PERATURAN DAERAH BARITO SELATAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2017-2022

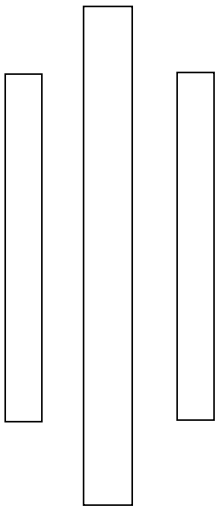

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat diselesaikan. RPJMD ini merupakan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tentang kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta prioritas dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan pada RPJPD dan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2012-2017 ini berdasarkan kepada

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
4. Direncanakan akan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJPD, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan RPJMD ini. Semoga upaya yang telah kita lakukan menjadi langkah awal yang baik dan terbaik bagi kita bersama demi mewujudkan Barito Selatan yang lebih baik. Harapan dalam mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan periode mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berbuat untuk membangun dan sejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan menuju BARSEL MANTAP (Maju, Aman, Tertata dan Padu)

Besar harapan kami agar penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan ini dapat bermanfaat sebagai upaya dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Buntok, 2017 Oktober

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2012 sampai 2017 dapat diselesaikan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan pada RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2012 sampai 2017 berdasarkan kepada

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
4. Diirencanakan akan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pojka, perumus beserta pihak yang telah membantu. Semoga dilakukan menjadi langka terbaik bagi kita bersama demi Kabupaten Barito Selatan. Harapan kami dalam mengemban amanah Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan adalah pemangku kepentingansecara bersama berbuat untuk membangun dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupatenahan baritoSelatan dan batin, menuju BARUSEL MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata dan Padu)

Besar harapan kami agar penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Selatan dapat bermanfaat sebagai upaya dalam mendorong kinerja daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Buntok, Desember 2017

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-6
1.4 Maksud dan Tujuan	1-7
1.5 Sistematika Penulisan	1-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-3
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-20
2.3 Aspek Pelayanan Umum	2-26
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	2-32
2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Menengah 2011-2016	2-38
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1 Kinerja Masa Lalu	3-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa	3-16
3.3 Kerangka Pendanaan	3-23
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	4-2
4.2 Isu Strategis	4-22
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1 Visi	5-1
5.2 Misi	5-3
5.3 Tujuan dan Sasaran	5-7
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEM	6-1
6.1 Strategi	6-1
6.2 Arah Kebijakan	6-14
6.3 Program Pembangunan Daerah	6-27
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM DAERAH	7-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	7-1
7.2 Program Perangkat Daerah	7-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	8-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IK	8-1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan P Daerah	8-10
BAB IX PENUTUP	9-1
9.1 Pedoman Transisi	9-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	9-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan 2016 2-3

Tabel 2. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016 2-5

Tabel 2. Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Barito Selatan 2-7

Tabel 2. Temperatur, Kelembaban, Relatif, dan Tekanan Udara di Kabupaten Barito Selatan 2-8

Tabel 2. Banyaknya Curah Hujan dan Kecepatan Angin di Kabupaten Barito Selatan 2-8

Tabel 2. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan pengairan di Kabupaten Barito Selatan 2-9

Tabel 2. Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016 2-10

Tabel 2. Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan (Hektar), 2016 2-11

Tabel 2. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan Barito Selatan (Kuintal), 2016 2-11

Tabel 2. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Sayuran di Kabupaten Barito Selatan (Ton), 2016 2-12

Tabel 2. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan di Buah di Kabupaten Barito Selatan (Ton), 2016 2-12

Tabel 2. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tanaman Di Kabupaten Barito Selatan (Ha) 2-13

Tabel 2. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan Tanaman Di Kabupaten Barito Selatan (Ton) 2-13

Tabel 2. Populasi Ternak Kuda Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan (Ekor), 2016 2-14

Tabel 2. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan (Ekor), 2016 2-14

Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor Di Kabupaten Barito Selatan (ton), 2016 2-15

Tabel 2. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor Di Kabupaten Barito Selatan (ton), 2016 2-16

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) di K
Barito Selatan 2-16

Tabel 2. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produ
Kabupaten Barito Selatan 2-17

Tabel 2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 2-18

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuha
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito
2010, 2015 dan 2016 2-19

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupa
Barito Selatan Tahun 2016 2-21

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupate
Barito Selatan 2016 2-19

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Be
Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (mi
Tahun 2012-2016 2-22

Tabel 2. Indikator Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 2-29

Tabel 2. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umu
Barito Selatan Tahun 2016 2-31

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab
Selatan Tahun 2015 2-31

Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Ba
Selatan Tahun 2015 2-32

Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Kondisi Kabupaten
Selatan (km) 2016 2-32

Tabel 3.20. Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamata
Barito Selatan Tahun 2012-2014 2-33

Tabel 3.21. Statistik Perbankan Barito Selatan 2015-2016 2-34

Tabel 3. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita/Bulan Menurut Gol
Pengeluaran Dan Kelompok Barang di Ka
Selatan (rupiah) Tahun 2016 2-37

Tabel 4. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok e P
Kapita/Bulan di Kabupaten Barito Selatan (%. 2-38

Tabel 5. Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten RTRW(WK) Barito Selatan 2-40

Tabel 6. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisi
Kabupaten Barito Selatan 2012-2016 2-42

Tabel 7. Target dan Realisasi Kinerja Daerah Kabupaten Ba
Selatan Tahun 2011-2016 2-46

Tabel 8. Pencapaian Indikator Sasaran Pembang
Kabupaten Barito Selatan Terhadap 2016 2-48

Tabel 9. Penapaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Ba
Selatan Tahun 2011-2016 2-54

Tabel 3. Statistik Pelanggan Listrik Kabupaten Tahun 2012-2016 & Kontribusi PAD Terhada Pendapatan Daerah&&&&&&. 3-3

Tabel 3. Perkembangan Anggaran dan Realisasi A Barito Selatan Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)&&&& 3-4

Tabel 3. Perkembangan Anggaran dan Realisasi A Barito Selatan Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)&&&.. 3-5

Tabel 3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 (dalam Juta rupiah)&&&&&... 3-9

Tabel 3. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito S 2011-2016 (dalam Juta Rupiah)&&&&&&&&&&&... 3-12

Tabel 3. Rasio Loan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (000 Rupiah)&&&&&&&&& &&&&&&&&&&... 3-14

Tabel 3. Rasio Hutang Terhadap Kabupaten Barito S Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)&&&&&& &&&&&. 3-15

Tabel 3. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Ba Selatan Tahun-2011-2015 (dalam juta rupiah)&&&. 3-15

Tabel 3. Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupate tahun 2012-2016&&&&&&&&&&.&&&&&&&&& 3-16

Tabel 3. Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tahun 2011-2015 (juta rupiah)&&&&&&&&&&.& 3-16

Tabel 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten B Selatan Tahun 2011-2016&&&&&&&&&&&&&&. .. 3-17

Tabel 2. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Keb 2013-2016&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&. 3-18

Tabel 3. SILPA Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016(Juta Rupiah)&&&&&&&&&&&&&&&&.. 3-19

Tabel 4. Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Ang Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2016&&&... 3-20

Tabel 5. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Ang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012&&. 3-20

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)&&&&&&&&&&&.. 3.21

Tabel 7. Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Barito S Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)&&&&&&& &&&&&& 3-23

Tabel 8. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Ang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2018&... 3-24

Tabel 9. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2022&&& 3-25

Tabel 10. Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat K Selatan Tahun Anggaran 2012-2018&&..&&&&&&& 3-26

Tabel 23.1. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun Ang 2022 3-27

Tabel 3.2. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas K Berdasarkan Prioritas Kabupaten Barito 2018-2022. 3-28

Tabel 3.3. Kerangka Pendanaan Kapasitas Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun Ang 2022 3-28

Tabel 4.1. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten B Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah) 3-30

Tabel 5.1. Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten B Selatan, Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah) 3-30

Tabel 6.1. Alokasi Prioritas Kabupaten Barito Selatan (dalam ribuan Rupiah) 3-31

Tabel 7.1. Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten B Selatan Tahun 2017-2022 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah) 3-32

Tabel 4.1. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Selatan (km), 2016 4-3

Tabel 4.2. Rasio Elektrifikasi (%) di Kabupaten Bar Berdasarkan Data Desa dan Data Rumah Tan 2012-2016 4-8

Tabel 4.3. Progres Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bar Selatan Tahun 2011-2016 4-10

Tabel 4.4. Perbandingan Indikator Terpilih Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah 2010-2015 1-12

Tabel 4.5. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten Daerah B Selatan 4-15

Tabel 4.6. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Barito 4-16

Tabel 4.7. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten B Selatan Tahun 2011-2016 4-20

Tabel 4.8. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nas Kalimantan Tengah sesuai RPJMN 2015 4-28

Tabel 5.1. Keterkaitan dan Konsistensi dengan Misi Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalim Tengah Tahun 2016-2021 5-4

Tabel 5.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan M 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan 5-13

Tabel 6.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah K Selatan (Tahun 2012-2017) 6-4

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 6-17

Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, da Kabupaten Barito Selatan 2012-2017 6-21

Tabel 6. Indikasi Rencana Program Pembangunan D 6-27

Tabel 7. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang D
Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito
2017-2022 Untuk Mencapai Visi dan Misi 7-5

Tabel 7. Indikasi Rencana Program Prioritas Pemb
untuk mencapai Visi, Misi dan Layanan
menyelenggarakan urusan pemerintahan 7-36

Tabel 8. Penetapan Indikator Kinerja (Urusan
Selatan 8-2

Tabel 8. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pem
Daerah 8-12

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 2-24

Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 2-25

Grafik 2.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016 2-26

Grafik 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016 2-27

Grafik 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2015 2-27

Grafik 2.6 Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Barito Selatan (ton), Tahun 2012-2016 2-35

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1-6
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan	2-2
Gambar 2.2	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (km^2) (Tahun 2018)	2-4
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Wanita Berumur 15 Tahun Keatas Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi	2-30
Gambar 2.32	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 dan 2015	2-36
Gambar 2.35	Statistik Pelanggan Listrik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013-2018	2-41
Gambar 2.39	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018	2-43

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2017.
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DA
TAHUN 2017-2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah seren
2017, telah terpilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yai
Raya Samsuri dan Satya Titiek Atyani Djoedir sebagai Bupa
Bupati Kabupaten Barito Selatan periode 2017-2022. Sumpah/ja
Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilaksanakan oleh Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Mei 2017

Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Oleh sebab itu, tugas utama yang harus dilaksanakan kepemimpinan Bupati
dan Wakil Bupati adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Men
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan periode 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ba
Selatan merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam kur
bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan
Program yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pe
Daerah dan Keuangan Daerah, program Perangkat Daerah dan l
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan b
sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan dae
mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih harus dite
dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang di
penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembang
menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yai
perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang
harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja perioc
isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Barito Sel
harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan. Kes

tersebut disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis daerah, i internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evalua pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga d Kabupaten Barito Selatan. RPJMD yang sudah disusun nantiny dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusuna Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerj Daerah (Renja PD)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Un-dang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pere Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republi Nomor 847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Re Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indo 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam N Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman P Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 27).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tenta Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan D Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang R Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangu Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Pemerintah daerah (Berita Neg Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 T tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 20 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Ta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 20 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Ta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Se 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahu Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan No 4).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Ta tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabu

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 pada RPJMD tahap ketiga.
2. RPJMD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
3. RKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPJMD dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.
4. Penyusunan RPJMD didasarkan pada RTRWP Kalimantan Tengah. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan

ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Kalimantan Tengah dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 Tahun adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan program satuan organisasi perangkat daerah, lintas satuan k daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin k pembangunan jangka panjang dan konsistensi perencanaan, p penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tal selama 5 tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan mewujudkan **cita** masyarakat Kabupaten Barito Selatan yaitu Dahanai Tuntung Tulus.

Adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 Tahun 2 adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah 2017-2022 tahun 2017
2. Sebagai acuan bagi SOPD dalam menyusun renstra 2017-2022 yang akan dijabarkan dalam rencana kerja dan pelaksanaan program prioritas.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS se Tahun 2017-2022.
4. Sebagai tolak ukut di dalam melaksanakan evaluasi kinerja t tahun 2017-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Ja Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja pemerinta

daerah, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Masa Lalu
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2. Neraca Daerah.
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2. Analisis Pembiayaan
3.2.3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendana

BAB IV PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Strategi
6.2 Arah Kebijakan
6.3 Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan
7.2 Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX PENUTUP
9.1 Pedoman Transisi
9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabu Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah sebesar 702.009,90 hekta Luas wilayah Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibukotanya terletak di Buntok. Secara geografis membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astron 1°22'21" LS - 2°32'51" LS dan 114°41'15" BT.

Barito Selatan dilalui oleh sungai Barito yang merup terpanjang di Kalimantan Tengah. Panjang sungai ini men dengan rata-rata kedalaman 8 m dapat dilayari hingga 700 melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilal nasional dan menjadi Kota perlintasan yang menghubung Kota Palangka Raya Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Banjarmasin. Dengan demikian lokasi Kabupaten ini mem strategis karena adanya pola pergerakan orang dan bara menjadi kota transit, baik dari arah Kota Banjarmasin m Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesat Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan letak dan posis sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kal Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002, luas daerahnya me km² yang terdiri dari (enam) 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, Je dan Dusun Hilir.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Unda Nomor 5 tahun 2002 seluas 8.830 km². Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi deng kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara Kapuas dan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Se

update informasi data spatial secara real luas kabupaten yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan p 2014-2034 dengan luas wilayah 7.120,89 hektar.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah da administrasi Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selat

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Barito Selatan secara geografis terletak pada 1°15' 35,625 LS - 2° 36' 31,300 LS dan 114° 34' 6,000 BT - 115° 36' 35,700 BT, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Barito Utara
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kapuas
Sebelah Timur	:	Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

1. Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi dan Penyempurnaan Raperda Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan, diperoleh luas wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,00 Ha. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No	Kecamatan	Luas Area (km²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Jenamas	662,1	9,43
2	Dusun Hilir	1.369,1	19,5
3	Karau Kuala	825,2	11,7
4	Dusun Selatan	1.133,1	16,15
5	Dusun Utara	1.271,1	18,11
6	Gunung Bintang	1.757,3	25,04
	Barito Selatan	7.020	100,00

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2017

Kecamatan terluas di Kabupaten Barito Selatan adalah Kecamatan Gunung Bintang yang memiliki wilayah seluas 1.757,36 km² atau

25,04 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Jenamas yang hanya meliliki luas 9,43 persen dari total wilayah Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2.2.
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (km²) Tahun 2016

2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 450 meter di atas permukaan air laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas merupakan daerah perbukitan dan Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Bintang Awai merupakan daerah perbukitan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Pada bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas yang meningkat ke arah Barat. Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian selatan memanjang dari barat daya ke timur.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Jenamas	Rantau K	27,00
2	Dusun Hilir	Mengk	31,00
3	Karau Kuala	Bengku	33,00
4	Dusun Selatan	Bunt	35,00
5	Dusun Utara	Penda	38,00
6	Gunung Bintang A	Tabak Ka	55,00

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2017

3. Geologi dan Tanah

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi geologis yang tergolong muda. Informasi untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, daya air tan dukung dan kerawanan fisik.

Berdasarkan formasi batuannya, potensi kesuburan Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran forma terdiri dari Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah ber bergambut; Batuan sedimen yang kaya kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa deng material vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, m jenis tanah yang kaya unsur hara; Batuan metamorf.

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan penyusun terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang ter hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim da medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdap Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Aluvial dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sun mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Ba endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dat terbentuk dari bahan induk liat dan lempung. Lapisan tanahnya terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua s kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlamba

tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, berso terbentuk wama kelabu tekstur halus sampai agak kasa terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah aluvial terdapat tanah gley yang berasosiasi dengan tanah organosol yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang dikenal sebagai tanah gley humus. Tanah ini sering dengan organosol sehingga disebut tanah komplek org humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur sampai sedang, drainase terhambat dan rekasi tanah ma dalam, tekstur halus, kasar, warna dari cerah sam drainase tergenang periodik sampai baik, reaksi t kandungan garam tinggi sampai sedang.

- Regosol, dijumpai di bagian tengah kabupaten Bari Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari ba endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sa muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabup selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.
- Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas di menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini tela perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari indu bentuk wilayahnya berombak sampai daerah perbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, baik dan reakasi tanah masam. Jenis tanah lain adalah mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampa 1.500 m keadaan medan yang terjal dan curah hu menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjad dangkal batuan.
- Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) ya disebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hing Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umu (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah dataran rendah, daer warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainas terhambat, reaksi tanah sangat masam.
- Podsolik, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwa

bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, warna coklat kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase terhambat dan reaksi masam.

- Podsol, terletak di bagian Selatan Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini memiliki wilayah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan Kabupaten Barito selatan

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	263.15	41,5
2.	Organosol	131.89	20,8
3.	Podsolik	71.01	11,2
4.	Podsol	48.92	7,7
5.	Litosol	39.94	6,3
6.	Kambisol	27.26	4,3
7.	Regosol	52.63	8,3
Jumlah		634.8	100

Sumber : RTRW Bupati 2016

4. Klimatologi

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklim tropis (tipe A) sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan curah hujan juga berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito Selatan udaranya relatif panas, yaitu siang hari mencapai sekitar 34,96°C dan malam hari sekitar 22,59°C dengan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif tinggi yaitu 3191,39 mm mencapai dengan rata-rata hujan turun sebanyak 20 hari setiap bulan. Untuk lebih lebih jelasnya mengenai kondisi temperatur

hujan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Tekanan Udara
Di Kabupaten Barito Selatan

No.	Bulan	Temperatur (°C)		Kelembaban Relatif (%)		Tekanan Udara (mb)
1	Januari	35,20	22,90	99,00	49,00	1.014,00
2	Pebruari	35,20	23,00	100,00	52,00	1.013,00
3	Maret	35,90	23,40	99,00	36,00	1.015,00
4	April	35,30	23,60	99,00	51,00	1.015,80
5	Mei	35,20	24,00	100,00	49,00	1.021,80
6	Juni	35,00	22,40	99,00	54,00	1.016,80
7	Juli	35,30	21,40	100,00	53,00	1.031,10
8	Agustus	35,20	21,00	100,00	49,00	1.021,90
9	Septem	34,80	22,40	98,00	50,00	1.031,40
10	Oktober	34,20	22,60	100,00	54,00	1.031,10
11	Nopemb	34,60	23,00	100,00	56,00	1.021,90
12	Desemb	33,60	21,40	98,00	57,00	1.021,10
	Rata-rata	34,69	22,55	99,33	50,83	1.031,39

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

.

Tabel 2.5
Banyaknya Curah Hujan dan Kecepatan Angin
di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No.	Bulan	Hujan		Kecepatan rata Angi (knots)
		Curah Huj (mm)	Jumlah Har Hujan	
1	Januari	383,50	24	22,00
2	Pebruari	422,90	23	16,00
3	Maret	392,00	22	15,00
4	April	257,90	22	16,00
5	Mei	330,90	22	15,00
6	Juni	112,60	18	11,00

7	Juli	342,70	18	12,0
8	Agustus	112,90	6	10,0
9	Septem	186,3	19	11,0
10	Oktober	386,70	22	13,0
11	Nopemb	585,50	21	15,0
12	Desemb	319,10	25	11,0
	Rata-rata	319,4	20,1	13,9

Sumber : Selatan Dalam Angka 2017

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur perekonomian Barito Selatan pada tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 22,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini sebagian besar penduduk bergantung pada sumber daya alam.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan pertanian yang menjadi sektor utama meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang penting dalam kehidupan sosial masyarakat Barito Selatan.

a. Tanaman Pangan

Tanaman pangan secara eksisting menurut kecamatan tanaman padi dan palawija. Adapun luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairan di Kabupaten Barito Selatan pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Luas Lahan Sawah menurut kecamatan dan Jenis
di Kabupaten Barito Selatan (Ha)

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi		Jumlah
			Tadah h	Lainny	
1	Jenamas	-	-	5.04	5.04
2	Dusun Hilir	-	-	2.00	2.00

3	Karau Kuala	-	1.25	-	1.25
4	Dusun Selatan	-	29.05	-	29.05
5	Dusun Utara	-	4.08	-	4.08
6	Gunung Bintan	-	701	-	701
	Barito Selata	-	35.09	7.040	42.13

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Produksi padi sawah dan padi ladang merupakan produ
dari sektor tanaman pangan. Kantong produksi padi sawa
pada kecamatan Dusun Selatan. Sedangkan kantong produksi padi ladang
kecamatan Gunung Bintang Awai dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang M
Kecamatan
Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Jenamas	332	1.169,0	-	-
2	Dusun Hilir	1.41	4.967,4	-	-
3	Karau Kuala	657	2.314,0	-	-
4	Dusun Selata	1.79	6.320,2	277	710,2
5	Dusun Utara	875	3.082,0	405	1.038,4
6	Gunung Binta Awai	599	2.110,2	801	2.053,1
	Barito Selatan	5.66	19.964,8	1.483	3.802,4

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Luas panen dan produksi padi sawah, kedelai, kacang tanah, kacang
hijau dan ubi kayu serta ubi jalar dapat dilihat pada Tabel
Tabel 2.9.

Tabel 2.8
Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang H
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (Hektar), 2016

No	Kecamatan	Jagung	Kede	Kaca Tana	Kaca Hija	Ubi Kay	Ubi Jala
1	Jenamas	-	-	-	-	-	2,0
2	Dusun Hilir	-	-	2,0	2,0	7,0	10,0
3	Karau Kuala	-	-	-	-	9,0	1,0
4	Dusun Selata	-	-	2,0	-	84,0	56,0
5	Dusun Utara	-	-	-	-	73,0	27,0
6	Gunung Binta	-	53,	8,0	-	21,0	9,0
	Barito Selata	-	53,0	12,0	2,0	194,(	105,(

Sumber : Barito Selatan 7 Dalam Angka 201

Tabel 2.9
Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hija
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (Kuintal), 2016

No	Kecamatan	Jagu	Kede	Kacai Tana	Kacai Hijau	Ubi Ka	Ubi Jala
1	Jenamas	-	-	-	-	-	18,1
2	Dusun Hilir	-	-	2,0	2,0	147,(	90,9
3	Karau Kuala	-	-	-	-	189,8	9,1
4	Dusun Selata	-	-	2,0	-	1.771	509,3
5	Dusun Utara	-	-	-	-	1.593,7	245,5
6	Gunung Binta	-	55,0	8,0	-	442,9	81,8
	Barito Selata	-	55,0(	12,0(	2,0	4092	9.550

Sumber : Barito Selatan 7 Dalam Angka 201

b. Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura yang diusahakan dari beberapa jenis komoditasnya yang memiliki potensi tinggi untuk di kembang adalah untuk tanaman sayuran yakni Cabai Kecil, Cabai Besar, S Tomat, Kacang Panjang, Ketimun dan Sayuran lainnya Kangkung dan Bayam, sedangkan untuk tanaman buah-buahan terdiri

dari Pisang, Nanas, Nangka, Durian, Papaya, rambutan dan buah-buahan lainnya yang ada, seperti Jeruk, Manggis, Duku, Sawo, dan Sirsak. Selengkapnya jenis tanaman sayuran disajikan pada Tabel 2.10 berikut

Tabel 2.10
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Barito Selatan, 2016 (Ton)

No	Kecamatan	Cabai Keci	Cabai Besa	Sawi	Toma	Kacan Panja	Ketim	Lainn
1	Jenamas	17,0	-	-	15,0	105,0	26,0	21,0
2	Dusun Hilir	16,00	-	-	6,0	18,0	5,0	40,0
3	Karau Kuala	38,00	33,0	-	2,0	39,0	3,0	27,00
4	Dusun Selata	19,00	195,0	-	101,0	193,0	134,0	39,00
5	Dusun Utara	73,00	64,0	33,00	-	126,0	182,0	29,70
6	Gunung Binta	176,00	49,0	118,00	44,0	276,0	275,0	395,00
Barito Selata		519,0	341,0	151,0	168,0	757,0	625,0	1.417,0

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Selengkapnya jenis komoditi buah-buahan disajikan dan Tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.11
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Barito Selatan, 2016 (Ton)

No	Kecamatan	Pisan	Nena	Nang	Duria	Pepay	Rambutan	Lainn
1	Jenamas	260,0	-	145,0	-	-	12,0	84,0
2	Dusun Hilir	96,0	3	11,0	-	2	-	4,0
3	Karau Kuala	268,0	-	-	-	25	68,0	25,0
4	Dusun Selata	107,0	260	68,0	22,0	17	14,0	48,0
5	Dusun Utara	1.193,	80	-	-	-	-	-
6	Gunung Binta	12.644	377	3.489	2254,	1.347,	812,0	782,0
Barito Selata		14.568	6.468,	3.713	2.276,	1.391	906,0	943,0

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

d. Perkebunan

Perkebunan juga merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian. Subsektor ini memberikan peranan cukup penting terhadap PDRB Kabupaten Barito Selatan. Tanaman karet termasuk tanaman primadona dan mendominasi perkebunan yang diolah oleh rakyat dan pihak swasta. Luas area dan produksi tanaman karet yang diusahakan dan sudah dikembangkan pada semua kecamatan di Kabupaten Barito Selatan terlihat pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13

Tabel 2.12
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
Di Kabupaten Barito Selatan (Ha), 2016

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya
1	Jenamas	53,5	25,0	-	-	-	-	-
2	Dusun Hilir	61,0	21,0	629,	-	-	-	-
3	Karau Kuala	229,	13,0	0,7	-	-	-	1,1
4	Dusun Selatan	3.423	27,7	9,6	-	-	-	15,0
5	Dusun Utara	7.522	7,0	853,0	-	-	3,0	-
6	Gunung Bintan	9.088	156,	11,0	59,0	1,6	101,	4,6
	Barito Selatan	20.376	249,1	1.503,	59,0	1,6	104,0	20,7

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Jenis tanaman perkebunan lainnya yang juga potensial dikembangkan adalah Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Lada, Kakao dan lainnya (Kemiri, Aren, Pinang dan Jambu Mete)

Tabel 2.13
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis
Di Kabupaten Barito Selatan (Ton), 2016

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya
1	Jenamas	7,40	3,41	-	-	-	-	8415,
2	Dusun Hilir	102	5,7	690,00	-	-	-	1.380,
3	Karau Kuala	49,46	1,56	-	-	-	-	231,0
4	Dusun Selatan	1.245,00	5,17	2,5	-	-	-	313,0
5	Dusun Utara	2.768,00	1,72	1,507,	-	-	4,8	224,0
6	Gunung Bintan	4.019,00	46,60	2,75	7,80	1,1	83,0	337,0
	Barito Selatan	8.098,88	64,1	3.030,	12,0	1,1	87,80	10.900

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

e. Peternakan

Jenis ternak yang ada di Kabupaten Barito Selatan me sapi potong, kerbau, kambing. Dalam perkembangan ternak yang paling signifikan dari sisi jumlah populasi dan jumlah ternak dipotong, sedang kerbau rawa adalah ternak yang pal diusahakan terutama yang terdapat di Kecamatan Jenam Kecamatan Dusun Hilir.

Tabel 2.14
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis
Di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	Jenamas	-	338	8503	-	90	-
2	Dusun Hilir	-	19	1484	-	103	47
3	Karau Kuala	-	54	79	-	163	160
4	Dusun Selatan	-	249	-	-	438	5.715
5	Dusun Utara	-	246	3	-	363	4.795
6	Gunung Bintang	-	221	4	-	565	4.93
	Barito Selatan	-	1.172	10073	-	1.727	15648

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Ternak kambing dan sapi potong serta babi hampir merata ada disetiap wilayah kecamatan yang ada di Barito Selatan tetapi hingga saat ini belum ada yang memlihara den peternakan besar. Sedangkan pokan unggas yang banyak dipelihara di Kecamatan Dusun Selatan seperti terlihat pada

Tabel 2.15
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis
Di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Jenamas	11.454	-	1.53	763
2	Dusun Hilir	21.428	-	2.54	841
3	Karau Kuala	20.485	-	2.42	679
4	Dusun Selatan	52953	-	731	4562
5	Dusun Utara	35.983	-	3.25	2.85

6	Gunung Binta	37841	-	5.24	4.93
	Barito Selata	180099	-	15.7	14637

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

f. Perikanan

Budidaya perairan atau akuakultur merupakan k memproduksi ikan dalam suatu wadah terkontrol pada keuntungan. Pada akuakultur harus memperhatikan setelah kegiatan pemeliharaan ikan upaya pengelolaan pemeliharaan, penebaran benih, pemberian pakan, p kualitas air, serta pencegahan hama dan penyakit. Dengan kata l perikanan budidaya merupakan usaha membesarkan dan m ikan, baik ikan yang masih hidup di alam maupun sudah dibudidayakan, di tempat tersendiri dengan adanya campur tangan manusia tidak terbatas pada ikan di kolam, tambak, empang, aqua dan sebagainya, melainkan juga termasuk pada kegiatan ikan di danau, sungai, waduk atau laut.

Usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Barito Se lama berkembang dan jika dilihat wadah atau jenis are yang digunakan adalah kolam dan keramba. Produksi tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Barito Se dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 di bawah ini :

Tabel 2.16
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan d
Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 - 2016 (Ton)

No	Kecamatan	Perikanan		Perairan U		Jumlah	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Jenamas	-	-	78,20	29,42	78,20	29,42
2	Dusun Hilir	-	-	1.290	1.767	1.290	1.767,
3	Karau Kuala	-	-	1.334	1.296	1.334	1.296,
4	Dusun Selata	-	-	1.482	1.178	1.482	1.178,
5	Dusun Utara	-	-	737,5	589,2	737,5	589,27
6	Gunung Binta	-	-	371,3	294,6	371,3	294,6
Barito Selatan		-	-	5.996	5.421	5.996	5.421

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 201

Tampak Kecamatan Dusun Selatan memiliki produksi tangkap tertinggi disusul oleh Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Hilir serta Dusun Utara, Jenamas dan Gunung Bintang Awai.

Tabel 2.17
Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan dan Subsektor
Di Kabupaten Barito Selatan (ton) tahun

No	Kecamatan	Budday Lau	Tamba	Kolam	Keram	Jarin Apun	Sawa	Jumla
1	Jenamas	-	-	84,3	579,7	-	-	664,0
2	Dusun Hilir	-	-	9,3	1.452,	-	-	1.462,
3	Karau Kuala	-	-	121,8	1.177,	-	-	1.299,
4	Dusun Selata	-	-	971,2	3.429,	-	20,8	4.422,
5	Dusun Utara	-	-	191,2	126,8	-	-	318,0
6	Gunung Binta	-	-	262,4	32,6	-	-	295,1
	Barito Selata	-	-	1.640,	6.799,	-	-	8.460,

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

g. Kehutanan

Peranan pertanian subsektor kehutanan terhdap pere Kabupaten Barito Selatan cukup besar terutama kawasan hutan dan perairan serta produksi kayu hutan di Kabupaten Barito S dilihat dalam Tabel 2.18 dan Tabel 2.19

Tabel 2.18
Luas Kawasan Hutan (dalam Ha) di Kabupaten Barito Selatan

No	Kawasan	Luas
1	Hutan lindung	82.79
2	Suaka alam dan pelestarian alam	76.82
3	Hutan Produksi a. Terbatas b. Tetap c. Dapat dikonversi	 85.07 203.44 93.37
4	Areal penggunaan lain	144.97
5	Sungai	15.60
	Barito Selatan	702.00

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 2.19
Produksi Kayu (m3) Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan

Tahun	Kayu Bula	Kayu Gerga	Kayu Lap
2012	5.217	905,	-
2013	7.411	267,	-
2014	888,	583,	-
2015	1.706	774,	-
2016	2.161	121,	-

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

2.1.2 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumberdaya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting adanya melihat pertumbuhan demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Barito Selatan

Kepadatan penduduk di kabupaten Barito Selatan tahun 2016 mencapai 19,56 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 6 kecamatan beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Dusun Selatan dengan kepadatan 8,07 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Gunung Timang Awai sebesar 0,99 jiwa/Km2

Penduduk Kabupaten Barito Selatan berdasarkan penduduk tahun 2016 sebanyak 33.894 jiwa yang terdiri atas 6 jiwa penduduk laki-laki dan 26.248 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki laki terhadap penduduk perempuan, yang berarti ada 104 penduduk laki laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.20
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Luas (Km²)	Kepadatan Penduduk per Km²
1	Jenamas	9305	7,0	662,1	14,0
2	Dusun Hilir	16416	12,3	1.369,	11,9
3	Karau Kuala	15866	11,9	825,2	19,1
4	Dusun Selatan	55.344	41,2	1.133,	48,0
5	Dusun Utara	16833	12,7	1.271,	13,1
6	Gunung Bintan	19540	14,6	1.757,	10,9
	Barito Selatan	133.304	100,0	7.020	19,56

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010, 2015, dan 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun (%)	
		2010	2015	2016	2010-2015	2015-2016
1	Jenamas	9.09	9.28	9305	0,3	0,4
2	Dusun Hilir	15.65	16.31	16416	0,8	0,6
3	Karau Kuala	15.41	15.81	15866	0,5	0,3
4	Dusun Selatan	49.92	54.48	55.344	1,7	1,6
5	Dusun Utara	16.35	16.71	16833	0,5	0,3
6	Gunung Bintan	18.05	19.31	19540	1,3	1,2
	Barito Selatan	12.50	131.79	133.304		

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

2. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Barito Selatan

Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan

pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan pengarusutamaan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sex ratio penduduk Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 sebesar 104, yang memiliki arti bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Belanja Tahun 2016

No	Kabupaten	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jenamas	4.262	4.668	9302	98,3
2	Dusun Hilir	8.254	7.959	16213	106,3
3	Karau Kuala	7.429	7.292	15861	100,9
4	Dusun Selatan	28.112	27.222	55334	103,3
5	Dusun Utara	8.556	8.281	16837	105,3
6	Gunung Bintang	10225	9285	19514	110,1
Barito Selatan		68.052	65.224	133.276	104

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

3. Distribusi Penduduk Kabupaten Barito Selatan

Secara umum, penyebaran penduduk di Kabupaten Barito Selatan cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kecamatan Dusun Selatan (14%), Gunung Bintang (15%), dan Dusun Utara (13%). Sedangkan Dusun Hilir dan Karau Kuala hampir sama persentasenya yaitu 12 persen penduduk dengan persentase hunian terkecil adalah Kecamatan Jenamas sebesar 7 persen (Gambar. 2)

Komposisi penduduk Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur digambarkan pada Tabel 2.23, bahwa kelompok umur usia non produktif yaitu umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun keatas adalah sebesar 32,71 persen, sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,29%. Memperhatikan komposisi tersebut bahwa dari jumlah penduduk usia produktif tersebut merupakan bonus demografi dimana struktur penduduk sangat menguntungkan masyarakat dari sisi pembangunan karena usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif itu artinya beban ketergantungan akan berkurang. Akan tetapi jumlah penduduk dengan umur produktif tersebut mais perlu didukung dengan lapangan pekerjaan karena berdasarkan data BPS untuk tahun 2016 bahwa dari jumlah penduduk usia produktif tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah sebesar 71,11%. Artinya bahwa penduduk usia produktif yang tidak bekerja yang menyebabkan tingkat ketergantungan penduduk kepada penduduk yang produktif menjadi tinggi. Dalam proses bonus demografi, penduduk usia sekolah dapat sudah mempersiapkan diri dengan banyak berkali ilmu-ilmu yang mampu memangkitkan semangat produktifitas dalam diri mereka dan menjadi agent dalam menopang kesuksesan bonus demografi di masa yang akan datang.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Barito Selatan, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 - 4	6.654	6.374	12.918	9,86
5 - 9	6.779	6.442	13.171	10,05
10 - 14	6.752	6.968	12.199	9,27
15 - 19	5.500	5.160	10.680	8,24
20 - 24	4.871	4.973	9.844	7,53
25 - 29	5.614	5.371	11.108	8,37
30 - 34	5.923	5.627	11.955	8,76
35 - 39	5.901	5.769	11.697	8,81
40 - 44	5.559	4.906	10.465	7,65
45 - 49	4.670	4.301	8.981	6,55
50 - 54	3.832	3.470	7.302	5,30
55 - 59	2.600	2.445	5.045	3,63
60 - 64	1.783	1.575	3.358	2,39
65 - 69	1.063	1.089	2.152	1,55
70 - 74	658	775	1.433	1,05
75+	520	734	1.254	0,93
Jumlah	68.058	65.240	133.305	100

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Penjabaran pada masing-masing fokus aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada analisa dibawah ini :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun

struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi dan indeks gini (gini ratio).

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda penggerak ekonomi wilayah meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terilhat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk diwilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Secara definisi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Barito Sela 2016 mencapai 8.847,2 milyar rupiah atau meningkat 10 persen da tahun 2015. Angka ini separuhnya (50,58) persen didomin peran kategori pertanian, kehutanan, dan 19,62 persen kategori pertambangan dan penggalian; serta kategori transportasi pergudangan 13,21 persen, dapat dilihat pada tabel 2.24 dibawah ini.

Tabel 2.24
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (Juta Rupiah)
Tahun 2013-2016

Lapangan U	2013	2014	2015	2016
Pertanian, K dan Perikana	762.079	844.968	918.949	959.071
Pertambanga Penggalian	987.513	918.562	842.619	904.374
Industri Peng	217.901	249.398	291.019	322.994
Pengadaan L dan Gas	1.005	1.171	1.916	2.181
Pengadaan A	4.445	5,111	6.161	6.790

Pengelolaan Sampah, Lim Daur Ulang				
Konstruksi	204.873	241.510	283.512	318.813
Perdagangan dan Eceran; Mobil dan Se Motor	261.934	297.587	336.958	383.083
Transportasi Pergudangan	355.788	397.965	484.411	553.265
Penyediaan Akomodasi d Makan Minum	63.890	73.284	86.706	103.069
Informasi da Komunikasi	41,763	48.729	54.724	60.806
Jasa Keuang Asuransi	156.306	194.904	86.706	228.178
Real Estate	74.496	87.517	101.270	112.809
Jasa Perusah	591,2	697,5	798,6	888,6
Administrasi Pemerintahan Pertahanan d Jaminan Sos	234.160	267.042	300.893	334.504
Jasa Pendidi	236.124	258.579	320.620	363.672
Jasa Keseha Kegiatan Sos	84.849	97.259	117.987,	128.690
Jasa lainnya	73.824	83.855	95,563	103.804
PDRB	3.761.54	4.068.14	4.448.69	4.887.1

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 201

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan cukup besar, hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang mengekspor enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batu bara sebelum diolah. Namun pada tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalian mulai tumbuh kembali dapat terlihat pada tabel 2.24

b. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dil pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara m seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan

disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan k masyarakatsecarahorisontal. Beberapa faktor yang menjadi perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dap untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam su adalah rasio gini dengan menganalisis nilai dengan semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata penduduk suatu wilayah.

Gambar 2.2
Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2015

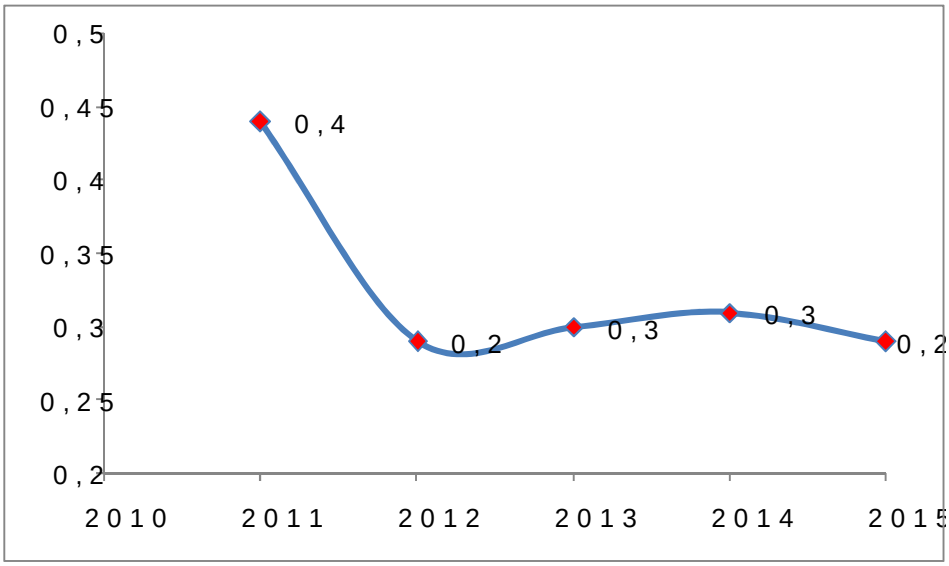

Secaraumum peningkatanindeks gini Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semkain tidak merata dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap wajar pada rangeindeks gini di kisaran ,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyatagarlebih memprioritaskanprogram dan kegiatan terkait peningkatandan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. FokusKesejahteraan Sosial

Kondisikesejahteraan sosialdapat dilihat dari beberapa aspek, antaralainaspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sertaseni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan

menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan suatu usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,) serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Barito Selatan sudah termasuk kategori sedang, yaitu mencapai angka 65,10 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 mencapai angka 68,27. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

b. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2016. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumberdaya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 yang mencapai 66,48 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2015 akan memiliki peluang hidup hingga 66-77 tahun.

Gambar 2.4
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

c. Pendidikan

Secara umum, bidang pendidikan di Kabupaten Barito Selatan mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat.

Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah selama 7,71 tahun dan setelah enam tahun berselang angka tersebut bertambah naik hingga 8,59 tahun.

Gambar 2.5
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009-2016

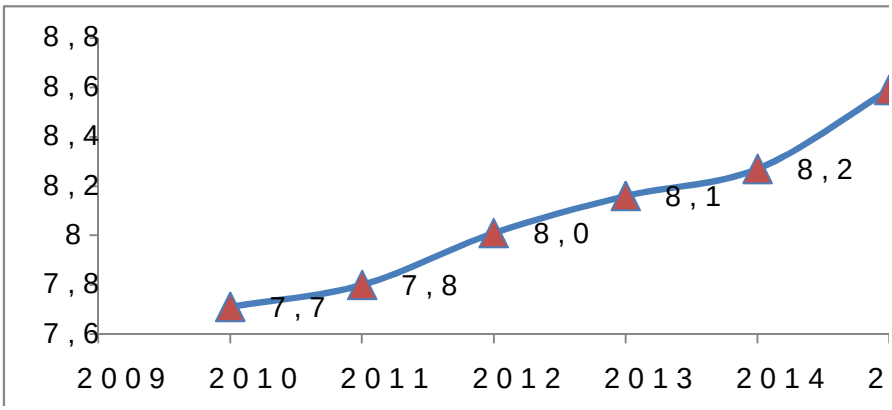

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

d. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mencapai 9,99 persen dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar tajam dari tahun 2014. Jika dilihat secara umum, tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah tergolong rendah jika dibandingkan angka nasional, namun trend kenaikan angka pengangguran selama empat tahun terakhir perlu mendapat perhatian khusus oleh stakeholders ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran.

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009-2015

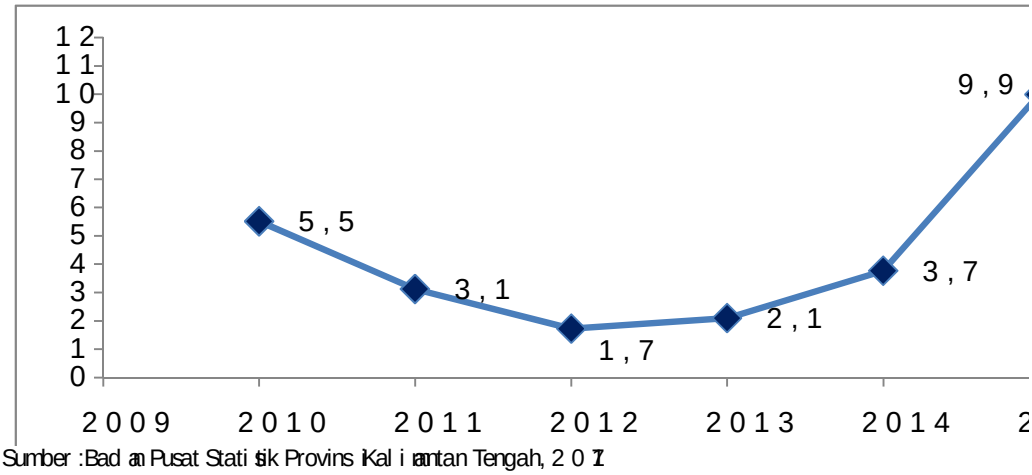

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu negara/wilayah berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu terkandung kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan mencapai 7,07 persen yang pada tahun berikutnya meningkat mencapai angka 7,56 dan kembali turun di tahun 2014 ke angka 7,25 serta langsung menurun drastis hingga mencapai angka 6,26 persen. Kemudian pada tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2016 mencapai 6,13 persen

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada beberapa bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

a. Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan antara lain tercermin dari angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan sarana pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Barito Selatan untuk tahun 2016 1 orang guru rata-rata mengajar 8 murid baik SD, SMP, maupun SMA sederajat.

Kesadaran masyarakat Barito Selatan dalam men
pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi pada
semakin meningkat. Hal ditunjukkan dengan Angka Partis
Sekolah di kelompok umur 7 - 12 tahun mencapai 100 persen
Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah di kelompok umur
13-15 juga mengalami peningkatan masing-masing 96,51 persen dan
74,17 persen.

Tabel 2.12 Indikator Pendidikan Kabupaten Barito S

Uraian	2014	2015	2016
Angka Partispasi Sekolah (APS)			
7 - 12	100	99,6	100
13 - 15	64,5	81,8	96,5
16-18	46,9	59,8	74,1
Rata-rata lama sekol	8,4	8,4	8,3
Angka Melek Huruf (%)	99,2	99,8	99,2

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017

Sementara itu, Angka melek huruf mengalami sedikit
begitu juga indikator rata-rata lama sekolah mengalami sed
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapka
indikator ini terus naik di tahun yang akan datang

b. Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan yang menunjang untuk optimalisasi
pelayanan kesehatan masyarakat sangat menentukan dalam kebijakan
pembangunan bidang kesehatan. Hal ini karena segala fasilitas dan
infrastruktur kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian pemerintah
dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana
kesehatan menjadi penting untuk ditindaklanjuti.

Tempat yang paling banyak dijadikan rujukan penduduk un
berobat jalan di Barito Selatan tahun 2016 adalah puskesmas/pustu
yaitu mencapai 59,95 persen. Hal ini dipengaruhi oleh
akses oleh penduduk dan biaya berobat yang dikelua
murah. Namun persentase rumah sakit pada tahun 2016 sebagai
rujukan untuk berobat jalan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015
hanya sebesar 14,75 persen.

Persentase penolong kelahiran terakhir tertinggi di B
pada tahun 2016 adalah bidan yaitu sebesar 54,47 persen. S

yang menggunakan dokter kandungan sebagai penolong mencapai angka 24,95 persen. Ini menunjukkan hampir besar penduduk Barito Selatan peduli terhadap keselama bayi saat proses persalinan.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh penduduk Barito Selatan pada tahun 2016 adalah suntikan dengan persentase sebesar 54,36 persen, lalu dikuti oleh pil KB dan susul sisanya alat kontrasepsi yang lain. Gambar 2.7 pada

Gambar. 2.7
Gambar. 2.7 Persentase Penduduk Wanita 15 - 49 Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB

c. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja layanan umum pada urusan P Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Ja Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rum bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Hun jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupat kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (min roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, d jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pemb minimal 1,5 m.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Barit
Tahun 12 2005

No	Indikator	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi Panjang J dalam Kondisi Baik	44,2	54,4	60,5	54,7	54,7
2.	Rasio Jaringan Iriga	-	11970	11970	11.9	11.9
3.	Persentase rumah bersanitasi	-	-	10.1	28,1	28,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumaha
dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Ru
pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan
kumuh dan Rumah layak huni

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten 1 2016 Barito Selata

No	Indikator	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah tangga per bersih	-	--	8.95 KK	9.01 KK	12.5 KK
2.	Rumah tangga pengg listrik	-	-	11.11 KK	12.3 KK	15.7 KK
3.	Rumah tangga bersa	-	-	63 %	64%	69%
4.	Rumah layak huni	-	-	33.72 Unit	33.7 unit	45.5 Unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan

e. Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ru
dengan indikator:
Rasio ruang terbuka H Satuan per Luas Wilayah ber HPL/HG
dan Rasio bangunan M per satuan bangunan.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Barito Se

No	Indikator	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio ruang terbuk Satuan Luas Wil HPL/HGB (%)	-	-	10-20 %	10-20 %	10-20 %
2.	Rasio bangunan IMB b satuan bangunan (%	-	-	70 %	75%	77%
3.	Luas Ruang Terbuka					42.4 Ha

Sumber: Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan

2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

a. Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Barito S
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Se
Tahun 2015 sebesar 375 pekerja. Perbandingan pencari kerja
laki lebih banyak dibandingkan perempuan, tercatat 452 laki
dan 530 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Te
dan Transmigrasi. Proporsi terbesar pencari kerja yang menda
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir SMA
yaitu sebesar 58 persen (219 pekerja).

b. Perhubungan

1) Jalan dan Angkutan Darat

Berdasarkan klasifikasi jalan, panjang jalan di
Barito Selatan mencapai 1.013,57 km merupaka
kabupaten; 302,97 km jalan desa. Kondisi permuk
yang masih baik mencapai 48,65 km. Pada tahun 2015,
sepanjang 152,56 km diaspal; 132,77 km beton; 1
kerikil dan 540,20 km tanah.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Barito Selatan (km), 2016

Jenis dan Kondisi	Panjang Jalan
Jenis Permukaan	
1 Aspal	152,56
2 Beton	132,77
3 Kerikil	188,04
4 Tanah	540,20
Jumlah	1.013,57
Kondisi Jalan	
1 Baik	185,47
2 Sedang	420,46
3 Rusak Ringan	263,15
4 Rusak Berat	144,49
Jumlah	1.013,57

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

2) Akomodasi

Jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Barito Selatan tahun 2016 adalah 20 unit dengan kamar 302 unit dan tempat tidur 406 unit. Jumlah akomodasi ini mengalami kenaikan sebesar 5 unit dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 301 unit kamar tidur.

Tabel 2.30
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2016

No	Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Jenamas	1	1	4	4	6	8
2	Dusun Hilir	-	-	-	-	-	-
3	Karau Kuala	1	1	8	8	10	10
4	Dusun Selatan	15	15	263	263	369	369
5	Dusun Utara	1	1	8	8	9	9
6	Gunung Bintang	2	2	19	19	12	12
	Barito Selatan	20	20	302	302	406	406

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka, 2017

c. Perbankan

Jumlah bank yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 sebanyak empat bank. Bank itu antara lain BRI, BPK BNI, BTPN, Bank Danamon dan Bank Mandiri.

Selama kurun waktu 2014-2016, perkembangan dana perbankan di Barito Selatan meningkat. Dana masyarakat Barito Selatan yang terkumpul di Bank pada tahun 2016 sebesar 12,38 triliuun rupiah yang simpanannya berupa giro, dan deposito. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 71,28 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dilihat menurut jenis dana yang dihimpun, jenis dana tabungan paling besar nilainya yaitu mencapai 5,65 triliun rupiah. Sedangkan jenis dana giro dan deposito masing-masing sebesar 4,57 dan 2,16 triliun rupiah.

Tabel 2.31
Statistik Perbankan Barito Selatan 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Bank	6	6	6
- Kantor Cabang	2	2	2
- Kantor Cabang Pembantu	6	7	7
Dana perbankan (trilyun rupiah)	6,62	7,22	12,38

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2017

3. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan social budaya masyarakat Selatan.

Pada tahun 2015 luas panen padi sawah adalah 5.347 hektar dengan produksi 19.786,47 ton, luas ladang adalah 1.483 Ha dengan produksi 3.082,01 ton. Penghasil padi terbesar adalah kecamatan Dusun Selatan yaitu seluas 2.077 Ha dengan produksi 7.015,24 ton.

Gambar 2.8
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Selatan (Ton), Tahun 2011-2016

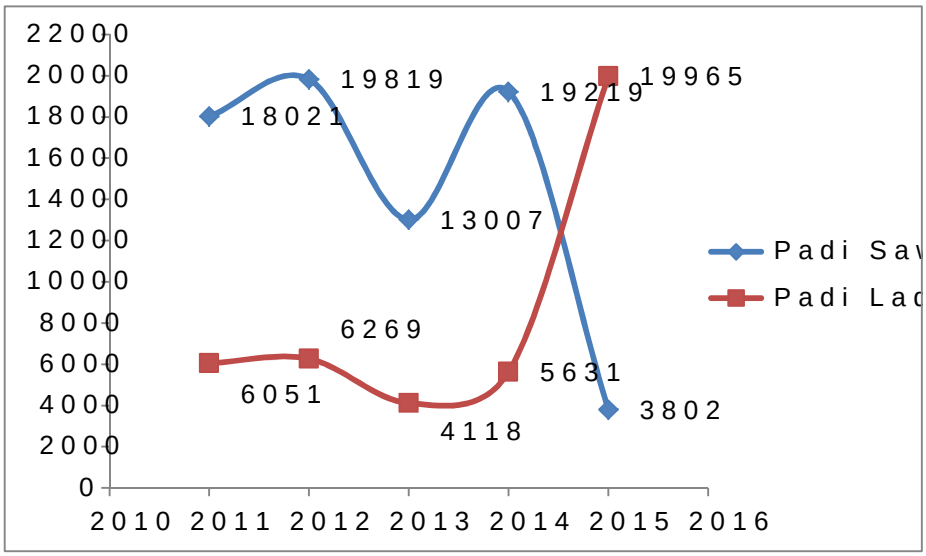

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Perkebunan karet masih menjadi komoditas utama K Barito Selatan dengan luas kebun 2017 adalah 32.764,50 Ha dan produksi 17.965,50 ton. Kabupat Selatan hanya memproduksi kayu bulat atau hasil gergajian dengan produksi di 2016 secara berurutan 2.161,51 m3 dan 121,61 m3.

b. Industri

Sektor industri pengolahan di Barito Selatan mencakup sub sektor industri non migas karena di ka tidak terdapat industri migas. Berdasarkan NTB yang terben sektor ini mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 5,73 kontribusi sebesar 6,54 persen terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2016

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipenga pertumbuhan sektor ini, antara lain dikarenakan industri d Kabupaten Barito Selatan masih merupakan industri sumber daya alam atau industri yang menggunaka sektor pertanian sebagai bahan baku, seperti karet, hasil pertanian lainnya.

Jumlah perusahaan industri kecil dan kerajinan di Barito Selatan tahun 2016 sebanyak 181 perusahaan, yang meny tenaga kerjanya sebanyak 567 orang. Umumnya didominasi oleh industri makanan dan minuman serta indu

kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anya
bambu, rotan dan sejenisnya dengan jumlah usaha
masing sebesar 86 dan 64 usaha.

c. Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Tabel 2.32
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 dan 2015

d. Pertambangan

Sektor pertambangan di Barito Selatan adalah pertambanga non migas. Perkembangan sektor ini menunjukkan sepanjang tahun 2015, yang ditunjukkan oleh besaran Tambah Bruto dalam pembentukan PDRB Barito Selatan

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun bukan makanan selama sebulan. Di Kabupaten Barito Selatan rata pengeluaran perkapita pada tahun 2016 mencapai angka Rp. 874.470,-.

Tabel 2.33
Pengeluaran Rata-rata per Kapita/Bulan Menurut Golongan Pengeluaran Dan Kelompok Barang di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 (rupi

Golongan Peng	Kelompok Barang		
	Makanan	Bukan Maka	Jumlah
< 150.000	-	-	-
150.000-199.999	-	-	-
200.000-299.999	186.443	95.973	282.416
300.000-499.999	263.964	155.556	419.520
500.000-749.999	395.572	218.778	614.350
750.000-999.999	545.569	318.021	863.590
1.000.000-1.499.999	702.198	500.141	1.202.339
1.500.000+	839.836	1.205.810	2.045.646
Jumlah	492.189	382.282	874.470

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kes masyarakat ialah dengan melihat pola pengeluaran masyarakatnya. Jika persentase pengeluaran untuk no semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesejahteraan, begitu pula sebaliknya.

Tabel 2.34
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita/Bulan di Kabupaten Barito Selatan (%)

Pengeluaran Per Kapita/Bulan	2014	2015	2016
100.000-149.999	-	-	-
150.000-199.999	0,2	-	0,5
200.000-299.999	5,6	0,3	6,9
300.000-499.999	43,3	27,3	18,8
500.000-749.999	27,8	30,9	28,9
750.000-999.999	11,4	20,5	22,2
"e 1.000.000	11,4	17,5	16,3

Sumber : Hasil Susenas 2014-2016 Kalten

Terjadi penurunan persentase penduduk yang penge diatas satu juta rupiah pada tahun 2016 yakni hanya sekitar 16,38 persen. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan dengan persentase penduduk mencapai 17,50 persen.

Pola pengeluaran untuk konsumsi makanan masyarak Selatan selama periode waktu 2014-2015 lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan, yakni mencapai 60 persen. A pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan pola konsum makanan dan diikuti kenaikan pola konsumsi non makanan. mengindikasikan bahwa adanya perbaikan kesejahteraan Barito Selatan dibandingkan periode sebelumnya.

Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita (59,32%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan (40,68%). Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir persentase tersebut mulai bergeser yang mengindikasikan semakin sejahteranya penduduk Kabupaten Barito Selatan dari pengeluaran untuk kebutuhan primer bergeser ke pengeluaran kebutuhan sekunder bahkan tersier.

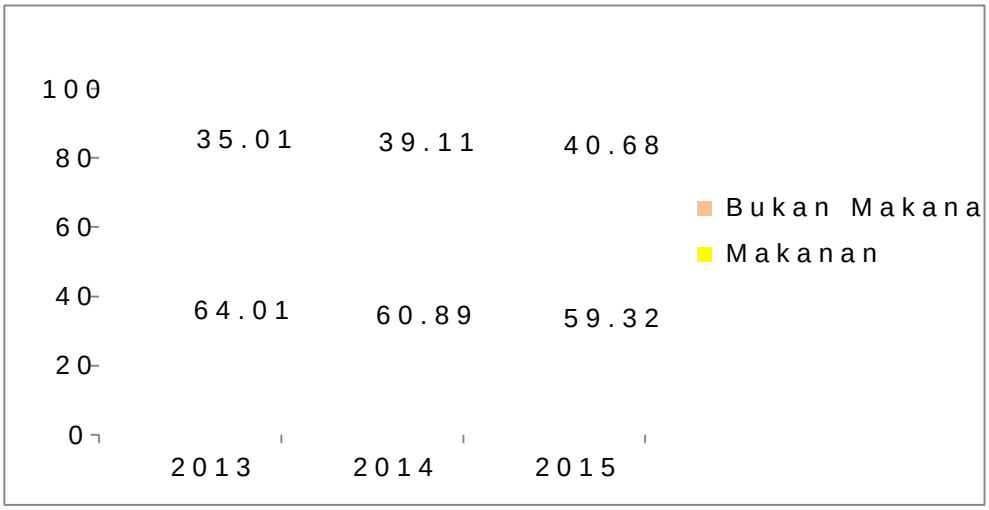

Sumber : Hasil Susenas 2015 alteng, 2013

2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Luas Wilayah (RTRW Kabupaten)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Kabupaten Barito Selatan. Selain wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan lindung, Barito Selatan memiliki RTRW Kabupaten Barito Selatan yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan yakni kawasan lindung (173.920,61 ha) dan kawasan budidaya (294.269,69 ha).

Tabel 2.35
Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
Barito Selatan

No	Fungsi/Peruntukan	Luas (H
	ð Kawasan hutan lindung;	67.566,6
	ð Kawasan yang memberikan perli kawasan bawahannya;	2.789,30
	ð Kawasan perlindungan setempat	2.904,53
	ð Kawasan suaka alam atau kawasan	74.816,8
	ð Kawasan ekosistem air hitam; d	13.719,0
	ð Kawasan perairan.	12.124,3
	Total Kawasan Lindung	173.920
	4. Kawasan Budidaya	
	ð kawasan peruntukan hutan pro	
	Hutan produksi terbatas (HPT)	60.592,0
	Hutan produksi tetap (HP)	79.968,0
	Hutan produksi yang dapat dik	27.541,7
	ð kawasan peruntukan hutan raky	280,12
	ð kawasan peruntukan pertanian	89.546,3
	ð kawasan peruntukan perikanan	745,62
	ð kawasan peruntukan pertambar	93.400,4
	ð kawasan peruntukan permukima	26.155,6
	ð kawasan peruntukan industri;	2.120,35
	ð kawasan peruntukan pariwisata	50,80
	ð kawasan areal penggunaan lain	54.428,2
	ð kawasan holding zone.	
	Total kawasan Budidaya	266.727
	Total Kawasan Lindung dan B	294.269

Sumber: Perda RTRW Kab. Barito Selatan No. 4 Tahun 2014

b. Kelistrikan

Listrik adalah infrastruktur yang mendorong a
proses produksi sekaligus pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Produksi listrik sebagian besar diha
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian
PLN.

Tabel 2.52.
Statistik Pelanggan Listrik Kabupaten Barito
Tahun 2011-2015

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2017

Kondisi kelistrikan di Kabupaten Barito Selatan hingg
tahun 2015 memiliki daya terpasang sebesar 31,51 (juta
VA) mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun
2013 dan 2014 masing-masing sebesar 18,30 dan 24,41
(juta VA). Jumlah pelanggan mengalami peningkatan setiap
tahunnya (lihat Tabel 2-Hal 3-4) menunjukkan bahwa
secara umum kondisi kelistrikan di Kabupaten Barito Selatan
saat ini telah mengalami perbaikan..

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, kebelangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

a. Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan meincu penurunan status kenyamanan dalam beinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi dimai ah aman jika pihak yang berwenang dapat mereadh atau mreinimalisir kriminalitas yang terjadi di Kabuaten Barito Selatan. Secara umum, angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten.

Tabel 2.36
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Res
Kabupaten Barito Sela4-2017 Tahun 201

Kepolisian Reso	2014	2015	2016
Polreso Barito Selatan	70	99	109
Jenamas	4	5	3
Dusun Hilir	5	9	6
Karau Kuala	7	6	6
Dusun Selatan	28	20	13
Dusun Utara	11	6	12
Gunung Bintang Awa	8	7	5

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 201

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai prodasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi prenentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itulah, kuantitas dis tra ikualitas sumberdaya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat prodasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas stelsm pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, maka diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Sebagian penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Selatan yang pernah mengenyam pendidikan hingga SD sederajat yakni sebesar 27,4 persen, sedangkan sebesar 29 persen tidak pernah mengenyam pendidikan atau belum tamat SD. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga SLTA sederajat juga cukup tinggi yakni mencapai 62,2 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi sebesar 17,2 persen hingga sarjana dan diploma mencapai 1,0 persen (Grafik 2.39).

Gambar 3.92.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Ditamatkan di Kabupaten Tahun 2016 Barito Selatan

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali setiap hal yang pernah dilaksanakan pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Sedangkan tiap tahapan pembangunan akan mengarahkan setiap program dan kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan menuju pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala

dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu melalui evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian maka fokus dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perbaikan-perbaikan strategi, kebijakan dan program/kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, agar ke depan kinerja perencanaan pembangunan lebih berdayaguna dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap RPJMD secara umum adalah melihat pencapaian target kinerja indikator makro yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan terutama bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode sebelumnya (2011-2016), antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 mencapai 5,59 persen (dana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 5,32 persen). Meskipun mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan belum mencapai target tahun 2015 (7,5 persen). Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif lebih stabil serta memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah lain juga belum tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 4,74 persen (target sebesar 3 persen), angka kemiskinan sebesar 5,91 persen (target sebesar 2 persen), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,54 persen kondisi agustus 2015 (target sebesar 2,5 persen), dan lain sebagainya.

Perlu digaris bawahi, perencanaan yang optimal bukan semata dinilai berdasarkan pada target pembangunan daerah terhadap masing-masing indikator yang dipaksakan semakin rendah nya atau setinggi-tingginya. Namun, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan segala potensi sumberdaya daerah sebagai modal dasar pencapaian pembangunan dan memiliki visi realistis secara maksimal dalam mencapai suatu target kinerja. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian strategi, kebijakan, sampai pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya untuk lebih mendorong kinerja pembangunan daerah yang tepat sasaran guna mewujudkan Visi terwujudnya Barito Selatan sebagai daerah yang maju dan man sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahte merata dan memiliki daya saing dilandasi iman dan taqwa

Salah satu hal yang cukup mendasar terkait dengan ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah lemahnya pengendalian dan evaluasi, baik dari sisi institusi, mekanisme maupun sumberdaya manusia. Sebenarnya tim pengawalan pencapaian target indikator kinerja telah banyak dibentuk, antara lain Tim Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tim Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), dan sebagainya. Namun tim-tim tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna efektifitas pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2017-2022, akan dilakukan perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi, sebagaimana tertuang dalam kaidah pelaksanaan RPJMD pada Bab X.

Tabel 2.37
Target dan Realisasi Kinerja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)											
		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,32	6,2	5,32	6,4	5,24	6,57	5,31	6,77	5,54	6,89	5,72*)
2.	Laju inflasi provisi (%)	5,37	4,55	5,23	5,85	5,02	6,79	4,85	7,07	4,75	4,74	4,55	3,18**)
3.	Angka Kemiskinan (%)	8,14	7,56	7,4	7,26	6,7	6,62	6,2	6,13	5,9	5,91	5,4	5,66***)
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3	2,55	3,9	3,08	3,6	3,00	3,4	3,77	3,2	9,99	3,0	3,67****)

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

Keterangan: *) : pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 (year on year)
**) : laju inflasi bulan September 2016 (year on year)
***) : angka kemiskinan bulan Maret 2016
****) : tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2016

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment, perlu terus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan menengah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022. Berdasarkan data capaian diatas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian saat ini secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Selain itu, secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai. Namun perlu ditekankan kembali, dari segi kualitas harus terus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indikator sasaran perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan dapat terilhat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perancangan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
1	Revitalisasi dan penciptaan klaster ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota	1.1 Teridentifikasinya klaster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	PDRB	6,79%	7,01 %	
		1.2 Tumbuhnya klaster ekonomi unggulan daerah yang berkembang.	Jumlah cluster ekonomi/ Industri kecil & menengah	4.500 unit usaha	4.678 unit usaha	
2	Terselenggaranya penataan ruang yang memerhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah.	2.1 Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengutamakan lingkungan.	Perda RTRWP ditetapkan tidak bertentangan dengan RPJMD	1	1	Perda No.5 Tahun 2015 tentang RTRW Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
		2.2 Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.	Data kualitas udara dan air	UDARA 8-1 AIR= 52		
			Dokumen KLHS, RPJPH, SLH, DNSDA telah terselesaikan			
			Rekomendasi Komda REDD dan Dewan Daerah Perubahan Iklim			
3	Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	SD: 75,16 % SMP :89,46 % SMA: 92,84 %	SD: 75,16 % SMP :82,15 % SMA: 92,53 %	Data yang tersedia bukan jumlah guru (orang), tetapi persentase
			Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
			Rupiah per-pendidik			
			Rupiah per-tenaga kependidikan			
		3.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (%)	SD: 111,50 SMP 96,82 SMA: 70,09	SD: 114,76 SMP 95,94 SMA: 70,70	
			Angka Partisipasi Murni (%)	SD: 99,04 SMP 84,71 SMA: 67,24	SD: 98,54 SMP :75,76 SMA: 52,36	
			Rasio murid terhadap guru (%)		SD: 46,00 SMP 15,00 SMA: 11,00	
			Angka putus sekolah		7-12 thn: 0,16 13-15 thn: 6,50 16-18 thn: 33,28	
			Angka melek huruf (%)	99,80	98,90	
4	Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah rumah dinas tenaga pendidik (SMA)			
			Jumlah sekolah dengan akses jalan Roda 4			
		4.2 Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.	Jarak sekolah SD/SMP/SMA dari permukiman			
5	Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.	5.1 Tersedianya standar pelayanan kesehatan.	Tersedianya Regulasi standar pelayanan kesehatan			
			Rasio dokter per satuan penduduk	2.510.000	2.38:100.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
		5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	1 6 8 1 0 0 0 0	1 7 6 1 0 0.0 0 0	
			Rasio Tenaga Bi satuan penduduk	1 0 8 1 0 0 0 0	2 0 1 1 0 0.0 0 0	
6	Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga kepelosok wilayah.	6.1 Tersedianya sarana dan prasarana akses kesehatan	Rasio puskesmas per satuan penduduk	2 , 4 3 0.0 0 0	2 , 7 3 0.0 0 0	
			Rasio Tempat Tidur rumah sakit per satuan penduduk	0 , 7 6 1.0 0 0	0 , 8 4 1.0 0 0	
		6.2 Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang merangkau seluruh lapisan masyarakat	Panjang jalan fungsional / waktu tempuh (jam) / biaya transport (Rp.)			
			Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	8 0 %	7 7 , 4 %	
7	Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi komunikasi, dan informatik yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.	7.1 Terwujudnya sistem transportasi, informasi dan komunikasi wilayah	Dokumen TATRAWIL	1 dokumen	1 dokumen	
		7.2 Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika	Sarana penunjang jaringan transportasi, komunikasi dan informatika	6 0 %	8 0 %	
		7.3 Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwut dan Bandara penunjang di Kalimantan Tengah	Ditetapkannya bandara Tjilik Riwut sebagai bandara embarkasi haji antara	Tahun 2012	Tahun 2012	
8	Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.	8.1 Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.	Luas pengairan / irigasi	1 0 9 2 8 8 Ha	4 0 8 4 5 2 Ha	
			Luas pencetakan sawah	1 0 0 0 Ha	6 9 3 , 3 7 Ha	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
9	Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	9.1 Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi	Perda/Perkada tentang ketenagalistrikan dan energi	1 perda	1 perda	Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi
		9.2 Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.	Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan	1.000 unit	264 unit	
		9.3 Tersedianya sarana dan prasarana ketenagalistrikan.	Pembangunan PLTU/LPH/LPH	90 %	86,25 %	
			Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik (unit)	355.574	628.061	
			Rasio Ketersediaan Daya Listrik	150 %	300 %	
			Rasio desa berlistrik	79,5	74,8	
10	Tersenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu	10.1 Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.	Perda/Perkada bidang ekonomi			
		10.2 Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat	Persentase koperasi aktif	85 %	73,03%	
			Jumlah UKM non BPR/BKM UKM	42500	29879	
			Jumlah BPR/BKM	100	243	
		10.3 Meningkatkan kemampuan manajerial pelaku ekonomi kerakyatan	Jumlah pelatihan			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
		1.0.4 Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya alokal	Pertumbuhan PDRB	7,5%	7,01%	
1.1	Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat	1.4.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambu nBonggai	Angka kriminalitas	2,079	1.571	
			Jumlah unjuk rasa	0	0	
			Sikap toleransi	100%	100 %	.
		1.4.2 Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat alokal.	Jumlah group kesenian	188	195	
			Jumlah gedung kesenian	17	19	

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan suatu bentuk capaian pembangunan daerah. Dengan melihat capaian pembangunan maka dapat terlihat secara nyata kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga capaian pembangunan dapat menjadi suatu dasar data dan infromasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, melihat permasalahan daerah, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan tepat melalui kebijakan daerah. Dengan melihat pentingnya capaian pembangunan tersebut maka disajikan data capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 2016 pada tabel 2.40 sebagai berikut

Tabel 2.39
Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2011-2016

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aspek Kesejahteraan							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Indikator Makro Pembangunan						
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,47	6,77	6,69	7,37	6,21	7,01
1.2	Laju inflasi provinsi (%)	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74
1.3	PDRB perkapita (Juta Rp.)	16,5	21,81	23,75	26,63	36,83	40,14
1.4	Angka Kemiskinan (%)	6,77	6,64	6,19	6,23	6,07	5,91
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	2,55	3,08	3,0	3,24	4,54
1.6	IPM	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
1.7	Indeks Gini	0,291	0,326	0,321	0,337	0,343	0,317
II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek Huruf (%)	97,78	97,84	97,88	97,99	98,90	ta
1.2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03
1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	11,09	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	97	86	73	85	85	85
2.2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
2.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	16,8	16,77	16,5	14,4	19,6	19,6
3	Ketenagakerjaan						
3.1	Rasio Pendudukyang Bekerja (%)	96,12	97,45	96,83	98,18	96,76	95,46

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
III.	Seni Budaya dan Olahraga						
1.	Kebudayaan						
1.1	Jumlah group kesenian/sanggar seni (buah)	168	341	341	343	341	336
1.2	Jumlah gedung (unit)	10	19	19	19	19	19
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	50	0	0	26	46	46
2.2	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	15	16	16
Aspek Pelayanan Umum							
I.	Pelayanan Urusan Wajib						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan dasar:						
	SD/MI						
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	98,70	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	89,04	98,87	99,60	99,18	94,12	94,12
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	1:13	1:15	1:17	1:19	1:25	1:25
1.1.4	Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	35,45	45,65	55,95	65,79	75,16	75,16***
1.1.5	Angka partisipasi murni dan paket A	96,63	92,15	96,03	97,41	98,13	98,54
1.1.6	Angka partisipasi kasar	117,70	104,47	109,19	118,83	112,01	114,76
	SMP/MTs						
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	84,46	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	45,18	69,63	67,18	67,35	68,64	58,64
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	1:15	1:16	1:17	1:18	1:22	1:22

No.	Indikator	Capaian indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.4	Prosentase guru SMP / SMPLB berkualifikasi S1/ D4, dan bersertifikasi (%)	55,00	59,16	68,88	79,53	82,15	82,15
1.1.5	Angka partisipasi kasar dan paket B	74,60	90,19	79,20	80,85	84,89	95,94
1.1.6	Angka partisipasi murni	61,30	66,62	65,11	68,15	75,40	75,76
1. 2	Pendidikan menengah						
1.2.	Angka partisipasi sekolah	54,50	55,75	55,06	64,74	77,50	77,50
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	45,18	69,63	67,18	67,35	58,64	58,64
1.2. 3	Rasio guru terhadap murid	1:14	1:16	1:17	1:18	1:20	1:20
1.2. 4	Prosentase guru SMA/ SMA LB / SMK berkualifikasi S1/ D4, dan bersertifikasi (%)	65,23	74,58	80,14	85,46	92,53	92,53
1.2. 5	Prosentase sekolah SMA/ SMA LB / SMK memakai sarana e-pembelajaran (elearning) - (%)	5	8	12	14	16	16
1.2. 6	Prosentase APK PLB setara SMA LB (%)	53,33	55,89	57,14	58,23	59,43	59,58
1.2. 7	Angka partisipasi kasar	57,61	58,32	60,65	58,85	67,74	70,70
1.2. 8	Angka partisipasi murni	39,62	44,99	43,55	45,43	51,75	52,36
2	Kesehatan						
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita						
2. 2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	2 , 3	2.34	2,70	2,70	2,70	2,70
2.3.	Rasio pustu per satuan penduduk			0,44	0,44	0,43	0,38
2. 4	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk	0,64	0,65	0,70	0,75	0,78	0,84
2.5.	Rasio dokter per satuan penduduk	10	11	12	14	18	20
2.6.	Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk	144	155	165	187	195	201
2. 7	Prosentase rumah tinggal bersanitasi (%)	38 , 9	40	40	40 ,	40	42

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.8	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
2.9	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	10	5	6	5	6
2.10	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahrian Hidup	254	50	390	96	96	89
2.11	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)	0,1	0,15	0,13	0,1	0,0	0,0
2.12	AKABA per 1000 Balita	12	14	11	13	12	13
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.084,35	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
3.2	Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha)	22402	3302	3411	3475	3480	3480
3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,18	0,95	0,25	0,26	0,27	0,27
3.4	Presentase rumah tinggal bersanitasi (%)	2401	2401	ta	4405	4405	3538
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan desa/kelurahan	1: 2	1 :	1 :	1 :	1 :	1 :
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1:1,7	1:1,9	1:1,6	0,78	0,79	0,79
3.7	Rasio rumah layak huni	1 : 4,14	1 : 4,33	1 : 4,11	1 : 4,10	1 : 4,10	1 : 3,9
3.8	Rasio permukiman layak huni (%)	9500	7600	7650	7700	7710	7045
3.9	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	1.642,96	1.643,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan kekawasan pemukiman penduduk (minimal dialuri oda 4) ~ (Km)	11057	1144563	1236600	1186948	1186948	1186948
3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik(> 40 Km/Jam) (Km)	6.000,00	4.449,00	4.119,00	4.202,00	4.230,00	4.230,00
3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m) (Km)	1000	6400	3300	3300	3300	3300
3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	5,00	4,98	4,80	4,78	4,60	4,60
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar****						

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.15	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	35,81	14,45	5,04	2,70	2,75	2,75
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota****						
3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3.550.300	6.853.800	6.830.000	9.070.000	9.150.000	9.150.000
3.18	Lingkungan Permukiman (Ha)	1.607.113	1.421.150	1.501.204	1.581.258	1.581.258	1.581.258
4	Perumahan						
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	1.284.187	5.981.134	6.951.169	6.951.169	6.951.169	6.096.695
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	2.848.310	4.302.295	5.913.385	5.913.385	6.002.212	6.002.212
4.3	Rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	82,61	85,10	87,59	88,1	88,1
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	5	13,2	11,5	9,9	9,7	10
4.5	Rumah layak huni (Unit)	544.231	519.191	556.473	566.139	570.154	570.154
5	Penataan Ruang						
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB (%)	7	7	4,99	4,99	5	5
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan****						
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya****						
6	Perencanaan Pembangunan						
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	-	-	-	-	-
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	-	1	-	-	-	-

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	2	2	2
6.4	Pelaksanaan Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
7	Perhubungan						
7.1	Jumlah armada sarana pengangkutan umum (PNP)	1.195	11.749	1.576	47.630	1.578	22.630
7.2	Load Factor Angkutan Jalan (%)	50	60	60	60	60	70
7.3	Jumlah uji KIR Angkutan umum (Unit)	21867	23080	24537	25337	28660	30278
7.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit)	191	210	213	215	218	221
7.5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada)	11	15	22	28	32	34
7.6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	200	244	113	113	113	113
7.7	Jumlah Angkutan Sungai (Unit)	4781	60	75	75	83	50
7.8	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah)	9	9	9	9	9	9
7.9	Jumlah Bandara (Buah)	9	9	9	9	9	9
7.10	Jumlah Dermaga Sungai (Buah)	118	118	146	149	232	234
7.11	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	10	13	13	19	19	19
7.12	Kepemilikan KIR Angkutan umum (Unit)	21867	23080	24537	25337	28660	30278
7.13	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari)	2	2	2	2	2	2
7.14	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp. Ribu)	60	60	75	75	75	85
7.15	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	673	773	1.023	1.863	2.313	2.948
7.16	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	542	1.000	1.050	1.250	1.385	1.395
7.17	Pemasangan Rambu SBNP (Unit)	70	70	90	90	90	102

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Lingkungan Hidup						
8.1.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	22	26	19	8	8	8***
8.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	50,38	50	49	69,53	70,37	70,37***
8.3	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
8.4	Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	7	8	9	11	14	14
8.5	Pemantauan, pengendalian dan pemulihan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	2	2	2	0	6
8.6	Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%)	50	21	9	19	18	25
8.7	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/kota)	1	1	2	14	14	14
8.8	Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)*	-	-	-	-	-	12
9	Pertanahan						
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
9.2	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Ha)*	6,	6,	6,	6,7	28,08	37,60
9.3	Penyelesaian kasus tanah Negara (jumlah kasus)	71					
9.4	Penyelesaian Izin lokasi****						
10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
101	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	54	60	66	67	68	80

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
102	Rasio bayi berakte kelahiran	45	46	47	48	50	54
103	Rasio pasangan berakte nikah	-	45	47	47,5	48	57
104	Kepemilikan KTP (orang)	968.845	1.162.568	1.265.238	1.315.178	1.341.630	1.349.663
105	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	31	43	50	55	57
106.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Manual	Digital Online	Digital Online	Digital Online	Digital Online	Digital Online ***
107	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	12 Kab/Kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
111	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,04	7,19	8,31	9,14	8,49	8,00
112	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	9,22	11,04	9,71	12,59	16,78	15,18
113	Rasio KDRT	0,0052	0,0054	0,0106	0,0066	0,0210	0,0306
114	Presentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,57	0,56	0,58	11,23	0,53	0,53
115	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,01	56,16	51,28	49,41	49,97	35,66
116	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	139	106	189	123	135
117	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	-
118	Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	-
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
121	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,79	1,06	1,00	1,00	0,80	1, 1
122	Rasio aksep tor KB	22,73	79,28	74,69	77,15	76,47	77,91
123	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	298.891	394.116	355.421	384.547	353.322	376.606
124	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	191.174	209.279	194.108	185.555	188.730	183.937

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13	Sosial						
131	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	10	4	4	4	4	4
132	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (Orang)	1.275	953	973	550	614	1078
133	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	120	105	140	175	120	174
14	Ketenagakerjaan						
141.	Angka partisipasi angkatan kerja	534	tad	tad	tad	tad	tad
142	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	140	3	20	4	57	172
143	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,86	72,89	69,90	72,63	68,56	71,11
144	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	3,142	2,164	1,400	406	1,738	1,570
145.	Keselamatan dan perlindungan	17,4975	14,5259	20,6553	21,6634	21,5069	27,491
146.	Penyelesaian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus)	tad	0	0	0	tad	tad
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
151	Presentase koperasi aktif (%)	74,34	71,15	72,80	78,23	73,03	73,03
152	Jumlah UKM non BPR BKM UKM (Unit)	41,613	213	216	460	29.979	29.979
153	Jumlah BPR BKM (Unit)	63	12	17	17	243	243
154	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	27,4788	29.979	29.979	29.979	29.979	29.979
16	Penanaman Modal						
161	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	372	380	420	442	468	473
162	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta rupiah)	17.791.499.566	22.341.369.559	36.433.566.648	39.673.132.718	46.360.377.983	33.138.154.341
	- PMDN (juta rupiah)	8.109.436.682	9.191.372.119	24.076.123.388	25.679.488.088	25.880.318.224	27.992.647.091
	- PMA (US$ Ribu)	17.959.019.879	17.959.951.987	2.177.886.432	1.948.949.447	3.278.674.407	1.088.548.880

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
163	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	25,6	26	29	31	39	32
164	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	4,08	25,57	63,08	8,79	16,96	28,52
17	Kebudayaan						
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	1	2	1	2	2
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan (buah)	490	487	487	487	490	490
18	Kepemudaan dan Olahraga						
181	Jumlah organisasi pemuda	62	62	62	65	66	66
182	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	43	42
183	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	67	65	63	40	35
184	Jumlah kegiatan olahraga	27	30	35	45	76	60
185	Gelanggang/balai remaja (sebaiknya milik swasta) (buah)	33	33	34	37	37	37
186	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulutangkis, basket) (buah)	207	210	289	289	289	289
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
191	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)	4	4	5	4	8	6
192	Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol)	1	1	2	1	-4	6
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
201	Rasio jumlah Pos Pamong Praja per 10000 penduduk	50	50	55	60	68	133

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
202	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	30	35	59	60	65	65
203	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	10	12	12	12	12	12
204.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah****						
205	Penggunakan Perda (buah)	2	3	5	5	5	3
206	Cakupan patroli petugas Satpol PP	14	14	30	30	30	48
207.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	0	0	0	3	5	5*
208.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang)	11621	11621	13.050	13186	15827	15827***
209.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten****						
2010	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran****						
2011	Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui kegiatan Percetakan Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana (Paket Kegiatan)*	0	0	0	1	1	1
2012	Pengadaan Paket logistik (Paket Kegiatan)*	0	0	0	1	1	1
2013	Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan (Paket Kegiatan, Posko Siaga Bencana)*	0	1	1	1	1	1
2014	Cakupan sarana prasarana peralatan perkantoran pemerintahan desa yang baik (paket)	210					
2015	Sistem Informasi Manajemen Pendata****						
2016	Indek Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	-	70,19	77,23

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2017	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) *	71,10	76,28	65,78	64,15	79,00	73,46
2018	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP*)	D	C	C	C C	B	B
2019	Nilai Inovasi Pelayanan Publik*	-	-	-	-	-	A
2020	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*	-	-	-	-	31,46	47,52
2021	Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) *	39	44	59	45	48	50
2022	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah *	9	9	9	9	9	9
21	Ketahanan Pangan						
211	Regulasi ketahanan pangan (Perda)	2	1	2	3	1	1
212	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	93330	66083	142805	169891	174185	213514
213	Pemantauan Cadangan Pangan (%) *	-	27,20	28,02	36,80	32,65	34,65
21. 4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) *	-	35,96	21,92	16,17	21,31	33,33
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
221	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2, 7	3	4	5	6	6
222	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2, 8	1,99	2,30	2,35	2,37	2,37
223	Jumlah LSM (buah)	15	15	15	15	15	15
224	LPM Berepresentasi (%)	6,73	3, 6	4, 8	6, 0	ta	6, 0**
225	PKK aktif (Unit)	1470	1480	1492	1565	1428	1.428
226	Posyandu aktif (Unit)	11	2141	2200	2236	2210	2210
227	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	562	562	562	562	562	562
228	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	26	26	26	26	26	26

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
23	Statistik						
231	Buku Kalimantan Tengah Dalam Angka	1	1	1	1	1	1
232	Buku PDRB Kalimantan Tengah	2	2	2	2	2	2
24	Kearsipan						
241	Pengelolaan arsip secara baku (lembar)	4.650	5.430	6.210	6.990	7.760	7.760
242	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	72	83	94	105	116	127
25	Komunikasi dan Informatika						
251.	Jumlah jaringan komunikasi***						
252	Desa dering/ Telepon Pelosaan (Unit)	1131	1131	1131	1131	1131	1131
253	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	132	132	132	132	132	132
254	Warung masyarakat Informasi	1	0	0	0	0	0
255	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	0	1	1	1	1	1
256	M-CAP (Mobile Capacity Access Point)	1	1	1	1	1	1
257	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)	0	98	98	98	98	98
258	Data Center (buah)	1	1	1	1	1	1
259	Media Center (buah)	1	1	1	1	1	1
2510	Rasio warte lwa net terhadap penduduk	0,000065	0,000162	0,000231	0,000301	0,000101	0,000101
2511	Jumlah surat kabar nasional/lokal	-	-	-	-	13	13
2512	Jumlah penyuran radio / TV lokal	59/16	232	232	232	661	661
2513	Website milik pemerintah daerah (buah)	15	0	0	15	15	15
2514	Pameran / expo terkait Kominfo	-	-	-	-	-	-
26	Perpustakaan						

No.	Indikator	Capaian indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.6.1	Jumlah perpustakaan (Unit)	124	215	227	227	227	227
2.6.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	269366	279366	289366	296366	309266	319366
2.6.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	85521	86651	91651	96751	105315	106850
II.	Pelayanan Urusan Pilihan						
1	Pertanian dan Peternakan						
1.1	Luas tanam tanaman pangan						
1.1.1	Padi sawah (Ha)	141582	159256	183652	182634	176171	193824
1.1.2	Padi ladang (Ha)	6602	8617	10246	6391	7179	7810
1.1.3	Jagung (Ha)	4.712	5.774	4.404	3.715	4.729	6.072
1.1.4	Kedelai (Ha)	3.465	2.751	1.896	1.595	1.463	1.136
1.1.5	Kacang Tanah (Ha)	880	694	667	511	544	431
1.1.6	Kacang Hijau (Ha)	222	150	237	91	95	51
1.1.7	Ubi Kayu (Ha)	6.320	4.216	3.949	3.666	3.211	2.593
1.1.8	Ubi Jalar (Ha)	1.429	1.528	1.587	1.328	1.240	977
1.2.	Luas Panen tanaman pangan						
1.2.1	Padi sawah (Ha)	147495	148068	168733	169651	185609	183416
1.2.2	Padi ladang (Ha)	10082	6093	8354	7822	5979	7254
1.2.3	Jagung (Ha)	3.247	3.195	2.752	2.062	2.594	2.507
1.2.4	Kedelai (Ha)	2.397	2.443	1.448	1.413	1.166	1.052
1.2.5	Kacang Tanah (Ha)	924	689	687	564	470	465
1.2.6	Kacang Hijau (Ha)	206	125	210	127	70	52
1.2.7	Ubi Kayu (Ha)	6.488	4.181	3.939	3.406	3.608	3.031
1.2.8	Ubi Jalar (Ha)	1.350	1.205	1.339	1.292	1.270	1.049
1.3	Produktivitas tanaman pangan						

No.	Indikator	Capaian indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.3. 1	Padi sawah (Ku / Ha)	30,74	31,62	33,77	37,43	38,03	39,57
1.3. 2	Padi ladang (Ku / Ha)	19,69	21,50	22,36	22,84	23,02	23,50
1.3. 3	Jagung (Ku/Ha)	28,78	28,82	28,88	25,30	31,37	32,66
1.3. 4	Kedelai (Ku/Ha)	11,53	11,56	11,74	11,92	11,98	12,00
1.3. 5	Kacang Tanah (Ku / Ha)	11,17	11,20	11,22	11,24	11,26	11,26
1.3. 6	Kacang Hijau (Ku / Ha)	8,25	8,24	8,24	8,27	8,43	8,46
1.3. 7	Ubi Kayu (Ku / Ha)	118,17	118,33	118,38	119,68	120,13	150,81
1.3. 8	Ubi Jalar (Ku / Ha)	70,99	71,12	71,14	71,27	71,24	91,90
1. 4	Produksi tanaman pangan						
1.4. 1	Padi sawah (Ton)	453.341	468.168	569.318	634.920	709.357	725.755
1.4. 2	Padi ladang (Ton)	19.707	14.206	18.568	17.732	12.850	16.744
1.4. 3	Jagung (Ton)	9.345	9.208	7.947	5.217	8.138	8.189
1.4. 4	Kedelai (Ton)	2.764	2.823	1.700	1.684	1.397	1.262
1.4. 5	Kacang Tanah (Ton)	1.032	772	771	634	529	523
1.4. 6	Kacang Hijau (Ton)	170	103	173	105	59	44
1.4. 7	Ubi Kayu (Ton)	76669	49475	46.630	40762	43342	45712
1.4. 8	Ubi Jalar (Ton)	9.583	8.570	9.525	9.208	9.048	9.640
1. 5	Luas Panen Tanaman Hortikultura						
1.5. 1	Buah-Buahan (Ha)	6.202.496	5.574.390	4.290.025	3.346.216	4.090.695	3.185.622
1.5. 2	Sayuran (Ha)	9.754	10.522	11.191	11.799	11.569	31.056
1.5. 3	Tanaman Hias (M2)	18370	16843	17.889	13.922	28413	17.718
1.5. 4	Tanaman Obat (M2)	458292	587.888	728.056	646.657	778.822	709.986
1. 6	Produksi Tanaman Hortikultura						
1.6. 1	Buah-Buahan (Ku)	1.123.246	1.284.548	1.087.063	1.048.571	1.308.120	1.152.212
1.6. 2	Sayuran (Ku)	292.231	293.169	278.442	333.234	334.636	319.327

No.	Indikator	Capaian indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.6.3	Tanaman Hias (Tangkai)	8.123.434	6.857.121	7.904.040	8.392.828	6.607.676	5.025.545
1.6.4	Tanaman Obat (Kg)	1.440.833	1.364.016	1.888.523	1.694.110	1.731.006	1.467.206
1.7	Populasi Ternak						
1.7.1	Sapi Potong (Ekor)	72.180	42.246	59.385	51.952	65.197	71.445
1.7.2	Kerbau (Ekor)	5.988	6.413	6.778	9.809	10.466	11.463
1.7.3	Kambing (Ekor)	47.185	35.260	46.674	43.463	39.595	43.368
1.7.4	Domba (Ekor)	1.803	9.900	1.884	2>34.1	2.004	1.502
1.7.5	Babi (Ekor)	19.248	13.285	18.532	19.390	18.242	19.016
1.7.6	Ayam Buras (Ekor)	3.897.909	1.950.748	3.028.271	3.167.218	2.663.843	2.512.553
1.7.7	Ayam Ras Petelur (Ekor)	62.440	19.511	37.330	40.900	94.912	111.776
1.7.8	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	4.455.671	2.936.947	5.225.358	4.892.196	7.274.673	7.902.412
1.7.9	Itik (Ekor)	252.503	143.360	281.063	261.318	271.014	255.056
1.8	Produksi Ternak						
1.8.1	Sapi Potong (Ton)	3.830,54	3.991,91	4.154,17	4.277,19	3.843,99	4.061,07
1.8.2	Kerbau (Ton)	-	26,40	28,05	44,95	56,14	67,15
1.8.3	Kambing (Ton)	117,41	214,64	320,13	338,68	315,25	343,99
1.8.4	Domba (Ton)	21,63	1,20	2,98	4,25	9,97	8,83
1.8.5	Babi (Ton)	4,81	2.021,00	2.374,77	433,64	1.548,74	2.074,23
1.8.6	Ayam Buras (Ton)	3.614,86	4.470,06	2.069,82	2.125,02	2.017,86	1.903,26
1.8.7	Ayam Ras Petelur (Ton)	48,91	33,19	29,28	40,90	21,07	34,58
1.8.8.	Ayam Ras Pedaging (Ton)	12.580,97	17.654,41	15.566,32	7.338,29	10.912,01	11.487,45
1.8.9	Itik (Kg)	145,92	285,17	148,94	143,12	148,43	139,69

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.9.	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	2,46	2,17	2,20	2,13	2,20	2,33
1.10	Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,49	1,42	1,48	1,50	1,52	1,59
1.11	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten (%)	4,01	1,65	2,62	3,38	6,75	5,32
1.12	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) *** *	28,2***					
1.13	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	14,90	14,70	13,99	13,73	14,49	13,41
1.14	Kontribusi produksi kelompoktani terhadap PDRB	12,21	11,70	12,12	12,15	12,15	12,15 * *
1,15	Cakupan binaan kelompoktani***						
2	Perkebunan						
2.1	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi dilapangan (%)	75	14	14	14	14	19
2.2	Pertumbuhan devisa eksport pertahun dari komoditas perkebunan (US $Juta)	80	255	95	90	95	112
2.3	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	15	6	9	7	7	7
2.4	peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US$/KK/Tahun)	1.500-2.000	700	650	700	600	600
2.5	Penyerapan tenaga kerja baru disektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	15000	23703	24798	20533	20600	31400
2.6	Peningkatan pertumbuhan subsektor sektor perkebunan (%)	5,49***	12,95	5,15	5,25	5,25	7,00
2.7	Pengembangan sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	13	3	3	3	3	3

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.8	Pengkatan Pemanfaatan Lahan Telantar (Ha/ Tahun)	150	150	150	150	150	150
3	Kelautan dan Perikanan						
3.1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	256559	3068619	5123629	5315159	6084859	6869377
3.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1019999	964288	9067540	10556080	10408282, 2	13056526, 1
3.3	Konsumsi ikan (Kg/ Kap/ Th)	35,72	44,36	44,36	45,89	46,19	46,35
3.4	Jumlah volume produksi olahan hasil perikanan (Ton) *	9.523	15.17	21.421	25.550	28.422	28.510
3.5	peningkatan produksi benih ikan (Juta ekor)	256670000	397970000	521280000	428680000	540200000	556200000
3.6	Nilai Tukar Nelayan (%) *	106,63	104,05	107,14	104,04	104,64	103,85
3.7	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%) *	2,48	2,48	2,62	2,59	2,46	2,59
4	Kehutanan						
4.1	Penataan kawasan hutan (Jumlah peta penatagan kawasan hutan)	-	1	1	1	0	0
4.2	Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)	-	2	2	1	1	1
4.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)	27	50	50	50	50	60
4.4	Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit)	-	40	56	56	60	60
4.5	Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen)	1	-	1	2	2	0
4.6	Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan (orang)	30	30	30	30	30	40

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.7	Pengembangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	1	1
4.8	Pengembangan pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan)	1	1	1	1	2	2
4.9	Pegembangan dan reboisasi (jumlah batang pohon/bibit)	-	5.320	18716	25000	45000	36000
4.10	Pengembangan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	-	40	40	40	40	40
5	Pariwisata						
5.1	Kunjungan wisata - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara						
5.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,32	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50
5.3	Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Selat*an	29,14	55,06	53,6	54,47	55,42	54,84
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,97	10,73	10,53	10,04	11,33	11,64
6.2	Ekspor Besih Perdagangan (US$)	14855.9.164	1.254.690000	1.017.670000	1.320.000000	990000.000	990000.000
6.3	Cakupan binaan kelompok pedag ang/usaha informal / Pemberian SIUP	3.889	4.593	3.733	4.342	6.296	6.296
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,36	14,57	13,99	13,69	16,04	16,15
7, 2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri****						
7.3	Pertumbuhan Industri ,(unit)	5.649	4.461	4.401	4.807	4.678	5.164
7.4	Cakupan binaan kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	11776	15205	15103	16814	16180	16655

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Ketransmigrasian						
8.1	Transmigran swakarsa (KK)	50	0	118	0	0	0
8.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%) ****	10					
Aspek Daya Saing							
I.	Kemampuan Ekonomi						
1	Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	ta(	6.569.000	7.097.974	8.034.470	8.831.144	9.207.786
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan ***(*Rp/perkapita perbulan						382.2
1.3.	Produktivitas total daerah****						
2	Pertanian						
2.1	Nilai Tukar Petani (%)	102,88	101,1	99,25	98,31	101,29	98,66
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur						
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	18,23	15,88	13,70
1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)	11.513.879/ 8.545.183	15.647.630/ 12.124.442	15.650.000/ 12.124.842	15.653.570/ 12.125.442	16.081.946/ 12.158.364	16.279.225/ 12.185.214
1.3	Jumlah pengguna angkutan umum*	143.335	146.456	158.763	169.872	171.948	172.948
2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,7	83,7	41,65	41,65	72	72
2.2.	Luas wilayah produktif (Juta Ha)	2					
2.3.	Luas wilayah industri (Ha)	15					
2.4.	Luas wilayah kebanjiran (Ha)	1.364.523					
2.5.	Luas wilayah kekeringan****						
2.6.	Luas wilayah perkotaan (Ha)	289.000					

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	155	166	170	147	147	155
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	35	35				35
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah)	243	24	561	561	502	519
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (Buah)	316	315	309	317	336	377
4	Komunikasi dan Informatika						
4.1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	106	137	125	150	225	300
4.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	47,4	61,1	60,6	65,1	69,3	69,8
4.3	Rasio desa berlistrik (%)	61,6	65,7	67,9	74,4	77,3	74,8
4.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	76,07	76,07	76,07	75,83	76,62	76,07
III.	Iklim Berinvestasi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Angka kriminalitas				13,26	16,22	15,71
1.2.	Jumlah demo ***						
1.3.	Lama proses perijinan (Ijin/Hari)	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)	7/109,23; 3/9,88	6/136,76; 3/102,54	4/130,62; 3/108,84	4/86,02; 3/80,02	4/86,02; 3/80,02	4/86,02; 3/80,02
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) ****						
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04
IV.	Sumber Daya Manusia						
1	Ketenagakerjaan						
1.1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	317					
1.2.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	11,99					
1.2	Rasio ketergantungan (%)	51,16	51,16	51,13	47,60	47,61	46,21

Keterangan : * : Indikator baru pada RPJMD 2016-2021 ** : Data tahun 2014** : Data tahun 2013 *** : Data tidak tersedia

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi dan kabupaten/kota. Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan di daerah karena lebih mengetahui kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas accountability pemerintah pusat terhadap masyarakat yang mewakili pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berdampak terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (fiscal needs) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam pembangunan pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan,

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yan dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari pe penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengala yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan pa undang keuangan negara yang dimulai dengan lahirnya Un Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sam Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peng Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari pa undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peratura Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan D Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pemerintah. Dalam tataran teknis, telah terbit Peraturan M Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman P Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusuna Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. H dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da Kabupaten Barito Selatan tahun program kegiatan yang dap dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

3.1. Kinerja Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah sa untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diuku kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di mas ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan terse melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2011 - 2016 dapat dilihat pada tabel berik

Tabel 3. 1

Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daera

Kabupaten B Selatan Tahun 20 2016 (Juta R Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi terhadap T Pendapata Daerah (%
2011	14.605.777.4	562.631.021.	2,6
2012	29.097.950.5	640.720.950.	4,5
2013	24.893.346.6	708.451.583.	3,5
2014	32.726.181.4	786.257.511.	4,2
2015	38.343.109.5	853.554.305.	4,5
2016	44.019.869.8	932.032.770.	4,7
Rata-rata	30.614.372.	747.274.690.	4,1

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 s.d 2016

Dari tabel di atas tampak bahwa kinerja fiskal Kabupaten Barito Selatan masih sangat kecil yaitu rata-rata 4,1 persen dalam enam tahun terakhir. Dengan keragaan seperti itu maka menjadi tugas bagi pemerintahan Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 APBD Kabupaten Barito Selatan telah mengalami perkembangan yang stabil. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Barito Selatan tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 (Rupiah)

URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	ANGGARAN
	2012	2013	2014	2015	2016		
Pendapatan	640.720.363.	720.673.306.	786.257.511.	853.554.305.	932.032.770.	7,83	930.580.061.
Belanja	605.917.192.	690.165.703.	772.158.024.	859.607.845.7	939.598.457.	8,67	929.523.367.
Surplus (Defisit	34.803.171.0	30.507.603.2	14.099.487.3	-6.053.551.2	-7.565.687.37	21,73	1.056.694.5
Penerimaan Pem	81.029.748.	100.302.028.	105.127.908.1	111.937.850.	98.506.299.	3,98	46,665,73
Pengeluaran Pe	16.184.053.	13.460.000.	7.378.000.0	7.378.000.0	5.873.783.6	-18,41	5.878.000.0
Pembiayaan Net	65.498.857.	86.842.028,5	97.749.908.	104.559.850.	92.328.299.	7,62	41.844.432.
Sisa Lebih Angg Tahun Berkenaa	100.302.028.	105.127.908.	111.849.395.	98.506.299.	84.988.100.	-25,61	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Diolah

Tabel 3. 3
Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 (Jumlah Uang)

NO	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	639.820.000	640.720.000	720.673.000	708.451.000	808.696.000	786.257.000	905.188.000	853.554.000	932.637.000	932.032.000
1.1	Pendapatan Daerah	25.000.000	25.097.000	30.000.000	24.893.300	35.130.000	32.726.000	44.977.000	38.343.000	50.327.000	44.019.000
1.1.1	Pajak	10.805.000	9.980.000	12.933.000	6.771.000	11.541.000	8.207.000	12.894.000	6.708.000	11.678.000	6.452.000
1.1.2	Retribusi	6.998.000	7.202.000	8.643.000	9.490.000	12.281.171	13.764.000	7.154.000	3.896.000	4.823.000	3.553.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yang Dipisahkan	3.909.000	3.409.000	45.558.000	4.055.000	3.481.000	3.481.000	5.253.000	5.253.000	5.253.000	5.440.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	3.286.000	4.505.000	3.866.000	4.576.000	7.819.000	7.271.000	19.674.000	22.484.000	285.716.000	285.743.000
1.2	Dana Perimbangan	566.660.000	570.120.000	616.187.000	614.158.000	690.943.000	676.472.000	738.100.000	697.772.000	802.702.000	785.114.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	75.822.000	79.282.000	72.698.000	70.669.000	95.009.000	80.538.000	95.421.000	69.601.000	52.785.000	46.971.000
1.2.2	DAU	450.692.000	450.692.000	504.292.000	504.292.000	552.539.000	552.539.000	570.135.000	570.135.000	583.667.000	583.667.000
1.2.3	DAK	40.146.000	40.146.000	39.197.000	39.197.000	43.394.000	43.394.000	72.543.000	58.034.000	166.249.000	154.475.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Sah	48.159.000	45.501.000	74.485.000	69.399.000	82.622.000	770.591.000	122.110.000	117.439.000	79.610.000	102.898.000
1.3.1	Hibah	1.000.000	145.000	3.500.000	0	500.000.000	0	500.000	0	500.000	24.538.000
1.3.2	Pendapatan lainnya	187.359.000	16.645.000	22.495.000	18.734.000	26.483.000	199.865.000	20.440.000	162.096.000	22.909.000	20.411.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.423.000	28.567.000	41.395.000	41.395.000	47.553.000	47.553.000	92.381.000	93.061.000	54.725.000	56.244.000
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi/ Pemerintah	0	143.000	6.149.000	6.299.000	8.085.000	9.518.000	8.788.000	8.168.000	1.472.000	1.703.000

Sumber : Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun 2012-2016, diolah

Dari tahun 2011 sampai 2016 pendapatan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan, dan diikuti dengan meningkatnya total belanja. Pada 3 tahun pertama, SILPA cukup besar pada tiap tahunnya. Dengan SILPA yang sedemikian tiap tahun, maka isu penting dalam pengelolaan keuangan pada saat itu adalah bagaimana meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pembangunan, penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil hasil pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah daerah semestinya perlu melakukan perbaikan terus mengingat bahwa SiLPA Tahun 2011 masih sebesar 14,988 milyar rupiah.

Berdasarkan tabel rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 7,89% per tahun dan kontribusi pertumbuhan mempunyai pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi pada adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 84,22% dari Total Pendapatan, sedangkan PAD 4,7% sedangkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 30,5%. Pembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan selama 5 tahun (tahun 2011-2016) sebesar 7,8% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah baik melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2011 2016 yang ditargetkan sebesar per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari peran PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif ketergantungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. Kontribusi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan PAD sebesar 84,22% sebesar 4,7% dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sebesar 30,5%, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam me

kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Perimbangan juga mengalami peningkatan sebesar 16,47% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi U (DAU) yang mengalami pertumbuhan sebesar 22,12% per tahun. Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan te menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam optimalisasi pada pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif. Pos L Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang meningkat. Penerimaan pada Pos ini berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kab Barito Selatan. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan k pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupat Selatan Tahun 2012-2017 kebijakan pengelolaan keuangan daer diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optima aset dan kekayaan pemerintah kota termasuk mengembangk dengan menganut prinsip-prinsip; (1) Potensial, lebih menitikbera pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang b Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak menimbulkan (4) lingk Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian p baik mengenai tarif maupun materinya.

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah merupakan sistem selalu dioptimalkan mengingat kontribusi PAD terhadap pembangunan daer dapat terus ditingkatkan. Untuk melihat perkembangan dari pendapatan, pada tabel berikut akan ditunjukkan perkembanga dari komponen pendapatan secara lebih rinci.

Dari tabel perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan Kabupaten Barito Selatan sudah baik. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa kinerja penerimaan daerah mencapai atau bahkan melebihi target, meskipun pada tahun 2014 dan 2015 perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan. Pertumbuhan tahunan dan rata-

rata dari masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012-2016 (dalam Juta rupiah)

NO	Uraian	Realisasi					Proyeksi	Rata-rata Pertumbu
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Pendapatan	640.720.3	708.451.5	786.257.5	853.554.3	932.032.7	976.24.639	0,0983
1.1	Pendapatan Asli	25.097.9	24.893.3	32.726.18	38.343.1(	44.019.86	80.15.123	0,1565
1.1.	Pajak	9.980.92	6.771.28	8.207.77	6.708.02(	6.452.13	14.766.07	-0,0826
1.1.	Retribusi	7.202.38	9.490.09	13.764.84	3.896.61(	3.553.26	5.427.131	-0,0092
1.1.	Hasil Pengelolaa Daerah yang Dip	3.409.08	4.055.82	3481.652	5.253.63	5.440.118	7.068.025	0,1481
1.1.	Lain-lain PAD yan	4.505.54	4.576.15	7.271.91	22.484.82	28.574.35	53.053.89	0,2708
1.2	Dana Perimbanga	570.120.5	614.158.5	676.472.1	697.772.1	785.114.7	783.654.4	0,0838
1.2.	Bagi Hasil Pajak/ pajak	79.282.14	70.669.1	80.538.60	69.601.52	46.971.28	59.639.90	-0,1075
1.2.	DAU	450.692.2	504.292.1	552.539.1	570.135.8	583.667.6	583.667.67	0,0675
1.2.	DAK	40.146.16	39.197.2	43.394.42	58.034.73	154.4745.7	140.348.83	0,5207
1.3	Lain-lain Pendapa yang Sah	45.501.8	69.399.6	770.591.9	117.439.0	102.898.1	106.653.1(	0,2589
1.3.	Hibah	145.000	-	-	-	24.538.87	500.000	0,0000
1.3.	Bagi Hasil Pajak Provinsi	16.645.89	18.734.5	199.826.0	162.096.1	20.411.26	35.088.58	0,0656
1.3.	Dana Penyesuaia Otonomi Khusus	28.567.96	41.395.4	47.553.93	93.061.35	56.244.16	69.302.85	0,2898
1.3.	Bantuan Lainnya	143.015	6.299.60	9.518.74	8.168.10(	1.703.89(	1.761.665	10,6566

2	Belanja							
A	Belanja Tidak La	320.614	340.395	382.878	437.144	514.478	1.023.401	12,6
2.1.	Belanja Pegawai	280.827.	302.373	334.185.	346.398	359.973.	623.445.	6,4
2.1.	Belanja Bunga	315.0	82263.3	0	12.5	7.58	0	-9,9
2.1.	Belanja Subsidi	700.0	0	0	0	0	1.000.0	0,0
2.1.	Belanja Hibah	16.194.	13.779.	18.675.	12.949.	45.086.	29.688.	59,5
2.1.	Belanja Bantuan S	2.270.5	3.772.0	3.061.2	2.624.	4.450.6	9.060.0	25,6
2.1.	Belanja Bagi Hasil Propinsi/Kab/Kota/ Desa	1.750.4	1.551.0	2.382.8	2.004.9	781.0	2.019.3	-8,6
2.1.	Belanja Bantuan K Kepada Pemerinta	17.998.	18.836.	24.573.	72.649.	104.179	134.752.	68,5
2.1.	Belanja Tidak Terd	559.3	0	0	505.2	0	1.000.0	
B.	Belanja Langsung	285.302	318.537	389.279	422.463	425.120	399.956	10,7
2.2.	Belanja Pegawai	21.125.	26.013.	36.694.	43.345.	46.045	50.511.	22,1
2.2.	Belanja Barang da	114.084.	145.430	172.169.	201.048	215.583.	206.175.	17,4
2.2.	Belanja Modal	150.092	207.393	180.415.	178.068	163.482.	143.268.	3,9

Sumber : Laporan Realisasi Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2011

Dari tabel di atas, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 9,83 persen. Sedangkan untuk Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah. Belanja tidak langsung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,63%, dan Belanja untuk Langsung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 juga mengalami rata-rata sebesar 10,75%.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan APBD pada Kabupaten Barito Selatan pada periode tersebut. Perkembangan neraca ini terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun 2012 sampai 2016. Total aset dari tahun 2011 hingga 2016 mengalami kenaikan dari semula Rp.1.106.347.833.835,70 menjadi Rp.1.284.960.295.475,83. Secara rinci pertumbuhan neraca Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Perumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan 2011-2016 (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Aset							
1,1	Aset Lancar	76.223.124.5	106.140.112.	115.027.311.	126.815.031.	118.648.832.	104.332.178.	5,37
1.1.1	Kas	70.520.081.(	100.086.997.85	105.148.266.	111.937.850.	84.989.100.	78.530.558	1,81
1.1.2	Piutang	2.180.056.0	1.356.863.7	5.449.188.9	9.512.393.6	10.083.103.	6.978.956.3	21,40
1.1.3	Persediaan	3.020.307.462	4.196.370.1	5.364.787.2	4.429.858.(	5.941.123.(	7.652.246.1	16,74
1.1.4	Investasi Jangka	16.483.796.	14.457.329.	16.690.682.	22.422.045.	29.349.525.	38.634.230.	15,25
1,2	Aset Tetap	1.012.885.680	1.150.519.599	1.331.285.423	1.495.005.890	1.106.058.399	1.401.860.757	5,57
1.2.1	Tanah	59.428.308.5	62.060.959.	72.204.186.	74.833.253.	95.360.305.	170.117.590.00	19,16
1.2.2	Peralatan Dan M	124.532.694.	146.050.196.	190.216.768.	166.433.330.	142.782.475.	166.230.677.	4,93
1.2.3	Gedung Dan Bang	446.207.979.	482.052.625.	534.857.695.	596.161.171.	649.279.658.	684.297.689.	7,39
1.2.4	Jalan, Irigasi Da	372.295.499.	450.047.430.	542.754.309.	617.607.314.	710.254.698.	802.036.882.	13,65
1.2.5	Aset Tetap Lainn	8.189.152.6	8.676.341.5	13.097.880.	14.322.137.	14.244.367.	15.253.340.	10,92
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.233.045.4	1.632.045.4	1.865.244.3	1.938.025.4	9.237.165.6	24.869.759.	49,44
1,3	Aset Lainnya	555.232.83	13.843.253.	13.664.256.	13.676.440.	25.802.083.	13.176.809.	69,52
1.3.1	Tagihan Penjualan	0	1.076.171.7	899.174.8(	699.359.3	643.058.2(	453.142.6(	-15,89
1.3.2	Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.3	Kemitraan Dengan Ketiga	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.4	Aset Tak Berwujud	0	417.375.00	417.375.0(	417.375.0(	768.030.0(	1.150.134.(	22,47
1.3.5	Aset Bukan Milik	0	11.792.473.	11.792.473.	11.792.473.	11.792.473.	3.693.050.6	-20,72
1.3.6.	Aset Lain-Lain	0	555.232.83	555.232.83	555.232.83	11.844.269.	7.880.481.9	69,99
	Jumlah Aset		1.284.960.295	1.476.661.672	1.657.707.408	1.250.509.315	1.519.969.745.3	3,41

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016
Kabupaten Barito Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Kewajiban	14.054.053.	10.730.000.					-12,6
2,1	Kewajiban Jangka P	14.054.053.	10.730.000.	0	0	0	0	-12,6
2.1.	Utang Perhitungan Ke			0	0	0	0	0,0
2.1.	Uang Muka Dari Ka			0	0	0	0	0,0
2.1.	Pendapatan Diterim			0	0	0	0	0,0
2.1.	Utang Belanja			0	0	1.839.539.2	2.827.089.9	23,9
2.1.	Utang Jangka Pend	14.054..053.	10.730.000.0	0	0	295.783.6	219.539.2	-72,6
2,2	Kewajiban Jangka P			0	0	0	0	0,0
2.2.	Utang Jangka Panja			0	0	0	0	0,0
	Jumlah Kewajiban			0	0	2.135.322.8	3.046.629.2	19,4
3	Ekuitas Dana	1.029.093.780	1.274.230.29	1.476.667.672	1.657.107.408	1.277.520.498	1.560.512.579	7,1
3,1	Ekuitas Dana Lanca	62.169.070.	95.410.112.	126.815.031.	115.027.311.	0	0	16,6
3.1.	Silpa	70.952.911.	100.302.028.	10521.908.12	111.849.395.	0	0	12,0
3.1.	Cadangan Piutang	2.180.056.0	1.356.863.7	5.449.18	9.512.393.6	0	0	44,5
3.1.	Cadangan Persedia	3.023.007.4	4.196.370.1	4.429.856.0	5.364.787.2	0	0	15,4
3.1.	Pendapatan Yang Dit	67.150.00	284.850.64	0	0	0	0	105,9
3.1.	Dana Yang Disediak Hutang Jangka Pen	(14.054.053.	(10.730.000.	0	0	0	0	-12,6
3,2	Ekuitas Dana Inves	1.029.924.709	1.178.820.182	1.36614.0.361.5	1.530.892.376	0	0	-99,3
3.1.	Diinvestasikan Dala	1.012.885.680	1.150.519.599	1.495.005.890	1.331.285.423	0	0	7,0
3.1.	Diinvestasikan Dala Lainnya	555.232.83	13.843.253.	13464.440.75	13.664.256.	0	0	122,7
3.1.	Diinvestasikan Dala Jangka Panjang		14.457.329.2	16.690.682.	2.242.045.1	0	0	-46,2
	Jumlah Ekuitas Dan							0,0
	Jumlah Kewajiban D Dana	1.106.147.883	1.248.960.295.4	1.476.667.672	1.657.707.408	1.279.655.821	1.563.559.208	5,9

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Barito Selatan daerah tahun 2011-2016 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Barito Selatan adalah rasio lancar. Neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, untuk itu dilakukan penyesuaian pada aktiva lancar.

Tabel 3. 6
Rasio Lancar
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (000 Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aset Lan	76.223.124	106.140.11	115.027.31	111.753.42	90.906.08	78530.558
Kewajiba Lancar	14.054.05	10.730.00		1.720.312	1.839.539	3.046.629
Rasio La	5,4	9,891902		64,9	49,4	25,7

Sumber : Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun 2011

Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Selatan sangat likuid dengan kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai rata-rata mencapai 31,09 kali dari aset lancarnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio leverage (daya ungkit) yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah:

a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Tabel 3.7
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 s/d 2016 (Juta Rupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kewajiban	10.730.000,00	0	2.316.095.793,5	2.135.322.8	3.046.629,2
Ekuitas	1.274.230.29	1.476.667.67	1.657.107.4	1.277.520.49	1.560.512.59
Total Debt to equity Ratio	0,0084207	0	0,0013976	0,0016714	0,0019523

Sumber : Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun 2012 s/d 2016, diolah

Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Selatan memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

b. Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Tabel 3.8
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 s/d 2016 (Juta rupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kewajiban	10.730.000	0	2.316.095.793,5	2.135.322	3.046.629.2
Aktiva	1.284.960.2	1.476.667.6	1.657.707.4	1.273.883.6	1.165.868.6
Total Debt to Aset Ratio	0,008	-	0,001	0,001	0,002

Sumber Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun 2012 s/d 2016, diolah

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva (aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumberdaya entitas. Dikarenakan adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, maka dalam laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumberdaya entitas dalam menggali PAD. Ada 2 rasio yang digunakan dalam mengukur aktivitas laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

a. Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover)

Tabel 3.9
Rasio Perputaran Aktiva Tetap
Kabupaten Barito Selatan 2012 s/d Tahun 2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
PAD	25.097.95	24.893.34	24.893.34	24.893.34	24.893.34
Aktiva Tetap	1.150.519.5	1.331.285.4	1.495.005.8	1.106.058.3	1.401.860.7
Rasio Perput aktiva tetap	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01

Sumber : Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun 2011

Dengan rasio perputaran aktiva tetap sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 perputaran aktiva selama 0,017 kali.

b. Perputaran total aktiva (total assets turnover)

Tabel 3.10
Rasio Perputaran Aktiva
Kabupaten Barito Selatan 2012 s/d Tahun 2016 (jumlah dalam rupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
PAD	25.097.95	24.893.34	32.726.18	38.343.10	44.019.86
Total Akti	1.284.960.2	1.476.661.6	1.657.707.4	1.279.655.8	1.563.559.2
Rasio Perputara total akti	0,02	0,01	0,020	0,030	0,028

Sumber : Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun 2011

Dengan rasio perputaran total aktiva sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva berada di 2,3 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung dalam menghasilkan PAD.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Di setiap organisasi seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah (PD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2012-2016 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam Pengelola Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Barito Selatan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan
2011	Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apa
2012-2016

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA PEMENUHAN KEB APARATUR (R	TOTAL PENGEL (BELANJA + PEM PENGELUARAN)	PRESENTA
		(a)	(b)	(a) / (b 100%
1	Tahun Anggara	341.740.508	690.165.703	49,52
2	Tahun Anggara	366.408.625	690.165.703.	53,09
3	Tahun Anggara	419.573.276	859.607.856.	48,81
4	Tahun Anggara	480.490.486	939.598.457	51,14

Laporan Realisasi APBD Barito Selatan Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutn kesimpulan analisis sementara penggunaan anggaran belanja antara

a. Proporsi belanja langsung dalam APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya rata-rata masih 50,48 dari total belanja daerah.

b. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur d Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya rata-rata masih 41,5% dari

total belanja daerah, sementara arah yang diinginkan secara mengenai proporsi belanja untuk lebih banyak oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.

c. Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominan belanja tidak langsung adalah karena dalam belanja tidak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta diterapkannya sistem penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pengalokasian antara target capaian dengan Standard Pelayanan Minimum dengan anggarannya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi sehingga realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya belanja wajib, sehingga alokasi belanja menjadi sangat terbatas.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pertahunnya. SiLPA pertahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SiLPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kabupaten Barito Selatan mengingat hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang dibelanjakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SiLPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
SiLPA
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 s/d 2016 (Rupiah)

Tahun	SiLPA (Rp)
2011	70.952.911.064,17
2012	100.302.028.358,59
2013	105.128.910.023,70
2014	111.937.850.496,15
2015	98.506.299.278,96
2016	84.988.100.274,37

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Barito Selatan, 2017

Analisis pembiayaan Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dijelaskan secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 Anggaran 2012
(dalam juta rupiah)

		2012	2013	2014	2015	2016
NO	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DA	640.720.	708.451.	786.257.	853.554.	932.032.
2	BELANJA DAERAH	605.917.	690.165.	772.158.	859.607.	939.598.
3	Pengeluaran Pem Daerah	16.184.	13.460.	7.378.(	7.378.(	5.873.1
A.	Defisit Riil	18.619.	4.825.8	6.721.4	(13.431.	(13.439.
Ditutup oleh realisasi Pembiayaan:						
3.1.	Sisa Lebih Perhit Anggaran Daerah Sebelumnya (SiLP	100.302.	105.127.	111.937.570,(	98.506.	84.988.
3.1.	Penerimaan Pinja Daerah	0	0	0	1.821,	15.416
3.1.	Penerimaan Kemb Pemberian Pinjam	0	0	0	0	4.471,
B.	Total Realisasi P	100.302.	105.127.	111.937.	98.506.	84.988.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		81.682.91	100.302.0	105.216.3	85.074.74	69.000.

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2012-2016 Diolah

Dari Tabel 3.15 diatas tampak bahwa pada tahun 2012 sampa Kabupaten Barito Selatan mengalami surplus anggaran. Surplus pada periode 2012 sampai 2014 dipergunakan sebagai pembiayaa berikutnya. Dan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penuru Gambaran komposisi pendanaan penutup riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2012-2016) terlihat pada Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 Anggaran 2012
(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 20		TAHUN 20		TAHUN 20		TAHUN 201		TAHUN 20		RATA-RATA PERTU
		(Rp	%	(Rp	%	(Rp	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Jumlah SiLPA	81.68	100	100.3(	100	105.2	100	85.074	100	69.000	100	18

Sumber: Laporan Realisasi APBD Barito Selatan 2012-2016, Diolah

Berdasarkan uraian dan perbandingan diatas selanjutnya diurai kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain

d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan dayaguna nasional

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dapat diuraikan menurut obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

e. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya terlebih dahulu untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program kegiatan yang telah dianggarkan, dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang menimbulkan kewajiban daerah, pengurangan program kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.2.3 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat menyelenggarakan otonominya secara efektif dan efisien yang bersumber dari pendanaan sendiri. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa model, salah satunya dengan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.16
Rasio Kemandirian Keuangan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 s/d 2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total PAD	Pengeluaran Daerah	Rasio PAD/ Total Pengeluaran (%)
2012	640.720.363	589.667.744.483	1,09
2013	708.451.583	366.408.626	1,93
2014	1.572.515.02	772.158.024	2,04
2015	853.554.305	859.607.856	0,99
2016	932.032.770	939.598.457	0,99

Sumber : Laporan Realisasi APBD Barito Timur 2011 s/d 2016, diolah

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 rasio kemandirian berada pada angka 1,93% dan tahun 2016 berada pada angka 0,99%.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendanaan program kegiatan yang dikomodir dalam periode tahun 2017-2022 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2017-2022

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

a. Proyeksi Pendapatan

1. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2016, 2021 ini 9,70% per tahun. Dengan menggunakan tahun dasar 2016 dan mempertimbangkan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian jumlah penerimaan alokasinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat serta beberapa komponen pendapatan lainnya yang tidak bisa diproyeksikan menggunakan nilai pertumbuhan pendapatan masa lalu, maka dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERA	970.624.639.	997.227.591.	1.029.676.155	1.063.275.398	1.098.072.246	1.134.115.900
I	P A D	80.315.123.016,9	63.293.422.	67.723.961.	72.464.639.	77.537.164.	82.964.765.
1	PAJAK DAERAH	14.766.071.	15.799.696.	16.905.674.	18.089.072.	19.355.307.	20.710.178.
2	RETRIBUSI DAERAH	5.427.103.321,0	6.438.456.6	6.889.148.6	7.371.389.0	7887.386.2	8.439.503.2
3	HASIL PENG.KEKAYAAN DAE	7.068.062.550,1	7.588.173.8	8.119.346.0	8.687.700.2	9.295.839.3	9.946.548,90
4	LAIN-LAIN PAD YG SYAH	53.053.895.	33.467.095.	35.809.792.	38.316.477.	40.998.631.	43.868.535.
II	PERIMBANGAN	783.656.415.	807.717.502.	831.949.027.	856.907.498.	882.614.723.	909.093.164.
1	TRANSFER UMUM	59.639.908.648	59.636.719.	61.425.820.	63.268.595.	65.166.653.	67.121.652.
2	DAU	583.667.676.	576.041.341.	593.322.581.	611.122.258.	629.455.926.	648.339.604.
3	DANA TRANSFER KHUSUS	67.489.050.507,0	99.180.168.	102.155.573.	105.220.240.	108.376.847.	111.628.152.
4	DANA ALOKASI KHUSUS N	72.859.274.	72.859.274.	75.054052.22	77.296.403.	79.615.295.	82.003.754.
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG	106.653.295.150,3	126.216.666.	130.003.166.	133.903.261.	137.920.359.	142.057.970.
1	PENDAPATAN HIBAH	500.000.0	500.000.0	515.000.0	530.450.0	546.363.5	562.754.4
2	DANA BAGI HASIL DARI PRO DAN PEMERINTAH DAERA	35.088.585.	35.088.585.	36.141.242.	37.225.479.	38.342.244.	39.492.511.
3	DANA PENYESUAIAN DAN KHUSUS	69.302.851.	69.302.851.	71.381.936.	73.523.394.	75.729.096.	78.000.969.
4	PENDAPATAN LAINNYA	1.761.667.502	21.325.230.	21.964.987.	22.632936.94	23.302.655.	24.001.734.

Proyeksi penerimaan Kabupaten Barito Selatan tiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,83 persen selama 6 (enam) tahun (2017-2022), dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016-2021 rata-rata sebesar 15,65 persen. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan tersebut, mengindikasikan bahwa Kabupaten Barito Selatan cukup memiliki kemandirian fiskal dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan tahun 2017-2022.

Peningkatan proyeksi target PAD secara signifikan diarahkan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Guna merealisasikan PAD dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain : revitalisasi BUMD Perusda dan ekstensifikasi usaha dalam beberapa sektor, seperti pemungutan pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, pertambangan galian, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya melalui penyertaan saham sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA tahun 2017-2022 menggunakan data SiLPA kurun waktu ditunjukkan melalui Tabel 3.16 dimana diketahui nilai SiLPA dengan tingkat pertumbuhan SiLPA minus 2,58%, namun demikian mempertimbangkan bahwa tahun mendatang proses perencanaan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan analisis terhadap pengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagai berikut :

Tabel 3.18
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	67.21	65.4	63.7	62.1	60.5

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pem Selatan dalam jangka waktu lima tahun 2017-2022, ditunjukkan sebagai ber

Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Anggaran 2017
(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	997.2	1.029.7	1.349.7	1.480.6	1.624.3
4	Sisa Lebih (Riil) Per Anggaran	67.21	65.47	63.78	62.13	60.52
	Total Kapasitas Ken Keuda	1064.4	1.095.1	1.413.5	1.542.8	1.684.8

b. Proyeksi Belanja

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai termasuk gaji dan tunjangan KDH/Wakil KDH anggota DPRD), bunga, subsidi, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Perkiraan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah sebagaimana tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.20
Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD 2016	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI APBD					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	BELANJA TIDAK L	514.478.	12,63	623.445.	652.624	735.040.	827.864.	932.411.	1.050.160
2.1.	Belanja Pegawai	359.973.	6,44	445.925.	407.844	434.116.	462.080.	491.846.	523.529.
2.1.	Belanja Bunga	7.58	-9,91	0	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58
2.1.	Belanja Subsidi	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.	Belanja Hibah	45.086.	59,53	71.928.	114.750	183.065.	292.052.	465.924.	743.309.
2.1.	Belanja Bantuan So	4.450.	25,65	5.591.	7.026.	8.829.	11.094.	13.940.	17.516.
2.1.	Belanja Bagi Hasil Propinsi/Kab/Kota/ Desa	781.0	-8,67	713.3	651.4	595.0	543.4	496.3	453.3
2.1.	Belanja Bantuan Ke Kepada Pemerintah	104.179.	68,54	175.581.	295.922	498.743.	840.575.	1.416.692	2.387.671
2.1.	Belanja Tidak Terd	0		0		0			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYA		10,75						
3.2.	Pembentukan Dana		22,14						
3.2.	Penyertaan Modal	7.078.	17,47	7.078.	7.078.	7.078.	7.078.	7.078.	7.078.
3.2.	Pembayaran Pokok	300.0	3,92	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
	Pemberian Pinjama		13,23						
	Total Belanja Wajib	521856.0		586.826	652624	742.418	835.242	939.789	1.057.538

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 dan Proyeksi 2012-2017

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat ditingkatkan sesuai dengan pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2016 sebagai dasar proyeksi tahun 2017-2022 dengan mempertimbangkan faktor inflasi. Adapun hasil proyeksi dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	Prioritas I	595.9	651.6	712.6	777.7	849.5
2.1.1	Belanja pegawai	545.4	597.4	654.6	715.7	781.8
2.1.2	Belanja bunga	1.90	2.20	2.30	2.30	3.60
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
2.1.7	Belanja bantuan keuangan prov/kab/kota dan pem.	48.63	52.01	55.69	59.71	64.10

2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah dan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat nyata berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit pada capaian Visi dan Misi daerah.

Prioritas II, dialokasikan untuk Program Prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, berhubungan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak pada masing-masing segmentasi masyarakat yang sudah sesuai dengan prioritas.

Prioritas III, dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial

kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/k
dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga.

Tabel 3.22
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 201		Tahun 2019		Tahun 202		Tahun 2021		Tahun 2022	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Priorita	54	680.082.	56%	760.222.	56%	847.293.	55%	987.348.	55%	1.051.626
2.	Priorita	32	408.495.	31%	435.711.	31%	462.623.	31%	493.342.	30%	524.282.
3.	Priorita	11	33.309.00	11%	34.479.	12%	39.845.	12%	40.538.	14%	48.408.
	Total	100	1.121.616	100%	1.230.413	100 %	1.349.76 0	100%	1.480.690	100 %	1.624.317

Kerangka pendanaan kapasitas keuangan daerah 2018-2022 periode 20
disajikan pada Tabel 3.22 yang memuat kapasitas kemampuan keu
daerah, belanja dan pembiayaan.

Tabel 3.23
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Da
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018-2022 (Dalam Jutaan Rupiah)

KOD	U R A I A N	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Kapasitas kemampuan keu	1.188.8	1.295.8	1.413.5	1.542.8	1.684.8
1	Pendapatan	1.121.6	1.230.4	1.349.706	1.480.609	1.624.301
2	Silpa	67.21	65.47	63.78	62.13	60.52
B.	Belanja					
2.1	Belanja tidak langsung	444.247.	481.842.	525.064.	575.424.	611.816.
	Prioritas I					
2.1.	Belanja pegawai	407.844.	434.116.	462.080.	491.846.	383.162.
2.1.	Beha ja bunga	6.15	5.54	4.99	4.50	6.83
2.1.	Belanja subsidi	1.000.0	1.000.0	1.000.0	1.000.0	1.000.0
2.1.	Belanja bantuan keuangan prov/kab/kota dan pem.de	651.4	595.0	543.4	496.3	713.3
	Prioritas III	46.131.	61.440.	82.081.	86.574.	46.131.
2.1.	Belanja hibah	26.369.	35.739.	48.440.	65.653.	65.653.
2.1.	Belanja bantuan sosial	6.670.0	8.740.2	11.405.	14.884.	19.423.

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan desa	713.3	651.4	595.0	543.4	496.3
2.1.	Belanja tidak terduga	1.000.0	1.000.0	1.000.0	1.000.0	1.000.0
2.2	Belanja langsung	470.832.	521459[illegible]	577530[illegible]	639630[illegible]	708408[illegible]
	Prioritas II	253.238.	297[illegible]	349427[illegible]	410459[illegible]	482152[illegible]
	Prioritas III	169.889.	176547[illegible]	183467[illegible]	190657[illegible]	198129[illegible]
	Surplus / (defisit)	-42.394.	24.517.	107.833.	188.166.	216.275.
C.	Pembiayaan daerah					
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	109.559.	115.589.	121.950.	128.662.	135.743.
3.2	Pengeluaran pembiayaan d	10.0[illegible]	16.1[illegible]	14.2[illegible]	12.1[illegible]	12.1[illegible]
	Pembiayaan netto	-42.394.	24.517.	107.833.	188.166.	216.275.
	Sisa lebih pembiayaan ang berkenaan	0	0	0	0	0

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat tersebut pada tabel 3.23 dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk maksimalkan pembangunan daerah dengan rumus sama total penerimaan dikurangi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Tabel 3.18 berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun ruang yang tersedia setiap tahun yang untuk memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan

a. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 3.22 dan 3.23 tersebut di atas, dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata (%
I	Penerimaan	1.022.439	1.121.616	1.230.413	1.349.763	1.480.690	1.624.317	
	dikurangi:							
II	Belanja Wajib Mengikat dan Utama	586.826	652.624	742.418	835.270	939.789	1.057.538	12,49
Kapasitas Riil (I-II)		435.613	468.992	487.994	514.520	540.901	566.779	4,784

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan proyeksi tersebut, maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara, tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata(%)
Prioritas I	588.027	680.082	760.222	847.293	987.348	1.051.62	
Prioritas II	384.875	408.495	435.711	462.623	493.342	524.282	6,378
Prioritas III	49.536	33.039	34.479	39.845	40.538	48.408	
Total	1.022.43	1.121.61	1.230.41	1.349.76	1.480.69	1.624.31	

Sumber: Hasil analisis

Penetapan anggaran tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya anggaran, tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar anggaran ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang diproyeksikan untuk menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun baris total untuk kolom rupiah menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal dalam menetapkan pagu indikatif program atau pagu indikatif urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara simultan hal tersebut diperhatikan ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya dialokasikan untuk persentase final prioritas III. Berikut rincian anggaran yang dialokasikan untuk prioritas III.

Tabel 3.26
Alokasi Prioritas Kabupaten Barito Selatan (dalam rupiah) 2016-2021

Uraian	2016	2.017	2018	2.019	2.020	2021	Rata-rata (%)
Belanja Hibah	45.086.	26.369.	25.739.	28.440.	25.653.	28.984.	
Bantuan sosial	4.450.1	6.670.(	8.740.1	11.405.	14.884.	19.423.	
Total	49.536.	33.039.	34.479.	39.845.	40.538.	48.408.	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Barito Selatan 2016-2017 Setda

b. Penghitungan Pendanaan

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2017-2022, yang meliputi : pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat atau daerah dalam pengembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2017-2022)

Tabel 3.27

Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2022 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah)

No.	Uraian	APBDTA.2017	APBDTA.2018	APBDTA.2019	APBDTA.2020	APBDTA.2021	APBDTA.2022	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.022.439	1.121.616	1.230.413	1.349.763	1.480.690	1.624.317	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.289.7	52.973.	58.112.	63.749.2	69.932.9	76.714.52	
1.1.1.	Pajak Daerah	7.077.9	7.764.5	8.517.7	9.343.9	10.250.1	11.244.5	
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.897.9	4.276.0	4.690.8	5.145.8	5.644.9	6.192.5	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan	5.967.8	6.546.0	7.118.71	7.878.3	8.642.5	9.480.8	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan	31.346.0	34.386.	37.722.	41.381.1	45.395.1	49.798.4	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER							
1.2.1	Pendapatan	904.042	1.040.984.4	1.198.670.	1.380.24	1.589.318	1.830.064	
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	54.086	62.279	71.713	82.576	95.084	109.487.	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	583.667	672.080	773.885	891.112	1.026.09	1.181.526	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	154.475	177.875	204.819	235.845	271.570	312.707.	
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	118.484	136.432	157.099	180.896	208.298	239.850.	
1.3.1	Hibah	28.255	32.536	37.464	43.319.6	49.674	57.198.9	
1.3.2	Pendapatan lain	23.503	27.063	31.162	35.883	41.318	47.577.6	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64.763	74.574	85.870	98.878	113.855	131.102.	
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	1.961.	2.259.	2.601.	2.995.	3.449.	3.971.6	
1.2.4	Bantuan Keuangan	672.080	773.885	891.112	1.026.09	1.181.52	1.360.50	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	177.875	204.819	235.845	271.570	312.707	360.075	

No.	Uraian	APBDTA.2017	APBDTA.2018	APBDTA.2019	APBDTA.2020	APBDTA.2021	APBDTA.2022	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	BELANJA							
2.1	Belanja Tidak Langsung	579.448	652.620	735.040	827.864	932.411	579.448	
2.1.1	Belanja Pegawai	383.162	407.844	434.116	462.080	491.846	383.162	6,44
2.1.2	Belanja Bunga	6.83	6.15	5.54	4.99	4.50	6.83	
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja Hibah	71.928.	114.750	183.065	292.052	465.924	71.928.	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.591.	7.026.	8.829.	11.094.	13.940.	5.591.	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kot dan Pemerintah Desa	713.3	651.4	595.0	543.4	496.3	713.3	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kot a dan Pemerintah Desa	175.581	295.922	498.743	840.575	1.416.692	175.581	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.	1.000.	1.000.	1.000.0	1.000.	1.000.	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG							
2.2	Belanja Langsung	470.832.	5214596	5775307	6396309	7084086	470.832.	
2.2.1	Belanja Pegawai	56.252.	687085	839227	1025058	1252038	56.252.	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.238.	2974699	3494273	4104599	4821527	253.238.	
2.2.3	Belanja Modal	169.889.	1765479	1834671	1906576	1981299	169.889.	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.2.1./sd 2.2.3)							
D	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH (B + C)							
E.	SURPLUS/(DEFISIT)							

No.	Uraian	APBDTA. 2016	APBDTA. 2017	APBDTA. 2018	APBDTA. 2019	APBDTA. 2020	APBDTA. 2021	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)							
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman							
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman							
3.1.6	Penerimaan Piutang							
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)							
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah							
3.2.1	Pembentukan dana cadangan							
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah							
3.2.2.1.	Penyertaan Modal pada PT Bank Kalteng							
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang							
3.2.4	Pemberian Pinjaman							
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
H	Pembiayaan Neto (F-G)							
I	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)-(H+E)							

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diident baik, maka pemerintahandaerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada mas Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagala melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pem daerah.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendes kelembagaan/keorganisasian dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondis strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informas diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi dae berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pe daerah, selanjutnya melakukan pengamatan untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikia Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebi Tanpa itu, akan banyak peluang penting akan hilang, deng ancaman tidak dikenali lebih dahulu diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangun masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif dae perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembang tahun terakhir serta berdasarkan hasil penyerapan aspirasi kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupa Selatan, sebagai berikut.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Meskipun pembangunan di Kabupeten Barito Selatan mengalami kemajuan, namun-masih mendasar yang akan dihadapi tahun mendatang cukup besar yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penyediaan infrastruktur serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Memperhatikan kondisi Barito Selatan saat ini, permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian adalah:

1. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Kabupaten Barito Selatan memiliki wilayah yang luas dan geografis yang sebagian besar transportasi melewati alur sungai, sehingga beberapa daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki berbeda. Transportasi dari kecamatan ke ibukota kabupaten dan sebaliknya sebagian besar melewati sungai. Dibeberapa kecamatan hanya ada yang yang bisa ditempuh lewat darat.

Dari Permasalahan Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai , ditegaskan dengan data dibawah ini:

a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kecamatan dan desa

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peranan penting. Untuk mendukung transportasi darat, pemerintah daerah membangun jalan sepanjang 1.037,56 km jalan kabupaten, 152,56 km jalan negara dan 97,9 km jalan provinsi. Dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 152,56 km jalan-aspal telah atau sekitar 15 persen, 1 persen beton, 19 persen kerikil, dan sisanya (53 persen) tanah. Kondisi jalan yang baik sekitar 14,67 persen atau sepanjang 152,55 persen, rusak ringan 28,44 persen dan yang rusak berat 14,34 persen.

Tabel 4.1
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Selatan (km)
2016

Jenis dan Kondisi	Panjang Jala
Jenis Permukaan	
1 Aspal	152,56
2 Beton	132,77
3 Kerikil	188,04
4 Tanah	540,20
Jumlah	1.013,57
Kondisi Jalan	
1 Baik	185,47
2 Sedang	420,46
3 Rusak Ringan	263,15
4 Rusak Berat	144,49
Jumlah	1.013,57

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel 4.1 panjang jalan yang ada di Kabupaten dengan kondisi baik 185,47 km dan kondisi sedang sepanjang 420,46 km memerlukan fasilitas keselamatan jalan untuk meni keselamatan pengguna jalan.

Semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua w antar kecamatan, kabupaten/kota, antar provinsi mesti diimba dengan pelayanan umum seperti jasa layanan angkutan se untuk memenuhi lalu lintas jalan darat tersebut. Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya term memadai dan moda masih belum memadai.

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupa memiliki jumlah ruas jalan cukup banyak yaitu sejumlah 20 Sejak beberapa tahun terakhir kondisi sebagian jaringa jembatan telah mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut merupakan bentuk penggunaan infrastruktur oleh sebagai alat pendukung perkembangan diberbagai segi kehi

Walaupun tingkat kerusakan bervariasi dan lokasinya ti namun kerusakan jaringan jalan dan jembatan tersebut telah mengganggu kelancaran arus transportasi darat yang akan kelancaran berbagai aktifitas kehidupan di masyarakat, b pemerintahan, aktifitas dunia usaha maupun aktifitas mas sendiri.

Berdasarkan data tahun 2016 Jumlah panjang jalan Kabupaten Ba
Selatan, ditinjau dari kondisi Jalan yang mantap 59,78% (atau sepanjang
terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena di sa
bertambahnya jumlah panjang namun masih banyak yan
fungsional. RPJMD tahun 2017 sd 2022 memprioritaskan
peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk mempertahankan dan menambah jal
menjadi paling tidak 70,04% untuk seluruh jalan kabupaten
Pembangunan jalan baru dapat dilakukan bila sangat pe
seperti untuk menunjang pariwisata yang dicanangkan pemerintah. Hal
tersebut dilakukan terkait dengan kelancaran arus transpo
dan orang dalam menunjang perbaikan ekonomi masyarakat.

Konektivitas Antar Wilayah Kecamatan Di Barito Selatan
semua tersambung Jalan Darat

Wilayah Kabapaten Barito Selatan terdiri dari 6 Kecam
Kecamatan yakni Kecamatan Dusun Selatan, Gunung Binta
Karau Kuala yang tersambung jaringan jalan kabupat
teraksesibilitas dengan ibukota kecamatan, sedangkan 3 (Dusun
Utara, Dusun Hilir dan Jenamas) belum terhubung melewat
langsung dengan ibukota kabupaten, hanya dapat melewa
sungai.

Pemerintah Daerah berencana untuk menyambung ko
antar kecamatan dengan ibukota kabupaten melakukan :

1. Untuk menghubungkan dari Kecamatan Jenamas ke
   Kabupaten dilakukan lanjutan peningkatan jalan , mel
   Nasional di Pasar Panas Ada-ro Jalan Rantau Kujang
   Jenamas. Perlu dilanjutkan pembangunan Jalan yang s
   tersebut.
2. Untuk menghubungkan dari Kecamatan Jenamas ke Du
   direncanakan pembuatan Jalan Tambak Bajai (perbatas
   Kapua-sJalan Bakut Sei Jaya Jl Mahajandau Jalan Mengkatif
   yang diusulkan ditangani oleh Pemprov Kalteng.
3. Untuk menghubungkan kecamatan Karau Kuala menuju ib
   Kabupaten , dilakukan peningkatan jalan yaitu dari Ba
   Telang (Batas Kab.Barito Timur) sepanjang 6,5 km dite
   Telang/ Siong (jalan di wilayah Bartim).
4. Untuk menghubungkan kecamatan Dusun Utara ke ibukota
   kabupaten , dengan melanjutkan pembangunan jalan k
   bernilai strategis (menuju ibukota kecamatan Dusun

Pendang), dimulai dari titik nol di jalan Nasional (Pa
Timpah-Kalahien-Buntok) ke Pendang, panjang 16,9 km.;

Disamping itu untuk menunjang Pariwisata Danau Malawen
jalan kebupaten dari Jl.Barito Raya menuju Desa Sababila
4,8 km, disamping sebagai jalan masuk/keluar ke kota Buntok
karena saat ini satu satunya jalan masuk kota Buntok adalah
Jalan Nasional ; Jalan Bumbat (km.6 muka di kantor Bappe
sd km.11,5 di Bundaran Sanggu), dengan panjang 5,5 km).

Pengembangan Terminal angkutan Darat

Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terk
rencana pengembangga transportasi adalah sarana dan
terminal penumpang diantaranya adalah Terminal angku
dimana bus antar propinsi atau bus antar wilayah dalam pr
melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan.

Kondisi saat ini Kabupaten Barito Selatan memiliki 1 unit terminal
tipe C di Kecamatan Dusun Selatan. memperhatikan rencana
struktur ruang yang telah dirumuskan rencana sistem jaring
keberadaan terminal yang ada, jenis dan kelas pelayana
rencana terminal angkutan penumpang sebagai pendukung
operasional angkutan di Kabupaten Barito Selatan sebagai
Terminal Penumpang Buntok Tipe B, Pembangunan Terminal
Tipe C di Bangkuang, Tabak Kamanas, dan di Pematang
Barang Beringin Tipe B di Buntok.

b. Belum maksimalnya sistem dan jaringan transpo
komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas e
kerakyatan sehinngga memerlukan biaya operasional
perawatan sarana prasarana angkutan sungai dana
penyeberangan.

Karateristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabup
Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah ali
menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan tranp
moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai

Angkutan penyeberangan sebagai penghubung j
transportasi darat (jalan raya) dalam kerangka tatanan
daerah berfungsi memperlancar kabupaten yang terdiri d
beberapa sungai/anjir memegang peranan yang penting da
Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh

khususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sung
jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan seb
jalan raya atau angkutan sungai, jumlah lebih pada angkutan
jalan raya. Alat angkutan terdiri dari perahu, perahu,
kapal sungai, bus air, bus air.

Rencana moda angkutan penyeberangan lebih mema
keberadaan lokasi dan fungsi dermaga sungai dan anjir, ter

a) Pelabuhan (dermaga) sungai nasional, meliputi : Pendan
Buntok Kota, Bangkuang, Mangkatip, Kalanis, Rangga
Jenamas pada Sungai Barito.

b) Pelabuhan (dermaga) sungai provinsi, meliputi : Mang
Sungai Mangkatip dan Sungai K

c) Pelabuhan (dermaga) sungai kabupaten meliputi dermaga
berfungsi sebagai penunjang mobilitas perekonomia
menghubungkan daerah perdesaan terpencil dan belum b
serta transportasi lainnya belum berkembang.

c. Masih Terbatasnya infrastruktur pengairan yang menduku
ketahanan pangan

Pertanian merupakan sektor yang memiliki laju
pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 2,60 persen. Oleh
itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis m
kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus d
pertumbuhannya. Kondisi tersebut terlihat dengan data t
dimana luas lahan pertanian dengan sederhana mencapai
35.094 Ha, sedangkan luas pengairan semi teknis 7.040 Ha
komoditi pertanian khususnya padi hybrida sebagian besar
Kecamatan Dusun Hilir 2.500 Ha; Kecamatan Dusun Selata
Intensifikasikan lahan lebak yaitu di: Jenamas 80 Ha,
Kecamatan Dusun Hilir 75 Ha, Karau Kuala 50 Ha,
Kecamatan Dusun Selatan 50 Ha, Kecamatan GB Awai
Pengembangan usaha produksi di Karau Kuala 100 Ha
Pengembangan usaha produksi di: Dusun Utara 85
Ha, Kecamatan GB Awai 125 Ha.

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, d
dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang s

wilayah yang berada di dekat aliran Sungai Barito. Wilaya
Barito Selatan bagian utara kurang subur karena wilaya
merupakan perbukitan bergelombang yang kedalaman tanahnya
dan kekurangan air untuk mengairi tanaman. Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mem
danau yang ada merupakan salah satu cara menatagu
Kabupaten Barito Selatan. Sehingga lahan di wilayah tersebut menjadi
produktif. Kebijakan pembuatan sumur bor juga merupakan
cara mengatasi kekurangan air di wilayah tersebut seh
menjadi lebih produktif untuk tanaman perkebunan. Kebi
perlu diambil terkait dengan pengembangan kawasan pertanian
mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, baik per
basah maupun pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian umum diarahkan tersebar di bagia
Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan
Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Dengan semaki
perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terba
untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah
teknis dan lahan abadi pertanian (sawah abadi) ini perl
ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkata
manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari sete
menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. P
sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tu
sari dan sebagainya.

d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masy

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyara
Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebesa
kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaat
energi listrik yang hingga saat ini masih hanya dinikmati oleh warga
diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum
seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

Terdapat rencana pengembangan PLTU di Kabupaten B
Selatan, dimana di rencanakan di Kota Buntok yang merup
yang potensial karena sebagai pusat pertumbuhan/PKL di
Barito Selatan. PLTU Buntok ini direncanakan dengan me
hasil batubara di Kecamatan GB Awai dan Dusun Utara yan
distribusikan melalui Sungai Barito. Proyeksi kebutuhan l
dengan tahun 2015, kebutuhan total (VA) di Barito Sela
45.182.280 VA. Sedangkan untuk 2030 ditargetkan seluruh desa dan
dusun terlayani oleh listrik.

Tabel 4.2 Rasio Elektrifikasi (%) di Kabupaten Barito Sela
Data Desa dan Data Rumah Tangga Tahun 2012

No	Rasio Elektrif	TAHUN				
		201	201	201	201	201
1.	Desa Berlistr	64,5	73,6	79,5	81,7	89,2
2.	Desa B Berlistr	35,4	26,3	20,4	18,2	10,7
3.	Rumah Tangga Berlistr	77,0	75,2	80,7	81,8	82,1
4.	Rumah Tangga Belum Berlistr	23,0	24,8	19,3	18,1	17,8

Sumber : Memori Bupati 2016

Dari data diatas dapat digambarkan kondisi sebagai b
a. Peningkatan persentase desa yang berlistrik dari tahu tahun 2016 sebesar 24,73 %.
b. Peningkatan persentase rumah tangga berlistrik dari s/d tahun 2016 sebesar 5,19 %.
c. Sampai dengan tahun 2016 dari 93 desa/kelurahan di Barito Selatan terdapat 83 desa yang sudah berlistrik yang belum berlistrik.
d. Sampai dengan tahun 2016 dari 34.463 jumlah rumah Kabupaten Barito Selatan 28.324 rumah tangga sudah atau 82,19 % dan masih terdapat 6.139 rumah tangga belum berlistrik atau sebesar 17,81%.

Jumlah pembangkit dan jaringan listrik yang diban pemerintah non PT. PLN (Persero) sampai dengan tahun 2016 yaitu

- Pembangkit PLTD = 22 unit dengan total daya terpas kVA.
- Pembangkit EBT (PLTS) = 5 unit dengan total daya terpasa 131.855Wp.
- Panjang jaringan listrik 13.455 meter sirkuit.

Pengelolaan Sumber Energi Listrik yang operasiona dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dan Pemerint Kabupaten Barito Selatan. Dari 93 Desa/Kelurahan sebut, sampai dengan tahun 2016 yang dikelola oleh PT. PL

sebanyak 48 desa, pemerintah sebanyak 35 desa da
belum berlistrik.
Berdasarkan data saat ini jumlah rumah tangga yang be
listrik sebanyak 6.139 dari 32.263 rumah tangga. Sementara
rumah tangga yang teraliri pembangkit listrik non P
sedangkan yang menggunakan PLN 21.883. Denga
elektrifikasi desa berlistrik sebanyak 89,25 persen
elektrifikasi rumah tangga berlistrik 82,19 persen. Ba
belum teraliri listrik baik PLN dan non PLN, pemerin
berupaya mengusulkan agar bagaimana desa tersebut dapat
menikmati penerangan listrik negara tersebut seperti d
Karena sejak kewenangan distamben dialihkan ke
Otomatis kewenangan pembangunan tenaga kelistrika
dilimpahkan ke Provinsi.

e. Sarana Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan perta
sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manu
kehidupan sehari-hari. Keberadaan air bersih di Kabupaten Barito
Selatan sampai saat ini sudah terpenuhi dengan bai
pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alter
dalam pemenuhan akan air bersih dimasa yang akan dat

f. Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di perkotaan yaitu
sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non
meliputi sampah intitusional (sekolah, kantor, dll)
komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaa
jalan, lapangan, dll), sampah klinik, rumah sakit, sampah indust
konstruksi, dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan
Kabupaten Barito Selatan dikelola langsung oleh masya
perorangan atau berkelompok. Secara perorangan s
dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun m
seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang
ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan.
Untuk kebutuhan pengelolaan sampah, pemerintah k
sudah menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (T
berbagai titik dalam kota maupun luar kota. Penyediaan petugas
seperti penyapu jalan, pengangkut sampah dan p
saluran/got sudah pula disediakan oleh pemerintah
prasarana transportasi seperti pick up dan truk sampah

Tabel 4.3 Progres Kegiatan Bidang Kebersihan
Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016

No.	Kegiatan	Tahun	
		2011	2016
1	Jumlah TPS	10 bu	16 bu
2	Jumlah TPA	1 bu	1 bu
3	Tenaga Kerja :		
	a. Penyapu Jalan	115 or	150 or
	b. Pengangkut Sampah	27 ora	27 ora
	c. Pembersih Saluran / Go	10 ora	10 ora
4	Truk Sampah	4 bu	8 bu
5	Pick Up	-	2 bu

Sumber : Memori Bupati 2016

2. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah ser usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan dis pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi r melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor prime sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari p ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyaraka disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pertumbuhan ekonomi terkait dengan finansial dan kebut primer, sekunder, maupun tersier. Trend positif ditunjukkan perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Selatan pertumbuhan yang reliatif stabil pada kurun waktu lima tah Pertumbuhan ekonomi ini menjadi potensi tinggi untuk p perekonomian kabupaten, utamanya pada sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan, ataupun pertamb penggalian. Dalam Kabupaten Barito Selatan, perekonomian memang berkembang dari tahun ke tahun, namun perlu dig terkait pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wi regional administrasi masih kurang efisien dalam perge perekonomian wilayah utamanya daerah terpencil/pelosok.

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi penghambat utama perkembangan wilayah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami

yang menyebabkan secara kumulatif pembangunan daerah b
seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus sel
perhatian lebih terhadap wilayah yang masih memiliki kesuli
pergerakan ekonomi. Ekonomi Barito Selatan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir relatif berada di bawah pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Tengah dan di antara kabupaten secara keseluruhan,
yaitu berada di angka 5,56 persen.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat dilihat mela
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan
keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Produk Sedan
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku nom
menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihas
suatu wilayah/regional. Nilai PDRB yang besar men
kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga s

Dilihat dari segi ekonomi, PDRB ADHB Barito Selatan tahun 2016
menduduki urutan kesepuluh Kalimantan Tengah dengan nilai
4,48,2 triliun rupiah. Sementara untuk laju pertumbuhan e
Kabupaten Barito Selatan menduduki urutan kelima belas se
Tengah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,62 dimana masih berada
dibawah angka laju pertumbuhan Kalimantan Tengah seb
persen.

Gambar 4.1 Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam
PDRB Kalimantan Tengah 2016

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha, BPS Kalteng 20

Tabel 4.4
Perbandingan Indikator Terpilih
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2011-2016

Kabupaten /	Pertumbuh duduk (%	IPM (%	2015*	2016*
Kotawaringin	3,16	70,60	7,23	5,81
Kotawaringin T	2,41	68,61	7,62	7,95
Kapuas	0,90	66,07	7,26	7,29
Barito Selata	1,06	68,27	5,59	5,62
Barito Utara	0,78	67,38	5,20	5,48
Sukamara	4,01	65,80	6,02	6,19
Lamandau	3,03	68,30	6,74	6,75
Seruyan	4,32	64,77	5,12	5,48
Katingan	1,68	66,81	6,52	6,54
Pulang Pisa	0,67	65,76	7,80	6,06
Gunung Mas	2,31	69,24	6,96	7,00
Barito Timur	2,94	69,71	5,15	5,50
Murung Raya	2,47	66,46	6,85	5,68
Palangkaraya	3,08	78,50	7,18	6,92

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017
Ket.: * Pertumbuhan Ekonomi

Dari gambar 4.1 dan tabel 4.4 terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Teng 4,38% sementara pertumbuhan ekonomi mengalami pe kenaikan dari 5,59% di tahun 2015 naik menjadi 5, menunjukkan bahwa nilai tambah bruto seluruh barang d jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah Barito Selata dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode te stagnan atau relatif berkembang maka dapat dicermati kabupaten Barito Selatan masih bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 19,62% diikuti Pertambang Penggalian 18,56% kategori penyumbang terbesar terhadap K Pertanian antara lain Subkategori Perkebunan 3,84 se persen, Subkategori Perikanan menyumbang sebesar 30 kemudian disusul Subkategori Peternakan yakni sebesar 1 Adapun subkategori lainnya seperti Subkategori Tanama Subkategori Tanaman Hortikultura, Jasa Pertanian, serta Subategori Kehutanan dan Penebangan Kayu hanya m kontribusi masing-masing dibawah 10 persen. Sementara, terkecil dari Jasa Perusahaan 0,02% dan Listrik dan Gas 0,

Isu terhadap masih rendahnya kapasitas dan kemandirian dapat ditelaah dengan analisa data sebagai berikut

1) Belum optimalnya pengelolaan SDA Barito Selatan

Disebutkan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentu
Barito Selatan adalah sektor pertanian, kehutahan, dan
dan diikuti pertambangan dan penggalian. Meskipun memb
kontribusi yang besar dengan luas wilayah Kabupaten Barito
Selatan adalah 27.009,10 hektar, SDA belum sepenuhnya opti
dimanfaatkan. Untuk perkebunan rakyat misalnya, d
tersebut, penggunaan lahan perkebunan rakyat Barito Selatan
33.746,01 dimanfaatkan untuk 10 komoditas (atau hanya
Sementara total perkebunan rakyat di DAS Barito seluas
hektare (ha). Di Kabupaten Murung Raya seluas 52.38
komoditas, Barito Utara 57.810 (10 komoditas), Barito Timur
55.510,81 (8 komoditas). Luasan perkebunan rakyat ini tida
sebanding dengan konsesi yang diperoleh perusahaan
skala besar. Data jumlah perkebunan besar-DAS Sasta (P
Barito mencapai 98 unit dengan luas konsesi mencapai 1,25 juta

Disektor kategori Pertambangan dan Penggalian, secara
pada tahun 2016, laju pertumbuhan mengalami pertumbu
positif sebesar 3,77 persen setelah tahun sebelumnya
penurunan hingga mencapai 0,61 persen. Kenaikan ini dipicu oleh
meningkatnya Subkategori Pertambangan Batubara da
sebesar 3,57 persen yang disebabkan karena perluasan usahaan
tambang batubara di Barito Selatan sudah mulai berope
pada tahun 2015 perusahaan tersebut. Adapun Subkategori
Pertambangan dan Penggalian Lainnya hanya mampu
sebesar 5,84 persen setelah sebelumnya tumbuh hingg
6,76 persen

Hal ini menunjukkan ekonomi Kabupaten Barito selat
bergantung pada sumber daya alam (SDA). Dengan
demikian bila sektor tersebut mengalami kendala sepert
beroperasi maka akan berimbas pada perekonomin Bar
secara keseluruhan.

2) Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal

Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum diberdayakan secara
optimal dapat dilihat dari berbagai data sebagai berikut:

a) Pola pengeluaran konsumsi masyarakat
Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kese
masyarakat ialah dengan melihat pola pengeluaran

masyarakatnya. Jika persentase pengeluaran untuk non mak semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesejahteraan, begitu pula sebaliknya. Pola pengelu konsumsi makanan masyarakat Barito Selatan selama waktu 2012-2015 lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan, yakni mencapai 60 persen. Akan tetapi pada dan 2015, terjadi penurunan pola konsumsi makanan dan terjadi kenaikan pola konsumsi non makanan. Hal ini mengin bahwa adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Barito Selatan dibandingkan periode sebelumnya. Terjadi penurunan persent penduduk yang pengeluarannya diatas satu juta rupiah 2015 yakni hanya sekitar 16,38 persen. Jumlah ini leb dibandingkan dengan tahun 2014 sebelumnya dimana persentase penduduk mencapai 17,50 persen.

b) Penghimpunan dana perbankan

Selama kurun waktu 2012-2014, perkembangan dana perbankan di Barito Selatan meningkat. Dana masyarakat Barito Se yang terkumpul di Bank pada tahun 2014 yaitu sebesar triliun rupiah yang pasiannya berupa tabungan, giro, dan deposito. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,28 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Jika dilihat jenis dana yang dihimpun, jenis dana tabungan yang p nilainya yaitu mencapai 5,65 triliun rupiah. Sedangkan jenis dana giro dan deposito masing-masing sebesar 4,57 dan 2,16 tril rupiah. Meskipun demikian, perkembangan perbankan Selatan sampai dengan tahun 2017 belum sebesar kabup lainnya daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Ini bisa dilihat da share penyaluran kredit perbankan terhadap Kalimant hanya mencapai 3,45 % dibandingkan dengan Kotawari 43,90% dan kota Palangka Raya 28,13. Kita ketah besarnya penyaluran kredit perbankan ini akan kebutuhan dana bagi semua sektor usaha yang pengg akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. penyaluran kredit untuk sektor UMKM yang menjadi terbesar dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan dalam bidang ekonomi lainnya antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaa kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, p budidaya perikanan, pengembangan tata niaga ko pemanfaatan potensi tambang, dan masih terdapat lainnya i

c) Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah yang berasal dari Pendapa
Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat (Dana P
dapat dilihat melalui beberapa parameter untuk
kemampuan fiskal yaitu Indeks Kapasitas Fiskal (IKF),
Ketergantungan Daerah (TKtD) dan Produk Domestik
Bruto (PDRB).

IKF adalah indeks kemampuan keuangan melalui API
membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belan
dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Kapasitas
Fiskal (IKF) adalah penjumlahan PAD, DAU, DBH, DA
Provinsi, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dikurangi Be
Pegawai yang dibagi dengan Jumlah Penduduk Miskin.

Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) adalah rasio ant
Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Total
Daerah Rasio ini mengukur kontribusi keuangan pusat
pengembangan daerah.

PDRB digunakan untuk mengetahui size ekonomi daerah. PDRB yang
besar mengindikasi bahwa jumlah nilai barang akhir dan j
semua unit dari daerah tersebut adalah besar.

Dari analisis menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas F
kabupaten Barito Selatan sebesar 0,77. Angka ini dima
daerah ini masuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang. Nilai Tingkat
Ketergantungan Daerah (TKtD) sebesar 84% (masuk kateg
tergantung) dan jumlah PDRB sebesar 4667.895 (kategori re
Kesimpulan dari analisis ini adalah Kabupaten Barit
masuk dalam kelompok daerah dengan tingkat sangat
(Instruktif) ketergantungan fiskal dinyatakan besar atau kinerja
anggaran tidak baik.

Tabel 4.5 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan

Parameter	Nilai	Kategori
Indeks Kapasitas F	0,77	Kapasitas Fiskal
Tingkat Ketergan Daerah (TKtD)	84%	Sangat Bergantu
PDRB	4666.895	Size Ekonomi Ke

Sumber: Brook 1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kal
Disarikan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia. 2017

3. Masalah sumberdaya manusia

Di bidang sumber daya manusia permasalahan dan tanta dihadapi antara lain belum meratanya jenjang pendidikan karena kondisi wilayah yang terpencil. Di samping itu j pendidikan masih rendah dan belum mampu untuk memenuhi k peserta didik yang disebabkan keterbatasan sarana dan pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan belum memadain belajar terutama buku pelajaran, peralatan peraga pendid terbatasnya dana yang tersedia.

Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai masalah dalam dunia pendidikan, di antaranya terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya tingkat kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya muatu pendidikan. Sumber daya manusia Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Dari jumlah penduduk 1 tingkat pendidikan penduduk tidak tamat SD mencapai 2 2,67%, SLTP 9,62%%, SLTA 62,19%, SMK 4,29%%, D1 da Universitas 17,24%.

Tabel 4.6
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Barito Selata

No	Jenjang Pend	Jumlah Capaian Kin (%)			Jumlah Seluruh AP		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	SD / MI	0,048	0,043	0,04(	50	45	21
2	SMP / MTs	0,020	0,190	0,06(	21	20	21
3	SMA/SMK/MA	0,330	0,320	1,62	34	33	28

Sumber : Dinas Pendidikan

Kualitas angkatan kerja relatif masih rendah tingkat bekerja terlihat dari tingkatan pendidikan yang bekerja diberbagai sektor memiliki tingkat pendidikan dibawah rata-rata SD/sederajat.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur denga Domestik Regional Bruto (PDRB) jelas akan membawa penga kemampuan penyerapan pertumbuhan angkatan kerja ya meningkat setiap tahun, baik akibat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerj (TPAK), maupun bertambahnya tingkat setengah peng Pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun seb

untuk angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran bagaimana tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak berhasil tersera masalah yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga me tantangan karena rasio dokter umum (dokter) per jumlah penduduk relatif belum ideal karena seorang dokter umum harus mer dari 6.206 orang penduduk. Pada tahun 2016 jumlah keselu berjumlah 36 orang, untuk jumlah penduduk 181.723 jiwa, sehingga seorang dokter harus melayani lebih dari 20.688 Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan keseha idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumla dokter spesialis di, khususnya di Barito Selatan belum kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distrib dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya m ditingkatkan.

Sebagian besar penduduk Barito Selatan bermukim d perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh ler dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahny produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur ter kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tinggin kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menen saing yang akan mempengaruhi pembangunan kesej masyarakat. Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung SDM perdesaan tersebut, antara lain: (1) rendahnya k produktifitas tenaga kerja; (2) masih tingginya jum tertinggaldengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, aks akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berke kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih lemah. Sumberdaya manusia kesehatan menunjukkan bahwa Kabup Selatan masih kekurangan tenaga kesehatan. Masih kekura umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kekurangan tenaga khusus untuk wilayah kecamatan di Kota Buntok sudah cukup. Ada beberapa puskesmas di kecamatan yang masih kekur tenaga dokter yakni dokter umum dan dokter gigi serta perawat. Kalau untuk desa, tenaga kesehatannya masih bidan.

4. Masalah Pertanian

Di bidang pertanian dihadapkan pada rendahnya daya saing nilai-nilai produk-produk pertanian dan masih ketergantungan terhadap import pangan dan peningkatan keragaman pengolahan hasil pertanian yang mempunyai nilai jual yang lebih kompetitif. Walaupun memiliki beragam hewan ternak, secara umum Kabupaten Barito Selatan mengalami produksi perternakan masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kebutuhan konsumsi daging di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2005 sebesar 2.662.149 ton/tahun atau setara dengan 5,10 kg/kapita/tahun dan sebagian besar didatangkan dari luar yang mencapai 1.308,7 ton/tahun.

Perkebunan karet yang luas dan produktif saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Kapasitas terpakai industri pengolahan getah karet baru mencapai 60%. Hal ini karena bahan baku karet banyak dijual ke Banjarmasin karena adanya perbedaan harga. Jenis tanaman yang mempunyai prospek sebagai produk unggulan di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah :

a. Budidaya tanaman kopi (GB. Awai, Dusun Selatan)
b. Budidaya tanaman kelapa (sebagian terbesar di GB. Awai)
c. Budidaya tanaman jagung (sebagian terbesar di GB. Awai)
d. Budidaya tanaman karet (Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau dan GB. Awai)
e. Budidaya tanaman kelapa sawit (Dusun Utara, Dusun Selatan dan GB. Awai)

Perairan Umum, Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan panjang 900 km, di dalam alur tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau (beberapa) dan rawa, kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi serta dapat pula menjadi kawasan agrowisata seperti di Desa Saraba Kelabilah.

- Perairan Budidaya, Sarana Pendukung:
  - Kerambah percontohan di kawasan danau Mangkatip masing-masing 1 Unit
  - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Mangkatip 100 Ha
  - Balai Benih Ikan (BBI) di Pakuan Jaya GB. Awai 205 Ha
  - Stasiun Benih Ikan Lokal di Mangkatip 0.25 Ha.
  - Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) Pasar Benih di Kecamatan Dusun Selatan 0.25 Ha.

5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintaha baik

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah d optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintaha sekurang-kurangnya terdapat empat elemen yang perlu meliputi: accountability, transparancy, participation dan predictability. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pe daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Menc tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang belum terwujud, beberapa fak penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum t penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akunta kinerja yang belum memuaskan.

a. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel

Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Kabup Selatan, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa berikut:

1. Opini BPK
2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten
5. Penindakan kasus korupsi

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Provinsi Kalimantan Tengah pada Tabel 4.6

T

Tabel 4.6
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Barito Selatan 2011 Tahun 2011

Tahun	Opini BPK
2011	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Perkembangan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun terakhir dari 2016 mendapat opini yang berbeda dari BPK. Mulai dari Tidak Memberi Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian, dan wajat Tanpa Pengecualian yang baru diraih pada tahun 2016.

Sebelum tahun 2016, Barito Selatan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer atas laporan keuangan hasil audit LKPD yang dilakukan BPK. BPK tidak memberikan pendapat atau disclaimer atas laporan keuangan tersebut terjadi karena

a. Pelaksanaan SAP dan pelaporan keuangan belum memada
b. Tata kelola belanja dan pendapatan belum sepenuhnya se ketentuan yang berlaku.
c. Sistem pengendalian internal belum optimal.
d. Tata kelola aset belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, kedepan perlu merumuskan strategi yang tepat dan meningkatkan komitmen melalui berbagai lain:

1. Penguatan komitmen integritas pimpinan, para pengelol pelaksanaan kegiatan.
2. Penguatan SPIP.
3. Penguatan perencanaan dan penganggaran.
4. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan.
5. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa.
6. Pembenahan penatausahaan BMN agar tercapai 3 T Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum).
7. Penguatan monitoring dan evaluasi.
8. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu Laporan Keua
9. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaa audit Inspektorat.

Kedepan upaya untuk perbaikan dalam rangka mempertahank opini WTP, antara lain:

1. Menyusun dan menerapkan Pedoman Pengelolaan PN mengatur mekanisme proses pendaftaran jasa terintegr pembayaran PNBP secara e-payment (elektronik).
2. Memperbaiki dan menerapkan Pedoman Penatausahaa termasuk penatausahaan dan penyajian persediaan serta metode penilaian persediaan baku pembanding berdasarkan perolehannya.
3. Menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ter dilaksanakan oleh setiap satker dalam upaya mencapai kualitas Keuangan yang baik. Melalui perbaikan dan peningkat akuntabilitas kinerja program dan kegiatan opini WTP dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2016 aspek Kebebasan Sipil sebesar 84,98; aspek Hak Politik sebesar 70,66; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 68,43. Capaian IDI di Barito Selatan menggunakan data algoritma Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 s dalam skala 0 sampai 100, angka ini naik 1,31 poin di dengan IDI tahun 2015 yang hanya berada di angka 73,46 kinerja demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut m pada kategori sedang. Klasifikasi tingkat demokrasi di menjadi tiga kategori yakni baik (indeks > 80), sedang dan buruk (indeks < 60).

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan merupakan salah satu permasalahan birokrasi yang harus Begitu pula di Kalimantan Tengah, KKN harus menjadi perh oleh bidang itterkait agar jumlah kasus KKN dapat diminima Pencegahan KKN dapat dilakukan dengan fokus pada pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi menyeluru ada celah bagi aparatur negara untuk melakukan praktek KK berikut terkait bahwa Kabupaten Barito Selatan menempatkan jumlah kasus penindakan KKN yang paling tinggi yakni 15 kasus pada tahun 2015 kasus jika dibandingkan kabupaten lainnya yaitu Palangka 15 kasus; Kasongan 12 kasus; Pulpis 7 kasus; 29 kasus; dan untuk 11 Tamiang Layang 9 kasus. Kemudian, Kejari Muara Teweh 6

Cahu 5 kasus; Kuala Kurun 8 kasus; Sampit 14 kasus; Pang
kasus; Nanga Bulik 7 kasus; Sukamara 15 kasus; dan K
Pembuang 13 kasus dugaan korupsi.

4.2 Isu-isu Strategis

1. Kebijakan Internasional (Sustainable Development Goals/SDGs)

Tujuan pembangunan dalam Millennium Developmen
(MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada t
Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangk
konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca
yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan terliha
jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingk
lebih ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program
merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu s
tahun program MDGs berjalan. Konsep SDGs ini diperluk
kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua
yang terjadi pasca-MDGs 2015. Terutama berkaitan dengan perub
situasi dunia sejak tahun 2000 meliputi degradasi sumber daya
alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin
perlindungan sosial, dan energi security, pembangunan yang
lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan
menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Ada tig
menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu

Indikator pertama yang melekat pada pembangunan
(Human Development), meliputi antaranya pendidikan, kesehatan. In
kedua yang melekat pada lingkungan (Social Economic Development),
seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkung
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga m
lingkungan yang lebih berorientasi pada (Environmental Development),
ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan ya
Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs paska M
selain memikirkan standar global dalam mengedepankan s
pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang
diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terul
terlepas dari pilar Environmental Sustainability, Economic Sust
dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difoku
pada negara berkembang atau negara maju. Terdapat 17 Global Goals
yang harus dicapai hingga 2030 yaitu:

1. Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pang peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
3. Memastikan tingkatan kesehatan usia hidup, untuk semua usia
4. Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempr peluang pembelajaran untuk semua pihak.
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempua
6. Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaa sanitasi untuk semua
7. Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan en semua
8. Memdukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, peke produktif untuk semua pihak.
9. Membangun insfrastruktur yang memiliki keandalan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan mendukung inovasi
10. Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara
11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, k berkelanjutan.
12. Memastikan keberlanjutan konsumsi dan produksi
13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya
14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pant pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosiste teresterial secara berkelanjutan, mengelola secara berkelanjutan, mencegah/ menghentikan, dan mencegah degradasi lahan dan hilangnya keragaman hayati.
16. Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat mendukung pembangunan berkelanjutan, d dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada se
17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan g pembangunan berkelanjutan.

2. Kebijakan Nasional: Tema dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 2019

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar me arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada masa me adalah kebijakan dari Pemerintah. Dokumen perencana nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan

karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan serta harus mengacu pula pada RPJPN. Dalam merumu merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Pre Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada period berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sas pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional 2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan dalam misi RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga k wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan meng sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan dem berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati dir sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tingg sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang man kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebud

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut maka untuk me prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang ber politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkeprib kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesem prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap b memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun t pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpe

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, sangat memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari dunia dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas dimiliki Negara Indonesia yang terletak di wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadi Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai penyangga bara di beberapa Negara ASEAN dan juga ikut berkontribusi dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber mineral yang tinggi sebagai sumber penambangan saat ini.

3. Kebijakan Strategis Regional: Pulau Kalimantan
   1. Pengembangan Wilayah Kalimantan (Buku III- RPJMN 2015-2019: Agenda Pengembangan Wilayah)

      Pada perencanaan pembangunan nasional 2015-2019, untuk pengembangan wilayah regional Kalimantan sesuai RPJMN-2015-2019 (Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah) adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kalimantan sebagai paru-paru dunia dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau sumber daya air dengan kondisi SDA-nya masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2020-2025 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerah-nya masing-masing melalui:

1) Pengembangan hilirisasi komoditas sawit serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, kuarsa;
2) Penyediaan infrastruktur wilayah
3) Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terintegrasi dan menerus.

Adapun sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi sebesar 45% untuk provinsi dan 15% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD provinsi 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di Kalimantan; (4) Terlaksananya penghentian tebang (moratorium) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan penduduk daerah untuk jenjang S1 sebesar 30% dan S2 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat perencanaan pembangunan, keuangan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Men

implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususn pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meni persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan o daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya perencanaan dan penganggaran di wilayah Kaliman Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui p peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksa monitoring dan evaluasi dana transfer ke daerah di wilayah Kalimantan.

Sasaran penanggulangan bencana dalam mengurangi indeks resiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pon Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Ba Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yan indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfung PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pertumbuhan lainnya.
Diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilay Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan den meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) m persen (2019). Secara rinci target pertumbuhan ekono kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2010-2015 Wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut.

a. secara berkala dan berkesinambungan untuk menin kesiapsiagaan;
b. Membangun dan memberikan perlindungan bagi pr vital yang diperlukan untuk memastikan keberlan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca benc
c. Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas pengembangan Desa Tangguh Bencana di kabupaten
d. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistr logistik kebencanaan melalui pembangunan 1 (satu) u pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalima dapat menjangkau wilayah terpencil;

Sesuai dengan Buku III RPJMN 2010-2014 (Agenda Pengembangan Wilayah), beberapa program strategis di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai RPJM-N 2010-2015

Kegiatan Strategis Jangka Menengah N
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Bangkuang - Kuala Pembuang - Sampit - Kumai
2. Pembangunan Jalur KA Palangkaraya - Tumbang Samba - Sampit - Kuala Pembuang - Segintung
3. Pembangunan Jalur KA Tamiang Layang - Buntok - Banjarmasin
4. Pembangunan Jalur KA Kalahien - Muara Teweh - Puruk Cahu - Tumbang Pisau - Batanjung (Kuala Kapuas)
5. Pembangunan Jalur KA Bangkuang - Palangkaraya - Batanjung
6. Pembangunan Jalur-Pasir Mayang - Banjarmasin
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut
2. Pembangunan Bandara Muara Teweh
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Te
2. Pengembangan pelabuhan Pangkalan Bun
3. Pengembangan Pelabuhan Bangkuang
4. Pengembangan Pelabuhan Bagendang
5. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di
6. Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabu
7. Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sungai Buaya
JALAN
1. Pembangunan Jalan-Bukit Batu-Buntok-Batanjung
2. Pembangunan Jalan-Sampit-Pandaran
3. Pembangunan Jalan -Tumbang Samba-Batas Kalbar
4. Pembangunan Jembatan Tumbang Samba
ASDP
1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baok di K
2. Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru, Ke
3. Pengadaan Bus Air
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sung
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baru, Sungai
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sung
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW, di Kab. Ba
2. PLTU Kalselteng 1 100 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distrib
4. Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut
5. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Telekomunikasi dan Informatika

1. Pembangunan Serat Optik seluruh kabupaten/
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVR
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaring
2. Revitalisasi lahan rawa ex PLG
PENDIDIKAN
1. Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PA
2. Program Pendidikan Dasar : a. Peningkatan mutu. SD; b. Peningkatan mutu SMP; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tu
3. Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal : a. Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mu (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/te tunjangan fungsional non PNS)
4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal : a. Peningkatan dan keterampilan
KESEHATAN
1. Pelayanan Kesehatan Dasar : akreditasi dan kesehatan dasar
2. Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Memba kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pelayanan s Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strateg
3. Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat : a. Jaminan k pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Sehat) aga menerima PBI (JKN) dapat masuk dalam kartu Kalteng ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan dan distribusi kefarmasian
5. Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Pena Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis M Surveilans; d. Imunisasi; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pembe Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulang

Sumber : RPJMN 2010-2014 Buku III: Agenda Pengembangan Wilaya

2. Telaah RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil. Misi pembangunan jangka panjang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum integratif dan komprehensif dalam rangka peningka dukung terhadap pembangunan daerah

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, pet kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk peng agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjuta
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman mod rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya sain
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar dae khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan da saling terkait antar usaha dan antar daerah
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajara mendidik secara merata dan adil pada semua jenis dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mem peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta me rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyar kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerint dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kecepat penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemu raga di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan h serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial da masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pen ruang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, sesuai tahapan RPJPD (tahun 2005-2025), pembangunan daerah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketah ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan penekanan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian ber keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat
Dalam 5 (lima) tahun ketiga tahapan (2012-2015) prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal da peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengend sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, pet kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk peng agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar da khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daera saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum integratif dan komprehensif dalam rangka menciptakan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan res rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajara mendidik secara merata dan adil pada jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mer peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanju
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berb pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningka percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat dem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerin dan masyarakat serta penguatan partisipasi antar kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan ke penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemu raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan h serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan buday masyarakat secara berkesinambungan.

3. Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 Tahun 2015

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertu
mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah
pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri,
lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap memper
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai
5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah T
2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah

a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan pusat-pus
pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka men
pengembangan potensi provinsi;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana
yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan
provinsi;
c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dala
mendukung pengembangan pertanian;
d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung
perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
e. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yan
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akiba
pertanian dan energi;
f. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapa
strategis provinsi;
g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan k
Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah
Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
b. Sistem Jaringan Prasarana utama
c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palangka Raya di Kota Palangka Ra
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Sampit di Kabupaten
Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin B
Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabu
Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tamiyang Layang di Kabup
Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan
Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung M
Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten

Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

a. Sistem jaringan transportasi darat

1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan

Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:

- Basarang Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun Sampit sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km
- Rencana pengembangan jalan kolektor primer (K1) meliputi: Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Sanamang Tumbang Kabuau Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km
- Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor (K3) primer meliputi :
  - Jl. Tjilik Riwut Km 31 Lingkar Luar Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
  - Bawan Lahei Batekong sepanjang 261,18 Km;
  - Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangkaraya) Sebangau sepanjang 15 Km;
  - Lanjutan Jl. G. Obos Kab Pagatan sepanjang 125 Km;
  - Kereng Bangkirai Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
  - Pelabuhan Bukit Pikalampangan sepanjang 6,4 Km;
  - Simpang Sepaku (Nanga Bulik) Pangkut Rantau Pulut Kuala Kuayan Simpang Sei Batangar Parenggean Kalanaman Buntut Bali Takaras Bawan;
  - Tewah Tumbang Mi Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
  - Simpang Batap Tumpung Laung Muara Teweh;
  - Kuala Kurun Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
  - Simpang Trinsing (Muara Teweh) sepanjang 16 Km;
  - Tampa Pinang Tunggal Jahi sepanjang 40 Km;
  - Rikut Jawu (Buntok) Tabak Kanilan Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
  - Simpang Pendap Tapin Bini sepanjang 28 Km.
  - Pangkalan Bun Kotawaringin Lama Rimam Durian sepanjang 56,5 Km;
  - Palantaran Parenge-a Tb. Sanga Tb. Kalang sepanjang 90 Km;
  - Mendawai Pagatan sepanjang 39,05 Km;
  - Sp. Kenawan Rimam Durian Sukamara sepanjang 112,7 Km;

- Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur sepanjang 80 Km;
- Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Lamunti dan A5 sepanjang 94,7 Km;
- Simpang Punti – Tb. Samba sepanjang 68 K
- Sampit – Samuda sepanjang 35,38 Km;
- Patung – Hayaping – Bentot sepanjang 34,8 Km;
- (24) Km.34 M.Teweh – Benangin sepanjang 55 Km.

2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penye meliputi:

Jaringan angkutan sungai dan danau:

- Sungai Jelai: Balai Riam – Kuala Jelai;
- Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Su Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun – Sei Seberang – Tanjung Putri;
- Sungai Kumai: Pangkalan Bun – Kumai;
- Sungai Belantikan: N. Bayat – Belantikan;
- Sungai Lamandau: Tapin N. Bi – Belantikan – N. Bulik Kotawaringin Lama – Mendawai Seberang;
- Sungai Seruyan: Mojang Rabau – Pulau Asam Baru Pembuang Hulu – Telaga Pulang Kuala Pembuang;
- Sungai Tualan: Kota Baru (Pandegase) – Manjalipan;
- Sungai Mentaya: Tb. – Kuala Kuayan – Manjalipan – Kotabesi – Sampit – Bagendang – Samuda;
- Sungai Cempaga: Pantai – Cempaga – Muara Kota Besi;
- Sungai Katingan: Bukit Raya – Saman Mantikei dan Kecamatan Petak – Tabla – Senamang – Tumbang Hiran – Tb. Samba – Pendahara – Kasongan – Baun Bang – Mendawai Pagatan;
- Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangka – Palangka Muara Sebangau;
- Sungai Kahayan: Tb. Tewah – Kuala Kuruan – Sepang Simin Bukit Liti – Palangkaraya
- Pulang Pisau – Mulik – Pangkoh – Bahaur;
- Sungai Rungan: Tb. – Tarikan – Tangkiling – Palangka Raya;
- Sungai Kapuas: Sei – Hanyo – Tanjung – Timpah – Mantangai Mandomai – Kuala Kapuas – Kapuas Hulu – Dalam;
- Sungai Barito: Puruk Cahu – Tewah – Montalat – Buntok Bangkuang – Mengkatip
- Telang Banjar – Tatas – Banjarmasin;

- Anjir Serapat: Banjarmasin;
- Anjir Kelampan: Pulang Pisau;
- Anjir Basarang: Kuala Kapuas;
- Terusan Raya: Kuala Kapuas; dan
- Terusan Hantipan: Pulau Hanaut.

Jaringan angkutan penyeberangan :

- Kumai Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk
- Bahaur Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- Kumai Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- Bahaur Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian

- Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi
- Jalur kereta api Puruk Cahu Batanjung;
- Jalur kereta api Puruk Cahu Kuala Kurun Rabambang Palangka Raya Pulang Pisau Kuala Kapuas;
- Jalur kereta api Rabambang Tumbang Samba Sampit Kuala Pembuang Teluk Segintung;
- Jalur kereta api Tumbang Samba Sanaman Mantikei Nanga Bulik Pangkalan Bun Kumai; dan
- Jalur kereta api Kuala Pembuang Nanga Bulik Kumai.

2) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur dengan:

- Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangkaraya Banjarmasin;
- Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Buntok Muara Teweh Tanjung; dan
- Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Banjarbaru Kuala Kapuas, Palangka Raya Sampit Pangkalan Bun, Pangkalan Bun Sanggau.
-

3) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api di Kalimantan Tengah meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala

Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (K
Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Ranta
(Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katinga

c. Sistem jaringan transportasi laut;
Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :
- Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin T
- Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau

d. Sistem jaringan transportasi udara.
Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
a. Rencana sistem jaringan energi atau kelistrikan;
1) Pembangkit Tenaga Listrik;
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) B
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupa
Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruy
Kabupaten Kapuas;
Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di
Barito Utara;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (
Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (P
Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utar
Lamandau;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (
Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, K
Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito U
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin
Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin
Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapu
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar
di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan
khususnya di desa terpencil yang sulit dijangkau
jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi l
angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik

meliputi;

- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi KV Palangka Raya Kuala Kurun Sampit; Sampit Pangkalan Bun; Pangkalan Bun Kumai; Pangkalan Bun Nanga Bulik;
- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi KV dari Bangkanai Muara Teweh Buntok Palangka Raya;
- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi KV Muara Teweh Puruk Cahu Kuala Kurun Kasongan dan Puruk Cahu Muara Juloi;
- Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten S Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
- Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Me Gardu Induk menuju pusat beban di seluruh Kabupaten/K seKalimantan Tengah Perluasan jaringan tegangan rendah jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pen seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

3) Gardu Induk, (terdiri dari pembangunan Gardu Induk (GI) d Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan P

4) Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) meliputi: Depo BBM di Pulan Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiya Murung Raya, Pangkalan Bun, Mukatiang Raya dan Buntok

5) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi meliputi: Jaringan pipa tranmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan Pontianak Palangka Raya Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari:

1) Sistem Jaringan Backbone;

Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem K Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur L

2) Remote Metro Junction (RMJ)

Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio

3) Sistem Jaringan Akses

Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, dan VSAT (Very Small Aperture) Terminal

c. Rencana sistem sumber daya air meliputi:

1) Wilayah Sungai (WS) meliputi

a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi:

Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai; Wilayah Sungai (WS) terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;

b) Wilayah Sungai Strategis Nasional meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.

c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:
Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS dan Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ, meliputi:
a) Bendung Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tamunga, Talohen, Natampin, Baruh Rin Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendu Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Barito Kabupat Selatan;
b) Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bend Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan S Kabupaten Lamandau;
c) Embung Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Saba Kabupaten Barito Selatan, Embung Ateuh di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, da Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
d) Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Medar, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupunda Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Bari Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di K Katingan, Danau Sarau, Danau Bawang, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasa Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Ti Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Da Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
e) Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau

3) Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Raw terdiri dari;

- Daerah Irigasi (DI)
  a) Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.29 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katinga luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Meny Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.

b) Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi, meliputi:
- Kabupaten Barito Timur, yaitu:
  - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
  - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
- Kabupaten Barito Utara, yaitu DI Pelayan (luas 3.000 Ha).
- Kabupaten Katingan, yaitu:
  - DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
  - DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)

c) Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten:
- Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
- Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 2
- Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi de pelayanan 1.000 Ha
- Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi deng pelayanan 400 Ha
- Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan pelayanan 750 Ha
- Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi deng pelayanan 631 Ha
- Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi deng pelayanan 3.750 Ha
- Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
- Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas 1.800 Ha

Daerah Rawa (DR)

a) Daerah
.925 Ha/13 lokasi) DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelay
Ha/7 Lokasi),

Daerah Rawa Tambak Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau , dan Kabupaten Barito Timur, meliputi:
DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lok
DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48
lokasi Kecamatan)

DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha
DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 l
DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 H
PLG).

b) Daerah Rawa Kewenangan, meliputi:
DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lok
DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.00
lokasi)
DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lo
DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lok
DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69
36 lokasi)
DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lo
DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 2.711 Ha/1 lokasi)
DR di Kabupaten Kotawaringin Timur

4) Pengamanan Pantai, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaanprasarana dan sarana pengaman pa berada di sepanjang 751 Km, meliputi:
- pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Caban Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Sei Baru),
- pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa K Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, Teluk Bogam);
- pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
- pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran);
- pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); d
- pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pant Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).

5) Instalasi Pengolahan Air, meliputi:
- Penyediaan dan pengelolaan bahan baku meliputi air permukaan d air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan s dan pertanian, meliputi:
- Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamanda Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentay Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Bar sungai Kapuas beserta anak sungai
- Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah ya di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah den yang sudah terbangun sebanyak 1 lokasi di Kabupaten

6) Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemel prasarana dan saranapengendalian banjir, yang Pengendalian Banjir dan Pengamanan Tebing Longsor Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun rencana pola ruang pada kawasan budidaya meliputi atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
   1) Hutan produksi terbatas (HPT) seluas ±3.335.571 Ha y di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
   2) Hutan produksi tetap (HP) seluas ±3.896.706 Ha yang seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
   3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) deng ±2.258.274 Ha tersebar di untuk lahan kelola masyara seluas ±624.101.04 Ha yang tersebar pada 377
b) desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi K Tengah.

b. Non kawasan hutan seluas ±2.629.779 Ha dengan peruntukan s berikut:

1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
   a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) de +187.814,65 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah;
   b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan deng 178.572,86 Ha dimana
   c) didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan sel 64,001,81 Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah;
   d) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura selua Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
   e) Kawasan Tanah Adat tersebar di Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
      Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang ses fungsi peruntukannya, merupakan kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya d lanjut dengan Peraturan Gubernur.
   f) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ad permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.0

dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Kalimantan Tengah.

2) Kawasan Peternakan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
3) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4) Kawasan peruntukan perikanan seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan dan seluas 134.810 Ha di perairan (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
5) Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
   a) Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah; dan
   b. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara.
6) Kawasan peruntukan pariwisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013-2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata manusia.
7) kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
   a) Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang tersebar seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
   b) Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
8) Kawasan peruntukan transmigrasi tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
9) Kawasan peruntukan technopark perkebunan, technopark pertambangan, technopark perikanan, technopark kehutanan, technopark pertanian, technopark peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

10) kawasan peruntukan lainnya, yaitu:
   a) Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan p
      yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota d
      Kalimantan Tengah;
   b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan
      untuk latihan militer (TNI) dan kepentingan pemeliharaan
      pertahanan dan keamanan Negara berupa satuan kewilayahan
      nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di
      Palangka Raya; dan
   d) Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Ko
      Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Pr Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral batuan dan batubara yang dikelompokan menjadi wilay pertambangan (WUP) dengan luas lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalima dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pe rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta ka peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan

b. kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energ Kabupaten/Kota.

4. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalah mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu strategis pembangunan baik isu internasional, kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi serta telaa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan akse wilayah

Pembangunan daerah merupakan pengembangan setiap lin masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehid sehari-hari. Hasil dari pembangunan daerah yang paling se dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lainnya, hingga masyarakat yang tumbuh dalam kesejahteraan. Oleh karena i untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, pe penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infra yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dengan kualitas dan kapasitas ya memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mend konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat da memperluas pembangunan ekonomi. Dalam upaya peningkatan aksesibilitas wilayah adalah dengan membangun infrastruktur efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluste pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komo daerah. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memada akan memperlancar konektivitas, biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terp infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, ener dan kelistrikan secara merata adalah salah satu kendala utam pembangunan Kabupaten Barito Selatan harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang

2. Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fak dalam melaksanakan reformasi global pembangunan Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam mencipt yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pem Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa unt saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemaj kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekon Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan membuat Kabupaten Barito Selatan siap menghadapi segala tantangan globalisa mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan

SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempat
SDM Kabupaten Barito Selatan setara dengan kota lain di Indonesia.
Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kanc
maupun Internasional. Efek lain dari peningkatan kualitas
pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito
Selatan menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga
kerja lokal sehingga penyerapan tenaga kerja yang berasa
Kabupaten Barito Selatan dapat diminimalisir.

Realisasi potensi sumber daya manusia yang telah mer
kerja di Kabupaten Barito Selatan masih jauh dari harapan pemerinta
daerah. Namun demikian tingkat Pengangguran di Kabupaten Barito
Selatan menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 201
tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,9 persen. Dari besaran angka
pengangguran ini, yang perlu digaris bawahi adalah kualitas
daya manusia yang menjadi tenaga kerja baik berusah
berusaha dibantu pekerja, maupun buruh/karyawan/
terindikasi masih memiliki daya saing yang rendah.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Selatan
hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD atau belu
bahkan ada yang tidak sekolah yakni sebesar 34,28 persen. Sedangkan
tenaga kerja yang sekolah hingga tingkat perguruan tinggi hanya sebesar
12,27 persen, yakni yang memiliki pendidikan Diploma I/II/III d
jenjang S1/S2/S3.

Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat m
jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusi
secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga k
daerah maupun luar daerah. Namun, pemerintah tidak bol
berpacu pada pendidikan formal saja dalam peningkata
sumber daya manusia maupun tenaga kerja ini, aka
pendidikan non formal seperti keterampilan khusus secara
memberi poin tersendiri pada peningkatan kualitas sumb
manusia.

3. Pengelolaan SDA dan LH melalui optimalisasi Investasi

Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang merupakan
wilayah tropis sekaligus memiliki sumber daya alam yang
Kabupaten Barito Selatan potensi meningkatkan daya duku
perkembangan perekonomian melalui penggalian sumber day

alam berbasis lingkungan hidup. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Barito Selatan dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas daya manusia maupun infrastruktur.

4. Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh

Good governance dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan atau pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait dengan nilai yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Mewujudkan Good Governance (tata kelola pemerintahan) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, kelembagaan, dan lembaga dimana warga atau kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat dipengaruhi dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi atau berkaitan dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dan kerjasama dalam rangka tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur merata, dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu aktor pemerintah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta yang berkembang dari kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang sehingga peran ini harus dijalankan dengan amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Selain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama pada pengembangan perekonomian melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa meninggalkan atau merusak kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya hutan yang selama ini menjadi

pendukung utama pembangunan daerah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memberikan manfaat kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya perlu dilanjutkan antara lain: optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan oleh semua sektor pada wilayah rawan kebakaran dan hutan; optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi dan hutan dengan tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis; perlindungan hukum bagi pelaku pembakaran dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi; pengembangan sumber benih dan usaha pembibitan tanaman hutan; peningkatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan efektifitas kawasan konservasi.

5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyeluruh pada aspek-aspek yang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan masyarakat dapat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan terdongkrak dan berkembang sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Perlu adanya perlakuan khusus pada Kabupaten Barito Selatan memeratakan hasil pembangunan sebagai sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat. Akses wilayah yang cukup sulit di wilayah menjadikan hambatan tersendiri bagi Kabupaten Barito Selatan untuk berkembang. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak leluasa memenuhi pembangunan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki di setiap wilayah. Oleh pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumah yang khusus

hal peningkatan aksesibilitas, baik di internal Kabupaten Barito Selatan maupun dengan daerah Kabupaten Barito Selatan

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran berisi tentang uraian untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumus dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pe jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang diteta RPJP.D

Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebaga dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian mendapatkan dokumen perencanaan yang lebih baik dan selaras dengan Manajemen Pemerintahan, maka Visi dan Misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat difokuskan sec dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka P Daerah (RPJPD), maka Tahun 2017 adalah merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profes Beriman dan Bertaqwa. Oleh sebab itu, rumusan Visi, Misi, dan Program Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 2022, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan perc pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah K Barito Selatan Tahun 2006-2026.

5.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ev Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pera Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta T Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana pemerintah daerah diatur bahwa yang dimaksud dengan

adalah rumusan umum mengenai kedaan yang diharapkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi yang dirumuskan untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Visi Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan saat Pilkada.

Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih 2012-2017, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

> TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA MAJU MANDIRI, SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN SEJAHTERA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA

Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu: 1) Maju; 2) Mandiri; 3) Sejahtera, dan 4) Daya Saing yang bertujuan untuk mencapai Barito Selatan yang MANTAP (Maju, Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu) sebagaimana yang digambarkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 5.1
Hubungan Elemen Visi

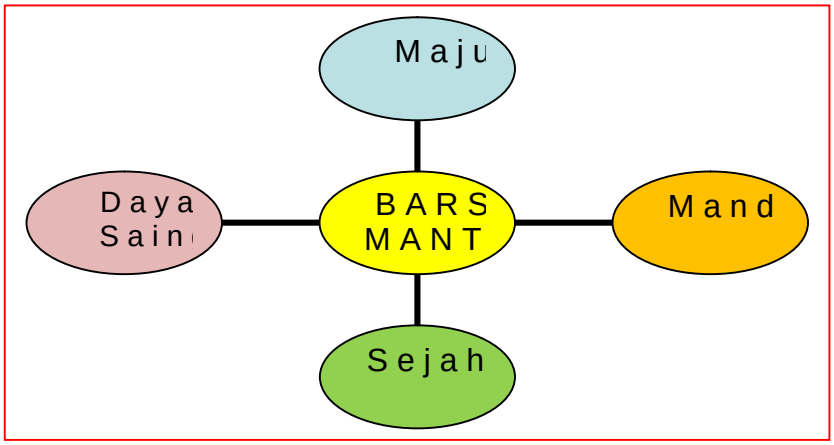

Barito Selatan yang MAJU, MANDIRI, AMAN, Tertata, dan Padu)

Adapun yang dimaksud Terwujudnya Barito Selatan

Sebagai Daerah Yang DAMAI MANDIRI, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat SEJAHTERA SECARA MERATA:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang siginifikan.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk pengurangan pengangguran terbuka
5. Meningkatnya kualitas hiduo manusia dengan terpenuhi-nya hak hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup
6. Tercapainya pemerataan untuk meni-kmati hasil pembangunan

Adapun yang dimaksud Kabupaten Barito Selatan yang memiliki DAYA SAING dan IMAN DAN TAQWA:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan hubungan yang harmonis antara manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat.

5.2 MISI

Misi merupakan upaya umum atau cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Visi. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh stakeholder pembangunan yang dirumuskan kedalam 5 (lima) Misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain) dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pe

dan pengamalan agama yang balk untuk menjadi masyara sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkota pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Day Alam dengan menggerakkan sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi..
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpa dalam membangun daerah Barito Selatan menuju masyarakat lebi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidup budaya dan adat istiadat daerah.
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah dan lembaga pelayanan kepada masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintah daerah yang baik dan akuntabel.

Misi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2012-2017 tersebut di atas, memiliki keterkaitan dan konsistensi de Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021), sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan dan Konsistensi Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Tahun 20

	Misi RPJMD BARSEL 2017-2022	Misi RPJMD KALTENG 2016-2021
1	Misi 1: Membangun dan membenahi (jalan, jembatan, listrik, air sampah, ruang terbuka hijau) dalam menunjang pelayanan transportasi, pengentasan penangguran.	Misi 1: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Misi 2 Mempercepat kecukupan sarana umum secara integratif dan k rangka peningkatan daya d pembangunan daerah. Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air,
	Misi 2: Meningkatkan kualitas hi Barito Selatan melalui pe pelayanan kesehatan, kua dan pengamalan agama y menjadi masyarakat yang bermartabat dan berakhla	Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehat Pariwisata

	Misi RPJMD BARSEL 2012-2017	Misi RPJMD KALTENG 2016-2021
	Misi 3: Mewujudkan kemandirian masyarakat di perkotaan dan yang berbasis Sumber Daya Sumber Daya Alam dengan sektor-sektor ekonomi lokal pasar dan infrastruktur ekonomi..	Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertu Pengentasan Kemiskinan Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup Alam Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daer
	Misi 4: Menciptakan rasa keber kesempatan berpartisip membangun daerah Barito lebih maju bagi seluruh e dengan tetap menjaga ke budaya dan adat istiadat	Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Peme
	Misi 5: Menghadirkan keberadaan daerah sebagai lembaga public dengan membangu pemerintahan daerah ya akuntabel.	Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Peme

Adapun penjelasan-masing misi tersebut di atas diuraika sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembata sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, peng kemiskinan dan pengangguran adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listr dan kecamatan dengan pembangunan instalasi kelistrik dikelola secara mandiri di desa yang jauh dari jaringan listrik dan penyediaan perumahan sederhana dan sehat masyarakat berpenghasilan rendah; penyelesaian dan penuntasan pembangunan ruas jalan provinsi, kabu jembatan dan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendid pengamalan agama yang balk untuk menjadi masyarak sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berda tinggi; meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan melalui pelayana

puskesmas 24 jam lengkap rawat inap di setiap satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan membangun sekolah unggulan berstandar nasional, meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas 5 se Kalimantan Tengah.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan disparitas perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Alam dengan menggerakkan sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung daerah, meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan, terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; menyiapkan dan menata pertanian rakyat; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi, melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam, meningkatkan ekspor non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah dan potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa, memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju, seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan budaya dan adat istiadat, dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat, mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan yang harmonis dan demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar, dalam keselarasan adat dengan tetap menghayati dan terhadap nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri identitas masyarakat, yang berarti kehilangan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai pelayanan publik dalam membangun tata kelola pemerintah daerah yang baik dan akuntabel melalui peningkatan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga mengembangkan dan meningkatkan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara daerah keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program terkait.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, menjawab isu strategis daerah, permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan diatas, dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022 sebagai diuraikan sebagai berikut:

A. VISI Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan

TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MANDIRI, SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DISEMUA LINI DAN MERATA DILANDASI IMAN DAN TAQWA

B. Rumusan Tujuan dan Sasaran yang merujuk pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, maka telah dirumuskan 5 (lima) MISI Pembangunan. Masing-masing MISI Pembangunan terdiri dari minimal satu atau Tujuan Pembangunan, dan dari masing-masing Tujuan Pembangunan terdiri dari beberapa Sasaran Pembangunan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang telah ada, dirumuskan sebanyak 16 (lima) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 41 (Empat Puluh satu) Sasaran Pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

1) Misi 1 : Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan Haain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu:
   1. Tujuan pertama pada Misi 1 adalah Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang, jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, terdiri dari 5 Sasaran Pembangunan yaitu :
      1.1 Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
      1.2 Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan
      1.3 Meningkatnya cakupan layanan air minum

1.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah lay dengan lingkungan bersih dan sehat.
1.5 Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi pengembangan sektor pertanian
1.6 Pencapaian Kawasan dan Kumuh.
1.7 Sanitasi Layak.

2) Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ku pendidikan dan pengamalan agama yang untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan bera mulia.Terdiri dari (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 10 (sepuluh) Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Tujuan Pertama pada Misi 2 adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan, terdiri dari (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
   1.1 Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
   1.2 Menurunnya angka kematian bayi
   1.3 Menurunnya angka kematian ibu
   1.4 Menurunnya angka gizi buruk
   1.5 Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

2. Tujuan Kedua pada Misi 2 adalah Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan, terdiri dari (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
   2.1 Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pend
   2.2 Meningkatnya akses dan layanan pendidikan masyarakat
3. Tujuan Ketiga pada Misi 2 adalah Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah , terdiri dari 1 Sasaran Pembangunan yaitu:
   3.1 Meningkatnya Pembinaan bagi tokoh agama dan toko masyarakat

3) Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyaraka perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya M dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pend

ekonomi. Terdiri dari 9 (sembilan) Tujuan Pembangunan dengan 20 (Dua Puluh) Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Tujuan Pertama pada Misi 3 Mendorong pembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat , terdiri 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:
   1.1 Meningkatnya Produksi hasil Pertanian.
2. Tujuan Kedua pada Misi 3 Mendorong pembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat , terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:
   2.1 Meningkatnya produksi Hasil perikanan
   2.2 Meningkatnya konsumsi Ikan
   2.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Tujuan Kedua pada Misi 3 adalah Mendorong pembangkan sektor Ketahanan Pangan yang menopang perekonomian masyarakat , terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:
   3.1 Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan
   3.2 Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Kapital
   3.3 Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan
4. Tujuan Ketiga pada Misi 3 adalah Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber, daya lokal (ekonomi) Sasaran Pembangunan yaitu:
   4.1 Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim in
   4.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
   4.3 Menurunnya angka kemiskinan
   4.4 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
   4.5 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
   4.6 Meningkatnya daya beli masyarakat.
5. Tujuan Keempat pada Misi 3 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM , terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
   5.1 Meningkatnya peran kelembagaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan ekonomi lokal.
   5.2 Meningkatan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kayu Manis, Lada, Nanas Parigi dll).

6. Tujuan Kelima pada Misi 3 Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan, terdiri dari 1 (satu) S Pembangunan yaitu:
   6.1 Meningkatnya pendapatan daerah terutama pening Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. Tujuan Keenam pada Misi 3 Meningkatnya kunjungan wisatawan, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan
   7.1 Terpasarnya pariwisata daerah.
8. Tujuan Ketujuh pada Misi 3 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekakayan alam Barito terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
   8.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekon daerah.
   8.2 Meningkatnya sektor ekonomi hijau.
9. Tujuan Kedelapan pada Misi 3 Meningkatkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya a lestari, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yait
   9.1 Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidu
   9.2 Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

4) Misi 4 : Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempat berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah. Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dan 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu:
1. Tujuan Pertama pada Misi 4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
   1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengg hak pilih.
   1.2 Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokum Kependudukan (KTP, KK, dll).
2. Tujuan Kedua pada Misi 4 Membangun pondasi yang kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan seja terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:
   2.1 Meningkatnya peran pemuda.
   2.2 Meningkatnya prestasi olah raga.

3. Tujuan Ketiga pada Misi 4 adalah Melestarikan dan menegakkan nilai budaya lokal yang menjadi ci masyarakat Barito Selatan, dari tiga 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:
   3.1 Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah

5) Misi 5 : Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah s lembaga pelayanan publik dengan membangun tata k pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 6 (enam) Sa Pembangunan yaitu:
   1. Tujuan Pertama pada Misi 5 adalah Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, terd (enam) Sasaran Pembangunan yaitu:
      1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daera
      1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
      1.3 Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksa pembangunan daerah.
      1.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
      1.5 Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
      1.6 Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.

Selanjutnya untuk keterkaitan antara visi, misi, tujuan, d sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 5.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan

Visi: Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2016)	TARGET TAHUN					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1: Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam mendukung pelayanan publik, transportasi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang berdaya memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah.	1.1 Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang mantap dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap	421,6	421,6	463,8	510,2	561,2	617,2	679,0
		1.2 Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	90	90	100	100	100	100	100
		1.3 Meningkatnya cakupan layanan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,5	55,5	61.05	100	100	100	100
		1.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan yang sehat.	jumlah rumah layak huni (unit)	28.065	28.06	28.31	28.56	28.81	29.06	29.31
		1.5 Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Rasio jaringan irigasi (Ha)	421,6	421,6	463,8	510,2	561,2	617,3	679,0
		1.6 Pecpaian Kawasan Kumuh	Rasio Kawasan Kumuh	15	10	5	0	0	0	0

		1.7	Sanitasi Lay	Rasio Kawas Sanitasi Lay	65	85	90	100	100	100	100
Misi 2: Meningkatkan kualita masyarakat Barit melalui peningka pelayanan keseh kualitas pendidik pengamalan agar balk untuk menja masyarakat yang mandiri, bermart berakhlak mulia	2. Meningkatkan der kesehatan masyar Selatan	2.1	Meningkatk harapan hic masyarakat	Angka Harap Hidup (tahur	69,54	70,50	70,90	71,40	72	72,75	72,75
		2.2	Menurunnya angka kema bayi (Per 1.0 Kelahiran H	Angka Kelangsunga Bayi (AKB)	6	6	5,5	5	5	4,5	4,5
		2.3	Menurunnya angka kema ibu (Per 100. Kelahiran H	Angka Kema (AKI) per 10 kelahiran hi	89	89	89	89	89	45	45
		2.4	Menurunnya angka gizi	Prevalensi g	5%	4%	4%	3,5%	3,5%	3%	3%
		2.5	Meningkatn pemakaian kontrasepsi	Jumlah pema kontrasepsi							
	3. Meningkatkan kua kuantitas pendidik masyarakat Barito	3.1	Peningkata Kualitas Gu pada semua jenjang pendidikan	Jumlah pela DIKLAT, dan							
		3.2	Meningkatn akses dan p pendidikan masyarakat	Angka melek	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99,5	99,5
				Rata-Rata Lama Sekolah (tah	12	12	12	12	12	12	12
	4. Meningkatkan per tokoh agama dan masyarakat dalan mendorong keruku ketentraman daera	4.1	Meningkatn pembinaan tokoh agam tokoh masy	Cakupan tok agama dan t masyarakat memperoleh pembinaan (							
Misi 3: Mewujudkan kem ekonomi masyara perkotaan dan pe yang berbasis Su Daya Manusia da Daya Alam denga	5. Mengembangkan pertanian yang me perekonomian mas	5.1	Meningkatn Produksi ha pertanian	BIDANG TAN PANGAN							
				Jumlah Produktivita Tanaman P:a							

menggerakkan sektor ekonomi lokal, pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi			Padi Sawah	35,40	36,83	36,97	37,07	38,50	39,25	40,13
			Padi Ladang (Ku/Ha)	20,06	28,07	28,50	28,75	28,90	29,03	29,32
			Jagung (Ku/	25,60	50,00	55,20	60,00	60,50	70,00	70,60
			Kedelai (Ku/	12,70	13,00	13,20	13,30	13,40	13,50	13,60
			Ubi Kayu (Ku	129,00	161,1	162,1	162,2	162,7	162,7	162,9
			Ubi Jalar (K	100,90	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5
			Kacang Tana (Ku/Ha	10,06	10,10	10,14	10,25	10,35	10,40	10,45
			Jumlah Prod Tanaman Pa							
			Padi Sawah	18.593	19.151	19.726	20.318	21.130	22.187	23.074
			Padi Ladang	1.758,1	2.769,	2.907,	3.053,	3.205,	3.366,	3.518,
			Jagung (Ton	92,01	1.000	2.208	3.600	4.840	7.000	8.472
			Kedelai (Ton	18,00	26,00	30,36	33,25	35,51	37,80	40,80

			Ubi Kayu (K	24.510	25.735	27.022	28.373	29.792	31.281	32.845
			Ubi Jalar (K	8.720,	9.156	9.613	10.094	10.599	11.129	11.685
			Kacang Tana (Ku/Ha)	70,40	100,0	130,7	150,5	170,6	200,0	220,5
			Luas Panen Tanaman Pa							
			Padi Sawah	5.252,5	5.200,	5.335,	5.481,	5.488,	5.652,	5.750,
			Padi Ladang	876,49	1.479,	1.530,	1.592,	1.663,	1.739,	1.200,
			Jagung (Ha)	35,94	200,0	400,0	600,0	800,0	1.000,	1.200,
			Kedelai (Ha	14,17	20,00	23,00	25,00	26,50	28,00	2,50
			Ubi Kayu (H	190,00	159,7	166,6	174,9	183,1	192,1	201,6
			Ubi Jalar (H	86,42	90,65	94,72	98,97	103,4	108,0	1.129,
			Kacang Tana	7,00	9,90	12,90	14,69	16,48	19,23	21,10
			Jumlah Prod Tanaman Hortikultura							

			Buah-buahan (Ton/Pohon)	145,40	3.083,4	3.145,8	3.302,1	3.467,2	3.641,5	3.713,9
			Sayuran (To	429,90	667,9	691,8	726,3	762,7	800,8	840,8
			Tanaman Ob (Ton/Ha)	3,99	4,39	4,83	5,31	5,84	6,43	7,07
			Jumlah Produktivita Tanaman Hortikultura							
			Buah-buahan (Ton/Ha)	0,60	5,19	5,45	5,72	6,01	6,31	6,62
			Sayuran (To	1,25	1,34	1,36	1,40	1,41	1,46	1,53
			Tanaman Ob (Ton/Ha)	1,08	1,18	1,28	1,38	1,48	1,58	1,70
	6. Mengembangkan perikanan yang m perekonomian mas	6.1 Meningkatn produksi hasil perikanan	Produksi Perikan	6.185,4	6,309,4	6,435,8	6,564,5	6,695,8	6.829,4	6.829,4
			Cakupan bina kelompok nela							
			Jumlah Kelom Budidaya/Nela Yang di Bina	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	64,00	64,00
			Jumlah Petug Mengikuti Dik Teknis (Org)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

			Produksi Hasil Budidaya: Ikan							
			Kolam Ikan	2.467,1	2.517,	2.567,	2.618,	2.671,	2.724,	2.724,
			Keramba dan	4,791,2	4,887,	4,984,	5,084,	5,186,	5.289,	5.289,
		6.2 Meningkatnya Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan/Kapita/ (Kg)	40,58	41,39	42,21	43,05	43,91	44,79	44,79
		6.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kesadaran Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Lestari							
			Jumlah Pokmas Yang Di Bina	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00
			Jumlah Penanganan Kasus Ilegal (Kasus)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (K	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
			Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber DayaPerikanan							
			-Reservaat (	-	-	3,00	8,00	12,00	16,00	20,00

				-Restocing (	-	-	450.0	1.200.	1.800.	2.400.	3.000.
				-Rehabilitas Revitalisasi (Buah)	-	-	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0
		7. Mengembangkan Ketahanan Pangan menopang perekor masyarakat	7.1 Ketersediaa pangan uta dan Cadang Pangan	Ketersediaan pangan utam Cadangan Pa							
				Penguatan Cadangan Pa (%)	60,00	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	64,0
				Informasi Pasokan, Har Akses Panga daerah %	90,00	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	94,0
				Stabilitas Ha Pasokan Par	90,00	90,0	95,0	92,0	93,0	94,0	94,0
				Skor Pola Pa Harapan (PP Masyarakat	94,00	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0	98,0
				Penanganan Kerawanan P (%)	60,00	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	64,0
			7.2 Mengemban Ketersediaa Energi dan Perkapital	Ketersediaan Energi dan P Perkapital	90,00	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	94,0
			7.3 Meningkatn Pengawasa pembinaan keamanan p	Pengawasan pembinaan keamanan pa	70,00	70,00	71,0	72,0	73,0	74,0	74,0

	8. Meningkatkan in daerah yang berb daya lokal	8.1	Terciptanya pranata huk yang mendo iklim invest	Jumlah Perd mendukung i usaha	8	8	8	8	8	8	8
		8.2	Meningkatn pemerataan kesejahtera masyarakat	Angka Indek Rasio	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,32
		8.3	Menurunnya angka kemi	Angka Kemis (%)	5,4	5,4	4,65	3.91	3,17	2,43	2,43
		8.4	Meningkatn investasi ya mendorong penciptaan lapangan ke	Laju Pertum Investasi (%	25	25,55	30,76	32	34,25	36,5	36,5
		8.5	Meningkatn partisipasi angkatan ke	Angka partis angkatan ke	4,1	4	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5
		8.6	Meningkatn daya beli masyarakat	Laju pertumb Ekonomi	7,1	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8	7,8
	9. Meningkatkan per masyarakat yang kepada pengemb koperasi dan U	9.1	Meningkatn peran kelembagaa permodalan UMKM dalar pengembang ekonomi lok	Persentase UMK aktif (%)	80	85	87	89	91	95	95
		9.2	Meningkata daya saing pemasaran produk ung daerah (Ro Karet, Kerb Rawa, Nena Parigi dll)	Stabilitas Ha Jual Produk Unggulan Da							

	10.	Meningkatkan kem pembiayaan pemb	10.1	meningkatn pendapatan daerah teru peningkatar Pendapatan Daerah (PA	Kenaikan Pendapatan						
	11.	Meningkatnya kun wisatawan	11.1	Terpasarny pariwisata	Jumlah wisa (%)	27	30	35	37	40	40	45
	12.	Meningkatkan kon sektor pariwisata perekonomian wila sekaligus pelesta budaya dan kekak Barito Selatan	12.1	Meningkatn kontribusi pariwisata perekonomi daerah	Kontribusi s pariwisata terhadap PD (ribu Rp)	568.009	568.00	575.30	582.70	594.70	598.00	668.00
			12.2	Meningkatn sektor ekor hijau								
	13.	Mewujudkan pemb yang berbasis per sumber daya alam lestari	13.1	Meningkatn ketaatan pengelolaar lingkungan	Persentase pengaduan n akibat adany dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan h yang ditinda (%)	70	70	72,5	80	83	85	85

		13.2	Terealisasi perencanaa tataruang y akomodatif konsisten								
Misi 4: Menciptakan kebersamaan kesempatan ber dalam membangu Barito Selatan y maju bagi selur masyarakat deng menjaga kehidup budaya dan ada daerah.	14. Meningkatkan par masyarakat dalam pembangunan	14.1	Meningkatn partisipasi masyarakat dalam menggunaka pilih	Partisipasi h pilihnya pad Pemilu	85	85	87	89	90	90	90
		14.2	Meningkatn cakupan kepemilikan Dokumen Kependuduk (KTP, KK, d	Dokumen Kependuduka							
	15. Membangun pondasi kuat bagi penyiap dalam pembangun dini	15.1	Meningkatn peran pemu	Cakupan Pembinaan Lembaga per (%)	25	27	35	40	43	47	47
		15.2	Meningkatn prestasi ola	Persentae p olah raga (%	15	20	25	30	35	35,5	35,5
	16. Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang ciri masyarakat B	16.1	Meningkatn perlindunga hak adat da tanah adat	Persentase yang diterbi	26,25	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5
Misi 5 Menghadirkan ke pemerintah daera lembaga pelayan dengan membang kelola pemerinta yang baik dan ak	17. Meningkatnya kap akuntabilitas kine pemerintahan	17.1	Meningkatny kualitas pengelolaan keuangan d	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		17.2	Meningkatn kualitas pelayanan	Indeks Kepu Masyarakat		82	84	86	88	88	88

		17.3	Meningkatn kinerja dan akuntabilita pelaksanaa pembangun daerah	Hasil penila mandiri pelaksanaan reformasi bi		65	75	80	85	85	85
		17.4	Nilai Akunt Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil peniai kinerja peme daerah	C	B	BB	BB	BB	A	A
		17.5	Predikat penyelenggara pemerintah daerah	Hasil predik penyelenggara pemerintaha	B	B	BB	BB	A	A	A
		17.6	Meningkatn pengawasan bidang pemerintah	Temuan Insp Kabupaten							

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam me program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja aka dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan s

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perenc komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah menca dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan p yang komprehensif, strategi juga dapat sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan k birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan a pembangunan, tetapi juga segala program yang menduk menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakuka baik, termasuk dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kap birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strate dijadikan salah satu rujukan penting dalam peren pembangunan daerah (*strategy focus management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus mencerminkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang akan menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, tra akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strateg dikendalikan dan dievaluasi (*process*).

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptak tambah diperlukan parameter tersebut sehingga dapat dikenali indika keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus m budaya berpikir strategik. Pemahaman strategis dan berpik

timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dua, yaitu:

1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Bupati ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Selain hal tersebut diatas, perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 6.1
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertolak belakang;

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangun pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda segmen masyarakat pengguna layanan, dan peman kepentingan
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berk dalam proses internal Pemerintah Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk alternatif skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan den sasaran atau sekelompok sasaran yang ingin dicapai, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 6.2
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

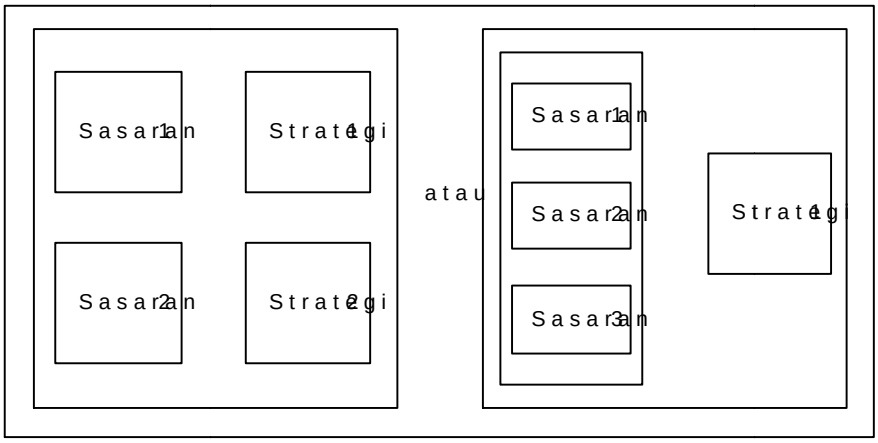

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan s membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasa hal, beberapa sasaran berhubungan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa tersebut.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk mene strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Selatan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan ca pembangunan sampai dengan periode awal perencana permasalahan pembangunan terpenting yang harus pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksterna mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan anca yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahar

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakar kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi d mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan l eksternal yang dihadapi; dan

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yang mungkin dapat dilakukan yaitu terdiri d (tujuh) Strategi dimana setiap strategi yang ada akan terhu dengan satu atau lebih sasaran, disebutkan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan
(Tahun 2017-2022)

SASARAN		STRATEGI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya cakupan ja handal dan terintegrasi	Strategi (1) Pemerataan Infra				
2	Meningkatnya cakupan la					
3	Meningkatnya cakupan layan					
4	Meningkatnya akses masy rumah layak huni dengan dan sehat.					
5	Meningkatnya ketersediaa bagi pengembangan sekto					
6	Pencapaian Kawasan Kum					
7	Sanitasi layak					

8	Meningkatkan usia harapa masyarakat	Strategi (2) Peningkatan pelaya pendidikan yang berkuali
9	Menurunnya angka kemati	
10	Menurunnya angka kemati	
11	Menurunnya angka gizi bu	
12	Meningkatnya penggunaan kontra (CPR)	
13	Peningkatan Kualitas Gur jenjang pendidikan	
14	Meningkatnya akses dan pendidikan bagi masyarak	
15	Meningkatnya pembinaan agama dan tokoh masyara	Strategi (3) Peningkatan peran tokoh masyarakat dalam menci beragama dan bermasyarakat tenteram
16	Meningkatnya Produksi ha	Strategi (4) Peningkatan Kema Daerah
17	Meningkatnya produksi pe budidaya	
18	Meningkatnya produksi pe	
19	Terciptanya pranata huku mendorong iklim investas	
20	Meningkatnya pemerataan masyarakat	
21	Menurunnya angka kemisk	
22	Meningkatnya investasi y penciptaan lapangan kerja	
23	Meningkatnya partisipasi	
24	Meningkatnya daya beli m	
25	Meningkatnya peran keler permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lo	
26	Meningkatan daya saing d produk unggulan daerah, (Kerbau Rawa, Nenas Pari	
27	meningkatnya pendapatan terutama peningkatan Pen Daerah (PAD)	
28	Terpasarnya pariwisata d	
29	Meningkatnya kontribusi perekonomian daerah	
30	Meningkatnya sektor pertanian ekon	
31	Meningkatnya ketaatan pe lingkungan hidup	Strategi (5) Pengelolaan Sumb mendukung pengembangan eknor
32	Terealisasinya perencana yang akomodatif dan kons	
33	Meningkatnya partisipasi dalam menggunakan hak p	Strategi (6) Peningkatan par

34	Meningkatnya cakupan ke Dokumen Kependudukan (	
35	Meningkatnya peran pemu	
36	Meningkatnya prestasi ol	
37	Meningkatnya perlindunga dan tanah adat	
38	Meningkatnya kualitas pe keuangan daerah	Strategi (7) Peningkatan kualita
39	Meningkatnya kualitas pe	
40	Meningkatnyakinerja dan pelaksanaan pembanguna	
41	Nilai Akuntabilitas Kinerj Daerah	
42	Predikat penyelenggaraan pemeri daerah	
43	Meningkatnya pengawasa pemerintahan	

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, terlihat jelas bahwa pencap pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan strategi sebagai upaya pembangun strategy focused organization) dalam tahun mendatang. Dalam manajemen kine prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pem daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 6.1 sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan d tahun ke depan.

Penjelasan keprioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2017 sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Strategi pertama yang akan dilakukan dalam rangka P Infrastruktur Daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangk merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang mantap dan
2. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan
3. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah laya dengan lingkungan bersih dan sehat.

5. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi peng
sektor pertanian.

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, je
perhubungan, energi penyediaan air bersih, irigasi (pengai
dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan r
hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kesejahtera
masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Infrastruktur ya
memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian da
aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastrukt
merupakan aset penting dalam mendukung seluruh
pembangunan daerah.

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktu
menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidika
kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat
publik sehingga efektifitas pelayanan dapat tercapai;
khususnya di daerah terpencil. Suksesnya peningkat
aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat k
ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Terkait dengan peningkatan infrastruktur jalan dan je
direncanakan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan
Selatan antara lain adalah:

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

(1) Jaringan jalan meliputi:

a. jaringan jalan strategis nasional yang berstatus jalan
yaitu ruas jalan Kalahien Buntok Ampah sepanjang 66,84
(enam puluh enan koma delapan puluh empat) kilometer;
b. jaringan jalan kolektor K1 yang berstatus jalan nasio
jalan Ugang Saryampa Mea sepanjang 41,21 (empat
satu koma dua puluh satu) kilometer;
c. jaringan jalan kolektor K2 yang berstatus jalan Provi
dari 1. ruas jalan Merdeka Raya sepanjang 0,71 (nol koma tujuh
puluh satu) kilometer; 2. ruas jalan Tugu sepanjang sep
0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) kilometer; 3. ruas jalan
Jeapat sepanjang 1,21 (satu koma dua puluh satu) kilometer.
d. jaringan jalan lokal primer yang berstatus jalan Kabupa
dari:
1. ruas jalan Simpang Jaya Baru Tabak Kanilan HPH Km.
20 Sei Paken sepanjang 49,70 (empat puluh sembilan koma
tujuh puluh) kilometer;

2. ruas jalan MTU Bangkuang Teluk Timba Damparan Leha-i Mangkatip Kalanis Adaro Rantau Kujang sepanjang 56,61 (lima puluh enam koma enam satu kilometer;
3. ruas jalan Pendukung strategis nasional sepanjang 22 (dua puluh dua koma sembilan kilometer;
4. ruas jalan Bangkuang (Barito Selatan) (Barito Timur) sepanjang 6,00 (enam koma nol kilometer;
5. ruas jalan Asam strategis nasional sepanjang (sebelas kilometer;
6. ruas jalan Parara pendukung strategis nasional sepanjang 1,07 (satu koma tujuh kilometer;
7. ruas jalan Mabuan Lahien sepanjang empat koma tiga kilometer;
8. ruas jalan Sabah Dahau Ganti Keladan sepanjang 15,56 (lima belas koma lima puluh enam kilometer;
9. ruas jalan Lang Saya Dangka sepanjang enam koma Sembilan puluh lima meter;
10. ruas jalan Pamanjakan strategis nasional sepanjang 3,58 tiga koma lima puluh delapan kilometer;
11. ruas jalan Gunung Rata Tanah Koi Bundar HPH KM. 20 sepanjang 30,44 tiga puluh koma empat puluh empat kilometer;
12. ruas jalan Tabak Kamuka Haji Sire sepanjang 2,69 (dua koma enam puluh sembilan kilometer;
13. ruas jalan Tabak Kakiayu Imban sepanjang 3,69 (koma enam puluh Sembilan meter;
14. ruas jalan Dangka Baruang sepanjang lima koma Sembilan kilometer;
15. ruas jalan Sarimbo Gunung Batutur sepanjang lima koma empat puluh enam kilometer;
16. ruas jalan Sangai Mujundre Sei Telang sepanjang 24,34 (dua puluh empat koma tiga empat kilometer;
17. ruas jalan eks HPH KM.30 Ramah Hulu Muara Teweh Gunung Rantau sepanjang tiga koma dua belas kilometer.
18. ruas jalan Rantau Kujang Rantau Bahuan Paminggir sepanjang (dua puluh lima kilometer.
19. ruas jalan mengkawah pajanda Sungai Jaya Baukota dadahup sepanjang empat puluh lima kilometer.
20. ruas Batampang Batilap Muara Puning sepanjang (lima belas kilometer.
21. ruas Tampi Bakabai Teluk Betung Batilap (dua puluh lima kilometer.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas

Strategi kedua adalah Peningkatan Pelayaanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
2. Menurunnya angka kematian bayi
3. Menurunnya angka kematian ibu
4. Menurunnya angka gizi buruk
5. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
6. Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan
7. Meningkatnya aksesbilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan pendidikan yang baik diharapkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pe harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pen khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam per pendidikan minimal pada jenjang pendidikan SMU, serta beasiswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berpresta itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat akan dilakukan diklat teknis dan bimbingan teknis kepa Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pe Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang bel menciptakan proses pembelajaran berkualitas. Terkait dengan ha tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu men peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja pendidikan itu sendiri.

Pembangun di bidang kesehatan juga harus dipandang s suatu investasi dalam kaitaannya untuk mendukung peni kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonom

memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan ke
Peningkatan aksesmudah di bidang kesehatan dilakukan den
tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi ma
Kabupaten Barito Selatan. Perhatian kepada bidang keseha
semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemamp
menentukan arah kebijakan pembangunannya, akan menentu
pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat yang Aman dan Tenteram

Strategi yang ketiga yaitu peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beraga bermasyarakat yang aman dan tenteram ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan masyarakat

Upaya untuk menciptakan kondisi pengamalan agama ya adalah kerukunan antarumat beragama yang dapat antara terjadinya dialog atau diskusi antarumat beragama, perte alim ulama atau tokoh masing-masing agama, memberikan kebebasa kepada warga untuk beribadah tanpa mengusik mereka sesu kepercayaan yang dianut; dan meredam atau mencegah dini benih yang dapat membuat antarumat beragama berseteru.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) melakukan dialog dengan agama dan tokoh masyarakat; (2) akomodasi menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat lainnya; (3) mengakomodasi aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan daerah kebijakan Bupati; (4) melakukan sosialisasi peraturan perunda undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkait kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; (5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendiri ibadat.

4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan ketiga adalah peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangk merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Produksi hasil pertanian

2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
3. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
4. Terciptanya pranata hukum yang mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
6. Menurunnya angka kemiskinan
7. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
8. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
9. Meningkatnya daya beli masyarakat
10. Meningkatnya peranan kelembagaan dan permodalan bagi UMKM dalam pengembangan ekonomi local
11. Meningkatan daya saing dan pemasaran produk unggulan (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll)
12. Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13. Terpeliharanya pariwisata daerah
14. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah
15. Meningkatnya sektor ekonomi hijau

Strategi pembangunan ini dilaksanakan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama diselenggarakan oleh masyarakat sebelumnya, termasuk yang berbasis hasil pertanian.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan memperoleh porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah, pengembangan kawasan di pedalaman juga diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan kegiatan penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga keuangan, perdagangan, dan lain, perlu difasilitasi. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah

Strategi pembangunan kelima adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mendukung pengembangan ekonomi

unggulan daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangk merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hid
2. Terealisasinya perencanaan tataruang yang akomoda konsisten.

Strategi ini menekankan pada bahwa pembangunan harus dilandasi dengan pendekatan pendayagunaan sumberday dengan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyaraka secara berkelanjutan. Pola konsumsi sumberdaya alam seha memberi kesempatan dan peran serta masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola sumberd secara optimal dan lestari .

Penggalian dan pemanfaatan keunggulan komparatif (comparative advantage) merupakan salah satu inti dari prioritas pengel sumberdaya alam dan lingkungan, baik dari perencanaan dan pengembangannya di masa datang dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk mendapatkan keunggulan k dalam jangka panjang. Strategi ini juga tetap mengedep pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai salah satu isu harus diperhatikan. Pemetaan kawasan pusat tumbuh dan ekonomi daerah tetap harus memperhatikan kelestarian ling

6. Peningkatan Partisipasi Publik

Strategi pembangunan keenam adalah peningkatan pa publik. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasik pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunak pilih.
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KK, dll)
3. Meningkatnya peran pemuda.
4. Meningkatnya prestasi olah raga.
5. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.

Partisipasi masyarakat (publik) merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas ke masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasark keikutsertaan level of involvement masyarakat dalam kegiatan

tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untu memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan ber efektif, efesien, dan berkelanjutan.

Alasan-alasan penggunaan pendekatan partisipatif perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara garis b dibagi menjadi 2 kelompok yaitu (1) masyarakat berhak unt terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan, dan berhak terlibat dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka seha hari dan masa depan mereka, (2) jika masyarakat diberi benar kesempatan (dan haknya), untuk terlibat secara akti pembangunan, maka pembangunan diperkirakan lebih berlangsu efektif dan efisien.

7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Strategi pembangunan ketujuh adalah peningkatan k reformasi birokrasi. Strategi ini dilaksanakan dalam rangk merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pemb daerah
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
5. Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikb kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan peme Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur yang berkua bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengeta teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan ya transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan Kondisi ini diharapkan mampu menjamin pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menc kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah me pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kew

prosedur operasional, kerjasama, sinergi, dan integrasi orga
serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sam
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan
manajemen kepegawaian, upaya-upaya terobosan guna
meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pe
provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian
pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas
publik.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan atau tindakan yang
pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dip
selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap
selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan pembangun
menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan
dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai
RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang d
mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yan
diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan
Penekanan prioritas pada setiap tahapan pembangunan
memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lain
rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJM

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan
memberikan jawaban atas permasalahan dan isu strategis
pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan
strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumus
kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan
terkait pemerataan pembangunan dan pengembangan
unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayah
dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan
termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

6.21 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Dae

Arah kebijakan merupakan keputusan atau tindakan yang
pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dip
selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap
selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah keb
merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta ses

dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus a setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambung rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selata masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 sampai Tahun 2022 sebagai berikut :

Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1
Fouks/Tema Pembangunan Tahunan, RPJMD Tahun 2017-2022

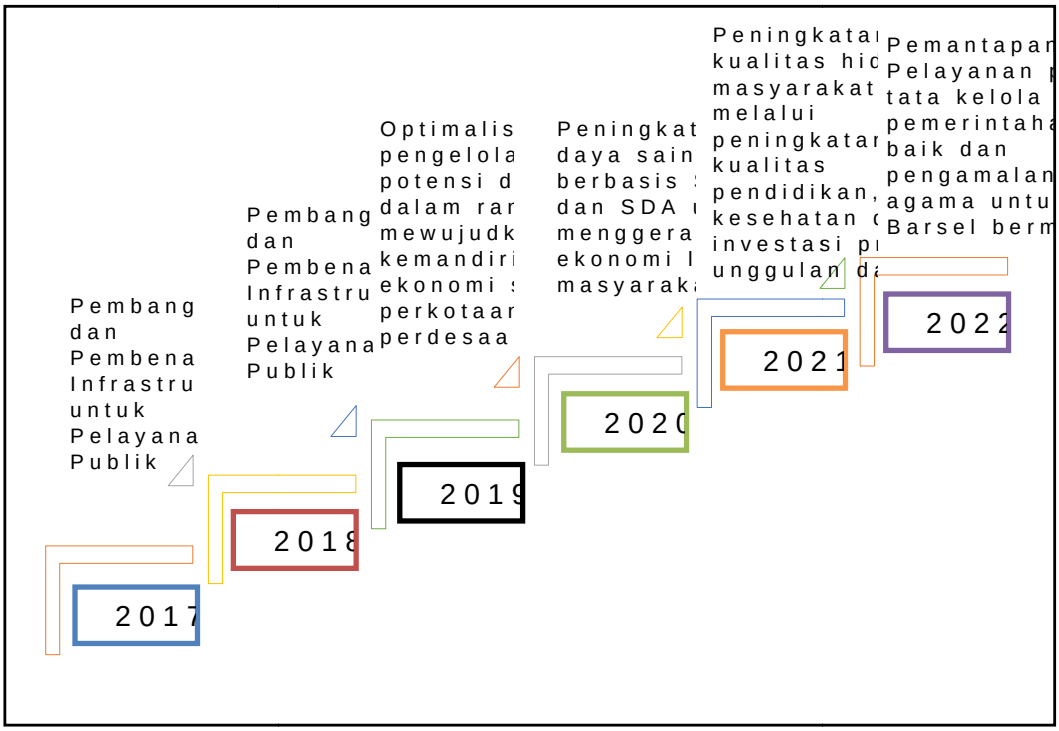

Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami bahwa setia tahun telah ditetapkan tema pembangunan yang menjadi acua penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 tahun 2017 sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2017 :

Pembangunaan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik .

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2018 :

Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik .

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2019 :
Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rang mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan .

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2020 :
Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untu menggerakan ekonomi lokal masyarakat .

1.5 Tema Pembangunan pada Tahun 2021 :
Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah .

1.6 Tema Pembangunan pada Tahun 2022 :

Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat .

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun RPJMD 2017-2022.

Memperhatikan arah kebijakan yang telah ditet berdasarkan tema pembangunan setiap tahun, maka selanju akan ditetapkan arah pembangunan lima tahunan dalam Renc Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut. Untuk sinkronisasi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pemerataan infras wilayah	1	Peningkatan sarana prasarana p dan informasi	x	x				
		2	Peningkatan kualitas dan kapas perhubungan	x	x	x	x	x	x
		3	Peningkatan ketersediaan infra Kabupaten/ kota yang layak	x	x	x	x	x	x
		4	Peningkatan ketercukupan ener	x	x	x			
		5	Tersedianya akses air bersih ur kebutuhan pokok minuman 60 Lt	x	x	x			
		6	Meningkatnya rumah layak huni kawasan kumuh	x	x	x			
		7	Peningkatan ketersediaan sumb	x	x	x	x		
2.	Peningkatan layanan Kesehatan dan Pen yang berkualitas	8	Peningkatan kualitas guru pada pendidikan		x	x	x		
		9	Optimalisasi manajemen pendid		x	x	x		
		10	Peningkatan kualitas dan kuant prasarana pendidikan	x	x	x			
		11	Peningkatan kualitas sarana da			x	x	x	x
		12	Peningkatan promosi kesehatan	x	x	x	x	x	x

		13	Peningkatan Akreditasi Sarana	x	x	x	x	x	x
3.	Peningkatan peran agama dan tokoh m dalam menciptakan beragama dan berr yang aman dan ten	14	Meningkatnya partipasi tokoh a masyarakat	x	x				
		15	Kemitraan pengembangan wawas		x	x			
		16	Pemberdayaan Masyarakat untu dan Keamanan	x	x	x	x		x
4.	Peningkatan kemar ekonomi daerah	17	Menjamin ketersediaan bahan k strategis	x	x	x	x	x	x
		18	Pengurangan beban dan pembe miskin	x	x	x	x	x	
		19	Peningkatan daya saing produk		x	x	x		
		20	Pengelolaan Potensi Sumberday		x	x	x	x	
		21	Pemberian kemudahan dalam be Barito Selatan	x	x	x	x		
		22	Peningkatan produksi hasil pad pertanian	x	x	x	x	x	
		23	Perluasan lapangan usaha dan kesempat di instansi pemerintahan dan sw	x	x	x	x	x	x
		24	Pengembangan objek dan pariwisata (a budaya dan minat khusus)			x	x		
		25	Pengembangan pola kerjasama y tenaga kerja lokal		x	x	x		
		26	Peningkatan sumber pendapatan	x	x	x	x	x	x
5.	Pengelolaan sumbe alam dan lingkung	27	Pengendalian pencemaran dan k	x	x	x	x		

	yang mendukung pengembangan eko unggulan daerah	28	Pengelolaan perkebunan kehutanan sistematis	x	x	x	x	x	x
		29	Rehabilitasi dan konservasi sum lingkungan hidup	x	x	x			
		30	Pelaksanaan legalisasi kepemil		x	x	x		
		31	Meningkatkan kegiatan disemina pencegahan, penanggulangan da bencana.	x	x	x			
		32	Melakukan penyuluhan secara k berkelanjutan dengan masyarak satuan pemukiman, swasta maup masyarakat umum lainnya	x	x	x	x		
		33	Peningkatan kualitas perencana	x	x	x			
		34	Pengembangan ekonomi unggula memperhatikan pelestarian alam	x	x				
		35	Pengembangan ekonomi lokal	x	x	x	x		
6.	Peningkatan partis	36	Kemitraan pengembangan wawas	x	x				
		37	Meningkatkan cakupan kepemilikan ka dan tingkat akurasi elemen data	x	x	x			
		38	Meningkatnya peran pemuda	x	x	x	x	x	x
		39	Rehabilitasi dan rekonsiliasi sa olahraga		x	x	x		
		40	Meningkatnya prestasi olah raga		x	x			
		41	Pemberdayaan Masyarakat untu dan Keamanan				x	x	
		42	Meningkatnya minat baca masya	x	x	x			

		43	Pemberdayaan Masyarakat untu dan Keamanan	x	x	x	x	x	x
		44	Presentase produk kreasi jenis inf yg		x	x	x		
		45	Meningkatnya partisipasi masya pembangunan desa	x	x	x	x	x	
7.	Peningkatan kualit Birokrasi	46	Pengelolaan administrasi aset d yang baik	x	x	x	x	x	x
		47	Meningkatnya implementasi dan pende sebagian kewenangan ke kecam			x	x	x	x
		48	Peningkatan SDM aparatur pela	x	x				
		49	Peningkatan standar pelayanan	x	x	x			
		50	Peningkatan tata kelola penyele pemerintahan		x	x			
		51	Peningkatan pelayanan publik a masyarakat dan konsultasi		x	x	x		
		52	Reformasi Birokrasi	x	x	x	x	x	x

Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Bar

Visi: Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, S Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa							
MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2		3		4	5	
Misi 1:	1.	Meningkatkan kon antarwilayah yang memperlancar dist orang, barang dan mendorong pereko daerah dan pemen kebutuhan infrastr wilayah.	1.1	Meningkatnya ca jaringan jalan y dan terintegrasi	Strategi (1) Pemerataan Infrastruktur	1.1	Peningkatan sarar prasarana penduk komunikasi dan in
Membangun dan membenahi infra (jalan, jembatan, lis sanitasi, air ber sampah, ruang t hijau dan lain), da menunjang pelay publik, transpor pengentasan ker dan penganggura			1.2	Meningkatnya ca layanan kelistrik		1.2	Peningkatan kuali kapasitas infrastr perhubungan
			1.3	Meningkatnya ca layanan air bers			
			1.4	Meningkatnya ak masyarakat terh rumah layak hun lingkungan bers sehat.		1.3	Peningkatan keter infrastruktur jalar Kabupaten/ kota y
			1.5	Meningkatnya ketersediaan jar irigasi bagi pengembangan s pertanian		1.4	Peningkatan keter energi
			1.6	Pencapaian Kaw Kumuh		1.5	Tersedianya akses untuk memenuhi k pokok minuman 60 Ltr/Org/Hr
			1.7	Sanitasi Layak		1.6	Meningkatnya rum huni dan penanga kawasan kumuh
						1.7	Peningkatan keter sumber daya air

Misi 2:	2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan	2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Strategi (2) Peningkatan pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	2.1	Peningkatan kualitas pada semua jenjang pendidikan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan serta pengamalan agama yang balk untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia			2.2	Menurunnya angka kematian bayi		2.2	Optimalisasi manajemen pendidikan
			2.3	Menurunnya angka kematian ibu		2.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			2.4	Menurunnya angka buruk		2.4	Peningkatan kualitas dan prasarana kesehatan
			2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)			
	3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan	3.1	Peningkatan Kualitas pada semua jenjang pendidikan		2.5	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat
			3.2	Meningkatnya akses layanan pendidikan masyarakat			
	4.	Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan ketentraman daerah	4.1	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Strategi (3) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram	3.1	Meningkatnya peran agama dan tokoh
						3.2	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
						3.3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Misi 3:	5.	Mengembangkan sektor pertanian yang menunjang perekonomian masyarakat	5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	Strategi (4) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	4.1	Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan yang berbasis SDA						4.2	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin

Daya Manusia da Daya Alam deng menggerakkan sektor ekonomi penguatan pasar infrastruktur per ekonomi.	6.	Mengembangkan perikanan yang m perekonomian mas	6.1	Meningkatnya pr perikanan budidaya		4.3	Peningkatan daya produk unggulan d
			6.2	Meningkatnya pr perikanan tangk		4.4	Pengelolaan Pote Sumberdaya Perik
	7.	Meningkatkan inve daerah yang berba daya lokal	7.1	Terciptanya pra hukum yang mendoron iklim investasi		4.5	Pemberian kemuda berbagai investas Selatan
			7.2	Meningkatnya pe kesejahteraan m		4.6	Peningkatan produ pada setiap subse pertanian
			7.3	Menurunnya ang kemiskinan		4.7	Perluasan lapanga dan kesempatan b instansi pemerinta swasta
			7.4	Meningkatnya in yang mendorong penciptaan lapa		4.8	Pengembangan objek pariwisata (alam d dan minat khusus)
			7.5	Meningkatnya partisip angkatan kerja		4.9	Pengembangan po kerjasama yang m tenaga kerja lokal
			7.6	Meningkatnya da masyarakat		4.1	Peningkatan sumber pendapatan daera
	8.	Meningkatkan pere masyarakat yang b kepada pengembar koperasi dan UMK	8.1	Meningkatnya pe kelembagaan da permodalan UMKM dalam pengemba ekonomi lokal			
			8.2	Meningkatan day dan pemasaran unggulan daerah Karet, Kerbau R Nenas Parigi dll			

	9.	Meningkatkan kem pembiayaan pemba	9.1	meningkatnya pe daerah terutama peningkatan Per Asli Daerah (PA			
	10	Meningkatnya kun wisatawan	10.	Terpasarnya par daerah			
	11	Meningkatkan kon pariwisata bagi perekonomian wila sekaligus pelestar budaya dan kekak Barito Selatan	11.	Meningkatnya ko pariwisata bagi perekonomian da			
			11.	Meningkatnya se ekonomi hijau			
	12	Mewujudkan pemb yang berbasis pen sumber daya alam lestari	12.	Meningkatnya ke pengelolaan ling hidup	Strategi (5) Pengelolaan S Daya Alam ya mendukung pengembanga eknomi unggu daerah	5.1	Pengendalian pen dan kerusakan lin
			12.	Terealisasinya perencanaan tat yang akomodatif konsisten		5.2	Pengelolaan peng kebakaran hutan s sistematis
						5.3	Rehabilitasi dan k sumberdaya alam lingkungan hidup
						5.4	Pelaksanaan lega kepemilikan lahan
						5.5	Meningkatkan keg diseminasi dan so pencegahan, pena dan pengendalian
						5.6	Melakukan penyul konsisten dan ber dengan masyaraka baik satuan pemul swasta maupun pe dan masyarakat u lainnya
						5.7	Peningkatan kuali

							perencanaan tata wilayah
						5.8	Pengembangan komoditi unggulan yang memperhatikan pe alam dan lingkung
						5.9	Pengembangan ek
Misi 4:	13	Meningkatkan part masyarakat dalam pembangunan	13.	Meningkatnya pa masyarakat dala menggunakan ha	Strategi (6) Peningkatan partisipasi Pu	6.1	Kemitraan pengem wawasan kebangs
Menciptakan ras kebersamaan da kesempatan berp dalam membangu Barito Selatan y maju bagi seluru masyarakat deng menjaga kehidup budaya dan adat daerah.						6.2	Meningkatnya cak kepemilikan kartu dan tingkat akura datanya
			13.	Meningkatnya ca kepemilikan Dok Kependudukan (dll)		6.3	Meningkatnya pemeru
	14	Membangun ponda kuat bagi penyiap dalam pembangun dini	14.	Meningkatnya pe pemuda		6.4	Rehabilitasi dan r sarana dan prasar olahraga
			14.	Meningkatnya pr olah raga		6.5	Meningkatnya olah raga
	15	Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang ciri masyarakat Ba	15.	Meningkatnya perlindungan ba adat dan tanah		6.6	Pemberdayaan Ma untuk Menjaga Ke Keamanan
						6.7	Meningkatnya min masyarakat
						6.8	Pemberdayaan Ma untuk Menjaga Ke Keamanan

						6.9	Presentase produl yang responsif ge
						6.1	Meningkatnya par masyarakat dalam pembangunan des
Misi 5	16	Meningkatnya kap akuntabilitas kine pemerintahan	16.	Meningkatnya ku pengelolaan keu daerah	Strategi (7) Peningkatan I Reformasi Bir	7.1	Pengelolaan admi dan keuangan dae baik
Menghadirkan keberadaan pem daerah sebagai pelayanan publi membangun tata pemerintahan da yang baik dan a						7.2	Meningkatkan imp dan pendelegasian kewenangan ke ke
			16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publi		7.3	Peningkatan SDM pelaksana pemeri
			16.	Meningkatnya akuntabilitas pe pembangunan da		7.4	Peningkatan stand pelayanan publik
			16.	Nilai Akuntabilit Pemerintahan D		7.5	Peningkatan tata penyelenggara an pemerintahan
			16.	Predikat penyel raan pemerintah		7.6	Peningkatan pelay atas pengaduan m dan konsultasi
			16.	Meningkatnya pengawasan bid pemerintahan		7.7	Reformasi Birokra

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah merupakan Program Daerah sesuai dengan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam pembangunan daerah selama lima tahun.

Program-program pembangunan daerah untuk mencapai visi misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2012-2017 terdiri dari 5 (Sapta) Prgram yaitu :

1. Program Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas Serta Bertaqwa
3. Program Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup
4. Program Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial budaya yang lestari
5. Program Pengelolaan tata pemerintahan yang baik

Selanjutnya lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.4 dibawah ini.

Tabel 6.4
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bidang	Indikasi Rencana Program Prioritas
1. Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana	a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan kecamatan serta kabupaten. b. Peningkatan sarana air bersih. c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Ba d. Peningkatan sarana transportasi darat, a e. Pengembangan wilayah perkotaan da pengelolaan tata ruang wilayah. f. Pengelolaan sampah berbasis masyaraka g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, R Kabupaten.
2. Program Peningkatan Kualitas S Daya Ma yang Se Cerdas Bertaqwa	a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang m paramedis yang cukup pelayanan kesehatan masyarakat murah dan mudah. b. Peningkatan pelayanan kesehatan khu pemberian bantuan kelahiran dan santu tidak mampu. c. Menyediakan rumah layak huni, melalui dan penataan lingkungan yang sehat. d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 berstandar internasional. e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD,

	serta menyiapkan tenaga Pendidik dan p f. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana info g. Membangun sarana prasarana pembina olahraga.
3. Peningkata Ekonomi B Lokal Lingkungar	a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasi 1. Dusun Selatan, pusat pemerintahan, kot perdagangan, pengembangan pertani pariwisata danau. 2. Dusun Utara, pengembangan perkebun 3. Gunung Bintang Awai, Pengelolaan I Pertanian. 4. Karau Kuala, Pengembangan industri rotan berk 5. Jenamas. Pengembangan Komoditi te perikanan. 6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian b. Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja lok c. Menciptakan lapangan kerja untuk menampung masyarakat. d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi ekonomi daerah. e. Mengembangkan potensi wisata alam pariwisata. f. Meningkatkan sistem produksi, pengola pertanian, perkebunan dan perikanan.
4. Peningkata kerukunan beragama, dan bud yang lesta	a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, t rangka pengamalan agama. b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat budaya. c. Meningkatkan budaya gotong royong mas d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir s alam. e. Melestarikan adat istiadat dengan membuat tempat bersejarah. f. Membina organisasi kemasyarakatan, pemuda kelompok seni budaya dan pembinaan su
5. Pengelolaa pemerintah yang baik	a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pem merata sesuai kemampuan dan kebutuhan b. Pelayanan yang cepat, ramah, transparan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotism c. Mendukung dan mendorong inovasi dan pemerintah daerah. d. Meningkatkan peran pemerintah daerah investasi.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Secara umum kerangka pendanaan adalah pengalokasian sumber pembiayaan/pendanaan yang dimiliki oleh daerah atau riil keuangan daerah yang akan ditujukan untuk pencapaian program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedalam berbagai Kelompok Kelompok Prioritas. Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok mendapatkan alokasian anggaran setelah Kelompok Prioritas I dapat terpenuhi kebutuhan dananya

Secara lengkap mengenai kerangka pendanaan, telah di Bab III dari, dan merupakan bagian yang menjadi kesatuan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022. Rencana

7.2 Program Perangkat Daerah

Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam masing-masing program setiap perangkat daerah. Pelaksanaan Program-program masing-masing Perangkat Daerah tentu untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada bagian ini disajikan seluruh program masing-masing perangkat daerah disertai dengan pendanaan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022 maupun untuk pemenuhan layanan SOPD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Program perangkat daerah untuk masa lima tahun bagi masing-masing perangkat daerah untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai, maka program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelayanan kepada m

pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fung

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewe pemerintah daerah tersebut, terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi 6 (enam) urusan yakni:
   1) pendidikan;
   2) kesehatan;
   3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
   4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan mas
   6) sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:
   1) tenaga kerja;
   2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
   3) pangan;
   4) pertanahan;
   5) lingkungan hidup;
   6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
   8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   9) perhubungan;
   10) komunikasi dan informatika;
   11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   12) penanaman modal;
   13) kepemudaan dan olah raga;
   14) statistik;
   15) persandian;
   16) kebudayaan;
   17) perpustakaan;
   18) kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yakni
   1) kelautan dan perikanan;
   2) pariwisata;
   3) pertanian;
   4) kehutanan;

5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian;
8) transmigrasi

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yaitu:
   a. Perencanaan
   b. Keuangan
   c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
   d. Penelitian dan pengembangan
   e. Fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup:
      1) Sekretariat Daerah
      2) Sekretariat DPRD
      3) Inspektorat

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, meliputi:

1. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
   1) Dinas Pendidikan;
   2) Dinas Kesehatan;
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   5) Satuan Polisi Pamong Praja;
   6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   7) Tenaga Kerja dan Transmi
   8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
   10) Dinas Lingkungan Hidup
   11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   12) Dinas Perhubungan
   13) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
   14) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   16) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
   17) Dinas Perpustakaan dan Arsip

2. Badan Daerah dan Kesatuan Kabupaten, terdiri dari:
   1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelit
      Pengembangan
   2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
   4) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebaka
   5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politi
3. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
   1) Bagian Pemerintahan
   2) Bagian Hukum
   3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemas
   4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya A
   5) Bagian Administrasi Pembangunan
   6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
   7) Bagian Organisasi
   8) Bagian Umum
   9) Bagian Protokol dan Komunikasi Publik
4. Sekretariat DPRD
5. Inspektorat
6. RSUD Jaraga Samameh
7. Kecamatan

Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah disamping untuk mendukung visi dan misi kepala d langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan mi Perangkat Daerah yang antara lain dimaksudkan sebagai f pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi Renstra Perangkat Daerah namun tetap dalam koridor sebag pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi jangka menengah daerah.

Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel 7.1 tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan D mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kem layanan Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggaraka pemerintahan daerah, disajikan pada tabel 7.2 tentang Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah untuk mencapai Visi, Misi d SOPD dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Tabel 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 1																	
Membangun dan Membenahi Infrastruktur																	
		Program pembangunan j dan jembatan	Tersediany transporta pada daera yang masih terisolir	613,12 (59,24%	25 km	15.867.500.000	25 km	17.454.250.000	25 km	19.199.675.000	25 km	21.119.642.500	25 km	23.231.606.750	125	96.872.674.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program peningkatan ja dan jembatan	Terpenuhin kelancaran transporta yang lebih efektif	613,12 (59,24%		53.322.500.000	1 paket	58.654.750.000	1 paket	64.520.225.000	1 paket	70.972.247.500	1 paket	78.069.472.250	5	325.539.194.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program rehabilitasi/pe araan jalan da jembatan	Terpelihar jalan dan jembatan sesuai fungsinya			2.189.000.000	1 paket	2.407.900.000	1 paket	2.648.690.000	1 paket	2.913.559.000	1 paket	3.204.914.900	5	13.364.063.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan saluran draina gorong gorong	Tertatanya saluran/dr ase perkotaan/ desaan ses fungsi			780.913.100	1 paket	859.004.410	1 paket	944.904.851	1 paket	1.039.395.336	1 paket	1.143.334.870	5	4.767.552.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Minum	Tersediany air bersih memenuhi syarat kua untuk kebutuhan masyaraka			6.175.000.000	1 paket	6.792.500.000	1 paket	7.471.750.000	1 paket	8.218.925.000	1 paket	9.040.817.500	5	37.698.992.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program perlua dan peningkata	Terjangkau kebutuhan bersih yan berkualitas untuk masyaraka			500.000.000		550.000.000	1 paket	605.000.000		665.500.000	paket	732.050.000		3.052.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Sarana Pengol Air Minum (SP	Tersediany sistem pengolaha bersih yan memenuhi syarat			3.500.000.000		3.850.000.000		4.235.000.000		4.658.500.000		5.124.350.000	paket	21.367.850.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Prasarana San	Tertatanya sistem san yang baik		1 paket	2.600.000.000	1 paket	2.860.000.000	1 paket	3.146.000.000	paket	3.460.600.000	paket	3.806.660.000	paket	15.873.260.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penye Lingkungan Pemukiman (PL	Terlaksana lingkungan permukima yang sehat		1 paket	12.000.000.000	1 paket	13.200.000.000	1 paket	14.520.000.000	paket	15.972.000.000	paket	17.569.200.000	paket	73.261.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Rehat Jaringan Irigas Rawa	Terkelolan bangunan jaringan ir yang baik sesuai fungsinya		1 paket	1.006.641.000	1 paket	1.107.305.100	1 paket	1.218.035.610	paket	1.339.839.171	paket	1.473.823.088	paket	6.145.643.969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan da Pembangunan Jaringan Irigas Rawa	Terkelolan air baku untuk kebutuhan irigasi yan lebih baik		1 paket	8.850.000.000	1 paket	9.735.000.000	1 paket	10.708.500.000	paket	11.779.350.000	paket	12.957.285.000	paket	54.030.135.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengamanan d Perlindungan Sumber Air	Terpelihar sumber air baku untuk kepentinga masyaraka		1 paket	150.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	181.500.000	paket	199.650.000	paket	219.615.000	paket	915.765.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Penat Ruang Kabupat	Terciptany penataan ruang kota yang baik			4.100.000.000	1 paket	4.510.000.000	1 paket	4.961.000.000	1 paket	5.457.100.000	1 paket	6.002.810.000	1 paket	25.030.910.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemb jasa Konstruks	Tersediany tenaga-ten teknis yan handal dar bersertifik			1.052.600.000	1 paket	1.157.860.000	1 paket	1.273.646.000	1 paket	1.401.010.600	1 paket	1.541.111.660	1 paket	6.426.228.260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Bna Teknik/Progran	Tercapainy kegiatan pembangur yang memenuhi syarat mut			1.264.869.500	1 paket	1.391.356.450	1 paket	1.530.492.095	1 paket	1.683.541.305	1 paket	1.851.895.435	1 paket	7.722.154.784	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Progrm Perenc Bina Marga	Terencana kegiatan pembangur di bidang I Marga			550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	1 paket	732.050.000	1 paket	805.255.000	1 paket	3.357.805.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perenc Cipta Karya	Terencanan kegiatan pembangun bidang Cipt Karya			275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	1 paket	366.025.000	1 paket	402.627.500	1 paket	1.678.902.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan w sesuai tata ruan	Kawasan strategis ce tumbuh														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Survey/Perenca Sumber Daya Ai	Terencanan kegiatan pembangun bidang Sum Daya Air			250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	1 paket	366.025.000	1 paket	1.526.275.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Rehabilitasi R		paket	paket	550.000.000	paket	825.000.000	paket	975.000.000	paket	1.200.000.000	paket	1.325.000.000	paket	4.875.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembangunan Penataan Kawa Pengembang		paket	paket	2.650.000.000	paket	2.900.000.000	paket	3.150.000.000	paket	3.400.000.000	paket	3.650.000.000	paket	15.750.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Pembangunan Penataan Kawa Kumuh		paket	paket	1.750.000.000	paket	1.750.000.000	paket	1.100.000.000	paket	1.400.000.000	paket	950.000.000	paket	6.950.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Penat Jalan Lingkung				5.400.000.000		6.450.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		8.550.000.000		35.400.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Penat dan Pemelihar Makam				1.925.000.000		2.125.000.000		2.470.000.000		2.595.000.000		2.525.000.000		11.640.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan R Terbuka Hijau				2.075.000.000		2.325.000.000		2.375.000.000		2.400.000.000		2.425.000.000		11.600.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Penat Fasilitas Umum Kota/PJU				1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		7.750.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Peningkatan Kapasitas Bida Pertanahan				1.000.000.000		1.500.000.000		1.725.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		7.075.000.000	Dinas Perumaha Kawasan Pemukima dan Pertanaha
		Program Penge Data dan Infor Serta Jaringan Komunikasi da Persandian		7 kegiatan	7 kegiat	300.000.000	7 kegiat	330.000.000	7 kegiata	363.000.000	7 kegiata	399.300.000	7 kegiata	439.230.000		1.831.530.000	DISKOMINFO

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Publik Informasi Daer dan Kerjasama Informasi Deng Media Massa		4 kegiatan	4 kegiata	1.270.000.0	4 kegiata	1.397.000.0	4 kegiatan	1.536.700.0	4 kegiatan	1.690.370.0	4 kegiatan	1.859.407.0	4 kegiata	7.753.477.00	DISKOMINFO
		Program Pelay dan Pengemba Komunikasi Informasi dan Penyiaran		1 paket; kegiatan;	1 pake 12 kegiata	390.500.00	1 pake 12 kegiata	429.550.0	1 paket 12 kegiata	472.505.0	1 paket 12 kegiata	519.755.5	1 paket 12 kegiata	571.731.0	50	2.384.041.55	DISKOMINFO
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhub	Persentase jumlah masyarakat yang terlaya angkutan darat/laut/u a	5 Kegiatan	5 Kegiat	20.000.00	50 Kegiata	200.000.0	50 Kegiata	300.000.0	50 Kegiatan	400.000.0	50 Kegiatan	500.000.0	50 Kegiatan	1.420.000.000	Dinas Perhubunga
		Program Pening pelayanan angk	Persentase jumlah masyarakat yang terlaya angkutan darat/laut/u a	8 kegiatan	8 kegiata	375.000.00	80 kegiata	375.000.0	80 kegiatan	375.000.0	80 kegiatan	390.000.0	80 kegiatan	400.000.0	80 kegiatan	1.915.000.000	Dinas Perhubunga
		Program Pembangunan S dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubunga sungai dala kondisi baik	3 Kegiatan	3 Kegiat	110.000.00	30 Kegiata	120.000.0	30 Kegiata	240.000.0	30 Kegiatan	240.000.0	30 Kegiatan	250.000.0	30 Kegiatan	960.000.000	Dinas Perhubunga
		Program pengen dan pengamanan lintas	Persentase berkurangny angka kecelakaan angkutan un	5 Kegiatan	5 Kegiat	80.000.00	50 Kegiata	80.000.0	50 Kegiata	90.000.0	50 Kegiatan	95.000.0	50 Kegiatan	100.000.0	50 Kegiatan	445.000.000	Dinas Perhubunga
		PAGU MISI 1				133.879.523.600		148.233.975.960		162.187.373.556		177.941.110.912		194.138.222.003		816.380.206.030	

Tabel 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 2																	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat																	
		Program Obat Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaa Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan			963.743.000		963.743.000		963.743.000		963.743.000		963.743.000		4.818.715.000	Dinas Kesehatan
		Program Upay Kesehatan Masyarakat				1.083.400.000		1.191.740.000		1.310.914.000		1.442.005.400		1.586.205.940		6.614.265.340	Dinas Kesehatan
		Program Perba Gizi Masyarak dan Pemberda Masyarakat				148.761.200		163.737.320		180.001.052		198.001.157		217.801.273		908.302.002	Dinas Kesehatan
		Program Pengawasan O dan Makanan				4.590.000		5.049.000		5.553.900		6.109.290		6.720.219		28.022.409	Dinas Kesehatan
		Program Prom Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				453.063.891		498.370.280		548.207.308		603.028.039		663.330.843		2.766.000.361	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Se				418.990.000		460.889.000		506.977.900		557.675.690		613.443.259		2.557.975.849	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan d Penanggulang Penyakit Menu				946.460.000		1.041.106.000		1.145.216.600		1.259.738.260		1.385.712.086		5.778.232.946	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu				55.196.000		60.715.600		66.787.160		73.465.876		80.812.464		336.977.100	Dinas Kesehatan

		Pengawasan d Pengendalian Kesehatan Makanan				18.200.000	20.020.000		22.022.000	24.224.200	26.646.620	111.112.820	Dinas Kesehatan
		Program Kegia DAK NON FISI				8.525.821.000	8.525.821.000		8.525.821.000	8.525.821.000	8.525.821.000	42.629.105.000	Dinas Kesehatan
		Program Dana Kapitasi Jami Kesehatan Na (JKN) pada FK (Dana bersum dari BPJS Pus				3.068.916.700	3.375.808.370		3.713.389.207	4.084.728.128	4.493.200.940	18.736.043.345	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan, peningkatan s dan Prasarana RS/RSJ/RSPar SMata				3.130.000.000	3.443.000.000		3.787.300.000	4.166.030.000	4.582.633.000	19.108.963.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan M Pelayanan Kesehatan BL				26.000.000.000	28.600.000.000		31.460.000.000	34.606.000.000	38.066.600.000	158.732.600.000	Dinas Kesehatan
		Program Pendidikan An Usia Dini				1.825.220.000	2.007.742.000	1 tahun	Rp 2.007.742.000	2.208.516.200	Rp 2.208.516.200	10.257.736.400	Dinas Pendidika
		Program Waji Belajar Pendi Dasar Sembila Tahun				Rp 20.290.163.500	22.319.179.850	1 tahun	Rp 22.319.179.850	24.551.097.835	Rp 24.551.097.835	114.030.718.870	Dinas Pendidika
		Program Pendidikan No Formal dan Informal				Rp 174.350.000	Rp 191.785.000	1 tahun	Rp 191.785.000	Rp 210.963.500	Rp 210.963.500	979.847.000	Dinas Pendidika
		Program Peningkatan M Pendidik dan Tenaga				Rp 1.173.203.500	1.290.523.850	1 tahun	Rp 1.290.523.850	1.419.576.235	Rp 1.419.576.235	6.593.403.670	Dinas Pendidika
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Rp 801.446.700	Rp 881.591.370	1 tahun	Rp 881.591.370	969.750.507	Rp 969.750.507	4.504.130.454	Dinas Pendidika
		Program Pendidikan Ti				Rp 764.850.000	Rp 841.335.000	65%	Rp 841.335.000	925.468.500	Rp 925.468.500	4.298.457.000	Dinas Pendidika
		Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan				800.000.000	800.000.000		800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	4.300.000.000	Dinas Sos Pemberday n Masyara dan Desa

		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Ad Terpencil (KA dan Penyanda Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainnya	Peningkata Kemampuan Petugas da Pedamping Sosial dan Pemberdaya Fakir Miski KAT dan PM Lainnya . Pelatihan u keluarga m	Jumlah fak miskin yan tertangani 1.350 oran		220.000.000	270.000.000	335.000.000	400.000.000	465.000.000	1.690.000.000	Dinas Sos Pemberda n Masyara dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	Dinas Sos Pemberda n Masyara dan Desa
		Program Pelay dan Rehabilita Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampila dan Prakte Belajar Ker Bagi Anak Terlantar Termasuk A Jalanan, Ar Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah Ke Keluarga 5 KK		155.000.000	175.000.000	195.000.000	215.000.000	235.000.000	975.000.000	Dinas Sos Pemberda n Masyara dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekon Pedesaan				250.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	1.350.000.000	Dinas Sos Pemberda n Masyara dan Desa
		PAGU MISI 2				71.571.375.491	77.702.156.640	81.673.090.197	88.885.942.817	93.773.043.421	413.605.608.566	

Tabel 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 3																	
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah																	
		Program Peningkatan Kesejahteraan	Meningtnya pelayan	298.000.000		555.000.000		585.000.000		664.000.000		646.000.000		1.233.000.000		3.683.000.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pemberdayaan Masyakat Dala Pengelolaan Su Daya		300.000.000		955.000.000		2.729.750.000		2.699.300.000		3.489.230.000		4.283.152.400		14.156.432.400	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Peningkatan Pemasaran Has Produksi Pertanian/Perk an		360.370.000		595.000.000		963.000.000		625.000.000		680.000.000		860.000.000		3.723.000.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perk an		1.606.350.000		Rp 3.601.250.000		3.705.500.000		3.929.000.000		3.971.000.000		5.056.000.000		20.262.750.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Peningkatan Ketahanan Pan		710.418.000		745.938.900		783.235.845		822.397.637		863.517.519		906.693.395		4.121.783.296	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perik		2.248.634.000		2.473.497.400		2.720.847.140		2.992.931.854		3.292.225.039		958.253.450		12.437.754.883	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan

		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		461.500.000	1.475.500.000	1.560.000.000	1.620.500.000	1.655.500.000	1.705.000.000	8.016.500.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pence dan penanggul Penyakit Terna		256.500.000	246.500.000	308.000.000	297.000.000	330.000.000	325.000.000	1.506.500.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Penyelenggara Penyuluhan da Kelembagaan		1.442.370.000	2.058.000.000	2.091.000.000	2.123.000.000	2.155.000.000	2.197.000.000	10.624.000.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tang		621.550.000	614.130.000	621.500.000	683.647.000	817.407.030	899.147.733	3.635.831.763	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Optimalisasi Pengelolaan da Pemasaran Pro Perikanan		210.000.000	324.000.000	377.150.000	434.477.500	485.529.625	542.827.619	2.163.984.744	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Kawasan Budid Laut, Air Payau Air Tawar		286.430.000	315.073.000	346.580.300	381.238.330	419.362.163	461.298.379	1.923.552.172	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Sistem penduk Usaha Bagi Ko dan UKM			267.000.000	293.700.000	323.070.000	355.377.000	390.914.700	1.630.061.700	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro K dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Kewirausahaan Keunggulan Ko dan UKM			441.219.310	485.341.241	533.875.365	587.262.902	645.989.192	2.693.688.009	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro K dan Menengah
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			841.012.564	925.113.820	1.017.625.202	1.119.387.723	1.231.326.495	5.134.465.804	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro K dan Menengah

		Program Pembi Dagang Kecil d Menengah (DKI				2.922.516.306		3.214.767.937		3.536.244.730		3.889.869.203		4.278.856.124		17.842.254.300	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro K dan Menengah
		Program Pembi Industri Kecil d Menengah (IKM				566.137.100		622.750.810		685.025.891		753.528.480		828.881.328		3.456.323.609	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro K dan Menengah
		PAGU MISI 3		8.802.122	000	18.996.774	580	22.333.237	093	23.368.333	510	25.510.196	684	26.803.340	814	117.011.882	681

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan Da Program Priorita Pembangunan	Indikator Kine Program (Outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 4																	
Berpartisipasi Dalam Pembangunan Daerah																	
		Program Peningk Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000		549.459.000	Kantor SATPC
		Program Pencega Dini dan Penanggulangan Bencana Alam				1.113.829.600		1.225.212.560		1.347.733.816		1.482.507.198		1.630.757.917		6.800.041.091	Kantor SATPC
		Program Pencega Tindakan Pelangg Keamanan Keterti Umum				168.249.000		185.073.900		203.581.290		223.939.419		246.333.361		1.027.176.970	Kantor SATPC
		Program Penegak Hukum, Perda, Pe dan Perundang-undangan				101.000.000		111.100.000		122.210.000		134.431.000		147.874.100		616.615.100	Kantor SATPC
		Program Pencega dan Kesiapsiagaa	Terselenggara kegiatan sosi posko, monito	100%	12 bln	194.475.000	12 bln	213.922.500	12 bln	235.314.750	12 bln	258.846.225	12 bln	284.730.847	100%	1.187.289.322	BPBD KAB. BARSEL
		Program Rehabili dan Rekonstruksi	Terselenggara Pendataan Da Bencana, Reh Rekon pasca bencana, prog Rencana Reha Rekon	100%	12 bln	87.700.000	12 bln	96.470.000	12 bln	106.117.000	12 bln	116.728.700	12 bln	128.401.570	100%	535.417.270	BPBD KAB. BARSEL

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan Da Program Priorita Pembangunan	Indikator Kine Program (Outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Kedarura dan Logistik	Terselenggara Survei dan pemetaan dae rawan bencan pengadaan log mengerahkan peralatan & lo	100%	12 bln	179.200.000	12 bln	197.120.000	12 bln	216.832.000	12 bln	238.515.200	12 bln	262.366.720	100%	1.094.033.920	BPBD KAB. BARSEL
		Program Pembinaa Kelembagaan Masy Pedesaan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		Program Pemberda Fakir Miskin, Komu Adat Terpencil (K Penyandang Masal Kesejahteraan Sos PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping So dan Pemberda Fakir Miskin, dan PMKS Lai . Pelatihan un keluarga misk	Jumlah fakir miskin yang tertang i 1.350 orang	15%	220.000.000	20%	270.000.000	20%	335.000.000	20%	400.000.000	20%	465.000.000	100%	1.690.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		Program Peningkat Keberdayaan Masy Pedesaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesej Sosial	Pelatihan Keterampilan Praktek Belaj Kerja Bagi An Terlantar Terr Anak Jalanan, Anak Cacat, d Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluar 500 KK	20%	155.000.000	20%	175.000.000	20%	195.000.000	20%	215.000.000	20%	235.000.000	100%	975.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		Program Pengemba Lembaga Ekonomi Pedesaan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		Program Pembina Hubungan Industr Ketenagakerjaan	Terhimpunnya Jumlah Tenag Kerja dan Te Kerja Purna Tugas di Wil Kab. Barito Selatan			196.309.000		196.309.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		1.004.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan Da Program Priorita Pembangunan	Indikator Kine Program (Outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengemb Masyarakat dan Kawasan Transmi	Peningkatan Pemahaman N Ketenagakerja bagi Pengusa dan Pekerja			56.235.000		56.235.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		286.470.000	01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Transmig Lokal				24.001.000		24.001.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		120.002.000	01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perenca dan Penyiapan Ka				94.460.000		94.460.000		95.000.000		95.000.000		110.000.000		488.920.000	01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pembang Pemukiman dan Penempatan				59.123.000		59.123.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		328.246.000	01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningk Pelayanan Publik Bidang Pendaftar Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kinerja pelaya pendaftaran penduduk dan pencatatan si		12 bln	836.356.000	12 bln	919.991.600	12 bln	1.011.990.760	12 bln	1.113.189.836	12 bln	1.224.508.820	100%	4.269.681.000	01 Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		Program Pengola Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebij Kependudukan	Tersediannya Base, Informa dan regulasi kependudukan		12 bln	122.100.000	12 bln	134.310.000	12 bln	147.741.000	12 bln	162.515.100	12 bln	178.766.610	100%	623.332.710	01 Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		Program Pengelol Data dan Informa Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian		7 keg	7 keg	300.000.000	7 keg	330.000.000	7 keg	363.000.000	7 keg	399.300.000	7 keg	439.230.000		1.831.530.000	05 DISKOMINFO
		Program Publikas Informasi Daerah Kerjasama Inform Dengan Media Ma		4 keg	4 keg	1.270.000.000	4 keg	1.397.000.000	4 keg	1.536.700.000	4 keg	1.690.370.000	4 keg	1.859.407.000	2 Kegia	7.753.477.000	05 DISKOMINFO
		Program Pelayan Pengembangan Komunikasi Inform dan Penyiaran		1 paket keg	1 pake 12 keg	390.500.000	1 paket 12 keg	429.550.000	1 paket 12 keg	472.505.000	1 pak 12 k	519.755.500	1 paket 12 keg	571.731.050		2.384.041.550	05 DISKOMINFO

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan Da Program Priorita Pembangunan	Indikator Kine Program (Outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningka Peran Serta Kepemudaan				829.660.000		889.660.000		949.660.000		1.009.660.000		1.069.660.000		4.748.300.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program pengemb Kebijakan dan Manajemen Olah				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pembina Pemasyarakatan Raga				81.350.000		91.350.000		101.350.000		111.350.000		121.350.000	100%	506.750.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pengemb Destinasi Parwisa				45.000.000		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000	100%	425.000.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pengemb Pasar Parwisata				235.500.000		295.500.000		355.500.000		415.500.000		475.500.000	100%	1.777.500.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pengemba Kemitraaan				79.400.000		109.400.000		139.400.000		169.400.000		199.400.000	100%	697.000.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pengemba Nilai Budaya				188.321.000		228.321.000		268.321.000		308.321.000		348.321.000	100%	1.341.605.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pengelol Kekayaan Budaya				201.759.000		271.759.000		341.759.000		411.759.000		481.759.000	100%	1.708.795.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Pengelol Keragaman Buday				410.170.000		460.170.000		510.170.000		560.170.000		610.170.000		2.550.850.000	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
		Program Perenca Pembangunan Da	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah			16.500.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000		19.000.000		88.000.000	Kecamatan Du Hilir
		Program Pemberd Masyarakat			1 tahun	113.460.000	1 tahun	147.498.000	1 tahun	191.711.400	1 tahun	249.224.820	1 tahun	323.992.266	100%	1.025.886.486	Kecamatan Du Utara

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan Da Program Priorita Pembangunan	Indikator Kine Program (Outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (20		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningk dan Pengembanga Daerah			1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	72.000.000	1 tahun	86.400.000	1 tahun	103.680.000	100%	372.080.000	Kecamatan Ka Kuala
		Program Peningk dan Pengembanga Pengelolaan Aset			1 tahun	10.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Jenamas
		Program Pengemb Informasi dan Komunikasi Publi	Berkembangny layanan infor dan komunika publik			186.500.000		201.125.000		207.881.250		210.775.313		213.814.078	100%	1.020.095.641	BAPPEDA
		Program Pengemb Infrastruktur dan Layanan Telekom dan Penyiaran	Berkembangya infrastruktur layanan telekomunikas penyiaran			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078	100%	290.095.641	BAPPEDA
		Program Penyelenggaraan dan Informatika	Terselenggara layanan pos d informasi			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		290.095.641	BAPPEDA
		Program Perenca Pengembangan W Pemanfaatan Rua Pengendalian Tat Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembanga wilayah pemanfaatan dan pengenda tata ruang			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	100%	580.191.281	BAPPEDA
		Program Optimali Pemanfaatan Tek				286.931.370		315.624.507		347.186.958		381.905.653		420.096.219		1.751.744.707	Dan Kepegawaian Pengembanga Sumber Daya Manusia
		PAGU MISI 4				10.003.088.970		11.036.786.067		12.122.590.224		13.381.455.214		14.733.875.870		60.319.340.347	

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Misi 5												
					Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah												
	4.08-1	Program Peningka Sistem Pengawasa Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebj KDH	Jumlah Temuan LHP		100%	1.716.376.400	100%	1.888.014.040	100%	2.076.815.444	100%	2.284.496.988	100%	2.512.946.687	100%	2.764.241.356	Inspektorat
	4.08-16	Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengaw	Jumlah tenaga pem dan aparatur peng yang berkinerja ba		100%	207.600.000	100%	228.360.000	100%	251.196.000	100%	276.315.600	100%	303.947.160	100%	1.267.418.760	Inspektorat
	4.08-21	Mengintensifkan Penanganan Pen Masyarakat	Jumlah laporan ka dan laporan kerugi negara		100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	Inspektorat
		Peningkatan Koo dan komunikasi Pejabat Pengawa Pemerintah			100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	305.255.000	Inspektorat
	4.08-20	Program Peningka Tata Kelola Penyelenggara Pemerintah Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tenga	Jumlah laporan ha evaluasi terhadap laporan hasil moni dan tindak lanjut h pemeriksaan														
		Program Pember yaan Kelemba ga Kesejahteraan S		75%	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	100%	260.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan N Budaya			1 tahun	1.895.280.100	100%	1.910.280.100	100%	1.926.780.100	100%	1.944.930.100	100%	1.964.895.000	100%	9.642.165.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningk Peran Serta Kepemudaan		70%	1 tahun	110.000.000	100%	121.000.000	1 tahun	133.100.000	1 tahun	146.410.000	1 tahun	161.051.000	100%	671.561.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningk Peran Serta Kepemudaan		85%	1 tahun	680.000.000	1 tahun	748.000.000	1 tahun	822.800.000	1 tahun	905.080.000	1 tahun	995.588.000	100%	4.151.468.000	Sekretariat Daerah
		Program Kerjasa Pembangunan		80%	1 tahun	220.800.000	1 tahun	242.880.000	1 tahun	267.168.000	1 tahun	293.884.800	1 tahun	323.273.280	100%	1.348.006.080	Sekretariat Daerah
		Program Optimal Pemanfaatan Tek Informasi		90%	1 tahun	725.000.000	1 tahun	797.500.000	1 tahun	877.250.000	1 tahun	964.975.000	1 tahun	1.061.472.500	100%	4.426.197.500	Sekretariat Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Penyele Konflik-Konflik Pertanahan		80%	1 tahur	125.000.000	1 tahur	125.000.000	1 tahur	125.000.000	1 tahur	125.000.000	1 tahur	125.000.000	100%	625.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Pelayan Pengadaan Peme			1 tahur	1.492.300.000	10 tahur	1.650.000.000	10 tahur	1.650.000.000	10 tahur	1.725.000.000	10 tahur	1.800.000.000	100%	8.317.300.000	Sekretariat Daerah
		Program Penataa Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengaw			1 tahur	25.000.000	1 tahur	35.000.000	1 tahur	45.000.000	1 tahur	45.000.000	1 tahur	50.000.000	100%	200.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningk Pengembangan S Pelaporan Capai Kinerja dan Keua	Penyusunan Pela Prognosis Realis Anggaran SKPD S Kab. Barsel tersusunnya lapo keuangan akhir ta penatausahaan keuangan SKPD S Akuntansi dan La keuangan Setda K	7%	1 tahur	80.000.000	1 tahur	238.000.000	1 tahur	261.800.000	1 tahur	287.980.000	1 tahur	316.778.000	100%	1.184.558.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningk Sistem Pengawas Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Keb KDH	Terlaksananya tir lanjut hasil peng	80%	1 tahur	200.000.000,00	1 tahur	1.580.000.000,00	1 tahur	1.738.000.000,00	1 tahur	1.911.800.000,00	1 tahur	2.102.980.000,00	100%	7.532.780.000	Sekretariat Daerah
		Program Penataa Peraturan perund undangan	Kajian Peraturan Perundang-Undan Daerah Terhadap Peraturan Perund Undangan yang B Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peunda Undangan Daerah	80%	1 tahur	815.000.000	1 tahur	1.508.320.000	10 tahur	988.150.000	1 tahur	1.086.965.000	10 tahur	1.195.661.500	100%	5.594.096.500	Sekretariat Daerah
		Program Pembina dan Pengembang Aparatur		80%	1 tahur	25.000.000	1 tahur	137.500.000	1 tahur	151.250.000	1 tahur	166.375.000	1 tahur	183.013.000	100%	663.138.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningk Kapasitas Kelem Perencanaan Pembangunan Da	Penyiapan Lapora Penyelenggaraan Pemerintahan Da (LPPD) dan Infor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Da (ILPPD)	90%	1 tahur	165.000.000	1 tahur	170.000.000	1 tahur	195.000.000	1 tahur	205.000.000	1 tahur	245.000.000	100%	980.000.000	Sekretariat Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengembangan Komunikasi, Info dan Media Massa	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan De	70%	1 tahun	280.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	100%	1.496.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningk Pelayanan Kedin Kepala Daerah/W Kepala Daerah		60%	1 tahun	1.635.000.000	10 tahun	1.720.500.000	10 tahun	1.720.500.000	10 tahun	1.720.500.000	10 tahun	1.720.500.000	100%	8.517.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Perencan Pembangunan Dae	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	19 dokumen	19 dokumen	2935000 000	19 dokumen	4230000 000	19 dokumen	4684000 000	19 dokumen	4987600 000	19 dokumen	9000000 000	19 dokume	25836600 000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengenda dan Evaluasi Pembangunan Dae	Jumlah dokumen h pengendalian dan pembangunan daer	12 dokumen	12 dokumen	1225000 000	12 dokumen	1500000 000	12 dokumen	1900000 000	12 dokumen	2300000 000	12 dokumen	3500000 000	12 dokume	10425000 000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningka Pengembangan Pengelolaan Keua Daerah	Jumlah laporan ke PD yang memenuhi standar	200 buku peraturan SKPD	200 buku peratura 46 SKP	9594500 000	200 buku peratura 46 SKP	7670000 000	200 buku peratura 46 SKP	7740000 000	200 buku peratura 46 SKP	7802000 000	200 buku peratura 46 SKP	8100000 000	200 buku 1 peratur 46 SKP	40906500 000	Badan Keuang Daerah
		Program Pembinaa fasilitasi pengelol keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS bagian keuangan mendapa pembinaan	0,	42 raperda/ perbub/3 orang	1200000 000	42 raperda/ perbub/3 orang	1380000 000	42 raperda/ perbub/3 orang	1414000 000	42 raperda/ perbub/3 orang	1450500 000	42 raperda/ perbub/3 orang	1763080 000	42 raperda aperbub 00 ora	7207580 000	Badan Keuang Daerah
		Program pembinaa fasilitasi pengelol keuangan desa/kelurahan	Jumlah kampung y telah menyampaika laporan keungan pemerintahan kamp yang baik	14 laporan keputusan	0,	0,	14 laporan keputus	350000 000	14 laporan keputus	360000 000	14 laporan keputus	391300 000	14 laporan keputus	432700 000	14 laporan keputus	1534000 000	Badan Keuang Daerah
		Program Peningka Pengembangan Pengelolaan Aset/ Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai a oleh Bid Asset Bad Keuangan Daerah audit BPK	1 Dokumen	1 Dokumen	2550000 000	10 Dokumen	3330000 000	10 Dokumen	3450000 000	10 Dokumen	3505000 000	10 Dokumen	4050000 000	5 dokume	16885000 000	Badan Keuang Daerah
		Program Peningka Akuntabiltas Peng Keuangan Daerah	Jumlah temuan pelanggaran keuda itindaklanjuti	0,	0,	0,	1 buah	210000 000	1 buah	217700 000	1 buah	240600 000	1 buah	334400 000	1 buah	1002700 000	Badan Keuang Daerah
		Program Peningka Kapasitas Sumber Aparatur	Persentase aparat memenuhi standar kompetensi/kualifi pada Unit Kerjanya	1,	1,	128943 857,	1,	97000 000,	1,	98800 000,	1,	99900 000,	1,	100900 000,	1,	525543 857,	Badan Kepegawaian Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembina ASN Kabupaten B Selatan	Pengurusan Kartu Taspen, Karis, K dan Karpeg; Penyelesaian Penanganan Kasu kasus Pelanggara Disiplin PNS; Bia Pemulangan PNS Pensiun; Pendata Penyimpanan Dat Kab. Barsel (SAP			307.689.000		338.457.900		372.203.690		409.134.059		452.487.465		1.879.971.758	Badan Kepegawaia Pengembang Sumber Day Manusia
		Program Pembina dan Pengembang Aparatur	Seleksi Penerima Calon PNS dan Pengurusan Usul Penetapan NIP; Penyusunan dan Pengurusan Form PNS Kabupaten B Selatan; Penyele UKP PNS; Penyelenggaraan Sosialisasi Tenta Perhitungan PAK Jabatan Fungsion Penyusunan DUK Daftar Nominatif Kabupaten Barito Selatan			482.452.520		470.197.772		429.247.900		642.144.304		705.088.735		2.729.130.831	Badan Kepegawaia Pengembang Sumber Day Manusia
		Program Optimal Pemanfaatan Tek				286.931.370		315.624.507		347.186.958		381.905.653		420.096.219		1.751.744.707	Badan Kepegawaia Pengembang Sumber Day Manusia
		Kelembagaan KORPRI/ASN				173.240.000		190.575.000		183.877.650		202.265.415		222.491.957		972.449.222	Badan Kepegawaia Pengembang Sumber Day Manusia
		Program Koordin Pelaksanaan Keb Kependudukan	Akurasi Data & K Pelayanan Admin Kependudukan		12 bulan	132.900.000	12 bulan	146.190.000	12 bulan	160.809.000	12 bulan	176.889.900	12 bulan	194.578.890	100,00%	678.467.790	Dinas Kependuduk dan Pencata Sipil
		Program Peningk Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Pen dan Pencatatan S	Meningkatnya kua dan kinerja pelay pendaftaran pend dan pencatatan s		12 bulan	836.356.000	12 bulan	919.991.600	12 bulan	1.011.990.760	12 bulan	1.113.189.836	12 bulan	1.224.508.820	100,00%	4.269.681.017	Dinas Kependuduk dan Pencata Sipil

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengola Data, Penyediaa Informasi dan Penyusunan Keb Kependudukan	Tersediannya Dat Base, Informasi, regulasi kependu		12 bulan	122.100.000	12 bulan	134.310.000	12 bulan	147.741.000	12 bulan	162.515.1	12 bulan	178.766.61	100,00%	623.332.71	Dinas Kependuduk dan Pencata Sipil
		Program Penataa Administrasi Kependudukan			12 bulan	665.390.000	12 bulan	731.929.000	12 bulan	805.121.900	12 bulan	885.634.09	12 bulan	974.197.49	100,00%	3.396.882.490	Dinas Kependuduk dan Pencata Sipil
		Program Pelayan Keluarga Berenc Kesehatan Repro				553.000.000		563.000.000		573.000.000		513.000.000		523.000.000		2.725.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan da Perlindungan
		Program Advokas Komunikasi, Info dan Edukasi (KIE				67.500.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		397.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan da Perlindungan
		Program Kesehat Reproduksi Rema				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		200.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan da Perlindungan
		Program Penguat Kelembagaan Ke Kecil Berkualitas				275.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000		295.000.000		1.425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan da Perlindungan

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Keseras dan Kebijakan Pendataan Kependudukan				182.500.000		467.500.000		182.500.000		182.500.000		467.500.000		1.482.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan
		Program Peningk Kualitas Hidup Perempuan				95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		495.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan
		Program Peningk Kualitas Keluarg				100.000.000		114.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000		664.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan
		Program Pemenu Hak Anak				80.000.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000		90.000.000		432.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan
		Program Perlindu Perempuan				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan
		Program Perlindu Hak Anak				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Penguat Kelembagaan da Sumber Daya Ap				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan
		Program Pengen Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup				335.000.000	10 Perda	368.500.000		405.350.000	10 Perda	445.885.000		490.473.500	10 Perda	539.520.850	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindu dan Konservasi S Daya Alam		1 Lokasi	1 lokasi	61.600.000	1 lokasi	67.760.000	1 lokasi	74.536.000	1 lokasi	81.989.600	1 lokasi	90.188.560	5 lokas	376.074.160	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Rehabil dan Pemulihan Cadangan Sumbe Daya Alam	Program Peningk Kualitas dan Aks Informasi SDA da		12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	59.895.000	12 bulan	65.884.500	1 paket	274.729.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningk Kualitas dan Aks Informasi SDA da	Pengembangan D dan Informasi SI LH			205.000.000		225.500.000		248.050.000		272.855.000		300.140.500		1.251.545.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan Ekowisata dan Ja Lingkungan Di Kawasan-Kawasa Konservasi Laut Hutan				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		305.255.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penger Kebakaran Hutan	Berkurangnya kebakaran hutan lahan		12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.400.000	12 bulan	53.240.000	12 bulan	58.564.000		244.204.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelo Ruang Terbuka H (RTH)				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		122.102.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penang Persampahan da Limbah Lingkung				3.069.900.000		3.376.890.000		3.714.579.000		4.086.036.900		4.494.640.590		18.742.046.490	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Adiwiyata	Pengembangan Pendidikan Lingk Hidup			60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		366.306.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Sarana Prasarana Keber				480.839.000		528.922.900		581.815.190		639.996.709		703.996.380		2.935.570.179	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penigka Kapasitas UPTD Tempat Pemrose Akhir (TPA)				397.600.000		437.360.000		481.096.000		529.205.600		582.126.160		2.427.387.760	Dinas Lingkungan Hidup

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Penataa Hukum/Peratura Perundang-Unda Lingkungan Hidu				92.000.000		101.200.000		111.320.000		122.452.000		134.697.200		561.669.200	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelo Data dan Informa Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian		7 kegiatan	7 kegiatan	300.000.000	7 kegiatan	330.000.000	7 kegiatan	363.000.000	7 kegiatan	399.300.000	7 kegiatan	439.230.000		1.831.530.000	DISKOMINFO
		Program Publika Informasi Daerah Kerjasama Inform Dengan Media M		4 kegiatan	4 kegiatan	1.270.000.000	4 kegiatan	1.397.000.000	4 kegiatan	1.536.700.000	4 kegiatan	1.690.370.000	4 kegiatan	1.859.407.000	4 kegia	7.753.477.000	DISKOMINFO
		Program Pelayan Pengembangan Komunikasi Infor dan Penyiaran		1 paket; 12 kegiatan;	1 paket; kegiatan	390.500.000	1 paket; kegiatan	429.550.000	1 paket; kegiatan	472.505.000	1 paket; kegiatan	519.755.500	1 paket; kegiatan	571.731.050		2.384.041.550	DISKOMINFO
		Program Pengembangan Komunikasi, Info dan Media Massa			4 kegiatan	315.000.000	4 kegiatan	346.500.000	4 kegiatan	381.150.000	4 kegiatan	419.265.000	4 kegiatan	461.191.500		1.923.106.500	DISKOMINFO
		Program Pengaw dan Pengendalia Perijinan				134.450.000		147.895.000		165.000.000		165.000.000		175.000.000		787.345.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu
		Program Peningk Kualitas Pelayan Perijinan				102.450.000		110.000.000		118.000.000		118.000.000		118.000.000		566.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu
		Program Penang Pengaduan				71.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		415.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu
		Program Pamera Promosi Investas				155.004.000		178.000.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		897.004.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu
		Program Peningk Peran Serta Kepemudaan				829.660.000		889.660.000		949.660.000		1.009.660.000		1.069.660.000		4.748.300.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pembina dan Pemasyaraka Olah Raga				81.350.000		91.350.000		101.350.000		111.350.000		121.350.000	100%	506.750.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pengembangan Destinasi Parwis				45.000.000		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000	100%	425.000.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pengembangan P Parwisata				235.500.000		295.500.000		355.500.000		415.500.000		475.500.000	100%	1.777.500.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pengemb Kemitraaan				79.400.000		109.400.000		139.400.000		169.400.000		199.400.000	100%	697.000.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pengemb Nilai Budaya				188.321.000		228.321.000		268.321.000		308.321.000		348.321.000	100%	1.341.605.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pengelo Kekayaan Budaya				201.759.000		271.759.000		341.759.000		411.759.000		481.759.000	100%	1.708.795.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Pengelo Keragaman Buda				410.170.000		460.170.000		510.170.000		560.170.000		610.170.000		2.550.850.000	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan
		Program Peningk Kesejahteraan P	Meningkatnya pelayanan	298.000.000		555.000.000		585.000.000		664.000.000		646.000.000		1.233.000.000		3.683.000.000	Dinas Ketah Pangan, Pertanian da Perikanan
		Program Pember Masyakat Dalam Pengelolaan Sum Daya		300.000.000		955.000.000		2.729.750.000		2.699.300.000		3.489.230.000		4.283.152.400		14.156.432.400	Dinas Ketah Pangan, Pertanian da Perikanan
		Program Peningk Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perket		360.370.000		595.000.000		963.000.000		625.000.000		680.000.000		860.000.000		3.723.000.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningk Produksi Pertanian/Perket		1.606.350.000		Rp 3.601.250.000		3.705.500.000		3.929.000.000		3.971.000.000		5.056.000.000		20.262.750.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Peningk Ketahanan Panga		710.418.000		745.938.900		783.235.845		822.397.637		863.517.519		906.693.395		4.121.783.296	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perika		2.248.634.000		2.473.497.400		2.720.847.140		2.992.931.854		3.292.225.039		958.253.450		12.437.754.883	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Peningk Produksi Hasil Peternakan		461.500.000		1.475.500.000		1.560.000.000		1.620.500.000		1.655.500.000		1.705.000.000		8.016.500.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pencega dan penanggulan Penyakit Ternak		256.500.000		246.500.000		308.000.000		297.000.000		330.000.000		325.000.000		1.506.500.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kelembagaan		1.442.370.000		2.058.000.000		2.091.000.000		2.123.000.000		2.155.000.000		2.197.000.000		10.624.000.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangk		621.550.000		614.130.000		621.500.000		683.647.000		817.407.030		899.147.733		3.635.831.763	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Optimal Pengelolaan dan Pemasaran Produ Perikanan		210.000.000		324.000.000		377.150.000		434.477.500		485.529.625		542.827.619		2.163.984.744	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Kawasan Budiday Laut, Air Payau Tawar		286.430.000		315.073.000		346.580.300		381.238.330		419.362.163		461.298.379		1.923.552.172	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		Program Pengembangan Data/Informasi	Berkembangnya lay data dan informasi disediakan	1 paket	1 paket	724.500.000	1 paket	760.725.000	1 paket	798.761.250	1 paket	838.699.313	1 paket	880.634.278	5 paket	4.003.319.841	BAPPEDA
		Program Perenca Pembangunan Da	Meningkatnya kua perencanaan pembangunan dae	1 paket	1 paket	882.000.000	1 paket	926.100.000	1 paket	972.405.000	1 paket	1.021.025.250	1 paket	1.072.076.513	5 paket	4.873.606.763	BAPPEDA

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program perenca pembangunan ek	Meningkatnya kua perencanaan pembangunan eko	1 paket	1 paket	378.000.000	1 paket	396.900.000	1 paket	416.745.000	1 paket	437.582.250	1 paket	459.461.363	5 paket	2.088.688.613	BAPPEDA
		Program Perenca Sosial dan Buday	Meningkatnya kua perencanaan sosi budaya			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
		Program Perenca Infrastruktur dan Prasarana Wilaya	Meningkatnya kua perencanaan infras dan prasarana wila			441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625		536.038.256	100%	2.436.803.381	BAPPEDA
		Program Perenca Pembangunan Da Rawan Bencana	Meningkatnya kua perencanaan pembangunan dae rawan bencana			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	100%	580.191.281	BAPPEDA
		Program perenca pendidikan dan K	Meningkatnya kua perencanaan pendidikan dan k			315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469	100%	1.740.573.844	BAPPEDA
		Program Perenca Bidang Kependud dan Kepemerinta	Meningkatnya kua perencanaan bida kependudukan da kepemerintahan			115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.688		140.390.972	5 paket	638.210.410	BAPPEDA
		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publ	Berkembangnya layanan informas komunikasi publi			186.500.000		201.125.000		207.881.250		210.775.313		213.814.078	100%	1.020.095.641	BAPPEDA
		Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi d Penyiaran	Berkembangya infrastruktur dan layanan telekomu dan penyiaran			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078	100%	290.095.641	BAPPEDA
		Program Penyelenggaraan dan Informatika	Terselenggaranya layanan pos dan informasi			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		290.095.641	BAPPEDA
		Program Perenca Pengembangan W Pemanfaatan Rua dan Pengendalia Ruang	Meningkatnya kua perencanaan pengembangan w pemanfaatan ruan pengendalian tat			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	100%	580.191.281	BAPPEDA
		Program Peningk Pengembangan S Kinerja Pendapa Daerah			1 Buku	655.628.000	1 Buku	714.776.000	1 Buku	773.924.000	1 Buku	833.072.000	1 Buku	892.220.000	100%	3.463.992.000	BPKAD

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningk dan Pengembang Pengelolaan Ase Daerah				1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	100%	6.500.000.000	BKPPKAD
		Program Peningk dan Penagihan				821.128.000	1 Buku	893.776.000	1 Buku	970.000.000	1 Buku	1.045.072.000	1 Buku	1.119.720.000	100%	4.133.568.000	BKPPKAD
		Program Peningk dan Pengembang Pengelolaan Keu Daerah				3.431.153.000	1 Buku	3.740.026.000	1 Buku	4.048.899.000	1 Buku	4.357.772.000	1 Buku	4.551.445.000	100%	17.013.142.000	BKPPKAD
		Program Pembinaa Kelembagaan Mas Pedesaan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pemberda Fakir Miskin, Kom Adat Terpencil (dan Penyandang M Kesejahteraan Sos PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petu dan Pedamping S dan Pemberdayaa Fakir Miskin, KA PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin	Jumlah fak miskin yang tertangani 1.350 orang	15%	220.000.000	20%	270.000.000	20%	335.000.000	20%	400.000.000	20%	465.000.000	100%	1.690.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Peningka Keberdayaan Masy Pedesaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pelayana Rehabilitasi Kesejahteraan So	Pelatihan Ketera dan Praktek Bela Kerja Bagi Anak Terlantar Termas Anak Jalanan, An Cacat, dan Anak	Jumlah Kep Keluarga 5 KK	20%	155.000.000	20%	175.000.000	20%	195.000.000	20%	215.000.000	20%	235.000.000	100%	975.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pengemb Lembaga Ekonomi Pedesaan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pengemb Lembaga Ekonomi Pedesaan				600.000.000		600.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000		3.100.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pembinaa Penyandang Cacat Trauma				40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		300.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Peningka Kapasitas Aparatu Pemerintah Desa	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan			810.000.000		835.000.000	-	865.000.000	-	945.000.000	-	965.000.000		4.420.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembinaa Penyandang Penya Sosial (eks. Na pidana, PSK, Nark dan Penyakit Sosi Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Ketram Berusaha Bagi Ek Penyandang Peny Sosial			30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Bantuan Jaminan Kesejahte Sosial	Pengumpulan dan Pengelolaan Sum Dana Sosial			45.000.000		45.000.000	-	45.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000		235.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pemberda Kelembagaan Kesejahteraan So	Peningkatan Kual SDM Kesejahtera Sosial Masyaraka			215.000.000		245.000.000	-	280.000.000	-	295.000.000	-	305.000.000		1.340.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Pembinaa Pengembangan Organisasi Kepem	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepem (Pengadaan sara prasarana Karang Taruna)			100.000.000	18%	110.000.000	18%	120.000.000	23%	130.000.000	23%	140.000.000	100%	600.000.000	Dinas Sosia Pemberdaya Masyarakat Desa
		Program Peningk Kualitas Pelayan Informasi.	Ketersediaan aks layanan informas		12 bulan	135.500.000	100	204.050.000	100	224.455.000	100	246.900.500	100	271.590.550	12 bulan	1.082.496.050	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da
		Program Pemelih Rutin / Program Berkala Sarana Prasarana Kears	Sarana Prasarana Kearsipan dan Dokumen/Arsip Y Terpelihara			25.000.000	100	52.500.000	100	57.750.000	100	63.525.000	100	69.877.500	100%	268.652.500	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da
		Program Peningk Sarana dan Pras Aparatur	Sarana dan prasa aparatur yang le dan modern		1 laporan	78.200.000	100,00	612.545.000	100,00	195.299.500	100,00	214.829.450	100,00	236.312.395	100%	1.337.186.345	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da
		Program Peningk Kapasitas Sumbe Aparatur.	Sumber daya apa yang berkualitas profesional			45.200.000	100	108.000.000	100,00	118.800.000	100,00	130.680.000	100,00	143.748.000	100%	546.428.000	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da
		Program Peningk disiplin aparatur	Aparatur yang te dan disiplin.			22.880.000	100	25.168.000	100	27.684.800	100,00	30.453.280	100,00	33.498.608	100%	139.684.688	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da
		Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Admin Kantor Yang Berb Kinerja			725.558.000	100,00	798.113.800	100,00	877.925.180	100,00	965.717.698	100,00	1.062.289.468	100%	4.429.604.146	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da
		Program Peningk pengembangan s pelaporan capai kinerja dan keua	Pelaporan SKPD akurat dan tepat			20.000.000	100,00	22.000.000	100,00	24.200.000	100,00	26.620.000	3,00	29.282.000	100%	122.102.000	Dinas Perpustakaa dan Arsip Da

No.	KODE	Urusan/Bidang Ur Pemerintahan D Program Priorit Pembangunan	Indikator Kinerj Program (Outcon	Kondisi Kine Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Da Penanggung j
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD (202		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningk dan Pengembang Pengelolaan Ase Daerah.	Tertibnya pengel aset.			15.000.000	100,00	16.500.000	100,00	18.150.000	100,00	19.965.000	100,00	21.961.500	100%	91.576.500	Dinas Perpustakaa dan Arsip D
		PAGU MISI 5				70.523.998.447	80558%	80.869.310.444	80558%	84.325.150.143	80563%	90.584.360.171	70863%	101.759.706.011	15300%	412.623.044.867	

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan Layanan SOPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pr (outcome)	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			URUSAN WAJIB															
1	01		PENDIDIKAN															
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN															Dinas Pendid
1	01	1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya adr perkantoran: jasa sur menyurat, komunikasi kantor, rakor, konsult keluar daerah	100%	12 bulan	Rp 7.155.470.000	12 bln	7.871.017.000	12 bln	Rp 7.871.017.000	12 bln	Rp 8.658.118.700	12 bln	Rp 8.658.118.700	100%	40.213.741.400	Dinas Pendid
		2	Program Peningk Sarana & Prasar Aparatur	Terlaksananya pemba gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengka kantor, pemeliharaan pemeliharaan perleng gedung	100%	12 bulan	Rp 1.626.220.000	12 bulan	1.788.842.000	12 bulan	Rp 1.788.842.000	12 bulan	1.967.726.200	12 bulan	Rp 1.967.726.200	100%	9.139.356.400	Dinas Pendid
		3	Program Peningka Kapasitas Sumber Aparatur	Tercapainya bimbinga implementasi peratur perundang-undangan		1 kegiatan	Rp 40.000.000	1 kegiatan	44.000.000	1 kegiatan	Rp 44.000.000	1 kegiatan	48.400.000	1 kegiatan	Rp 48.400.000	100%	224.800.000	Dinas Pendid
		4	Program Pendidi Anak Usia Dini	APM PAUD		1 tahun	Rp 1.825.220.000	1 tahun	2.007.742.000	1 tahun	Rp 2.007.742.000	1 tahun	2.208.516.200	1 tahun	Rp 2.208.516.200	100%	10.257.736.400	Dinas Pendid
		5	Program Wajib E Pendidikan Dasa Sembilan Tahun	Jumlah Sekolah sasaran		1 tahun	Rp 20.290.163.500	1 tahun	22.319.179.850	1 tahun	Rp 22.319.179.850	1 tahun	24.551.097.835	1 tahun	Rp 24.551.097.835	100%	114.030.718.870	Dinas Pendid
		6	Program Pendidi Non Formal dan Informal	jumlah Peserta pendi non formal		1 tahun	Rp 174.350.000	1 tahun	Rp 191.785.000	1 tahun	Rp 191.785.000	1 tahun	Rp 210.963.500	1 tahun	Rp 210.963.500	100%	979.847.000	Dinas Pendid
		7	Program Peningk Mutu Pendidik da Tenaga Kependic	Persentase pendidik y memiliki kompetensi s bidangnya		1 tahun	Rp 1.173.203.500	1 tahun	1.290.523.850	1 tahun	Rp 1.290.523.850	1 tahun	1.419.576.235	1 tahun	Rp 1.419.576.235	100%	6.593.403.670	Dinas Pendid
		8	Program Manajer Pelayanan Pendi	Persentase sekolah y sudah menerapkan pr prinsip manajemen be sekolah (MBS)		1 tahun	Rp 801.446.700	1 tahun	Rp 881.591.370	1 tahun	Rp 881.591.370	1 tahun	969.750.507	1 tahun	Rp 969.750.507	100%	4.504.130.454	Dinas Pendid

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pr (outcome)	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	01	9	Program Pendidi Tinggi	Jumlah sekolah tingg difasilitasi/dibantu (b	50%	55%	Rp 764.850.000	60%	Rp 841.335.000	65%	Rp 841.335.000	65%	925.468.500	70%	Rp 925.468.500	70%	4.298.457.000	Dinas Pendi
JUMLAH							35.787.823.700		39.366.606.070		43.303.266.677		47.633.593.345		52.396.952.679		218.488.242.471	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggur Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03		KESEHATAN															
1	03	01	DINAS KESEHATAN															Dinas Kesel
		1	Program Pelayana Administrasi Perka	Terselenggaranya administrasi perkan jasa surat menyurat komunikasi, rutin ka rakor, konsultasi ke daerah	100%	100%	9.082.421.813	100%	9.990.663.994	100%	10.989.770.393	100%	12.088.747.432	100%	13.297.589.176	100%	55.449.192.807	Dinas Kesel
		2	Program Peningkat Sarana Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedur rehabilitasi, pengad perlengkapan kanto pemeliharaan rutin, perlengkapan gedun	100%	100%	2.901.815.000	100%	3.191.996.500	100%	3.511.196.150	100%	3.862.315.765	100%	4.248.547.342	100%	17.715.870.757	Dinas Kesel
		3	Program Peningkat Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian	Pegawai N/A					1 Paket	30.000.000	1 Pkt	33.000.000	1 Pkt	36.300.000	1 Pkt	99.300.000	Dinas Kesel
		4	Program Peningkat Kapasitas Sumber Aparatur	Tersedianya Kualita Kesehatan, standar pelayanan, terakred terlatih, terususunn kepegawaian dan penyuluhan bahaya dan penyakit menul (PMS)	1 Paket	1 paket	254.191.300	1 paket	279.610.430	1 paket	307.571.473	1 paket	338.328.620	1 paket	372.161.482	1 paket	1.551.863.306	Dinas Kesel
		5	Program Peningkat Pengembangan Sis Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuan	" Dokumen perenca dan penganggaran " Tersusunya Profil dan Lakip " Terlaksananya Ra Koordinasi dengan " Tersusunnya Doku DHA Kabupaten	4 Laporan	5 laporan	138.257.500	5 laporan	152.083.250	5 laporan	167.291.575	5 laporan	184.020.725	5 laporan	202.422.798	5 laporan	844.182.703	Dinas Kesel
		6	Program Obat dan Perbekalan Keseha	Pengadaan Obat da Perbekalan Kesehat	100%	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	4.818.715.000	Dinas Kesel
		7	Program Upaya Kesehatan Masyar	Terselenggaranya pelayanan kesehata masyarakat	100%	100%	1.083.400.000	100%	1.191.740.000	100%	1.310.914.000	100%	1.442.005.400	100%	1.586.205.940	100%	6.614.265.340	Dinas Kesel
1		8	Program Perbaikar Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Prevalensi Balita G Kurang dan Gizi Bu	100%	< 5%	148.761.200	< 5%	163.637.320	< 5%	180.001.052	< 5%	198.001.157	< 5%	217.801.273	< 5%	908.202.002	Dinas Kesel
		9	Program Pengawas Obat dan Makanan	Persentase kasus o makanan yang tidak	Pengawas Berkala semua 5 apotik, Te obat dar Pelayana	100%	4.590.000	100%	5.049.000	100%	5.553.900	100%	6.109.290	100%	6.720.219	100%	28.022.409	Dinas Kesel
		10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	" Tersebarnya Infor Kesehatan melalui Komunikasi " Terbentuknya Des	Pelaksana Germas d Puskesma	100%	453.063.891	100%	498.370.280	100%	548.207.308	100%	603.028.039	100%	663.330.843	100%	2.766.000.361	Dinas Kesel

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggur Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		11	Program Pengemba Lingkungan Sehat	Penyehatan SAB da Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualita Lingkungan, Pengembangan Wila Sehat, Pengendalia Pencemaran	100%	100%	418.990.000	100%	460.889.000	100%	506.977.900	100%	557.675.690	100%	613.443.259	100%	2.557.975.849	Dinas Kesel
		12	Program Pencegah Penanggulangan P Menular	" Terlaksananya Pengawasan Kualita dan sanitasi lingkur penembangan wilay sehat, dan pengend dampak resiko penc lingkungan	100%	100%	946.460.000	100%	1.041.106.000	100%	1.145.216.600	100%	1.259.738.260	100%	1.385.712.086	100%	5.778.232.946	Dinas Kesel
		13	Program Peningkat Pelayanan Kesehat dan Anak	" Peningkatan Kuali Pelayanan Kesehata " Neonatal, bayi da Balita	Data Audit Materil	100%	55.196.000	100%	60.715.600	100%	66.787.160	100%	73.465.876	100%	80.812.464	100%	336.977.100	Dinas Kesel
		14	Pengawasan dan Pengendalian Kese Makanan	Peningkatan penga kesehatan makanan	100%	100%	18.200.000	100%	20.020.000	100%	22.022.000	100%	24.224.200	100%	26.646.620	100%	111.112.820	Dinas Kesel
		15	Program Kegiatan NON FISIK	Terlaksananya Kegi Promotif dan Preve bersumber DAK Non	100%	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	42.629.105.000	Dinas Kesel
		16	Program Dana Kapitalisasi Jamin Kesehatan Nasiona pada FKTP (Dana bersumber dari BP Pusat)	Terlaksanya Dana Kapitalisasi Jamina Kesehatan Nasional	80	83%	3.068.916.708	83%	3.375.808.370	83%	3.713.389.207	83%	4.084.728.128	83%	4.493.200.940	83%	18.736.043.345	Dinas Kesel
		17	Program Pengadaa peningkatan saran Prasarana RS	Cakupan layanan pengadaan sarana d prasarana rumah sa	C	100%	3.130.000.000	100%	3.443.000.000	100%	3.787.300.000	100%	4.166.030.000	100%	4.582.633.000	100%	19.108.963.000	Dinas Kesel
		18	Program Peningkat Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase layanan kesehatan yang mer standar	100%	100%	26.000.000.000	100%	28.600.000.000	100%	31.460.000.000	100%	34.606.000.000	100%	38.066.600.000	100%	158.732.600.000	Dinas Kesel
JUMLAH							57.193.844.904		61.964.272.994		67.241.783.893		73.017.005.383		79.369.717.072		338.786.624.745	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pro (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Te RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03		PEKERJAAN UMUM															
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya adm perkantoran: jasa sura menyurat, komunikasi, kantor, rakor, konsulta daerah		1 tahun	2.955.200.00	1 tahun	3.250.720.00	1 tahun	3.575.792.00	1 tahun	3.933.371.20	1 tahun	4.326.708.320	1 tahun	18.041.791.520	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		2	Program Peningk Sarana dan Pras Aparatur	Terlaksananya pembangunan/rehabilit meliharaan gedung da peralatan kantor		1 tahun	1.110.000.00	1 tahun	1.221.000.00	1 tahun	1.343.100.00	1 tahun	1.477.410.00	1 tahun	1.625.151.000	1 tahun	6.776.661.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Program Peningk Disiplin Aparatu	Tercapainya tingkat ki pegawai yang efektif		1 tahun	125.000.00	1 tahun	137.500.00	1 tahun	151.250.00	1 tahun	166.375.00	1 tahun	183.012.500	1 tahun	763.137.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Program Peningk Kapasitas Sumbe Daya Aparatur	Tersedianya aparatur berkualitas dan berper	1 paket	paket	200.000.000	paket	220.000.000	paket	242.000.000	paket	266.200.000	paket	292.820.000	paket	1.221.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Program Peningk Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Terlaksananya sistem informasi yang akunta		1 tahun	285.000.000		313.500.000		344.850.000		379.335.00	1 tahun	417.268.500	1 tahun	1.739.953.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	Program Peningk Pengembangan S Pelaporan Capai Kinerja dan Keua	Tersedianya sistem ma pelaporan melalui apli internet		1 tahun	235.000.000		258.500.000	paket	284.350.000	paket	312.785.00	1 tahun	344.063.500	paket	1.434.698.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	Program pemban jalan dan jembat	Tersedianya transporta daerah yang masih ter		1 tahun	15.867.500.000		17.454.250.000	paket	19.199.675.000	paket	21.119.642.50	1 tahun	23.231.606.750	paket	96.872.674.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Program peningk jalan dan jembat	Terpenuhinya kelancar transportasi yang lebil		1 tahun	53.322.500.000		58.654.750.000	paket	64.520.225.000	paket	70.972.247.50	1 tahun	78.069.472.250	paket	325.539.194.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	Program rehabilitasi/pem an jalan dan jem	Terpeliharanya jalan d jembatan sesuai fungs		1 tahun	2.189.000.000		2.407.900.000	paket	2.648.690.000	paket	2.913.559.00	1 tahun	3.204.914.900	paket	13.364.063.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pro (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Te RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		10	Program Pemban saluran drainase gorong gorong	Tertatanya saluran/dra perkotaan/perdesaan s fungsi		1 tahun	780.913.100	1 paket	859.004.410	1 paket	944.904.851	1 paket	1.039.395.336	1 tahun	1.143.334.870	paket	4.767.552.557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Program Pengembangan A Minum	Tersedianya air bersih memenuhi syarat kuali untuk kebutuhan masy		1 tahun	6.175.000.000	1 paket	6.792.500.000	1 paket	7.471.750.000	1 paket	8.218.925.000	1 tahun	9.040.817.500	paket	37.698.992.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12	Program perluas peningkatan SR	Terjangkaunya kebutuh bersih yang berkualita masyarakat		1 tahun	500.000.000	1 paket	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	1 tahun	732.050.000	paket	3.052.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13	Program Pemban Sarana Pengolah Minum (SPAM)	Tersedianya sistem pe air bersih yang memen syarat		1 tahun	3.500.000.000	1 paket	3.850.000.000	1 paket	4.235.000.000	1 paket	4.658.500.000	1 tahun	5.124.350.000	paket	21.367.850.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14	Program Pemban Prasarana Sanita	Tertatanya sistem san baik		1 tahun	2.600.000.000	1 paket	2.860.000.000	1 paket	3.146.000.000	1 paket	3.460.600.000	1 tahun	3.806.660.000	paket	15.873.260.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15	Program Penyeh Lingkungan Pemukiman (PLP	Terlaksananya lingkun permukiman yang seha		1 tahun	12.000.000.000	1 paket	13.200.000.000	1 paket	14.520.000.000	1 paket	15.972.000.000	1 tahun	17.569.200.000	paket	73.261.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		16	Program Rehabil Jaringan Irigasi Rawa	Terkelolanya bangunar jaringan irigasi yang b sesuai fungsinya		1 tahun	1.006.641.000	1 paket	1.107.305.100	1 paket	1.218.035.610	1 paket	1.339.839.171	1 tahun	1.473.823.088	paket	6.145.643.969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17	Program Peningk dan Pembanguna Jaringan Irigasi Rawa	Terkelolanya air baku kebutuhan irigasi yang baik		1 tahun	8.850.000.000	1 paket	9.735.000.000	1 paket	10.708.500.000	1 paket	11.779.350.000	1 tahun	12.957.285.000	paket	54.030.135.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		18	Program Pengam dan Perlindunga Sumber Air	Terpeliharanya sumber untuk kepentingan mas		1 tahun	150.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	181.500.000	1 paket	199.650.000	1 tahun	219.615.000	paket	915.765.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		19	Program Penataa Ruang Kabupate	Terciptanya penataan kota yang baik		1 tahun	4.100.000.000	1 paket	4.510.000.000	1 paket	4.961.000.000	1 paket	5.457.100.000	1 tahun	6.002.810.000	paket	25.030.910.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		20	Program Pembin jasa Konstruksi	Tersedianya tenaga-te teknis yang handal da bersertifikat		1 tahun	1.052.600.000	1 paket	1.157.860.000	1 paket	1.273.646.000	1 paket	1.401.010.600	1 tahun	1.541.111.660	paket	6.426.228.260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pro (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Ta RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		21	Program Bna Teknik/Program	Tercapainya kegiatan pembangunan yang me syarat mutu		1 tahun	1.264.869.500	1 paket	1.391.356.450	1 paket	1.530.492.095	1 paket	1.683.541.305	1 tahun	1.851.895.435	1 paket	7.722.154.784	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		22	Progrm Perencar Bina Marga	Terencananya kegiatar pembangunan di bidan Marga		1 tahun	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	1 paket	732.050.000	1 tahun	805.255.000	1 paket	3.357.805.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		23	Program Perencar Cipta Karya	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Karya		1 tahun	275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	1 paket	366.025.000	1 tahun	402.627.500	1 paket	1.678.902.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		24	Program Survey/Perencana Sumber Daya Air	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Daya Air		1 tahun	250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	1 tahun	366.025.000	1 paket	1.526.275.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH							113.169.223.600		124.486.145.960		136.934.760.556		150.628.236.612		165.691.060.273		690.909.427.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pro (outcome)	Kondis Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tal RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05		PENATAAN RUANG															
1	05	01	Dinas Perumaha Kawasan Pemuki dan Pertanahan															
1	05	1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya adm perkantoran: jasa sura menyurat, komunikasi, kantor, rakor, konsulta daerah	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.750.000.000	100%	11.750.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
1		2	Program Peningk Sarana dan Pras Aparatur	Terlaksananya rehabil pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengk gedung, pembelian pe	100%	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	350.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		3	Program Peningk Disiplin Aparatu	Tersedianya pakaian p yang memadai	1 paket	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	paket	365.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		4	Program Pening Kapasitas Sumb Aparatur	Persentase sumber day aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bida	paket	paket	65.000.000	paket	70.000.000	paket	70.000.000	paket	75.000.000	paket	75.000.000	paket	355.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		5	Program Perenca dan Penelitian S	Persentase SDM yang m standar kompetensi/kua pada Unit Kerjanya	1 paket	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	paket	135.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		6	Program Pembangunan da Rehabilitasi Run	Jumlah rehabilitasi dan pembangunan yang dikembangkan	paket	paket	550.000.000	paket	825.000.000	paket	975.000.000	paket	1.200.000.000	paket	1.325.000.000	paket	4.875.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		7	Program Pembangunan da Penataan Kawas Pengembang	Panjang drainase yang dibangun	paket	paket	2.650.000.000	paket	2.900.000.000	paket	3.150.000.000	paket	3.400.000.000	paket	3.650.000.000	paket	15.750.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pro (outcome)	Kondis Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tal RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		8	Program Pembangunan da Penataan Kawas Kumuh	Tersedianya jalan lingk drainase, penanganan persampahan dan instal pengelolaan limbah kom pada kawasan kumuh ko Tersedianya sistem air bagi warga kota"	paket	paket	1.750.000.000	paket	1.750.000.000	paket	1.100.000.000	paket	1.400.000.000	paket	950.000.000	paket	6.950.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		9	Program Penata Jalan Lingkunga	Panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (			5.400.000.000		6.450.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		8.550.000.000		35.400.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		10	Program Penata Pemeliharaan M	jumlah paket pekerjaan perencanaan dan penga teknis jalan dan jembat			1.925.000.000		2.125.000.000		2.470.000.000		2.595.000.000		2.525.000.000		11.640.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		11	Program Peningk Kapasitas Penge Ruang Terbuka H	Jumlah Perda RTRWP/K			2.075.000.000		2.325.000.000		2.375.000.000		2.400.000.000		2.425.000.000		11.600.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		12	Program Penata Fasilitas Umum Kota/PJU	Konsistensi Pemanfaata dengan meningkatnya S dalam Penataan Ruang			1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		7.750.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
		13	Program Peningk Kapasitas Bidan Pertanahan	Persentase pemenuhan dan prasarana dengan k baik			1.000.000.000		1.500.000.000		1.725.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		7.075.000.000	Dinas Peruma Kawasan Pemukiman d Pertanahan
JUMLAH							19.147.000.000		21.927.000.000		22.827.000.000		24.632.000.000		25.462.000.000		113.995.000.000	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	08		DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
1	08	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															Dinas Lingkunga Hidup
1	08	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkar jasa surat menyura komunikasi, rutin k rakor, konsultasi k daerah	1 paket	1 paket	1.101.951.400	1 paket	1.212.148.540	1 paket	1.333.361.194	1 paket	1.466.697.313	1 paket	1.613.367.044		6.727.525.491	Dinas Lingkunga Hidup
1	08	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedu pembelian peralata	1 paket	1 paket	285.000.000	1 paket	313.500.000	1 paket	344.850.000	1 paket	379.335.000	1 paket	417.268.500		1.739.953.500	Dinas Lingkunga Hidup
		3	Program Peningkatan Disiplin Apar	Jumlah pelanggara Pegawai Negeri Sip		1 tahun	30.000.000	1 paket	33.000.000	1 paket	36.300.000	1 paket	39.930.000	1 tahun	43.923.000		183.153.000	Dinas Lingkunga Hidup
	08	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah sumber day aparatur yang mem kompetensi sesuai bidangnya		100%	25.000.000	10 orang	27.500.000	10 orang	30.250.000	10 orang	33.275.000	100%	36.602.500		152.627.500	Dinas Lingkunga Hidup
1	08	5	Program Pengembanga Sistem Pelap Capaian Kine Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan lapor kinerja dan keuang		100%	41.500.000		45.650.000		50.215.000		55.236.500	100%	60.760.150		253.361.650	Dinas Lingkunga Hidup
1	08	6	Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemarar dan/atau perusakar lingkungan hidup y ditindaklanjuti		52%	335.000.000	10 Perda	368.500.000		405.350.000	10 Perda	445.885.000	80%	490.473.500	20 Perda	539.520.850	Dinas Lingkunga Hidup

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	08	7	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam		1 Lokasi	1 lokasi	61.600.000	10 lokasi	67.760.000	10 lokasi	74.536.000	10 lokasi	81.989.600	10 lokasi	90.188.560	50 lokasi	376.074.160	Dinas Lingkunga Hidup
1	08	8	Program Rehabilitasi Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Peningkat Kualitas dan Akses Informasi SDA dan		12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	59.895.000	12 bulan	65.884.500	10 paket	274.729.500	Dinas Lingkunga Hidup
1	08	9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inform SDA dan LH	Pengembangan Dat Informasi SDA dan		100%	205.000.000		225.500.000		248.050.000		272.855.000	100%	300.140.500		1.251.545.500	Dinas Lingkunga Hidup
	08	10	Pengembanga Ekowisata da Jasa Lingkun Di Kawasan-Kawasan Konservasi L dan Hutan	Jumlah kawasan konservasi yang dikembangkan ekow dan jasa lingkunga		50%	50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	80%	73.205.000		305.255.000	Dinas Lingkunga Hidup
1	08	11	Program Pengendalian Kebakaran H	Berkurangnya keba hutan dan lahan		12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.400.000	12 bulan	53.240.000	12 bulan	58.564.000		244.204.000	Dinas Lingkunga Hidup
		12	Program Pengelolaan Ruang Terbu Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbu Hijau per Satuan L Wilayah ber HPL/H		100%	20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000	100%	29.282.000		122.102.000	Dinas Lingkunga Hidup
		13	Program Penanganan Persampahan Limbah Lingkungan	Persentase penang sampah dan Limbah Lingkungan		0	3.069.900.000		3.376.890.000		3.714.579.000		4.086.036.900	90	4.494.640.590		18.742.046.490	Dinas Lingkunga Hidup
		14	Program Adiwiyata	Pengembangan Pen Lingkungan Hidup		100%	60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000	100%	87.846.000		366.306.000	Dinas Lingkunga Hidup
		15	Program Sara dan Prasaran Kebersihan	Pemenuhan sarana d prasarana kebersiha		100%	480.839.000		528.922.900		581.815.190		639.996.709	100%	703.996.380		2.935.570.179	Dinas Lingkunga Hidup
		16	Program Penigkatan Kapasitas UP Tempat Pemrosesan (TPA)	Persentase Kapasitas UPTD		100%	397.600.000		437.360.000		481.096.000		529.205.600	100%	582.126.160		2.427.387.760	Dinas Lingkunga Hidup

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akh Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	08	17	Program Pen Hukum/Perat n Perundang- Undangan Lingkungan Hidup	Jumlah Perda		100%	92.000.000		101.200.000		111.320.000		122.452.000	100%	134.697.200		561.669.200	Dinas Lingkunga Hidup
JUMLAH							6.340.390.400		6.974.431.440		7.671.872.384		8.439.059.622		9.282.965.584		37.203.031.780	

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembanguna	Indikator Kinerja Pr (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Targe	Rp	Targe	Rp	Target	Rp	Targe	Rp	Target	Rp	Targe	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	19		Kesatuan Ban dan Politik Da Negeri															
1	19	01	Badan Kesban polinmas															Badan Kesbang-polinmas
1		1	Program pelay Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkan jasa surat menyurat komunikasi, rutin ka rakor, konsultasi ke daerah	1 tahun	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300		2.575.401.500	Badan Kesbang-polinmas
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa	Terlaksananya pemeliharaan perler gedung, pembelian peralatan		1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000		112.500.000	Badan Kesbang-polinmas
		3	Program Peningkatan Disiplin Apara	Jumlah pelanggaran Negeri Sipil		1 tahun	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	1 tahun	25.000.000		125.000.000	Badan Kesbang-polinmas
		4	Peningkatan Kapasitas Sum Daya Aparatur	Persentase sumber d aparatur yang memili kompetensi sesuai bi		1 tahun	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	1 tahun	25.000.000		125.000.000	Badan Kesbang-polinmas
1		5	Program kemit Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pembinaan te LSM, Ormas dan OKP		1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000		2.329.000.000	Badan Kesbang-polinmas
1		6	Program Pencegahan D dan Penangan Konflik	Menurunnya jumlah di daerah		1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000		1.372.250.000	Badan Kesbang-polinmas
1		7	Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat Ur Organisasi Po	Indeks Demokrasi In	donesia	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000		2.315.400.000	Badan Kesbang-polinmas

Kode	Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembanguna	Indikator Kinerja Pr (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
				Targe	Rp	Targe	Rp	Target	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
JUMLAH					1.790.910.300		1.790.910.300		1.790.910.300		1.790.910.300		1.790.910.300		8.954.551.500	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1	19	01	Kantor SATPOL PP															Kantor SATPOL PP
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		100%	1.221.800.500		1.343.980.550		1.478.378.605		1.626.216.466		1.788.838.112		7.459.214.233	Kantor SATPOL PP
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		100%	82.000.000	100%	90.200.000	100%	99.220.000	100%	109.142.000	100%	120.056.200		500.618.200	Kantor SATPOL PP
1		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur			67.900.000		74.690.000	-	82.159.000	-	90.374.900	-	99.412.390		414.536.290	Kantor SATPOL PP
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang			363.200.000		399.520.000		439.472.000		483.419.200		531.761.120		2.217.372.320	Kantor SATPOL PP
		5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)			90.000.000		99.000.000	-	108.900.000	-	119.790.000	-	131.769.000		549.459.000	Kantor SATPOL PP
		6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana yang menerima bansos masa tanggap darurat			1.113.829.600		1.225.212.560	-	1.347.733.816	-	1.482.507.198	-	1.630.757.917		6.800.041.091	Kantor SATPOL PP
		7	Program Penindakan Tindakan Pelanggaran Keamanan Ketertiban Umum	Jumlah kantrantibmas			168.249.000		185.073.900	-	203.581.290	-	223.939.419	-	246.333.361		1.027.176.970	Kantor SATPOL PP
		8	Program Penegakan Hukum, Perda Perkada dan Perundang-undangan	Tersedianya peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum kerjasama dalam dan luar negeri penanggulangan bencana			101.000.000		111.100.000	-	122.210.000	-	134.431.000	-	147.874.100		616.615.100	Kantor SATPOL PP
JUMLAH							3.207.979.100		3.528.777.010		3.881.654.711		4.269.820.182		4.696.802.200		19.585.033.203	

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondis Kinerj Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggun
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05		Urusan Wajib															
		01	Badan Penanggulanga Bencana Daera															
		1	Program Pelay Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perka ; jasa ; surat men komunikasi, air lis rutin kantor, koord monitoring dll	100%	12 bln	453.950.000	12 bln	499.345.000	12 bln	549.279.500	12 bln	604.207.450	12 bln	664.628.195	100%	2.771.410.145	BPBD KAB. BARSEL
		2	Program Peningkatan S dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan gedu kantor, kendaraan pengadaan perleng	100%	12 bln	69.655.000	12 bln	76.620.500	12 bln	84.282.550	12 bln	92.710.805	12 bln	101.981.885	100%	425.250.740	BPBD KAB. BARSEL
		3	Program Peningkatan D Aparatur	Tersedianya penga pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	12 bln	10.400.000	12 bln	11.440.000	12 bln	12.584.000	12 bln	13.842.400	12 bln	15.226.640	100%	63.493.040	BPBD KAB. BARSEL
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sum Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pe formal	100%	1 keg	53.000.000	1 keg	58.300.000	1 keg	64.130.000	1 keg	70.543.000	1 keg	77.597.300	100%	323.570.300	BPBD KAB. BARSEL
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapo Capaian Kinerj Keuangan	Terpenuhinya pela dokumen kinerja d keuangan	100%	12 bln	71.264.200	12 bln	78.390.620	12 bln	86.229.682	12 bln	94.852.650	12 bln	104.337.915	100%	435.075.067	BPBD KAB. BARSEL
		6	Program Pence dan Kesiapsiag	Terselenggaranya kegiatan sosialisa posko, monitoring	100%	12 bln	194.475.000	12 bln	213.922.500	12 bln	235.314.750	12 bln	258.846.225	12 bln	284.730.847	100%	1.187.289.322	BPBD KAB. BARSEL
		7	Program Rehab dan Rekonstru	Terselenggaranya Pendataan Dampak Bencana, Rehab-R	100%	12 bln	87.700.000	12 bln	96.470.000	12 bln	106.117.000	12 bln	116.728.700	12 bln	128.401.570	100%	535.417.270	BPBD KAB. BARSEL
		8	Program Kedaruratan da Logistik	Terselenggaranya dan pemetaan dae rawan bencana, pengadaan logistik mengerahkan SDM peralatan & logist	100%	12 bln	179.200.000	12 bln	197.120.000	12 bln	216.832.000	12 bln	238.515.200	12 bln	262.366.720	100%	1.094.033.920	BPBD KAB. BARSEL
JUMLAH							1.119.644.200		1.231.608.620		1.354.769.482		1.490.246.430		1.639.271.072		6.835.539.804	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembangun	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	13		Sosial															
1	13	01	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa															Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggarany administrasi perkantoran: jas surat menyurat, komunikasi, ruti kantor, rakor, konsultasi kelua daerah	100%	100%	1.526.400.000	100%	1.605.369.000	100%	1.637.369.000	100%	1.722.369.000	100%	8.154.876.000	100%	14.646.383.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan ge pembelian peral	100%	100%	50.600.000	100%	52.500.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	313.100.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		3	Program Peningkatan Disiplin Apar	Motivasi dan dis PNS meningkat	100%	100%	18.100.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	128.100.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
1		4	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan apa dana perencana pembangunan	100%	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	320.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		5	Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah kelemba masyarakat ped yang dibina			800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
1		6	Program Pemberdayaa Fakir Miskin, Komunitas Ad Terpencil (K dan Penyand Masalah Kesejahteraa Sosial (PMK Lainnya	Peningkatan Kemampuan Pet dan Pedamping dan Pemberdaya Fakir Miskin, KA PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin	Jumlah fa miskin ya tertangan 1.350 ora	15%	220.000.000	20%	270.000.000	20%	335.000.000	20%	400.000.000	20%	465.000.000	100%	1.690.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
		7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM berpartisipasi a dalam pembangu			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa
1		8	Program Pelayanan da Rehabilitasi Kesejahteraa Sosial	Pelatihan Keterampilan da Praktek Belajar Bagi Anak Terla Termasuk Anak Jalanan, Anak C dan Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluarga KK	20%	155.000.000	20%	175.000.000	20%	195.000.000	20%	215.000.000	20%	235.000.000	100%	975.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat d Desa

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembangun	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		9	Program Pengembanga Lembaga Eko Pedesaan	Jumlah kelompo usaha Ekonomi Produktif masy pedesaan yang			250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		10	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun				600.000.000		600.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000		3.100.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		11	Program Pembinaan P Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah pelatiha yang dilaksanak			40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		300.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah D	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan			810.000.000		835.000.000	-	865.000.000	-	945.000.000	-	965.000.000		4.420.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		13	Program Pembinaan e Penyandang Penyakit Sos eks. Nara - pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sos Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Ketra Berusaha Bagi E Penyandang Per Sosial			30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		14	Program Ban dan Jaminan Kesejahteraa Sosial	Pengumpulan da Pengelolaan Sur Dana Sosial			45.000.000		45.000.000	-	45.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000		235.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		15	Program Pemberdayaa Kelembagaan Kesejahteraa Sosial	Peningkatan Kua SDM Kesejahter Sosial Masyarak			215.000.000		245.000.000	-	280.000.000	-	295.000.000	-	305.000.000		1.340.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
		16	Program Pembinaan d Pengembanga Organisasi Kepemudaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Pengadaan sara dan prasarana K Taruna)			100.000.000	18%	110.000.000	18%	120.000.000	23%	130.000.000	23%	140.000.000	100%	600.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaa Masyarakat Desa
				JUMLAH			4.569.388.200		5.026.327.020		5.528.959.722		6.081.855.694		6.690.041.264		27.896.571.900	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggur Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJI		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	14		Tenaga Kerja															
1	14	01	Dinas Tenag Kerja dan Transmigras															Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: ja surat menyurat, komunikasi, rut kantor, rakor, konsultasi kelu daerah		12 bul	863.338.000	12 bul	863.338.000	12 bul	886.123.000	12 bulan	906.123.000	12 bulan	934.123.000	Terpenu nya pelaya nan kantor	4.453.045.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan g pembelian pera			173.500.000		173.500.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		911.000.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
		3	Program Peningkatan Disiplin Apa	Motivasi dan di PNS meningkat			28.800.000		28.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		147.600.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan apa			35.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		230.000.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		5	Program Pengembang Sistem Pelap Capaian Kine & Keuangan	Terpenuhinya pelaporan / dok kinerja dan keu			30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitya Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas te kerja			223.750.000		223.750.000		255.000.000		295.000.000		405.000.000		1.402.500.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase ang kerja			194.100.000		194.100.000		205.000.000		225.000.000		225.000.000		1.043.200.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		8	Program Perlindungan Pengembang Lembaga Ketenagaker				19.761.000		19.761.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		99.522.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		9	Program Pengembang Data dan Informasi	Persentase peningkatan penyediaan dat informasi			78.622.000		78.622.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		397.244.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggur Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJM		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		10	Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagaker	Terhimpunnya Jumlah Tenaga dan Tenaga Ker Purna Tugas di Wilayah Kab. B Selatan			196.309.000		196.309.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		1.004.618.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
1		11	Program Pengembang Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pemahaman Nor Ketenagakerjaa Pengusaha dan Pekerja			56.235.000		56.235.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		286.470.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
		12	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmi Lokal (KK)			24.001.000		24.001.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		120.002.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
	08	13	Program Perencanaan Penyiapan Kawasan	Jumlah kawasan yang direncana dan disiapkan u dibangun			94.460.000		94.460.000		95.000.000		95.000.000		110.000.000		488.920.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
		14	Program Pembanguna Pemukiman Penempatan	Jumlah kawasan pemukiman dan penempatan yan dibangun			59.123.000		59.123.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		328.246.000	Dinas Tena Kerja dan Transmigra
JUMLAH							2.076.999.000		2.076.999.000		2.185.123.000		2.275.123.000		2.448.123.000		11.062.367.000	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangg Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	11		Pengendalian Penduduk da Keluarga Berencana															
1	11	01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan d Perlindungan Anak															Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penyusunan da base		100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	5.526.500.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembe peralatan		100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	9.250.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		3	Program Peningkatan Disiplin Apar	Motivasi dan d PNS meningkat		paket	31.000.000	paket	15.000.000	paket	31.000.000	paket	15.000.000	paket	31.000.000	paket	123.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		4	Program Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi	Persentase pes KB aktif terhad PUS, dan Jum pasangan usia ber-KB			553.000.000		563.000.000		573.000.000		513.000.000		523.000.000		2.725.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		5	Program Advo Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE	Data Pengelola Pengembangan Pemanfaatan D Kependudukan Pencatatan Sip			67.500.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		397.500.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja kec/kelurahan mengikuti Prog Kesehatan Reproduksi Re			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		200.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangg Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kec Berkualitas	Meningkatnya kelembagaan keluarga kecil berkualitas			275.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000		295.000.000		1.425.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		8	Program Keserasian d Kebijakan Pendataan Kependuduka	Meningkatnya t administrasi kependudukan catatan sipil ya sesuai dan seja kebijakan kependudukan			182.500.000		467.500.000		182.500.000		182.500.000		467.500.000		1.482.500.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
1		9	Program Peningkatan Kualitas Hidu Perempuan	Jumlah pelaksa sosialisasi bag masyarakat ten KDRT			95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		495.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		10	Program Peningkatan Kualitas Kelu	Meningkatnya keluarga kecil berkualitas			100.000.000		114.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000		664.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		11	Program Pemenuhan H Anak	Persentase tersedianya ba informasi tenta pengasuhan tur kembang anak dikelompok BKB,BKR dan B			80.000.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000		90.000.000		432.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		12	Program Perlindungan Perempuan	Persentase tersedianya ba informasi tenta pengasuhan tur kembang anak dikelompok BKB,BKR dan B			85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		425.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		13	Program Perlindungan Anak	Persentase tersedianya ba informasi tenta pengasuhan tur kembang anak dikelompok BKB,BKR dan B			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A
		14	Program Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Aparatur	Persentase sum daya aparatur memiliki kompe sesuai bidangn			30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	Dinas Pengend Penduduk, Kelu Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A

Kode	Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangg Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
JUMLAH					4.544.300.000		4.859.800.000		4.628.800.000		4.585.800.000		4.926.800.000		23.545.500.000	

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prio	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kin Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	04		URUSAN PILIHAN															
2	04	01	PERTANIAN															
			Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan		1				-	-	-	-	-	-	-		-	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
2		1	Program pelay Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: ja surat menyurat komunikasi, rut kantor, rakor, konsultasi kelu daerah	2.609.891.200		2.650.600.000		2.707.100.000		2.761.600.000		2.816.100.000	100	2.859.600.000	100	13.795.000.000	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendara dinas, penimbu halaman kantor	285.508.800		445.000.000		379.000.000		333.000.000		337.000.000	100	341.000.000	100	1.835.000.000	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
1		3	Program Peningkatan Kapasitas Sum Daya Aparatur	Pengembangan Aparatur dan Penyediaan Da Base	194.347.500		23.500.000		199.950.000		208.950.000		26.500.000	100	210.950.000	100	669.850.000	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
1		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapo Capaian Kiner Keuangan	Meningkatnya pemantapan da sinkronisasi program, konsu dan koordinasi monitoring	289.032.000		380.000.000		389.000.000		398.000.000		407.000.000	100	416.000.000	100	1.990.000.000	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
		5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pelayanan	298.000.000		555.000.000		585.000.000		664.000.000		646.000.000		1.233.000.000		3.683.000.000	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
		6	Program Pemberdayaan Masyakat Dala Pengelolaan Sumber Daya	Persentase jumlh penyuluh yang mengikuti pelati /workshop denga jumlah penyuluh ada (%)	300.000.000		955.000.000		2.729.750.000		2.699.300.000		3.489.230.000		4.283.152.400		14.156.432.400	Dinas Ketaha Pangan, Pert dan Perikana
		7	Program Peningkatan Pemasaran Ha Produksi Pertanian/Per nan	Penyuluhan peningkatan produktivitas ko perkebunan (orang/tahun)	360.370.000		595.000.000		963.000.000		625.000.000		680.000.000		860.000.000		3.723.000.000	Dinas Ketahar Pangan, Perta dan Perikanar
		8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Per nan	Produktivitas ha pertanian/perkel 6 komoditas (ke sawit, karet, ka kelapa dalam, la dan kopi) (Kg/H	1.606.350.000	Rp	3.601.250.000		3.705.500.000		3.929.000.000		3.971.000.000		5.056.000.000		20.262.750.000	Dinas Ketahar Pangan, Perta dan Perikanar
		9	Program Peningkatan Ketahanan Pa	Jumlah hasil pro pertanian yang dipasarkan (%)	710.418.000		745.938.900		783.235.845		822.397.637		863.517.519		906.693.395		4.121.783.296	Dinas Ketahar Pangan, Perta dan Perikanar

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prio	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kin Awal RPJM (Tahun 201	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton/Tahun)	2.248.634.000		2.473.497.400		2.720.847.140		2.992.931.854		3.292.225.039		958.253.450		12.437.754.883	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		11	Program Peningkatan Produksi Hasi Peternakan	Produksi konsun (ton/tahun); dan produksi benih (	461.500.000		1.475.500.000		1.560.000.000		1.620.500.000		1.655.500.000		1.705.000.000		8.016.500.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		12	Program Pencegahan penanggulangi Penyakit Tern	Persentase tern yang terkena pe (%)	256.500.000		246.500.000		308.000.000		297.000.000		330.000.000		325.000.000		1.506.500.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		13	Program Pengembangan Penyelenggara Penyuluhan da Kelembagaan	Jumlah pembuat unit percontohan/den penyuluhan pert perikanan dan pertanian (unit)	1.442.370.000		2.058.000.000		2.091.000.000		2.123.000.000		2.155.000.000		2.197.000.000		10.624.000.000	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		14	Program Pengembangan Perikanan Tan	dokumen pengel aset/barang dae	621.550.000		614.130.000		621.500.000		683.647.000		817.407.030		899.147.733		3.635.831.763	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		15	Program Optimalisasi Pengelolaan d Pemasaran Produksi Peri	Produksi konsun (ton/tahun); dan produksi benih (	210.000.000		324.000.000		377.150.000		434.477.500		485.529.625		542.827.619		2.163.984.744	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
		16	Program Pengembangan Kawasan Budi Laut, Air Paya Air Tawar	Luasan yang dik (ha)	286.430.000		315.073.000		346.580.300		381.238.330		419.362.163		461.298.379		1.923.552.172	Dinas Ketahan Pangan, Perta dan Perikanan
JUMLAH							17.457.989.300		20.466.613.285		20.974.042.321		22.391.371.376		23.254.922.976		104.544.939.258	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	10		Kependuduka dan Pencatat Sipil															
1	10	01	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil															Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggarany administrasi perkantoran: jas menyurat, komun rutin kantor, rak konsultasi kelua daerah		12 bulan	877.508.000	12 bulan	965.258.800	12 bulan	1.061.784.680	12 bulan	1.167.963.148	12 bulan	1.284.759.463	100,00%	5.357.274.091	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan ge pembelian perala		12 bulan	535.550.000	12 bulan	589.105.000	12 bulan	648.015.500	12 bulan	712.817.050	12 bulan	784.098.755	100,00%	3.269.586.305	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		3	Program Peningkatan Disiplin apara	Tersedianya pak pegawai yang me		12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.500.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	27.500.000		128.000.000	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan menangani masa kependudukan da Pencatatan sipil		12 bulan	311.200.000	12 bulan	342.320.000	12 bulan	376.552.000	12 bulan	414.207.200	12 bulan	455.627.920	100,00%	1.899.907.120	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		5	Program Pengembanga Sistem Pelap Capaian Kine Keuangan	Dokumen pengelo aset/barang daera		12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	59.895.000	12 bulan	65.884.500	100,00%	274.729.500	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		6	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependuduka	Akurasi Data & K Pelayanan Admin Kependudukan		12 bulan	132.900.000	12 bulan	146.190.000	12 bulan	160.809.000	12 bulan	176.889.900	12 bulan	194.578.890	100,00%	678.467.790	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		7	Program Peningkatan Pelayanan Pu dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S	Meningkatnya ku dan kinerja pela pendaftaran pen dan pencatatan s		12 bulan	836.356.000	12 bulan	919.991.600	12 bulan	1.011.990.760	12 bulan	1.113.189.836	12 bulan	1.224.508.820	100,00%	4.269.681.016	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		8	Program Pengolahan D Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependuduka	Tersediannya Da Base, Informasi, regulasi kependu		12 bulan	122.100.000	12 bulan	134.310.000	12 bulan	147.741.000	12 bulan	162.515.100	12 bulan	178.766.610	100,00%	623.332.710	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil
		9	Program Pena Administrasi Kependuduka	Persentase Unit K internal yang terl dengan baik		12 bulan	665.390.000	12 bulan	731.929.000	12 bulan	805.121.900	12 bulan	885.634.090	12 bulan	974.197.499	100,00%	3.396.882.490	Dinas Kependuduka dan Pencatat Sipil

JUMLAH	3.550.004.000	3.903.604.400	4.291.964.840	4.719.111.324	5.189.922.456	21.654.607.020

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembangunai	Indikator Kin Program (outc	Kondis Kinerj Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	07		PERHUBUNGAN															
1	07	01	DINAS KOMUNIKASI D INFORMATIKA															DISKOMINFO
1	07	1	Program Pelay Administrasi Perkantoran	Terselenggar administrasi perkantoran: surat menyur komunikasi, kantor, rakor konsultasi ke daerah			649.215.000		703.820.000		770.002.000		836.822.200		910.704.420		3.870.563.620	DISKOMINFO
1	07	2	Program Peningkatan S dan Prasarana Aparatur	Terlaksanany rehabilitasi pemeliharaar rutin, pemeliharaar perlengkapar gedung, pembelian peralatan			100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		610.510.000	DISKOMINFO
1	07	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya sumberdaya aparatur			60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		366.306.000	DISKOMINFO
1	07	4	Program Pengembangar Sistem Pelapo Capaian Kiner Keuangan	dokumen pengelolan aset/barang daerah			195.250.000		214.775.000		236.252.500		259.877.750		285.865.525		1.192.020.775	DISKOMINFO
		5	Program Peningkatan Disiplin Apara	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan t			35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		213.678.500	DISKOMINFO
1	07	6	Program Pelay dan Pengemba Komunikasi Informasi dan Penyiaran	Cakupan laya komunikasi, informasi dan media massa			440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		644.204.000		2.686.244.000	DISKOMINFO
		7	Program Infor Serta Jaringar Komuniasi dan Persandian	Jumlah sistem informasi yan termanfaatkar dengan optima			142.500.000		156.750.000		172.425.000		189.667.500		208.634.250		869.976.750	DISKOMINFO

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembangunai	Indikator Kin Program (outc	Kondis Kinerj Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penang Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa	Persentase peningkatan pengembanga komunikasi, informasi dan media massa			455.000.000		500.500.000		550.550.000		605.605.000		666.165.500		2.777.820.500	DISKOMINFO
1	07	9	Program Publi Informasi Daer dan Kerjasama Informasi Den Media Massa	Persentase peningkatan penyediaan da dan informasi			1.215.000.000		1.336.500.000		1.470.150.000		1.617.165.000		1.778.881.500		7.417.696.500	DISKOMINFO
JUMLAH							3.291.965.000		3.610.845.000		3.967.729.500		4.354.322.450		4.779.954.695		20.004.816.645	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan P Prioritas Pemban	Indikator Kinerja Pr (outcome)	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggun Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	15		Koperasi Usaha K dan Menengah															
1	14	01	Dinas Perdaganga Koperasi Usaha K dan Menengah															Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		1	Program Pelayana Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkant jasa surat menyurat, komunikasi, rutin ka rakor, konsultasi kel daerah		100%	921.685.700	100%	1.013.854.270	100%	1.115.239.697	100%	1.226.763.667	100%	1.349.440.033	100%	5.626.983.367	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		2	Program Peningka Sarana dan Prasa Aparatur	Terlaksananya pemel perlengkapan gedung pembelian peralatan		100%	133.536.320	100%	146.889.952	100%	161.578.947	100%	177.736.842	100%	195.510.526	100%	815.252.587	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
		3	Program Peningka Disiplin aparatur	Persentase aparatur disiplin dalam pelaksa tugas			71.000.000	100%	78.100.000	100%	85.910.000	100%	94.501.000	100%	103.951.100	100%	433.462.100	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		4	Program Peningk Kapasitas Sumbe Aparatur	Meningkatnya kemam aparatur		100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000	100%	241.576.500	100%	1.007.341.500	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		5	Program Pengemb Sistem pendukun Usaha Bagi Kope dan UKM	dokumen pengelolan aset/barang daerah		100%	267.000.000	100%	293.700.000	100%	323.070.000	100%	355.377.000	100%	390.914.700	100%	1.630.061.700	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		6	Program Peningka Kualitas Kelemba Kewirausahaan d Keunggulan Kope dan UKM	Persentase jumlah wirausaha		100%	441.219.310	100%	485.341.241	100%	533.875.365	100%	587.262.902	100%	645.989.192	100%	2.693.688.000	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		7	Program Perlindu Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	dokumen pengelolan aset/barang daerah		100%	841.012.564	100%	925.113.820	100%	1.017.625.202	100%	1.119.387.723	100%	1.231.326.495	100%	5.134.465.800	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		8	Program Pembina Dagang Kecil dan Menengah (DKM)	Persentase Jumlah UMKM		100%	2.922.516.306	100%	3.214.767.937	100%	3.536.244.730	100%	3.889.869.203	100%	4.278.856.124	100%	17.842.254.300	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
1		9	Program Pembina Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah lembaga keuar mikro		100%	566.137.100	100%	622.750.810	100%	685.025.891	100%	753.528.480	100%	828.881.328	100%	3.456.323.600	Dinas Perdaganga Koperasi Us Kecil dan Menengah
JUMLAH							6.329.107.300		6.962.018.030		7.658.219.833		8.424.041.816		9.266.445.998		38.639.832.977	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembangun	Indikator Kine Program (outc	Kondis Kinerj Awal RPJMI (Tahu 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	02		URUSAN WAJIB															
2	02	01	Pemerintahan Umum															
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S Pintu
2		1	Program Pengawasan Pengendalia Perijinan	dokumen penge aset/barang da			134.450.000		147.895.000		165.000.000		165.000.000		175.000.000		787.345.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S Pintu
		2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Tingkat Waktu Tanggap (respo rate) daerah la investasi			102.450.000		110.000.000		118.000.000		118.000.000		118.000.000		566.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S Pintu
		3	Program Penanganan Pengaduan	dokumen penge aset/barang da			71.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		415.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S Pintu
		4	Program Pameran Promosi Investasi	Jumlah promosi kerjasama inve			155.004.000		178.000.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		897.004.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S Pintu
JUMLAH							462.904.000		521.895.000		557.000.000		557.000.000		567.000.000		2.665.799.000	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangg Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	15		Kebudayaan															
1	14	01	Dinas Pemud Olahraga, Pariwisata d Kebudayaan															Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkan jasa surat menyura komunikasi, rutin k rakor, konsultasi ke daerah			889.498.900		1.029.498.900		1.169.498.900		1.309.498.900		1.449.498.900	100%	5.847.494.500	DISPORAPARBUD
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				173.675.000		223.675.000		273.675.000		323.675.000		373.675.000	100%	1.368.375.000	DISPORAPARBUD
		3	Program Peningkatan Disiplin Apar	Terlaksananya peme perlengkapan gedun pembelian peralatan			42.765.000		52.765.000		62.765.000		72.765.000		82.765.000	100%	313.825.000	DISPORAPARBUD
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pemenuh sarana dan prasaran dengan kondisi baik Unit Kerja internal			40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	100%	300.000.000	DISPORAPARBUD
1		5	Program Peningkatan Pengembanga Sistem pelap Capaian Kine dan keuanga	Meningkatnya keman aparatur			65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000		145.000.000	100%	525.000.000	DISPORAPARBUD
1		6	Program Peningkatan Peran Serta	Jumlah organisasi p yang aktif			829.660.000		889.660.000		949.660.000		1.009.660.000		1.069.660.000		4.748.300.000	DISPORAPARBUD
1		7	Program pengembanga Kebijakan da Manajemen O Raga	Jumlah organisasi olahraga			50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	100%	350.000.000	DISPORAPARBUD
1		8	Program Pembinaan d Pemasyaraka Olah Raga	Jumlah cabang olah yang dibina; persent peningkatan pembina raga			81.350.000		91.350.000		101.350.000		111.350.000		121.350.000	100%	506.750.000	DISPORAPARBUD
		9	Program Pengembanga Destinasi Parwisata	Jumlah destinasi pa yang dikembangkan			45.000.000		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000	100%	425.000.000	DISPORAPARBUD
		10	Program Pengembanga Pasar Parwis	Jumlah kunjungan wisata			235.500.000		295.500.000		355.500.000		415.500.000		475.500.000	100%	1.777.500.000	DISPORAPARBUD

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangg Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	11	Program Pengembanga Kemitraaan	Tingkat Hunian Hotel			79.400.000		109.400.000		139.400.000		169.400.000		199.400.000	100%	697.000.000	DISPORAPARBUD
2		12	Program Pengembanga Nilai Budaya	Jumlah pegelaran se budaya			188.321.000		228.321.000		268.321.000		308.321.000		348.321.000	100%	1.341.605.000	DISPORAPARBUD
		13	Program Pengelolaan Kekayaan Bu	Jumlah cagar budaya dikelola secara terp			201.759.000		271.759.000		341.759.000		411.759.000		481.759.000	100%	1.708.795.000	DISPORAPARBUD
		14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran se budaya			410.170.000		460.170.000		510.170.000		560.170.000		610.170.000		2.550.850.000	DISPORAPARBUD
				JUMLAH			3.332.098.900		2.951.848.900		3.371.848.900		3.791.848.900		4.211.848.900		16.859.244.500	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondis Kinerj Awal RPJMD (Tahu 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pa Tahun Periode RF		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			PENDIDIKAN															
1	2		Dinas Perpustakaan Arsip Daerah															
		1	Program Pengembanga Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegem Membaca.	12 bulan	100	195.150.000	100	499.065.000	100	557.236.500	100	618.000.150	100	681.615.165	12 bulan	2.551.066.815	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		2	Program Pengembanga Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kege Membaca.	12 bulan	12 bulan	319.132.200	100	426.045.420	100	468.649.962	100	515.514.958	100	567.066.454	12 bulan	2.296.408.994	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		3	Program Perbaikan Si Administrasi Kearsipan.	Digitalisasi arsip berbasis IT		1,00	40.700.000	100	130.000.000	100	143.000.000	100	157.300.000	100	173.030.000		644.030.000	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		4	Program Penyelamata dan Pelestar Dokumen / A Daerah.	Ketersediaan arsip otentik, utuh dan terpercaya		1 paket	54.000.000	100	59.400.000	100	65.340.000	100	71.874.000	100	79.061.400	100%	329.675.400	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Ketersediaan akses informasi arsip		12 bulan	135.500.000	100	204.050.000	100	224.455.000	100	246.900.500	100	271.590.550	12 bulan	1.082.496.050	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		6	Program Pemeliharaan Rutin / Progr Berkala Sara	Sarana Prasarana Kearsipan dan Dokumen/Arsip Yan Terpelihara			25.000.000	100	52.500.000	100	57.750.000	100	63.525.000	100	69.877.500	100%	268.652.500	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasara aparatur yang lengk modern		1 lapora	78.200.000	100,00	612.545.000	100,00	195.299.500	100,00	214.829.450	100,00	236.312.395	100%	1.337.186.345	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		8	Program Peningkatan Kapasitas Su Daya Aparatu	Sumber daya aparat berkualitas dan pro			45.200.000	100	108.000.000	100,00	118.800.000	100,00	130.680.000	100,00	143.748.000	100%	546.428.000	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		9	Program Peningkatan disiplin apar	Aparatur yang tertil disiplin.			22.880.000	100	25.168.000	100	27.684.800	100,00	30.453.280	100,00	33.498.608	100%	139.684.688	Dinas Perpustak n dan Ars
		10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administ Kantor Yang Berbas Kinerja			725.558.000	100,00	798.113.800	100,00	877.925.180	100,00	965.717.698	100,00	1.062.289.468	100%	4.429.604.146	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
		11	Program Peningkatan pengembanga sistem pelap capaian kine dan keuanga	Pelaporan SKPD ya akurat dan tepat wa			20.000.000	100,00	22.000.000	100,00	24.200.000	100,00	26.620.000	100,00	29.282.000	100%	122.102.000	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kinerja Pr (outcome)	Kondis Kinerj Awal RPJMD (Tahu 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pa Tahun Periode RP		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		12	Program Peningkatan Pengembanga Pengelolaan Daerah.	Tertibnya pengelolaan aset.			15.000.000	100,00	16.500.000	100,00	18.150.000	100,00	19.965.000	100,00	21.961.500	100%	91.576.500	Dinas Perpustak n dan Ars Daerah
JUMLAH							1.676.320.200		###########		2.778.490.942		3.061.380.036		###########		##########	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah d Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20	01	Sekretariat Daerah						-	-	-	-	-	-	-		-	Sekretari Daerah
1		1	Program pela Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: jas surat menyurat, komunikasi, ruti kantor, rakor, konsultasi kelua daerah; honprar non PNS	90%	1 Tahun	4.035.400.00	100 Tahur	4.215.420.00	100 Tahun	4.215.420.00	100 Tahur	4.215.420.00	100 Tahun	4.215.420.00	100%	20.897.080.00	SETDA, Bagian Umum
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan b rumah jabatan jaringan listrik perlengkapan g pembelian peral komputer laptop pembangunan workshop Damka Pembangunan g Distako KPP, Ka SANTELDA, teha stadion Bulutan gedung KNPI	70%	rehab 1 paket; pemb kantor paket; pemb works-shop 1 paket, rehab Ged. KNPI, Rehab olah ra 1	4.491.915.00	100 paket 1 tahun	4.410.000.00	4 pak ; 1 tahun	4.410.000.00	2 paket 1 tahun	4.410.000.00	2 paket; tahun	4.410.000.00	100%	22.131.915.00	SETDA, Bagian Umum
1		3	Program Peningkatan Disiplin Apara	Terlaksananya d dengan tokoh masyarakat, pim ormas, Penerim Kunjungan Kerja Pejabat Negara, Pejabat Pemerin daerah dan terla kunjungankerja kepala daerah d pengadaan paka khusus dinas da hari khusus	60%	2 kegiatan	500.000.00	30 Paket	455.000.00	30 Paket	455.000.00	30 Paket	455.000.00	30 Paket	455.000.00	100%	2.320.000.00	SETDA, Bagian Umum
		4	Program Pengembanga Komunikasi, Informasi dan Media Massa		70%	1 tahun	280.000.00	1 tahun	304.000.00	1 tahun	304.000.00	1 tahun	304.000.00	1 tahun	304.000.00	100%	1.496.000.00	SETDA, Bagian Umum
		5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Ke Daerah/Wakil Kepala Daera		60%	1 tahun	1.635.000.00	1 tahun	1.720.500.00	1 tahun	1.720.500.00	1 tahun	1.720.500.00	1 tahun	1.720.500.00	100%	8.517.000.00	SETDA, Bagian Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintah d Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		6	Program Pemberdayaa Kelembagaan Kesejahteraa Sosial		75%	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	100%	260.000.000	SETDA, Bagian Umum
		7	Program pela Administrasi Perkantoran				450.000.000		452.000.000		463.000.000		456.000.000		458.000.000		2.279.000.000	SETDA, Bagian Pengadaa Barang d Jasa
		8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				475.000.000		75.000.000		275.000.000		75.000.000		75.000.000		975.000.000	SETDA, Bagian Pengadaa Barang d Jasa
		9	Program Peningkatan Kapasitas Su Daya Aparatu	Tertatanya kelembagaan, orientasi tugas, workshop, konsu dan koordinasi	70%	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	100%	1.500.000.000	SETDA, Bagian Pengadaa Barang d Jasa
		10	Program Pela Pengadaan Pemerintah			1 tahun	1.492.300.000	1 tahun	1.650.000.000	1 tahun	1.650.000.000	1 tahun	1.725.000.000	1 tahun	1.800.000.000	100%	8.317.300.000	SETDA, Bagian Pengadaa Barang d Jasa
		11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				450.026.000		455.026.000		460.026.000		466.576.000		473.231.000		2.304.885.000	SETDA, Bagian Pembang n
		12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		90%	1 tahun	725.000.000	1 tahun	797.500.000	1 tahun	877.250.000	1 tahun	964.975.000	1 tahun	1.061.472.500	100%	4.426.197.500	SETDA, Bagian Pembang n
		13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebjakan KDH	Terlaksananya t lanjut hasil pengawasan	80%	1 tahun	100.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	121.000.000	1 tahun	133.100.000	1 tahun	146.410.000	100%	610.510.000	SETDA, Bagian Pembang n
		14	Program Peningkatan Pengembanga Sistem Pelap Capaian Kine dan Keuangar	Penyusunan Pelaporan Progr Realisasi Angga SKPD Setda Kab Barsel tersusu laporan keuanganakhir t penatausahaan keuangan SKPD Setda, Akuntans Laporan keuang	7%	1 tahun	80.000.000	1 tahun	238.000.000	1 tahun	261.800.000	1 tahun	287.980.000	1 tahun	316.778.000	100%	1.184.558.000	SETDA, Bagian Pembang n

Kode			Bidang Urus Pemerintah d Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebjakan KDH	Terlaksananya t lanjut hasil pengawasan	80%	1 tahun	200.000.000	1 tahun	1.580.000.000	1 tahun	1.738.000.000	1 tahun	1.911.800.000	1 tahun	2.102.980.000	100%	7.532.780.000	SETDA, Bagian Pembang n
		16	Program Fasi Peningkatan S Bidang Komin dan Layanan Elektronik		60%	1 tahun	75.000.000	1 tahun	82.500.000	1 tahun	90.750.000	1 tahun	99.825.000	1 tahun	109.807.500	100%	457.882.500	SETDA, Bagian Pembang n
		17	Program Pengembanga dan Pemeliha Infrastruktur		60%	1 tahun	135.000.000	1 tahun	148.500.000	1 tahun	163.350.000	1 tahun	179.685.000	1 tahun	197.653.500	100%	824.188.500	SETDA, Bagian Pembang n
		18	Peningkatan Kapasitas Sui Daya Aparatu				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		610.510.000	SETDA, Bagian Pembang n
		19	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebjakan KDH	Terlaksananya t lanjut hasil pengawasan			170.000.000		187.000.000		205.700.000		226.270.000		248.897.000		1.037.867.000	SETDA, Bagian Pembang n
		20	Program Peningkatan Pengembanga Pengelolaan Keuangan Dae		60%	1 tahun	285.000.000	1 tahun	313.500.000	1 tahun	344.850.000	1 tahun	379.335.000	1 tahun	417.268.500	100%	1.739.953.500	SETDA, Bagian Pembang n
		21	Program Pengembanga Data/Informas		60%	1 tahun	75.000.000	1 tahun	82.500.000	1 tahun	90.750.000	1 tahun	99.825.000	1 tahun	109.807.500	100%	457.882.500	SETDA, Bagian Pembang n
1		22	Program Pena Peraturan perundang-undangan	Kajian Peratura Perundang-Unda Daerah Terhada Peraturan Perur Undangan yang Lebih Tinggi da Keserasian Anta Peraturan Peun Undangan Daera	80%	1 tahun	815.000.000	1 tahun	1.508.320.000	1 tahun	988.150.000	1 tahun	1.086.965.000	1 tahun	1.195.661.500	100%	5.594.096.500	SETDA, Bagian Hukum
		23	Program Kerjasama Pembangunan		80%	1 tahun	220.800.000	1 tahun	242.880.000	1 tahun	267.168.000	1 tahun	293.884.800	1 tahun	323.273.280	100%	1.348.006.080	SETDA, Bagian Hukum
		24	Program Pena Peraturan perundang-undangan				75.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	115.500.000	1 tahun	127.050.000	1 tahun	139.755.000	100%	562.305.000	SETDA, Bagian Pemerinta n

Kode			Bidang Urusan Pemerintah d Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		25	Program Peningkatan Kapasitas Ap Pemerintahan Desa				75.000.00	1 tahun	382.500.00	1 tahun	420.750.00	1 tahun	462.825.00	1 tahun	509.107.50	100%	1.850.182.50	SETDA, Bagian Pemerinta n
		26	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebjakan KDH	Terlaksananya t lanjut hasil pengawasan			50.000.00	1 tahun	55.000.00	1 tahun	60.500.00	1 tahun	66.550.00	1 tahun	73.205.00	100%	305.255.00	SETDA, Bagian Pemerinta n
		27	Program Pena Daerah Ekono Baru					1 tahun	375.000.00	1 tahun	82.500.00	1 tahun	90.750.00	1 tahun		100%	548.250.00	SETDA, Bagian Pemerinta n
		28	Program Pemberdayaa Kelembagaan Kesejahteraa Sosial				1.655.000.00	1 tahun	1.920.500.00	1 tahun	2.112.550.00	1 tahun	2.323.805.00	1 tahun	2.556.185.50	100%	10.568.040.50	SETDA, Bagian K
1		29	Program Pengembanga Data/Informas		60%	1 tahun	70.000.000	1 tahun	77.000.00	1 tahun	84.700.00	1 tahun	93.170.00	1 tahun	102.487.00	100%	427.357.00	SETDA, Bagian K
		30	Program Pengembanga Nilai Budaya			1 tahun	1.895.280.000	1 tahun	1.910.280.00	1 tahun	1.926.780.00	1 tahun	1.944.930.00	1 tahun	1.964.895.00	100%	9.642.165.00	SETDA, Bagian K
		31	Program Peningkatan Serta Kepemu		70%	1 tahun	110.000.000	1 tahun	121.000.00	1 tahun	133.100.00	1 tahun	146.410.00	1 tahun	161.051.00	100%	671.561.00	SETDA, Bagian K
		32	Program Pembangunan Ekonomi			1 tahun	710.000.000	1 tahun	805.000.000		880.000.00	1 tahun	905.000.000		980.000.00	1 tahun	4.280.000.00	SETDA, Bagian Perekono n dan SD
		33	Program Kerjasama Pembangunan			1 tahun	495.000.000	1 tahun	525.000.000		495.000.00	1 tahun	200.000.000		150.000.00	1 tahun	1.865.000.00	SETDA, Bagian Perekono n dan SD
		34	Program Penyelesaian Konflik-Konfli Pertanahan			1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000		125.000.00	1 tahun	125.000.000		125.000.00	1 tahun	625.000.00	SETDA, Bagian Perekono n dan SD
1		35	Program Pemberdayaa Kelembagaan Kesejahteraa Sosial			1 tahun	1.035.200.00	1 tahun	1.170.000.000		1.280.000.00	1 tahun	1.405.000.000		1.565.000.00	1 tahun	6.455.200.00	SETDA, Bagian Keuangan dan Aset

Kode			Bidang Urusan Pemerintah d Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1 tahun	1.119.150.000	1 tahun	1.260.700.000	1 tahun	1.610.000.000	1 tahun	2.460.000.000	1 tahun	2.125.000.000	1 tahun	8.574.850.000	SETDA, Bagian Keuangan dan Aset
		37	Program Pengembanga Sistem Pelap Capaian Kine Keuangan			1 tahun	545.400.000	1 tahun	625.000.000	1 tahun	699.100.000	1 tahun	785.500.000	1 tahun	825.000.000	1 tahun	3.480.000.000	SETDA, Bagian Keuangan dan Aset
JUMLAH							25.100.471.000		28.947.126.000		29.600.694.000		31.112.730.800		31.916.756.280		146.677.778.080	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembangun	Indikator Kine Program (outco	Kondis Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJM		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintaha Umum															
	20		Sekretariat DPRD															Sekretar DPRD
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: ja surat menyurat surat, komunika unit kantor dan gudang , rutin untuk 72 PNS d 25 DPRD, rakor konsultasi kelu daerah	1 tahun	1 tahun	6.441.882.125	1 tahun	6.457.072.500	1 tahun	6.508.072.500	1 tahun	6.514.622.500	1 tahun	6.514.622.500	300.000 su	32.436.272.125	Sekretar DPRD
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan g pembelian pera	1 tahun	1 tahun	1.602.323.000	1 tahun	675.800.000	1 tahun	675.800.000	1 tahun	675.800.000	1 tahun	1.025.800.000		4.655.523.000	Sekretar DPRD
1		3	Program Peningkatan Disiplin Apa	Meningkatnya kedisplinan berpakaian ang DPRD dan pega SETWAN	1 paket	1 paket	409.275.000	1 paket	560.000.000	1 paket	410.000.000	1 paket	810.000.000	1 paket	710.000.000		2.899.275.000	Sekretar DPRD
		4	Program Pengembang Sistem Pela Capaian Kin & Keuangan				386.525.000		386.525.000	-	386.525.000	-	386.525.000	-	386.525.000		1.932.625.000	Sekretar DPRD
1		5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Terserapnya as masyarakat ; tersosialisasiny Peraturan Peru undangan; berfungsinya Ba Kehormatan De dan pembahasa Raperda	Terlaks anya reses d pembah an Raperd	Orang dan Raperd	6.202.817.875		6.962.000.000		6.962.000.000		7.062.000.000		7.062.000.000		1.932.625.000	Sekretar DPRD
JUMLAH							15.042.823.000		15.041.397.500		14.942.397.500		15.448.947.500		15.698.947.500		43.856.320.125	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah d Program Prio Pembanguna	Indikator Kiner Program (outco	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Du Selatan						-	-	-	-	-	-	-		-	Kecamatan Du Selatan
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggarany administrasi perkantoran: jas menyurat, komun **rutin kantor**, **rak** konsultasi kelua daerah		1 tahun	1.150.223.00	1 tahun	1.207.785.95	1 tahun	1.250.682.60	1 tahun	1.346.112.15	1 tahun	1.427.916.29	100%	6.382.719.90	Kecamatan Du Selatan
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan be gedung kantor d terbelinnya Gens teralis kantor, d penimbunan dan pemasangan pav stone kantor kecamatan		1 tahun	180.950.00	1 tahun	140.300.0	1 tahun	99.480.00	1 tahun	121.997.00	1 tahun	212.589.12	100%	755.316.12	Kecamatan Du Selatan
1		3	Program Peningkatan Disiplin Apar	Pengadaan paka Dinas		1 paket	66.000.000	1 paket	62.235.00	1 paket	75.000.00	1 paket	38.000.00	1 paket	86.000.00	100%	327.235.00	Kecamatan Du Selatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya da operasional kecamatan/kelur TP-PKK		1 tahun	550.775.00	1 tahun	559.558.0	1 tahun	1.421.068.00	1 tahun	605.200.00	1 tahun	624.547.00	100%	3.761.148.00	Kecamatan Du Selatan
		5	Program Pengembanga Sistem Pelap Capaian Kine Keuangan			1 tahun	45.040.000	1 tahun	48.294.00	1 tahun	50.146.00	1 tahun	53.203.51	1 tahun	96.068.68	100%	292.752.18	Kecamatan Du Selatan
		6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah D			1 tahun	10.000.000	1 tahun	30.000.00	1 tahun	43.000.00	1 tahun	36.000.00	1 tahun	39.600.00	100%	158.600.00	Kecamatan Du Selatan
JUMLAH							2.002.988.000		2.048.172.950	-	2.939.376.600	-	2.200.512.660	-	2.486.721.104		11.677.771.314	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembangun	Indikator Kin Program (outc	Kondis Kinerj Awal RPJMD (Tahu 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Dusun Hilir						-	-	-	-	-	-	-		-	Kecamatan Dusun Hilir
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggara administrasi perkantoran: surat menyura komunikasi, r kantor, rakor, konsultasi kel daerah		1 tahun	503.100.000	1 tahun	517.000.000	1 tahun	536.200.000	1 tahun	557.000.000	1 tahun	624.000.000	100%	2.737.300.000	Kecamatan Dusun Hilir
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedur kantor dan meubelair		1 tahun	1.094.500.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	165.500.000	1 tahun	177.000.000	1 tahun	188.000.000	100%	1.775.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
		3	Program Peningkatan Disiplin Apar	Terciptanya d kinerja aparat			47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		237.500.000	Kecamatan Dusun Hilir
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya S yang handal d profesional		1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	100%	250.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
		5	Program Pembinaan d Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya pembinaan da peningkatan kapasitas apa			412.500.000		418.000.000		413.000.000		419.000.000		424.500.000		2.087.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
		6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah			16.500.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000		19.000.000		88.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
1		7	Program Pengembanga Sistem Pelap Capaian Kine Keuangan	Terselenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan set tahunnya		1 tahun	13.500.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	100%	123.500.000	Kecamatan Dusun Hilir
JUMLAH							2.137.600.000		488.441.800		537.285.980		591.014.578		650.116.036		2.987.934.394	

Kode			Bidang Uru Pemerintah Program Pri Pembangun	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondis Kinerj Awal RPJMD (Tahu 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP				
						Target	Rp	Target	Rp341.456	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
1	20		Pemerintaha Umum																	
	20		Kecamatan																	
	20	01	Kecamatan Dusun Utara						-	-	-	-	-	-	-			-		Kecamatan Dusun Uta
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa menyurat, komuni rutin kantor, rako konsultasi keluar		1 tahun	849.762.40	10 tahun	1.093.161.11	12 tahun	1.454.341.45	15 tahun	1.863.729.29	22 tahun	2.424.017.55	100%	7.685.011.84	2		Kecamatan Dusun Uta
1		2	Program Peningkata Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan ber gedung kantor da terbelinnya Lapto pakaian dinas pe		1 tahun	1.424.790.00	10 tahun	1.493.935.00	10 tahun	677.139.50	10 tahun	1.041.181.35	10 tahun	972.395.75	100%	5.609.441.60	5		Kecamatan Dusun Uta
		3	Program Peningkata Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaia Dinas Beserta Perlengkapannya		1 tahun	70.000.00	10 tahun	91.000.00	10 tahun	118.300.47	14 tahun	153.790.00	10 tahun	199.927.00	100%	633.017.47	4		Kecamatan Dusun Uta
1		4	Program Peningkata Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dan operasional kecamatan/kelura TP-PKK, dan Musrenbang Keca		1 tahun	432.874.60	10 tahun	462.197.00	10 tahun	731.584.47	14 tahun	951.059.81	16 tahun	1.236.377.60	100%	3.814.093.57	70		Kecamatan Dusun Uta
		5	Program Pemberdaya Masyarakat	Persentase masya yang tidak berkerj menurun		1 tahun	113.460.00	10 tahun	147.498.00	10 tahun	191.711.40	10 tahun	249.224.82	10 tahun	323.992.26	100%	1.025.886.48	86		Kecamatan Dusun Uta
JUMLAH							2.890.887.000		3.287.791.120		3.173.077.304		4.258.985.278		5.156.710.260		18.767.450.962			

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Gunung Bint Awai						-	-	-	-	-	-	-		-	Kecamatan Gunung Bintang Aw
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraa administrasi perkantoran		1 tahun	497.540.00	1 0 tahun	547.294.00	1 0 tahun	602.023.40	1 0 tahun	662.225.74	1 0 tahun	728.448.31	1 4 tahun	3.037.531.45	Kecamatan Gunung Bintang Aw
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan b gedung kantor pembelian prin dan perawatan meubelair, kom dan genset		1 tahun	45.950.00	1 0 tahun	50.545.00	1 0 tahun	55.599.50	1 0 tahun	61.159.45	1 0 tahun	67.275.39	1 5 tahun	280.529.34	Kecamatan Gunung Bintang Aw
		3	Program Peningkatan Disiplin Apa	Terpenuhinya kebutuhan sara dan fasilitas ap		1 tahun	15.640.00	1 0 tahun	17.204.00	1 0 tahun	18.924.40	1 0 tahun	20.816.84	1 0 tahun	22.898.52	1 4 tahun	95.483.76	Kecamatan Gunung Bintang Aw
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan dikl pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan S terpenuhinya la asset kecamata dokumen tata b dan patok yang akurat sesuai f		1 tahun	291.050.00	1 0 tahun	320.155.00	1 0 tahun	352.170.50	1 0 tahun	387.387.55	1 0 tahun	426.126.30	1 5 tahun	1.776.889.35	Kecamatan Gunung Bintang Aw
1		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Aparatur	Peningkatan da pembangunan gedung kantor, rujab camat da sekcam, mess pegawai, tempa parkir, pagar k		1 tahun	2.150.200.00	1 0 tahun	2.365.220.00	1 0 tahun	2.601.742.00	1 0 tahun	2.861.916.20	1 0 tahun	3.148.107.82	1 2 0 tahun	13.127.186.02	Kecamatan Gunung Bintang Aw
JUMLAH							3.000.380.000		3.300.418.000		3.630.459.800		3.993.505.780		4.392.856.358		18.317.619.938	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan KARAU KUALA															
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: ja surat menyurat komunikasi, rut kantor, rakor, konsultasi kelu daerah		1 tahun	748.000.00	1 tahun	897.600.00	1 tahun	1.077.120.00	1 tahun	1.292.544.00	1 tahun	1.551.052.80	100%	5.566.316.80	Kecamatan Karau Kuala
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan b gedung kantor pembelian prin dan perawatan meubelair, dan		1 tahun	710.000.00	1 tahun	1.367.000.00	1 tahun	2.017.400.00	1 tahun	1.377.880.00	1 tahun	685.456.00	100%	6.157.736.00	Kecamatan Karau Kuala
		3	Program Peningkatan Disiplin Apa	Penyediaan Pa Olahraga		1 tahun	10.000.00	1 tahun	10.000.00	1 tahun	20.000.00	1 tahun	10.000.00	1 tahun	20.000.00	100%	70.000.00	Kecamatan Karau Kuala
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase apar yang memenuhi standar kompetensi/kual i pada Unit Kerj		1 tahun	271.600.00	1 tahun	325.920.00	1 tahun	391.104.00	1 tahun	469.324.80	1 tahun	563.189.76	100%	2.021.138.56	Kecamatan Karau Kuala
		5	Program Pengembang Sistem Pelap Capaian Kine & Keuangan	dokumen pengel aset/barang dae		1 tahun	30.000.00	1 tahun	36.000.00	1 tahun	43.200.00	1 tahun	51.840.00	1 tahun	62.208.00	100%	223.248.00	Kecamatan Karau Kuala
		6	Program Peningkatan Pengembang Aset Daerah	Persentase selis perhitungan nila oleh Bid Asset E Keuangan Daera dengan audit BP		1 tahun	50.000.00	1 tahun	60.000.00	1 tahun	72.000.00	1 tahun	86.400.00	1 tahun	103.680.00	100%	372.080.00	Kecamatan Karau Kuala
JUMLAH							1.819.600.000		2.696.520.000		3.620.824.000		3.287.988.800		2.985.586.560		14.410.519.360	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Pric Pembangun	Indikator Kine Program (outco	Kondi Kiner Awal RPJM (Tahu 2017	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pad Tahun Periode RP				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
`	20		Pemerintaha Umum																	
	20		Kecamatan																	
	20	01	Kecamatan Jenamas						-											Kecamata Jenamas
1		1	Program pelayanan Administras Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: jas surat menyurat, komunikasi, ruti kantor, rakor, konsultasi kelua		1 tahun	639.900.00	1 tahun	644.400.00	1 tahun	699.900.00	1 tahun	699.900.00	1 tahun	699.900.00	100%	3.384.000.00			Kecamata Jenamas
1		2	Program Peningkatar Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan b gedung kantor, dinas, dan pem printer, dan perawatan meub		1 tahun	1.683.500.00	1 tahun	444.500.00	1 tahun	532.000.00	1 tahun	392.000.00	1 tahun	337.000.00	100%	3.389.000.00			Kecamata Jenamas
		3	Program Peningkatar Disiplin Apa	Tersedianya pak dinas		1 tahun	24.400.00	1 tahun	30.000.00	1 tahun	35.000.00	1 tahun	35.000.00	1 tahun	35.000.00	100%	159.400.00			Kecamata Jenamas
		4	Program Peningkatar Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya da operasional kecamatan/kelu , TP-PKK		1 tahun	290.750.00	1 tahun	700.000.00	1 tahun	354.500.00	1 tahun	357.000.00	1 tahun	359.500.00	100%	2.061.750.00			Kecamata Jenamas
		5	Program Ke Tahunan da Pengemban Sistem Pelaporan Capaian Kir dan Keuang	Terselenggarany monitoring, eval dan pelaporan se tahunnya		1 tahun	40.000.00	1 tahun	40.000.00	1 tahun	60.000.00	1 tahun	60.000.00	1 tahun	60.000.00	100%	260.000.00			Kecamata Jenamas
1		6	Program Peningkatar dan Pengemban Pengelolaar Aset Daerah	Persentase selis perhitungan nila oleh Bid Asset B Keuangan Daerah dengan audit BP		1 tahun	10.000.00	1 tahun	15.000.00	1 tahun	15.000.00	1 tahun	20.000.00	1 tahun	20.000.00	100%	80.000.00			Kecamata Jenamas
JUMLAH							2.688.550.000		1.873.900.000	-	1.696.400.000	-	1.563.900.000	-	1.511.400.000		9.334.150.000			

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembanguna	Indikator Kine Program (outco	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Ak Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20	01	Inspektorat						-	-	-	-	-	-	-		-	Inspektora
1		1	Program pelay Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: ja surat menyurat, komunikasi, rut kantor, rakor, konsultasi kelu daerah			586.726.000		632.726.000		660.846.000		714.310.000		724.310.000		3.318.918.000	Inspektora
1		2	Program Peningkatan S dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan g pembelian pera			74.600.000		94.600.000		129.600.000		124.600.000		154.600.000		578.000.000	Inspektora
		3	Program Peningkatan Disiplin Apara	Persentase apa yang disiplin dal pelaksanaan tug			32.500.000		39.000.000		39.000.000		44.500.000		44.500.000		199.500.000	Inspektora
		4	Program Pengembangan Sistem Pelapo Capaian Kiner Keuangan	dokumen pengel aset/barang dae			40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		240.000.000	Inspektora
		5	Program Pemb dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Jumlah laporan h pemeriksaan (LH laporan hasil ev (LHE), laporan h reviu keuangan (			20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		115.000.000	Inspektora
		6	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemer dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengaw yang berkinerja			192.600.000		157.600.000		157.600.000		207.600.000		207.600.000		923.000.000	Inspektora
1		7	Program Mengintensifk Pengaduan Masyarakat	Jumlah laporan h dan laporan keu negara			50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		450.000.000	Inspektora

1		8	Program Peningkatan S Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Jumlah Temuan	LHP		1.816.376.400	1.896.376.400	1.901.376.400	1.901.376.400	1.901.376.400	9.416.882.000	Inspektora
1		9	Program Peningkatan Koordinasi da Komunikasi Pe Pengawas Pemerintah	Jumlah laporan h dan laporan keru negara			100.000.000	120.000.000	140.000.000	140.000.000	150.000.000	650.000.000	Inspektora
JUMLAH							2.912.802.400	3.110.302.400	3.203.422.400	3.307.386.400	3.357.386.400	15.891.300.000	

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Ki Awal RPJ (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06		PERENCANAAN															
1	06	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															BAPPEDA
1	06	1	Program Pelay Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perka jasa surat menyura komunikasi, rutin k rakor, konsultasi k daerah			1.390.400.000		1.529.440.000		1.682.384.000		1.850.622.400		2.035.684.640		8.488.531.040	BAPPEDA
1	06	2	Program Peningkatan S dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya reha dan pemeliharaan pemeliharaan perlengkapan gedu pembelian peralata			555.844.280		410.929.759		238.711.247		251.781.809		274.655.900		1.731.922.995	BAPPEDA
		3	program Peningkatan Disiplin Apara	Terpenuhinya kete disiplin aparatur pemerintah			130.200.000		139.100.000		147.505.000		152.380.250		157.499.263		726.684.513	BAPPEDA
1	06	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapa sumberdaya aparat			156.300.200		345.250.000		220.762.500		121.550.625		127.628.156		971.491.481	BAPPEDA
1	06	5	Program Peningkatan Pengembangar Sistem Pelapo Capaian Kiner Keuangan	Meningkatnya siste pelaporan capaian k dan keuangan			125.000.000		142.305.000		150.420.250		161.601.263		179.853.826		759.180.339	BAPPEDA
1	06	6	Program Pengembangar Data/Informas	Berkembangnya laya data dan informasi disediakan			724.500.000		760.725.000		798.761.250		838.699.313		880.634.278		4.003.319.841	BAPPEDA
1	06	7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kuali perencanaan pembangunan daer			882.000.000		926.100.000		972.405.000		1.021.025.250		1.072.076.513		4.873.606.763	BAPPEDA
1	06	8	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya kuali perencanaan pembangunan ekon			378.000.000		396.900.000		416.745.000		437.582.250		459.461.363		2.088.688.613	BAPPEDA
		9	Program Perencanaan S dan Budaya	Meningkatnya kuali perencanaan sosia budaya			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
1	06	10	Program Perencanaan Infrastruktur d Prasarana Wil	Meningkatnya kuali perencanaan infrast dan prasarana wilay			441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625		536.038.256		2.436.803.381	BAPPEDA

Kode			Bidang Urusa Pemerintah d Program Prior Pembanguna	Indikator Kinerja P (outcome)	Kondisi Ki Awal RPJ (Tahun 20	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggu Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya kuali perencanaan pembangunan daer rawan bencana			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
1	06	12	Program perencanaan pendidikan da Kesra	Meningkatnya kuali perencanaan pendi dan kesra			315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469		1.740.573.844	BAPPEDA
1	06	13	Program Perencanaan Bidang Kependudukan Kepemerintaha	Meningkatnya kuali perencanaan bidan kependudukan dan kepemerintahan			115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.688		140.390.972		638.210.410	BAPPEDA
		14	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Pu	Berkembangnya lay informasi dan kom publik			186.500.000		201.125.000		207.881.250		210.775.313		213.814.078		1.020.095.641	BAPPEDA
		15	Program Pengembangan Infrastruktur d Layanan Telekomunikas Penyiaran	Berkembangya infrastruktur dan l telekomunikasi dan penyiaran			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		290.095.641	BAPPEDA
		16	Program Penyelenggara Pos dan Inform	Terselenggaranya l pos dan informasi			252.500.000		277.750.000		305.525.000		336.077.500		369.685.250		1.541.537.750	BAPPEDA
		17	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan R dan Pengenda Tata Ruang	Meningkatnya kuali perencanaan pengembangan wila pemanfaatan ruang pengendalian tata			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
JUMLAH							6.020.244.480		6.430.574.759		6.507.097.997		6.816.393.347		7.277.005.510		33.051.316.092	

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penangg g Jawa
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
`	20		Pemerintaha Umum																	
	20	01	BPKAD						-	-	-	-	-	-	-		-			BPKAD
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaran administrasi perkantoran: ja surat menyurat komunikasi, ru kantor, rakor, konsultasi kelu daerah		1 tahun	1.082.220.000	1 tahun	1.140.640.000	1 tahun	1.199.060.000	1 tahun	1.257.480.000	1 tahun	1.314.400.000	100%	5.993.800.000	BPKAD		
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan kantor BPKAD, Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendara dinas, penimbu halaman kantor		1 tahun	3.130.000.000	1 tahun	2.145.000.000	1 tahun	160.000.000	1 tahun	175.000.000	1 tahun	190.000.000	100%	5.800.000.000	BPKAD		
		3	Program Peningkatan Disiplin Apa	Tersedianya pa dinas , pakaian raga		1 tahun	77.500.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	88.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	100.000.000	100%	1.178.128.000	BPKAD		
		4	Program Pengembang Kapasita Su Daya Aparat	Persentase apa yang memenuhi standar kompetensi/kual			110.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	100%	1.200.628.000	BPKAD		
		5	Program Pengembang Data dan Informasi	Tersusunnya Akuntansi Pemerintah dae Raperda APBD 2022, Intensifi dan Ekstensifik Sumber PAD		1 Buku	207.966.600	1 Buku	227.327.200	1 Buku	246.687.800	1 Buku	266.048.400	1 Buku	285.409.000	100%	1.233.439.000	BPKAD		
1		6	Program Pengelolaan dan Pengembang Potensi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan dae		1 tahun	925.128.000	1 tahun	1.006.776.000	1 tahun	1.088.424.000	1 tahun	1.170.072.000	1 tahun	1.251.720.000	100%	5.616.992.000	BPKAD		
1		7	Program Peningkatan Pengembang Sistem Kiner Pendapatan Daerah	Jumlah laporan keuangan PD ya memenuhi stand		1 Buku	655.628.000	1 Buku	714.776.000	1 Buku	773.924.000	1 Buku	833.072.000	1 Buku	892.220.000	100%	6.645.145.000	BPKAD		
1		8	Program Peningkatan Pengembang Pengelolaan Daerah	Persentase seli perhitungan nila oleh Bid Asset Keuangan Daera dengan audit BP			1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	100%	6.500.000.000	BPKAD		

Kode			Bidang Urus Pemerintah Program Prio Pembanguna	Indikator Kine Program (outc	Kondisi Kinerja A RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penangg g Jawa
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Tahun Periode RPJ				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
		9	Program Peningkatan Penagihan	Persentase peningkatan pendapatan dae			821.128.001	10 Buku	893.776.001	10 Buku	970.000.001	10 Buku	1.045.072.001	10 Buku	1.119.720.001	100%	4.236.534.600			BPKAD
1		10	Program Peningkatan Pengembang Pengelolaan Keuangan Da	Jumlah temuan pelanggaran keu yang itindaklanj			3.431.153.001	10 Buku	3.740.026.001	10 Buku	4.048.899.001	10 Buku	4.357.772.001	10 Buku	4.551.445.001	100%	17.623.270.800			BPKAD
JUMLAH							11.540.723.600		11.223.321.200		10.004.994.800		10.679.516.400		11.354.914.000		56.027.936.600			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ak
pada Bab ini adalah berkaitan khusus Penetapan indikator
kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah pada d
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasil
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah d
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetap
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabata

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja se
meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (
(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tu
dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indi
Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang sahih yang diperlukan
   dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian s
   dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
   kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Me
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja
Utama yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indika
strategik yang telah ditetapkan pada Bab V terdahulu seba
tabel 8.1 dibawah ini:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan

SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2016)	TARGET TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap (km)	421,6	421,6	463,8	510,2	561,2	617,2
1.2 Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi	90	90	100	100	100	100
1.3 Meningkatnya cakupan layanan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,5	55,5	61.05	100	100	100
1.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni lingkungan yang aman dan sehat.	jumlah rumah layak huni	28.06	28.06	28.31	28.56	28.81	29.06
1.5 Meningkatnya ketersediaan dan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Rasio jaringan irigasi (Ha)	421,6	421,6	463,8	510,2	561,2	617,3
1.6 Pecpaian Kawasan Kumuh	Rasio Kawasan Kumuh	15	10	5	0	0	0
1.7 Sanitasi Layak	Rasio Kawasan Sanitasi Layak	65	85	90	100	100	100
2.1 Meningkatkan harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,54	70,50	70,90	71,40	72	72,75
2.2 Menurunnya angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)	6	6	5,5	5	5	4,5
2.3 Menurunnya angka kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran	89	89	89	89	89	45

2.4	Menurunnya angka gizi	Prevalens buruk	5%	4%	4%	3,5%	3,5%	3%
2.5	Meningkatn pemakaian kontrasepsi	Jumlah pemakaian kontrasep (CPR)						
3.1	Peningkata Kualitas Gu pada semua jenjang pendidikan	Jumlah pelaksana DIKLAT, d BIMTEK						
3.2	Meningkatn akses dan l pendidikan masyarakat	Angka mel huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99,5
		Rata-Rata Lama Sekolah (t	12	12	12	12	12	12
4.1	Meningkatn pembinaan tokoh agam tokoh masy	Cakupan t agama dar tokoh masyaraka yang memperole pembinaar						
5.1	Meningkatn Produksi ha pertanian	BIDANG TANAMAN PANGAN :						
		Jumlah Produktivita Tanaman Pangan :						
		Padi Sawa (Ku/Ha)	35,40	36,83	36,97	37,07	38,50	39,25
		Padi Lada (Ku/Ha)	20,06	28,07	28,50	28,75	28,90	29,03
		Jagung (K	25,60	50,00	55,20	60,00	60,50	70,00
		Kedelai (K	12,70	13,00	13,20	13,30	13,40	13,50
		Ubi Kayu (Ku/Ha)	129,00	161,12	162,17	162,20	162,70	162,78
		Ubi Jalar (Ku/Ha)	100,90	101,00	101,50	102,00	102,50	103,00
		Kacang Ta (Ku/Ha	10,06	10,10	10,14	10,25	10,35	10,40
		Jumlah Produksi Tanaman						

	Pangan						
	Padi Sawa (Ton)	1895,9	19.151	19.726	20.318	21.130	22.187
	Padi Lada (Ton)	1.758,	2.769,	2.907,	3.053,	3.205,	3.366,
	Jagung (T	92,01	1.000,	2.208,	3.600,	4.840,	7.000,
	Kedelai (T	18,00	26,00	30,36	33,25	35,51	37,80
	Ubi Kayu (Ku/Ha)	24.510	25.735	27.022	28.373	29.792	31.281
	Ubi Jalar (Ku/Ha)	8.720,	9.156,	9.613,	10.094	10.599	11.129
	Kacang Ta (Ku/Ha)	70,40	100,00	130,76	150,55	170,60	200,00
	Luas Pane Tanaman Pangan						
	Padi Sawa	5.252,	5.200,	5.335,	5.481,	5.488,	5.652,
	Padi Lada (Ha)	876,49	1.479,	1.530,	1.592,	1.663,	1.739,
	Jagung (H	35,94	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,
	Kedelai (H	14,17	20,00	23,00	25,00	26,50	28,00
	Ubi Kayu (	190,00	159,73	166,63	174,93	183,11	192,17
	Ubi Jalar	86,42	90,65	94,72	98,97	103,41	108,05
	Kacang Ta (Ha)	7,00	9,90	12,90	14,69	16,48	19,23
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultu						
	Buahhuahan (Ton/Poho	145,40	3.083,	3.145,	3.302,	3.467,	3.641,
	Sayuran (Ton/Ha)	429,90	667,99	691,80	726,39	762,71	800,84
	Tanaman ((Ton/Ha)	3,99	4,39	4,83	5,31	5,84	6,43
	Jumlah Produktivi Tanaman						

		Hortikultu						
		Buahbuahan (Ton/Ha)	0,60	5,19	5,45	5,72	6,01	6,31
		Sayuran (Ton/Ha)	1,25	1,34	1,36	1,40	1,41	1,46
		Tanaman ((Ton/Ha)	1,08	1,18	1,28	1,38	1,48	1,58
6.1	Meningkatn produksi hasil perikanan	Produksi Perikanan	6.185,4	6,309,1	6,435,2	6,564,0	6,695,3	6.829,1
		Cakupan bi kelompok nelayan :						
		Jumlah Kel Budidaya/N Yang di Bin (Klpk)	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	64,00
		Jumlah Pet Yang Mengi Diklat Tekn	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Produksi Ha Budidaya: Ik						
		Kolam Ika	2.462,7	2.517,0	2.567,4	2.618,1	2.671,5	2.724,9
		Keramba d KJA	4,791,1	4,887,5	4,984,8	5,084,9	5,186,3	5.289,9
6.2	Meningkatn Konsumsi ikan	Konsumsi Ikan/Kapit un (Kg)	40,58	41,39	42,21	43,05	43,91	44,79
6.3	Pengelolaa Sumber Day Alam	Kesadaran Masyaraka Dalam Pengelola Sumber Da Yang Lest						

		Jumlah Pokmaswa Yang Di B (Klpk)	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00
		Jumlah Penangana Kasus Ileg Fishing (K	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Jumlah Ke Operasiion Pengawas Perikanan	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00
		Pengemba Wilayah Konservas Sumber DayaPerik :						
		-Reservaa (Danau)	-	-	3,00	8,00	12,00	16,00
		-Restocing (Ekor)	-	-	450.00	1.200.(	1.800.(	2.400.(
		-Rehabasiit Dan Revit Beje (Bua	-	-	20,00	30,00	40,00	50,00
7.1	Ketersediaa pangan uta dan Cadang Pangan :	Ketersedia pangan ut dan Cadan Pangan						
		Penguatan Cadangan Pangan (%	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
		Informasi Pasokan, H da Akses Pangan di daerah %	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
		Stabilitas dan Pasok Pangan (%	90,00	90,00	95,00	92,00	93,00	94,00

		Skor Pola Pangan Harapan (Masyaraka	94,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
		Penangana Daerah Kerawanar Pangan (%	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
7.2	Mengemban Ketersediaa Energi dan Perkapital	Ketersedia Energi dar Protein Perkapital	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7.3	Meningkatn Pengawasar pembinaan keamapan g	Pengawas dan pembi keamanan pangan	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
8.1	Terciptanya pranata huk yang mendc iklim invest	Jumlah Pe yang mendukun usaha	8	8	8	8	8	8
8.2	Meningkatn pemerataan kesejahtera masyarakat	Angka Indel Gini Rasio	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
8.3	Menurunnya angka kemi	Angka Kemiskina	5,4	5,4	4,65	3.91	3,17	2,43
8.4	Meningkatn investasi y mendorong penciptaan lapangan ke	Laju Pertumbuh Investasi	25	25,55	30,76	32	34,25	36,5
8.5	Meningkatn partisipasi angkatan ke	Angka partisipas angkatan	4,1	4	3,8	3,7	3,6	3,5
8.6	Meningkatn daya beli masyarakat	Laju pertumbuh Ekonomi	7,1	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8
9.1	Meningkatn peran kelembagaa permodal-an UMKM adal pengemban	Persent-as UMKM akti	80	85	87	89	91	95

	ekonomi lok							
9.2	Meningkata daya saing pemasaran produk ung daerah (Ro Karet, Kerb Rawa, Nena Parigi dll)	Stabilitas Jual Produ Unggulan Daerah						
10.1	meningkatn pendapatan daerah teru peningkatar Pendapatan Daerah (PA	Kenaikan Pendapata Daerah						
11.1	Terpasarny pariwisata	Jumlah wisatawan	27	30	35	37	40	40
12.1	Meningkatn kontribusi pariwisata perekonomi daerah	Kontribusi pariwisata terhadap P (ribuan Rp	568.009 1	568.00	575.30	582.70	594.70	598.00
12.2	Meningkatn sektor ekon hijau							
13.1	Meningkatn ketaatan pengelolaar lingkungan	Persentas pengaduar masy akib adanyadu pencemara dan/atau perusakan lingkungar hidup yang ditindak la (%)	70	70	72,5	80	83	85
13.2	Terealisasi perencanaa tataruang y akomodatif konsisten							
14.1	Meningkatn partisipasi masyarakat dalam menggunaka pilih	Partisi ha pilihnya p Pemilu	85	85	87	89	90	90

14.2	Meningkatn cakupan kepemilikar Dokumen Kependuduk (KTP, KK, c	Dokumen Kependudu						
151	Meningkatn peran pemu	Cakupan Pembinaar Lembaga pemuda (%	25	27	35	40	43	47
152	Meningkatny prestasi ola	Persentae prestasi o raga (%)	15	20	25	30	35	35,5
16.1	Meningkatn perlindunga hak adat da tanah adat	Persentas yang diter	26,25	26,25	26,5	26,75	27	27,25
17.1	Meningkatn kualitas pengelolaar keuangan d	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17.2	Meningkatn kualitas pelayanan p	Indeks Ke Masyaraka (IKM)		82	84	86	88	88
17.3	Meningkatn kinerja dan akuntabilita pelaksanaa pembangun daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksana reformasi birokrasi		65	75	80	85	85
17.4	Nilai Akunt Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil peni kinerja pemerinta daerah	C	B	BB	BB	BB	A
17.5	Predikat penyelenggara pemerintah daerah	Hasil pred penyelenggara raan pemerinta	B	B	BB	BB	A	A

17.	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	Temuan Inspektorat Kabupaten						

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada awal Bab ini, indikator kinerja daerah pada dasarnya untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode masa jabatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menggambarkan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai perubahan kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian daerah membutuhkan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam pembahasan terkait Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat dua aspek dan indikator yaitu 1) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (dampak/Sasaran); dan 2) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Outcome/Sasaran). Kedua aspek tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

A. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Sasaran (dampak)

Pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Sasaran (dampak), penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Aspek kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat dikukur antara lain Pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per Kapita, Angka Melek dan beberapa indikator. Sedangkan pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita, produktivitas dan beberapa indikator lainnya dan dapat dilihat pada Tabel

B. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkatan Pemerintah Daerah

Pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkatan Pemerintah Daerah, penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Aspek yang berkaitan dengan pelayanan umum berdasarkan urusan pemerintahan yang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Urusanan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta Unsur Penunjang Pemerintahan. Selanjutnya Indikator tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8.3.

Tabel 8.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingk

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target T 2017	2018	2019	2020	2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8	7,
2	Laju Inflasi	4,55	4,4	4,25	4,15	4,05	3,8
3	PDRB per kapita	25,2	27,3	29,4	31,5	33,1	35
4	Indeks Gini	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,3
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia						
6	Indeks ketimpangan Williamson (I Regional)						
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan						
8	Rasio kesenjangan kemiskinan						
9	Proporsi penduduk dengan pendap 1,00 (PPP) per kapita per hari						
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,04	69,73	70,43	71,33	72,22	73
11	Angka Melek Huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99
12	Angka rata-rata lama sekolah	12	12	12	12	12	1
13	Angka usia harapan hidup	71,56	71,68	71,8	71,92	72,04	72
14	Persentase balita gizi buruk	0	0	0	0	0	0
15	Pravalensi balita gizi kurang	0	0	0	0	0	0
16	Cakupan Desa Siaga Aktif						
17	Angka partisipasi angkatan kerja	68.276		69.642	71.034	72.455	73.904
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	150,00		165	182	200	220
19	Tingkat pengangguran terbuka	5,28	5,06	4,84	4,62	4,40	4,6
20	Rasio penduduk yang bekerja	86,57	88,87	92,45	93,47	94,78	96,
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja						
22	Rasio kesempatan kerja terhadap keatas						
23	Proporsi tenaga kerja yang berusa bebas keluarga terhadap total kes						
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	5.635	5.485	5.285	5.135	4.850	4.6
25	Indeks Kepuasan Masyarakat						
26	Persentase PAD terhadap pendapatan						
27	Opini BPK						
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
29	Penguatan cadangan pangan						
30	Penanganan daerah rawan pangan						
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB						
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,87	3,1	3,33	3,56	3,89	4,
33	Produksi sektor pertanian						
34	Kontribusi sektor perkebunan (tan PDRB	17,46	19,21	21,13	23,24	25,56	28,1
35	Produksi sektor perkebunan	10,23	11,15	12,07	12,99	13,91	14,
36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB						
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB						
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB						
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,415	0,625	0,84	1,14	1,355	1,5
40	Kontribusi sektor kelautan dan perkanan terhadap PDRB		15,00	18	20	22	2
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,87	19,42	19,97	20,52	21,07	21,
42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,05	8,43	8,81	9,19	9,57	9,9
43	Kontribusi sektor industri rumah t sektor Industri						
44	Pertumbuhan industri	21	21	22	23	24	2
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB						
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	651.353	716.488	788.137	866.951	953.646	
2	Nilai tukar petani	109,67	110,51	111,35	112,19	113,03	113,
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	238.938	262.832	289.115	318.026	349.829	
4	Produktivitas total daerah		54.137	59.551	65.506	72.056	79.262
5	Persentase desa berstatus swasen desa	24	25	27	29	30	3(
6	Rasio Ekspor + Impor terdapat PD keterbukaan ekonomi)						
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank						
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR						
9	Angka kriminalitas yang tertangani	85	80	75	60	50	5(
10	Rasio ketergantungan	29,23	28,12	27,01	26,00	24,99	24,

Tabel 8.3

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.2	Angka Partasipasi Kasar	98,82	98,82	98,82	98,82	98,
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan					
1.4	Angka Partisipasi Murni:	106,53	85,00	86,00	88,00	89,
1.4.1	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,71%	96%	96,5%	97%	97,
1.4.2	Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	106,53	85,00	86,00	88,00	89,
1.4.3	Angka Partispasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C					
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:					
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	95,71%	96%	96,5%	97%	97,
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	106,53	85,00	86,00	88,00	89,
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/ Paket C					
1.6	Angka Putus Sekolah:					
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,0
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0%
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA					
1.7	Angka Kelulusan:					
1.7.1	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	94,98%	94,98%	95%	96%	97
1.7.2	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	96,12 %	80%	85%	90%	90
1.7.3	Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA					
1.8	Angka Melanjutkan:					
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI	94,98	94,98	95,00	96,00	97,
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs	88,82	88,82	88,22	90,00	90,
1.8.3	Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/MA					
1.9	Fasilitas Pendidikan:					
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	26,45	30	35	40	4
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan kondisi bangunan baik	16,67	20	35	50	7
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/pend pendidikan dasar	1;83	1;83	1;83	1;83	1;8
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terha sekolah pendidikan menengah					
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1;8	1;8	1;10	1;15	1;1
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1;11	1;12	1;14	1;16	1;1
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1;08	1;08	1;10	1;15	1;1
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata					
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang be sekolah dasar					
1.17	Angka melek huruf penduduk usia perempuan dan laki					
1.18	Penduduk yang berusia >15 Ta buta aksara)	0,19	0,15	0,1	0,05%	0,0
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	78,86%	78,86%	79,57%	80,28%	80,9
2	Kesehatan					
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	5	5	5	4
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	99,75	99,75	99,85	99,9	99
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup					
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup					
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	89	89	89	89	4
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 75	1 : 70	1 : 65	1 : 60	1 :
2.7.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 10
2.8.	Rasio pustu per satuan penduduk	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10
2.9.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk					
2.10	Rasio dokter per satuan penduduk	40 : 100.000	40 : 100.000	40 : 100.000	42 : 100.000	42 : 10
2.11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk					
2.12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani					
2.13	Cakupan pertolongan persalinan yang memiliki kompetensi kebida					
2.14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Im (UCI)					
2.15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	4%	4%	3,5 %	3,5 %	3%
2.16	Proporsi penduduk dengan asupa tingkat konsumsi minimum (stan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)					
2.17	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak					
2.18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk					
2.19	Cakupan balita pneumonia yang ditangani					
2.20	Cakupan penemuan dan penangan TBC BTA					
2.21	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
2.22	Tingkat kematian karena Tuberku penduduk)					
2.23	Proporsi jumlah kasus Tuberk dalam program DOTS					
2.24	Proporsi kasus Tuberkulosis yang dalam program DOTS					
2.25	Cakupan penemuan dan penangan DBD					
2.26	Penderita diare yang ditangani					
2.27	Angka kejadian Malaria					
2.28	Tingkat kematian akibat malaria					
2.29	Proporsi anak balita yang tidur d berinsektisida					
2.30	Proporsi anak balita dengan dem obat anti malaria yang tepat					
2.31	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
	Penggunaan kondom pada hubung					
2.32	terakhir					
2.33	Proporsi jumlah penduduk usia 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehen					
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan ru miskin					
2.35	Cakupan kunjungan bayi					
2.36	Cakupan puskesmas					
2.37	Cakupan pembantu puskesmas					
2.38	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4					
2.39	Cakupan pelayanan nifas	75%	78,5 %	80%	83%	85
2.40	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani					
2.41	Cakupan pelayanan anak balita					
2.42	Cakupan pemberian makanan pen anak usia 6 -24 bulan keluarga					
2.43	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat					
2.44	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin					
2.45	Cakupan pelayanan gawat darura diberikan sarana kesehatan (RS)					
2.46	Cakupan Desa/ Kelurahan menga penyelidikan epidemiologi < 24 ja					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Pekerjaan Umum:					
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	421,66	463,83	510,21	561,23	617,
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk					
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman y kendaraan roda 4					
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalar KM/Jam)		1.500,00	1.996,37	2.196,00	2.415
3.1.5	Persentase jalan yang memil drainase/saluran pembuangan air	10,00	12,00	14,00	16,00	18,0
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang lima atau bangunan rumah liar	2	1	1	1	1
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	30,67	30,67	25,57	25,32	20,
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2	1	1	1	1
3.1.9	Persentase drainase dalam kondi aliran air tidak tersumbat	10,00	12,00	16,00	20,00	24,0
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun					
3.1.11	Persentase pembangunan turap d penghubung dan aliran sungai r	1,50	1,70	1,90	2,10	2,5
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	5.469,60	6.069,60	6.469,60	6.869,60	7.269
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	421,66	463,83	510,21	561,23	617,
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum					
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan terhadap air minum layak, perkot					
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh					
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan					
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 :
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1 : 158	1 : 158	1 : 148	1 : 148	1 : 1
3.2.	Penataan Ruang:					
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per S HPL/HGB	15.913	15.913	16.000	16.000	16.5
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% kota/kawasan perkotaan					
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan					
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya					
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepo hasil pemotretan citra satelit d terhadap luas daratan					
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4.1.	Rasio rumah layak huni					
4.2.	Rasio permukiman layak huni					
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni					
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau					
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata					
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh					
4.7.	Persentase luasan permukiman k perkotaan					
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan					
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat didukung dengan PSU					
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, d Masyarakat					
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggara ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	50%	100%	100%	100%	100%
5.4.	Tingkat waktu tanggap (time layanan Wilayah Manajemen Ke	20 km : 30' : 55'	20 km : 30' km : 55'	20 km : 30' : 55'	20 km : 30' : 55'	20 km : 30' : 55'
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sosial					
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1100	1050	1000	950	90
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
6.3.	Persentase PMKS skala yang m sosial untuk pemenuhan kebutuha					
6.4.	Persentase panti sosial yang pemberdayaan sosial melalui kel (KUBE) atau kelompok sosial eko					
6.5.	Persentase panti sosial yang mer prasarana pelayanan kesehatan s					
6.6.	Persentase wahana kesejahteraa masyarakat (WKBSM) yang menye prasarana pelayanan kesejahtera					
6.7.	Persentase korban bencana yang sosial selama masa tanggap daru					
6.8.	Persentase korban bencana yang mengunakan sarana prasarana ta					
6.9.	Persentase penyandang cacat fi lanjut usia tidak potensial yang t sosial					
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja					
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	5	4	4	3
1.2.	Besaran kasus yang diselesaika Bersama (PB)	62	35	30	25	20
1.3.	Besaran pencari kerja yang terda	ftar yang ditempatkan				
1.4.	Keselamatan dan perlindungan					
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang men Jamsostek					
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusa pemerintah daerah	2	2	2	2	2
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan					
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di P	erusahaan				
1.9.	Besaran tenaga kerja yang menda berbasis kompetensi	30	40	80	100	150
1.10	Besaran tenaga kerja yang menda berbasis masyarakat					
1.11	Besaran tenaga kerja yang menda kewirausahaan					
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3					
2	Pemberdayaan Perempuan dan Pe	rlindungan Anak				
2.1.	Persentase partisipasi perempua pemerintah	25,00	25,00	27,00	29,00	30,
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	35%	36%	36%	36%	40
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,00	15,00	18,00	22,00	25,
2.4.	Rasio KDRT	0,005	0,0045	0,0040	0,0035	0,00
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja di	bawah umur				
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47,50 %	47,75%	48,00%	48,25%	48,5
2.7.	Cakupan perempuan dan anak ko mendapatkan penanganan penga terlatih di dalam unit pelay	40%	50%	60%	70%	80
2.8.	Cakupan perempuan dan anak ko mendapatkan layanan kesehat kesehatan terlatih di Puskesmas KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sak					
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi so oleh petugas rehabilitasi sosial dan anak korban kekerasan di da terpadu.					
2.10	Cakupan penegakan hukum dari t sampai dengan putusan pengadila kekerasan terhadap perempuan d					
2.11	Cakupan perempuan dan anak ko mendapatkan layanan bantuan hu	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
2.12	Cakupan layanan pemulangan bag korban kekerasan					
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosi anak korban kekerasan					
2.14	Rasio APM perempuan di SD	hal di SD				
2.15	Rasio APM perempuan di SMP	hal di SMP				
2.16	Rasio APM perempuan di SMA	hal di SMA				
2.17	Rasio APM perempuan di Perguruan	hal di Perguruan				
2.18	Rasio melek huruf perempuan kelompok usia 15	Laki-laki pe 24 tahun				
2.19	Kontribusi perempuan dalam peke sector nonpertanian					
3	Pangan					
3.1	Ketersediaan pangan utama dan C	adangan Pangan				
3.1.1	- Penguatan Cadangan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,0
3.1.2	- Informasi Pasokan,Harga da Akses Pangan di daerah %	90,00	90,00	91,00	92,00	93,0
3.1.3	- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90,00	90,00	95,00	92,00	93,0
3.1.4	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat (%)	94,00	94,00	95,00	96,00	97,0
3.1.5	- Penanganan Daerah Kerawanan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,0
3.2.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	90,00	90,00	91,00	92,00	93,0
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keam	anan pangan	70,00	70,00	71,00	72,00	73,0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
4	Pertanahan					
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	70,75	72,75	77,75	78,75	80,
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara					
4.3.	Penyelesaian izin lokasi					
5	Lingkungan Hidup					
5.1.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota					
5.1.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam ren kabupaten/kota					
5.1.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/ provinsi					
5.1.4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air					
5.1.5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara					
5.1.6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan					
5.1.7.						
5.1.8.	Peningkatan kapasitas dan Saran Pengawas Lingkungan Hidup di D Kabupaten/Kota					
5.1.9.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA					
5.1.10.	Terverifikasinya MHA dan kearifa pengetahuan tradisional					
5.1.11.	Terverifikasi hak kearifan lokal a tradisional					
5.1.12.	Penetapan hak MHA					
5.1.13.	Terfasilitasi kegiatan peningkata keterampilan					
5.1.14.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana					
5.1.15.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat					
5.1.16.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup					
5.1.17.	Pengaduan masyarakat terkait iz dan PUU LH yang diterbitkan olel Kabupaten/Kota, lokasi usaha da kabupaten/kota.	80%	80%	85%	85%	90
5.1.18.	Timbulan sampah yang ditangani					
5.1.19.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R					
5.1.20.	Persentase cakupan area pelayanan					
5.1.21.	Persentase jumlah sampah yang tertangani					
5.1.22.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota					
5.1.23.	Persentase izin pengelolaan sam diterbitkan					
5.1.24.	Persentase pengelolaan sampah terhadap peraturan perundang- u					
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	90	94	98	100	10
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	80%	82,50%	85%	87%	88,5
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	25	30	35	40	4
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90%	94%	98%	100%	100
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	40%	50%	70%	90%	93
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1.	Cakupan sarana prasarana perka desa yang baik					
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaa pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	15	15	1
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK					
7.4.	Persentase LSM aktif	50 Unit	53 Unit	55 Unti	58 Unit	60 U
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	10,75	10,95	11,15	11,35	11,
7.6.	Persentase PKK aktif	93 Unit	93 Unit	93 Unit	93 Unit	93 U
7.7.	Persentase Posyandu aktif	167	167	167	167	16
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Pr masyarakat	558.940	79.125.000	86.251.000	97.560.000	107.540
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	2.016.700.000	2.056.700.000	2.096.700.000	2.096.700.000	2.136.70
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,010				
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)					
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Di berperan aktif dalam pembanguna Kampung KB					
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Di menyusun dan memanfaatkan Ran Pengendalian Penduduk					
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Dae Daerah) yang mengatur tentang p dan kualitas penduduk					
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati profil (parameter dan proyeksi pe perencanaan dan pelaksanaan pr					
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggara non formal, dan informal yang me kependudukan					
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,56	2,14	2,13	2,12	2,1
8.9.	Ratio Akseptor KB	75%	78%	80%	82%	84
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CP menikah usia 15 - 49	75%	77%	80%	85%	88
8.11	Angka kelahiran remaja (perempu 1.000 perempuan usia 15 19 tahu					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (P dibawah 20 tahun	2,13	2,14	2,15	2,16	2,1
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB need)	14,93	14,50	14,00	13,50	13,
8.14	Persentase Penggunaan Kontrase (MKJP)	18,15%	18,5%	19%	20%	22
8.15	Persentase tingkat keberlangsung kontrasepsi					
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,38%	88%	88,10%	88,20%	88,3
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	90,25%	90,30%	90,35%	90,40%	90,5
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,02%	83,10%	83,20%	83,30%	83,4
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejaht Kecamatan	50%	55%	60%	65%	70
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Inf Remaja/Mahasiswa					
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayag Daerah KB untuk perencanaan d pembangunan daerah di bidang p					
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Pendapatan Keluarga Sejahtera mandiri	86,09	86,10	86,20	86,30	86,
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina setiap desa/kelurahan	64,5%	65%	67%	70%	72
8.24	Cakupan ketersediaan dan distrib kontrasepsi untuk memenuhi per					
8.25	Persentase Faskes dan jejarin wilayah) yang bekerjasama deng memberikan pelayanan KBKR ses pelayanan					
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Da setiap desa	1	1	1	1	1
8.27	Persentase remaja yang terkena (IMS)					
8.28	Cakupan kelompok keglatan yang keluarga melalui 8 fungsi keluarg					
8.29	Cakupan keluarga yang mempun memahami dan melaksanakan pen pembinaan tumbuh kembang anak					
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita					
8.31	Persentase Pembiayaan Program Keluarga Bencana dan Pembangu APBD dan APBDes					
9	Perhubungan					
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	11.150	11.200	11.300	11.450	11.6
9.2.	Rasio ijin trayek					
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	400 unit	402 unit	404 unit	409 unit	415 u
9.4.	Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terminal Bis	9	9	9	10	1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat					
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum					
9.7.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	1100	1100	1300	1500	170
9.8.	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	300	300	325	350	37
9.9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 170	1 : 160	1 : 150	1: 140	1: 1
9.10	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	11.150	11.200	11.323	11.456	11.6
	Jumlah orang/barang melalui der per tahun					
10	Komunikasi dan Informatika					
10.1	Cakupan pengembangan dan pem Informasi Masyarakat di Tingkat					
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi					
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	87,88%	88,88%	89,90%	90,50%	92
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet					
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi					
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
11.1	Persentase koperasi aktif	100%	100%	100%	100%	100
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100%	100%	100%	100%	100
12	Penanaman Modal					
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	52	53	55	58	61
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,5 triliun	1,55 triliun	1,6 triliun	1,7 Triliun	1,75 T
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja					
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Reali rupiah)	625				
13	Kepemudaan dan Olah Raga					
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	25%	27%	35%	40%	43
13.2	Persentase wirausaha muda					
13.3	Cakupan pembinaan olahraga					
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi					
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda					
13.6	Jumlah atlet berprestasi					
13.7	Jumlah prestasi olahraga					
14	Statistik					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi					
14.2	Buku kabupaten dalam angka	1	1	1	1	1
14.3	Buku PDRB	1	1	1	1	1
15	Persandian					
15.1	Persentase Perangkat daerah ya sandi dalam komunkasi Perangka					
16	Kebudayaan					
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya					
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi					
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu					
17	Perpustakaan					
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	18.012	50	50	100	10
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	22.568	100	160	200	20
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,56%	0,59%	0,62%	0,65%	0,6
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/hari	397,08	476,50	571,83	686,17	823,
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28,787	28,757	30,507	32,507	34,7
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga tekn memiliki sertifikat	1	1	1	1	1
18	Kearsipan					
18.1	Persentase Perangkat Daerah y secara baku	0%	20%	40%	60%	80
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	10	1	2	3	3
Layanan Urusan Pilihan						
1	Pariwisata					
1.1.	Kunjungan wisata	27%	30%	35%	37%	40
1.2.	Lama kunjungan Wisata					
1.3.	PAD sektor pariwisata					
2	Pertanian					
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB					
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,67	3,1	3,33	3,56	3,8
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (ta PDRB	17,46	19,21	21,13	23,24	25,5
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB					
2.5.	Produktivitas padi atau bahan p lainnya per hektar					
2.6.	Cakupan bina kelompok petani					
3	Kehutanan					
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis					
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan					
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untu keanekaragaman hayati terhadap hutan					
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	95	97	98	98	9
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik					
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin					
5	Perdagangan					
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan					
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	941	1011	1081	1151	122
6	Perindustrian					
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	28	30	33	35	3
7	Transmigrasi					
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	200 KK	10 KK	20 KK	20KK	25
8	Kelautan dan Perikanan					
8.1.	Produksi perikanan	6.185,40	6,309,11	6,435,29	6,564,00	6,695
8.2.	Konsumsi ikan	40,58	41,39	42,21	43,05	43,9
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan					
8.3.1	Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk)	36,00	42,00	48,00	54,00	60,0
8.3.2	Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,0
8.4.	Produksi Hasil Budidaya Ikan					
8.4.1	Kolam Ikan	2.467,72	2.517,07	2.567,42	2.618,76	2.671
8.4.2	Keramba dan KJA	4,791,29	4,887,12	4,984,86	5,084,56	5,186
8.5.	Kesadaran Masyarakat Dalam Per Yang Lestari					
8.5.1	- Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk)	18,00	24,00	30,00	36,00	42,0
8.5.2	- Jumlah Penanganan Kasus Ilegal Fishing (Kasus)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0
8.5.3	- Jumlah Kegiatan Operasional P (Kali)	10,00	12,00	14,00	16,00	18,0
8.6.	Usaha Pengelolaan	140,00	145,00	150,00	155,00	160,
8.7.	Nilai tukar nelayan					
8.8.	Pengembangan Wilayah Konserva DayaPerikanan					
8.8.1	- Reservaat (Danau)	-	3,00	8,00	12,00	16,0
8.8.2	- Restocing (Ekor)	-	450.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.00
8.8.3	- Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah)		20,00	30,00	40,00	50,0
Penunjang Urusan						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Pembangunan					
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaa ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	tidak ada	ada	-	-
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencana telah ditetapkan dengan PERDA/P	-	Ada	-	-	-
1.3.	Tersedianya Dokumen Perenca telah ditetapkan dengan PERKAD	Ada	Ada	Ada	-	-
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang dengan PERDA					
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	-	-
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD					
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW					
2	Keuangan					
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA		9%	8%	7%	6%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD		9%	8%	7%	6%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		9%	8%	7%	6%
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)		22%	22%	22%	22%
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)		12%	10%	10%	10%
2.7.	Perbandingan antara belanja lang tidak langsung		100%	100%	100%	100%
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		41.382.064.879.482	451.168.123.754	623.726.529.487	5904.912
2.9.	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Wak
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendap dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bu
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti p formal	100%	100%	100%	100%	100
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang t pendidikan dan pelatihan struktu	100%	100%	100%	100%	100
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Or
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Or
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsio instansi pemerintah	394 Orang	512 Orang	666 Orang	866 Orang	1.126 O
4	Penelitian dan pengembangan					
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.					
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.					
	Penerapan SIDa:					
4.3.	Persentase perangkat daerah ya penerapan inovasi daerah.					
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.					
5	Pengawasan					
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	39%	50%	60%	70%	80
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	40%	30%	20%	10%	5%
5.3.	Jumlah temuan BPK	20	15	10	5	5
6	Sekretariat Dewan					
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahu Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	-	-
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Pr DPRD untuk melaksanakan Fungs Pembentukan Perda, dan Fungsi Dokumen Rencana Lima Tahuna Dokumen Rencana Tahunan (RKP	Ada	Ada	Ada	-	-
6.3.	Terintegrasi program- program D melaksanakan fungsi pengawasan dan Anggaran ke dalam Dokumen Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	-	-

Tingkat

2022
98,
90,
98
90,
98
90,
0,0
0
98
95
98,
90,
5
9
1;8
1;2
1;2
1;2
0
81,7
4
99
4
1 :
10 : 10
6 : 10
42 : 10
3

2022
85

679,
2.415
18,0
1
20,
1
25,0
3,0
7.669
679,
1 :
1 :
16.5
100%
100%
100%
20 km : 30' : 55'
100%
85

2022
3
15
2
200
30,
43
25,
0,00
49,0
90
0,20
64,0
94,0
94,0
98,0
64,0
94,0
74,0

2022
80,
95
10
90
5
Ada
Sudah
100
95
1
60 u
11,
93 U
16
125.754
2.176.70
2,
86
90

2022
2,1
12,
25
88,4
90,6
83,5
80
86,
75
1
11.6
415
1
170
40
1 : 1
11.7
95
100
100
100
100
6
1,75 T
47

2022
1
1
15
25
0,7
988,
37,2
1
100
3
40
4,
28,1
10
129
4
25
6.829
44,7
64,0
5,0
2.724
5.289
48,0
2,0
20,0
165,
20,0
3.000.00
60,0

2022
-
-
-
-
WTP
59
59
59
22
10
100
50.300.158
Tepat Wak
3 Bu
100
100
26 Or
130 Or
1.464 C
100
59
5
-
-
-

CEKLIS INPUT RENSTRA >> RPJMD

NO	DINAS/BADAN/INSTANSI	KET
1	SETDA	SUDAH
2	SETWAN	SUDAH
3	INSPEKTORAT	SUDAH
4	DINAS SOSIAL, PMD	(urusan Sosial Belum Ada dat
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB P3A	SUDAH
7	BAPPEDA	SUDAH
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	SUDAH
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SUDAH
10	DINAS KETAHANAN PANGAN P3	SUDAH
11	BPBD	SUDAH
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	SUDAH
13	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	SUDAH
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SUDAH
15	DINAS PU	SUDAH
16	DINAS NAKERTRANS	SUDAH
17	DINAS KESEHATAN	SUDAH
18	DINAS PENDIDIKAN	SUDAH
19	DINAS PERDAGANGAN KUKM	SUDAH
20	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	
21	DINAS PERHUBUNGAN	SUDAH
22	DINAS KOMINFO	
23	DINAS DUKCAPIL	SUDAH
24	BPKAD	
25	DINAS PERUMAHAN, KP	SUDAH
26	KECAMATAN DUSUN SELATAN	SUDAH
27	KECAMATAN DUSUN HULIR	SUDAH
28	KECAMATAN DUSUN UTARA	SUDAH
29	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	SUDAH
30	KECAMATAN JENAMAS	SUDAH
31	KECAMATAN KARAU KUALA	SUDAH

Ceklis IKU Perangkat Daera

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Daerah Selatan akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai dengan visi dan program kepala daerah terpilih. Perkembangan RPJMD Kabupaten Barito Selatan ini disesuaikan masa jabatan kepala daerah terpilih, yakni 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 serta mempertimbangkan arah dan kebijakan wilayah sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan 2011-2031.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu satu tahun.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2022 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2017 hingga 2022. Sedangkan perencanaan pembangunan tahun 2022 mempergunakan RPJMD Transisi Tahun 2012-2022 dan RPJMD Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2017-2022 disusun, yang akan memuat visi, misi, program kepala daerah terpilih pemilihan tahun 2022. Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022 akan merupakan pada RPJMD Transisi tahun 2022.

Program-program transisi disusun sebagai bagian program indikatif satu tahun ke depan (2022) setelah periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan berakhir tahun 2022, dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada saat jabatan kepala daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau) dan lainnya dalam menunjang pelayanan publik, transportasi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga sosial budaya dan adat istiadat daerah.
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung oleh seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinam

pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang dilakukan tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kese masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang sema makin berkurangnya jumlah penduduk kemiskinan, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mewujudkan masyarakat Barito Selatan yang memiliki kepedulian terhada sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuha Esa. Di samping itu, dalam periode tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertingga yang sudah maju dapat terkurangi secara signifikan, da fasilitas layanan publik yang Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja apa pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akun

Program transisi tahun 2012 sudah barang tentu akan dirumuska dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa dilaksanakan dan pada tahun sebelumnya. Untuk period selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbaga ekonomi (economic facility) yang benar nyata, dan peluang peluang sosial (social opportunity) yang adil kepada masyaraka Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbuka masyarakat terhadap berbagai sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang sosial adalah upaya meningkatkan kese masyarakat melakukan mobilitas sosial secara vertikal didukun kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sen

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 ini hendaknya dapat dilaksanakan sec konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan p jawab, dengan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta masyarakat, termasuk dunia us agar melaksanakan program dalam RPJMD 2011-2016 ini dengan sebaik-baiknya.

2. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Barito Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Organisasi (Renja-SKPD).
3. Badan/Dinas/Unit Satuan di lingkungan Barito Selatan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
4. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program wilayah non-prioritas.
5. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pendanaan belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai seberapa pentingnya sebuah program berserta kegiatannya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Barito Selatan berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Bupati Barito Selatan,

EDDY RAYA SAMSURI